



LAPORAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA (AAKI)

Bogor, 20 s.d. 23 Juni 2022

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini diselenggarakan secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pengurus dan anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia mengenai konstitusi, hak konstitusional warga negara dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang.

Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang dan mengetahui teknik penyusunan permohonan pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN.....	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan.....	3
B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN.....	4
B.1. Nama Kegiatan.....	4
B.2. Waktu dan Tempat.....	4
B.3. Peserta Kegiatan.....	4
B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	6
B.5. Uraian Kegiatan	6
B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	6
B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan	6
B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test	7
B.5.4. Acara Pembukaan	7
B.5.5. Penyampaian Materi	8
B.5.6. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN.....	17
E. PEMBIAYAAN	18
F. PENUTUP.....	18
G. LAMPIRAN	19

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Laporan Keuangan
3. Jadwal Kegiatan
4. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
5. Tata Tertib Kegiatan
6. Bahan Penjelasan Teknis
7. Panduan Penggunaan SIMULTAN
8. Panduan Moderator
9. Panduan Narasumber
10. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
11. Kumpulan Materi Narasumber dan Bahan Latihan/Praktik
12. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
13. Surat Tugas Narasumber dan Moderator
14. Surat Perjanjian Kerjasama
15. Daftar Hadir Peserta
16. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
17. Penilaian Hasil Praktek Peserta
18. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
19. Daftar Pertanyaan Peserta
20. Alur Kegiatan *Online*

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA

Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Juni 2022

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;



2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait posisi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang nilai-nilai konstitusi. Nilai-nilai konstitusi bersumber dari nilai utama (*core value*) dalam ideologi Pancasila. Pemahaman tentang nilai utama yang akan membangun nilai konstitusional dapat membuka pemahaman masyarakat untuk melihat secara jelas keberadaan ideologi Pancasila. Pancasila tidak hanya dianggap sebagai simbol saja tanpa ada sebuah implementasi berupa nilai-nilai utama yang ada di dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila menjadi pilihan terbaik bagi penyelesaian permasalahan bangsa. Namun demikian, Pancasila tidak boleh disakralkan dan didogmakan. Pancasila harus senantiasa dijaga agar tetap menjadi *open and living ideology*. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya secara strategis dalam rangka melakukan pemaknaan relevansi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi yang hidup dan terbuka.

Dalam perspektif sebagai lembaga pengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi berkepentingan terhadap setiap ikhtiar untuk meneguhkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* yang sekaligus merupakan “jiwa” dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terutama ikhtiar tersebut sejalan dengan visi Mahkamah Konstitusi yaitu menegakkan konstitusi melalui peradilan yang modern dan terpercaya. Dengan misi antara lain memperkuat integritas peradilan konstitusi, meningkatkan kesadaran berkonstitusi warga negara dan penyelenggara negara, serta meningkatkan kualitas putusan. Pada konteks inilah, tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi pada dasarnya mencakup pula tugas mengawal tegaknya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Dengan kata lain, di samping menjalankan fungsinya sebagai *the Guardian of*



Constitution, pada dasarnya Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai *the Guardian of Ideology*, pengawal ideologi negara.

Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal ideologi negara salah satunya dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Kegiatan tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi agar warga negara dapat memahami dan berperan aktif dalam menciptakan demokrasi dan konstitusi yang bermartabat.

Adapun kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia dilaksanakan secara *online*. Dalam kegiatan tersebut peserta mendapatkan materi seputar Konstitusi, Hak Konstitusional Warga Negara, Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang. Hal ini dilakukan sebagai sarana sosialisasi Pancasila dan Konstitusi agar tercapainya visi dan misi Mahkamah Konstitusi, yaitu meningkatnya kesadaran berkonstitusi warga negara.

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;
- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia”.

B.2. Waktu dan Tempat

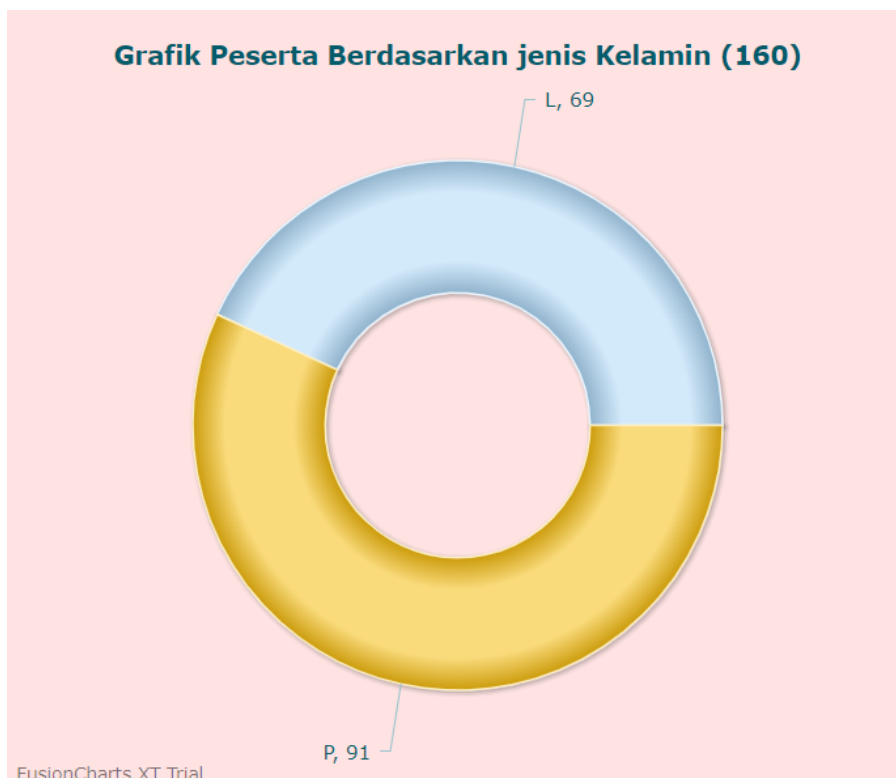
Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Juni 2022 secara virtual dengan menggunakan peralatan *ICT* di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan

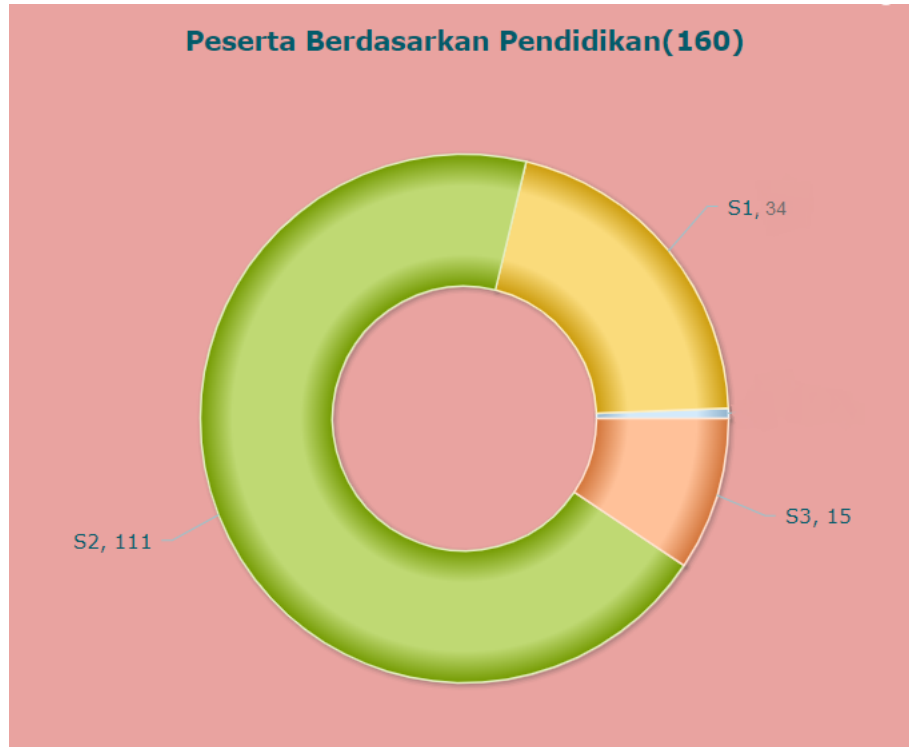
Peserta kegiatan sebanyak 160 orang pengurus serta anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia. Seluruh peserta mengikuti kegiatan secara virtual menggunakan Laptop/PC/Smartphone dan jaringan internet masing-masing.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia:

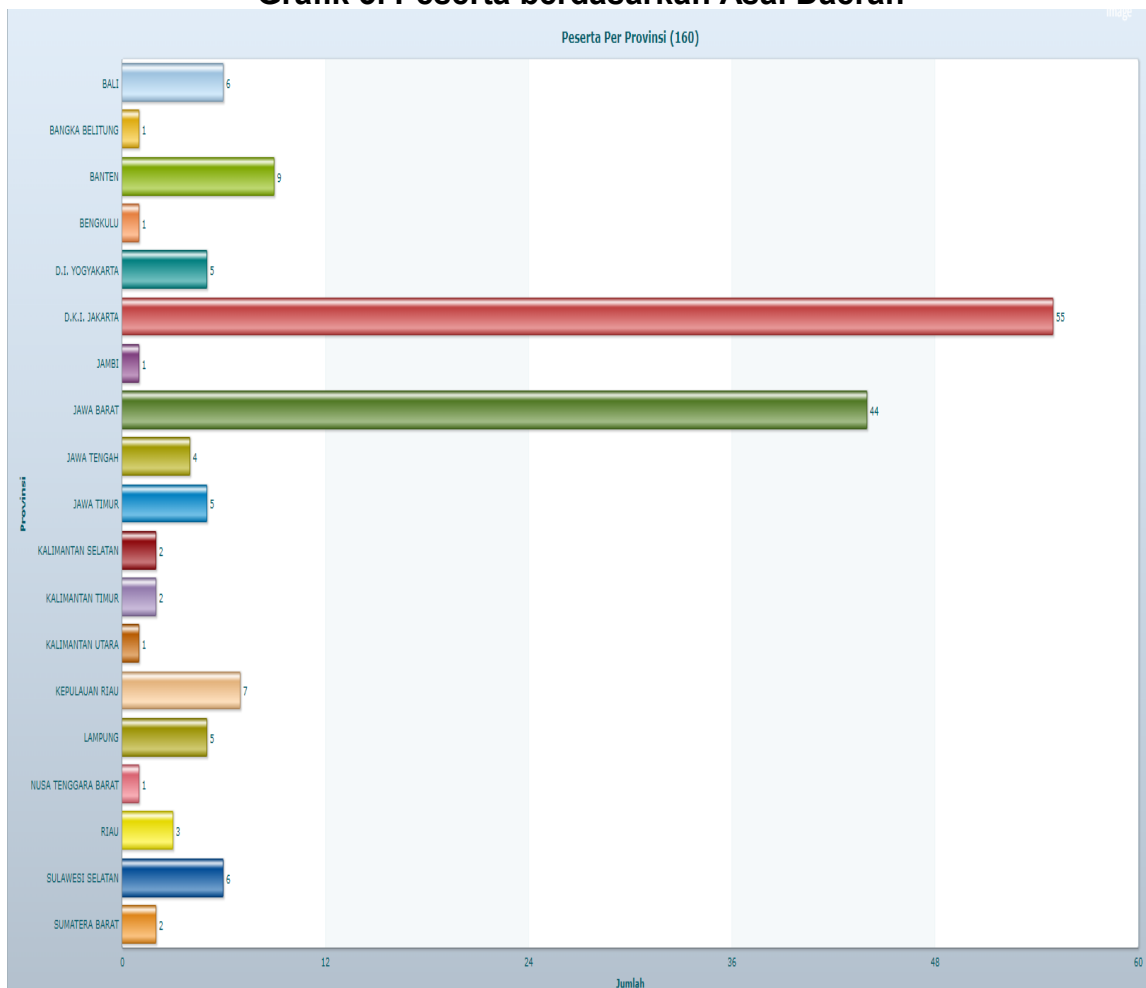
Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta yang hadir secara *online* akan mendapatkan modul/makalah/*hand out* materi dari Narasumber (*soft file*).
- b. Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan.
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan yang mengumpulkan tugas yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.

B.5. Uraian Kegiatan

B.5.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Mekanisme pendaftaran/registrasi bagi peserta yang mengikuti kegiatan secara daring (*online*) adalah sebagai berikut:

1. Peserta *online* (daring) melakukan registrasi ulang dengan cara mengisi data di link https://bit.ly/RegistrasiHKWN_AAKI;
2. Peserta yang telah melakukan registrasi, akan mendapatkan username dan password akun di laman pusdik.mkri.id untuk pengisian Pre Test, Post Test, Kuesioner, Absensi, mengunduh seluruh materi, serta e-sertifikat pada aplikasi SIMULTAN;
3. Peserta akan bergabung ke dalam Grup Telegram untuk mendapatkan informasi seputar pelaksanaan kegiatan.

B.5.2. Penyelenggaraan Kegiatan

Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan secara *online* dari kantor/kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* yaitu *Zoom Meeting*. Pengelolaan kehadiran dan partisipasi peserta *online* dan narasumber diatur sebagai berikut:

1. Peserta wajib bergabung di *Zoom Meeting* 30 menit sebelum acara dimulai;
2. Peserta wajib menggunakan identitas *Zoom Meeting* dengan format yaitu No Registrasi_Nama Lengkap_Asal Instansi;



3. Peserta mengisi daftar hadir melalui akun masing-masing peserta;
4. Peserta mengaktifkan kamera video Laptop/PC/Smartphone selama kegiatan berlangsung;
5. Peserta menonaktifkan suara selama sesi pemaparan materi oleh narasumber;
6. Sesi tanya jawab dibuka ketika moderator mempersilakan;
7. Peserta yang ingin bertanya, dapat secara langsung dengan memberi tanda “*Raise Hand*” atau memanfaatkan kolom *chat*;
8. Peserta diharapkan menggunakan prinsip Positif dan Kolaboratif selama kegiatan berlangsung.

B.5.3. Penjelasan Teknis dan Pre Test

Peserta sudah bergabung pada *Zoom Meeting* pukul 13.00 WIB sesuai dengan jadwal yang telah disampaikan. Setelah bergabung peserta mendapatkan Penjelasan Teknis pada pukul 13.30 s.d. 14.30 dari Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Bapak Nanang Subekti.

Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* secara daring/*online* di akun masing-masing yang sebelumnya telah diberikan saat registrasi.

B.5.4. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H. pada pukul 15.30 WIB. Sebelum acara resmi dibuka, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Imam Margono, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan. Meskipun Acara Pembukaan dilakukan secara virtual dari ruang kantor masing-masing, susunan acara tetap dilaksanakan selayaknya kegiatan non virtual dimana terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars MK, Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Umum AAKI, Ceramah Kunci dan Arahan Sekretaris Jenderal MK, menyanyikan Hymne MK, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.



B.5.5. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas pakar hukum dan konstitusi, panitera pengganti dan peneliti Mahkamah Konstitusi dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila	Prof. Dr. Adji Samekto, S.H. M.Hum.
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
6.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Saiful Anwar, S.H., M.H.
7.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	1. Ria Indriyani, S.H., M.H. 2. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H. 3. Ery Satria Pamungkas, S.H. 4. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 5. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H. 6. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
8.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Rudi Kurniawan
9.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anna Triningsih, S.H., M.Hum. 2. Titis Anindyajati, S.E., S.H., M.H. 3. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H. 4. Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H. 5. Intan Permata Putri, S.H. 6. Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah virtual oleh narasumber dari kantor/kediaman narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator dan *host* yang mengatur lalu lintas peserta untuk bertanya di aplikasi *Zoom Meeting*. Peserta menyampaikan pertanyaan secara langsung dengan “*raise hand*” ataupun tidak langsung di kolom *chat*. Untuk peserta yang menyampaikan pertanyaan melalui kolom *chat*, pertanyaan tersebut akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh narasumber.

Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator sekaligus *host*. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara



aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang. Dalam mengerjakan praktek ini didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Peneliti yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan satu dokumen permohonan pengujian Undang-Undang dari setiap peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum *online* untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.5.6. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 13.30 WIB pada hari Kamis, 23 Juni 2022 oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh Ketua Umum AAKI, dan seluruh peserta kegiatan.





HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 15 (lima belas) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal tersebut melalui akun peserta masing-masing di laman *pusdik.mkri.id* dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 7,95 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 121 menunjukkan nilai sebesar 1,657. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor 2,58. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,25: kurang); (0,25-0,75: cukup); (0,75-1,25: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam



hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal pre test dan post test, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas narasumber, materi, sarana dan prasarana, teknis penyelenggaraan dan layanan teknologi dan informasi. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dibagikan kepada peserta adalah kuesioner evaluasi kegiatan yang berfungsi untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, **Tingkat Kualitas Narasumber** yang dihitung dari nilai rata-rata hasil penilaian peserta mengenai kualitas narasumber. Kualitas narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan. Setelah pengolahan data dilakukan, nilainya adalah **3,57 yang termasuk kategori baik**. Ini berarti, para narasumber yang dihadirkan telah mampu menyampaikan materi dengan baik sehingga dapat dipahami oleh para peserta.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Evaluasi kegiatan secara menyeluruh dibagi ke dalam lima indikator utama, yaitu materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, pelayanan administrasi, serta sistem informasi/SPBE. **Penilaian Kualitas Sistem Informasi/SPBE mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,87 yang tergolong kategori sangat baik**. Hasil dari seluruh pengukuran variabel diatas menjadi **nilai tingkat kepuasan pelayanan pendidikan dengan skor 3,76 yang tergolong kategori sangat baik**.



Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Materi			
1	Kesesuaian materi dengan mata ajar	3,67	Baik
2	Materi informatif dan bermanfaat	3,76	Sangat Baik
3	Materi mudah dipahami	3,55	Baik
4	Alokasi waktu materi sesuai	3,50	Baik
5	Materi merupakan isu yang problematis	3,61	Baik
6	Materi meningkatkan keterampilan analisis	3,67	Baik
	Materi yang paling menarik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 3. Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila 	
Tingkat Kepuasan atas Materi		3,63	Baik
Narasumber dan Moderator			
7	Narasumber menguasai materi dan menyampaikan dengan baik	3,77	Sangat Baik
8	Narasumber mampu mengintegrasikan media dan materi	3,69	Baik
9	Narasumber mampu menjawab pertanyaan secara komprehensif	3,78	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
10	Moderator memandu setiap sesi dengan baik	3,76	Sangat Baik
11	Narasumber kompeten dan kredibel	3,80	Sangat Baik
	Narasumber yang paling menarik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum 2. Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. 3. Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum. 	
	Moderator yang paling menarik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nanda Adytiansyah 2. Nanang Subekti 3. Bangkit Panji Anarogo 	
Tingkat Kepuasan atas Narasumber dan Moderator		3,76	Sangat Baik
Metode Penyelenggaraan			
12	Metode penyelenggaraan kegiatan menarik	3,74	Baik
13	Waktu pelaksanaan kegiatan efektif dan efisien	3,70	Baik
14	Tampilan tayangan video visual kegiatan pembelajaran menarik	3,66	Baik
15	Panitia informatif dalam memberikan pelayanan	3,82	Sangat Baik
16	Panitia dengan cepat memberikan penanganan pengaduan pengguna layanan	3,83	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan atas Metode Penyelenggaraan		3,75	Baik
Pelayanan Administrasi			
17	Kemudahan peserta dalam melakukan registrasi	3,86	Sangat Baik
18	Informasi terkait dengan kegiatan dapat diakses dengan mudah melalui SIMULTAN	3,87	Sangat Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
19	Kualitas audio dan video baik	3,66	Baik
20	Sarana menyampaikan saran dan keluhan dapat diakses dengan baik	3,76	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan atas Pelayanan Administrasi		3,79	Sangat Baik
Sistem Informasi/SPBE			
21	Layanan sistem informasi yang mencakup e-registrasi, bahan/materi, microsite, e-sertifikat, pre tes post test online, daftar hadir online, kuesioner, & Evaluasi online memudahkan peserta	3,89	Sangat Baik
22	Layanan sistem informasi di Pusdik cukup interaktif dalam proses kegiatan pendidikan	3,84	Sangat Baik
23	Layanan sistem informasi di Pusdik telah terintegrasi dengan baik	3,87	Sangat Baik
24	Layanan sistem informasi Pusdik telah memiliki kualitas yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan	3,87	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan atas Sistem Informasi/SPBE		3,87	Sangat Baik
Tingkat Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Kegiatan		3,76	Sangat Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran)



yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,58 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimum 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,76 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,76+4)/2 = 3,88$

Hasil dari penghitungan Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,88; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, administrasi umum dan sarana dan prasarana kegiatan tergolong sangat baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Kegiatan diselenggarakan secara tatap muka (luring);
 - b) Waktu pelaksanaan tidak terlalu pagi mengingat peserta merupakan ASN sehingga khawatir ada yang melaksanakan apel pagi;
 - c) Mohon mempertimbangkan perbedaan waktu WIT, WITA, dan WIB agar para peserta dapat mengikuti semua materi yang diberikan;
 - d) Kegiatan dan kerja sama dengan AAKI dapat terus berkelanjutan;
 - e) Terdapat penambahan waktu ketika mengerjakan tugas praktik;
 - f) Penyampaian materi dapat menggunakan bahasa yang mudah dimengerti karena tidak semua berlatar belakang pendidikan hukum.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Tampilan materi dapat diperbesar sehingga peserta tidak perlu membuka file materi dan bisa fokus pada zoom;
 - b) Meningkatkan kualitas audio.



Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 124 orang dari 160 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya mengikuti ketentuan terkait penamaan akun zoom sehingga menghambat kelancaran *host* dalam mengatur peserta untuk bergabung di zoom meeting;
- b) Beberapa peserta terkadang keluar masuk dari *zoom meeting* karena alasan jaringan;
- c) Beberapa peserta terkendala jaringan sehingga tidak optimal dalam menerima tampilan audio visual selama pembelajaran;
- d) Masih terdapat peserta yang menonaktifkan video tampilan diri masing-masing saat narasumber memaparkan materi;
- e) Masih terdapat peserta yang lupa untuk mengisi daftar hadir di semua sesi;
- f) Masih ada peserta yang tidak mengerjakan tugas.





PEMBIAYAAN DAN PENUTUP



E. PEMBIAYAAN

Anggaran kegiatan ini dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia TA 2022 (DIPA) Nomor: 077.01.BJ 4246.QDC 051 A (Peningkatan Pengetahuan dan Pemahaman Warga Negara mengenai Pancasila dan Konstitusi). Kegiatan ini menghabiskan anggaran sebesar Rp. 31.738.009 (tiga puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu sembilan rupiah). Biaya dimaksud belum termasuk dengan anggaran untuk kebutuhan biaya penggantian paket data beberapa provider bagi peserta kegiatan yang mendapat e-sertifikat.

F. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono
NIP. 19690331 198912 1 001

Bogor, 20 Juli 2022

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



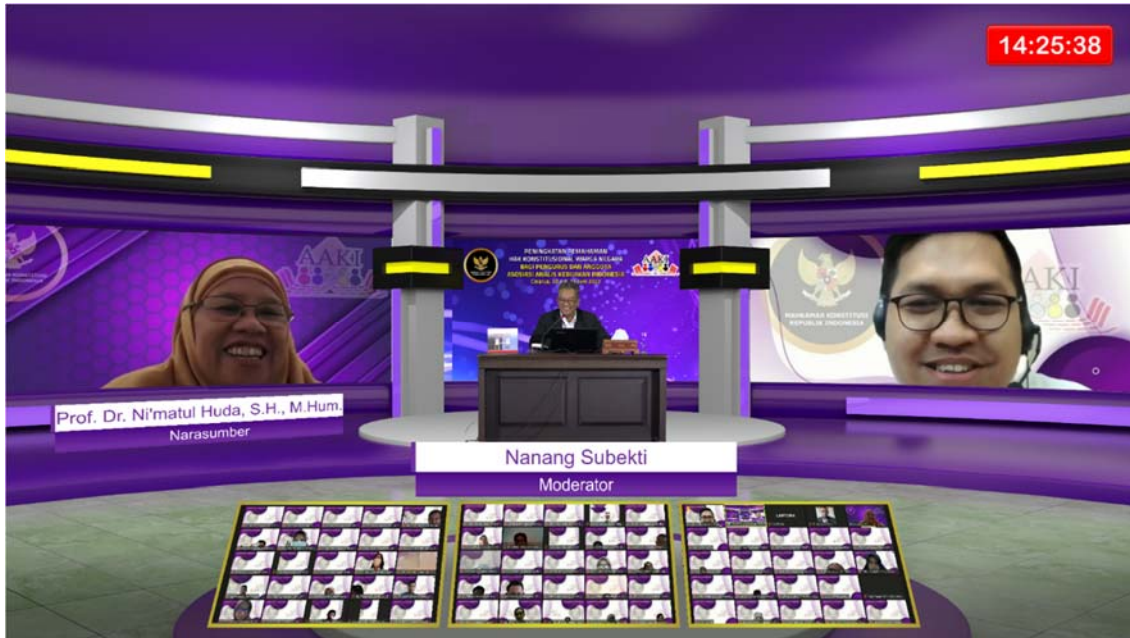
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Umum AAKI, Plt. Kepala Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila oleh Prof. Dr. Adji Samekto, S.H. M.Hum.



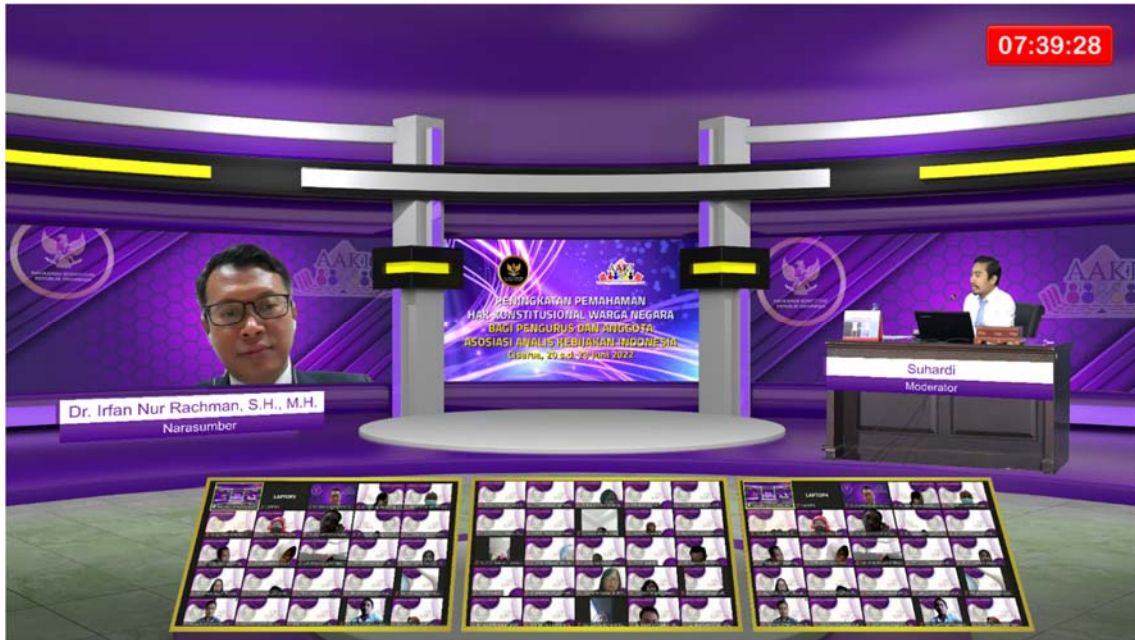
Penyampaian materi Konstitusi dan Konstitusionalisme oleh Dr. Fajar Laksono.



Sesi diskusi dan tanya jawab pada materi Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.



Penyampaian materi Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 oleh Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 oleh Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.



Materi Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 6 narasumber yang dibagi dalam 6 kelas



Penyampaian materi Sistem Informasi Perkara Elektronik.



Materi Evaluasi Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 disampaikan oleh 6 narasumber yang dibagi dalam 6 kelas.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh Ketua Umum AAKI, dan seluruh peserta kegiatan.

LAPORAN KEUANGAN**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Asosiasi
Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI)
(077.01.BJ 4246.QDC 051 A)**

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Teguh Birawa Putra dkk	Biaya Perjalanan Dinas Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tanggal 20 s.d. 24 Juni 2022	Rp 9,100,000
2	Judhariksawan dkk	Honor Narasumber Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tanggal 20 s.d. 24 Juni 2022	Rp 10,200,000
3	Koperasi Konstitusi	Biaya Pembelian Konsumsi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tanggal 20 s.d. 24 Juni 2022	Rp 1,840,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Penyediaan Perlengkapan Akomodasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tanggal 20 s.d. 24 Juni 2022	Rp 1,310,000
5	PT Telkomsel	Biaya Penggantian Paket Data Peserta Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Analisis Kebijakan Indonesia (AAKI)	Rp 9,081,909

6	Tokopedia	Pengadaan tools software multimedia untuk mendukung Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus Dan Anggota Assosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi tanggal 20 s.d. 24 Juni 2022	Rp	206,100
		TOTAL	Rp	31,738,009

JADWAL KEGIATAN
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

Hari, Tanggal : **Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Juni 2022**
Tempat : Aplikasi *Online* Zoom Meeting
Peserta : Pengurus dan Anggota AAKI

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin 20 Juni 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>	Panitia	Zoom
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Zoom
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>	Panitia	Zoom
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 4. Sambutan Ketua Umum AAKI 5. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa 	- Sekretaris Jenderal MK - Ketua Umum AAKI - Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi	Zoom
	17.30 WIB	Lanjut besok	Panitia	Zoom
KEDUA				
Selasa 21 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		

	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 15.30 WIB	ISHOMA		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
KETIGA				
	07.15 – 07.30 WIB	<i>Peserta sign in ke aplikasi Zoom Meeting</i>		
Rabu 22 Juni 2022	07.30 – 09.30 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Zoom

	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: PP Mahkamah Konstitusi	Zoom
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Dilakukan secara Mandiri oleh Peserta	
KEEMPAT				
Kamis 23 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>		
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik	Narasumber: IT Mahkamah Konstitusi	Zoom
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi	Zoom
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan	Panitia	Zoom

	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none">1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Mars Mahkamah Konstitusi3. Kesan Pesan Perwakilan Peserta4. Sambutan Ketua Umum AAKI5. Ceramah Kunci Plt. Kapusdik dan Penutupan6. Hymne Mahkamah Konstitusi7. Pembacaan Doa	<ul style="list-style-type: none">- Plt. Kapusdik- Ketua Umum AAKI	Zoom
--	-------------------	--	---	------



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA (AAKI)

Bogor, 20 s.d. 23 Juni 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya penyusunan Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) dapat terselesaikan.

Panduan Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi Pengurus dan Anggota AAKI yang tersebar dari berbagai daerah yang memiliki posisi penting dalam pembangunan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini, keberadaan anggota AAKI memiliki peran strategis dalam mewujudkan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan akuntabel yang sejalan nilai-nilai Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Pemahaman anggota AAKI mengenai hak-hak konstitusional warga negara menjadi krusial dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang berorientasi kepentingan masyarakat.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Juni 2022

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	9
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum.....	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat.....	14
8. Pembiayaan.....	14
9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet	14
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	15
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	25
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	27
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	27
2. Sarana dan Prasarana.....	29
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	32

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan 7 (tujuh) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



Jabatan	: Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Bima, 31 Desember 1956
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
Karir	: <ul style="list-style-type: none">• Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA• Kepala Biro Kepegawaian MA• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.



Jabatan	: Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
Kelahiran	: Palopo, 17 Juli 1964
Pendidikan	: S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Ketahanan Universitas Gadjah Mada S3 – Fakultas Ilmu Hukum Universitas Airlangga
Karir	: <ul style="list-style-type: none">• Ketua Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan• Ketua Ombudsman Makassar• Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Guru Besar Hukum Pidana Universitas Hasanuddin

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan

- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
- Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Panningahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

i. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir :
 - Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
 - Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



- Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara
Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
 - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
 - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



- Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
- Karir :
 - Kementerian Hukum dan HAM
 - Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
 - Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II

PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dalam rangka langkah strategis untuk melakukan revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila sekaligus untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara yang dijamin UUD 1945, Mahkamah Konstitusi melakukan ikhtiar nyata dengan membentuk sebuah Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, yang diharapkan menjadi *centre of excellence* dalam Pengembangan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pancasila dan Konstitusi. Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi didasarkan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 Organisasi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2022 adalah Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI). Pemilihan *target group* ini didasari atas pertimbangan bahwa ada keterkaitan erat antara MK dengan AAKI, yaitu MK mendorong terwujudnya budaya sadar berkonstitusi dan sedangkan anggota AAKI dapat menjadi pihak yang memiliki peran dan posisi strategis untuk mewujudkan budaya sadar Pancasila dan Konstitusi melalui rekomendasi kebijakan-kebijakan maupun peraturan perundang-undangan yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 sekaligus memberikan pengaruh bagi lingkungannya dalam upaya peningkatan pemahaman hak-hak konstitusional dan upaya konstitusional dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional warga negara.

Mahkamah Konstitusi mengharapkan kegiatan ini berjalan dengan baik sehingga mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pemahaman hak-hak konstitusional warga negara. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan mampu membentuk peserta sebagai warga negara yang kontributif dalam mendukung upaya pembangunan sosial, moral, dan politik hukum di Indonesia.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan ketaatan berpancasila serta berkonstitusi;
- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Nama Kegiatan

“Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring di kediaman atau kantor masing-masing. Adapun jadwal kegiatan ini sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 20 Juni 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Sambutan Ketua Umum AAKI Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Hymne Mahkamah Konstitusi Pembacaan Doa
	17.30 WIB	Lanjut Besok
KEDUA		
Selasa, 21 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi Implementasi Nilai-nilai Pancasila

		Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	15.00 – 15.30 WIB	ISHOMA
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Mahkamah Konstitusi
KETIGA		
Rabu, 22 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi V : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffe Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Mahkamah Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi
	15.00 – 17.00 WIB	Sesi Mandiri: Lanjutan Praktik Mandiri Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
KEEMPAT		
Kamis, 23 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Peserta <i>sign in</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat TIK Mahkamah Konstitusi

	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffe Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang Terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Peneliti Mahkamah Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post-Test</i> dan Pengisian Kuesioner Evaluasi Kegiatan
	13.00 – 15.30 WIB	Penutupan: 1. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars Mahkamah Konstitusi 3. Kesan dan Pesan dari Peserta 4. Laporan Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Penutupan 6. Hymne Mahkamah Konstitusi 7. Pembacaan Doa
	15.30 WIB	Selesai

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 400 (empat ratus) orang yang terdiri dari Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) yang tersebar dari berbagai wilayah di Indonesia.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI):

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila. b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya. c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital. d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	2 x 60 menit
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	a. Pengertian Konstitusi dan Konstitusionalisme, serta Hubungan Konstitusi dan Konstitusionalisme; b. Supremasi Konstitusi dalam Negara Demokrasi Konstitusional; c. Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Konstitusi; d. Perubahan Konstitusi.	2 x 60 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-dasar Penyelenggaraan Negara; c. Sistem Pemerintahan; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>); e. Otonomi Daerah.	2 x 60 menit
4.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Konsep dan Prinsip-Prinsip HAM; b. Perkembangan HAM dan sebagai Tata Nilai Pergaulan Masyarakat Internasional; c. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945; d. Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara terhadap HAM; e. Terminologi dan Klasifikasi Pelanggaran HAM.	2 x 60 menit
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang.	2 x 60 menit
6.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945: - Kewenangan MK; - Kedudukan Hukum; - Alasan Permohonan (Formil & Materiil); - Petitum; b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.	2 x 60 menit
7.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Peserta Melakukan Praktik Menyusun Permohonan Pemohon Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.	4 x 60 menit
8.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Tata Cara Pendaftaran Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 secara <i>Online</i> ; b. Tata Cara Persidangan Jarak Jauh; c. Tata Cara Pembuktian dan Alat Bukti (Keterangan Saksi, Ahli & Para Pihak).	2 x 60 menit
9.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945	Peserta Melakukan Presentasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Depan Kelas/Aula.	2 x 60 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk:

membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Pembiayaan

- a. MK menanggung biaya penyelenggaraan yang meliputi narasumber serta bahan/materi kegiatan;
- b. MK akan mengganti biaya kuota data internet peserta sejumlah Rp.100.000,- khusus kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Biaya konsumsi, akomodasi, serta transportasi menjadi beban masing-masing peserta;
- d. MK tidak memberikan uang saku kepada peserta;
- e. MK tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

9. Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- a. Peserta yang mendapatkan penggantian biaya kuota internet adalah peserta yang mendapatkan sertifikat;
- b. Pusdik MK akan mengirimkan tautan/*link google form* permintaan nomor rekening peserta melalui WhatsApp Blast ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat setelah sertifikat dapat diunduh;
- c. Ketentuan Pengisian Nomor Rekening melalui tautan/*link google form*:
 - Nama pemilik rekening harus sama dengan nama peserta pada saat registrasi;
 - Jika nama pemilik rekening tidak sesuai, maka dianggap tidak bersedia.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib menggunakan *laptop/pc/smartphone* pribadi yang terhubung dengan jaringan.
- b. Peserta wajib mengunduh aplikasi *Zoom Meeting* sebelum kegiatan dimulai.
- c. Peserta *log in* menggunakan *Meeting ID* yang dinformasikan oleh panitia. Metode *log in* di aplikasi *Zoom Meeting*:
 - 1) Buka aplikasi *Zoom Meeting*
 - 2) Klik tombol *Join a Meeting*
 - 3) Masukkan *Meeting ID*
 - 4) Masukkan nama sesuai format **(Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal)**
 - 5) Klik *Join*
 - 6) Masukkan *Password Meeting*.
- d. Peserta sudah dapat bergabung pada akses *link Zoom Meeting* yang diberikan 30 menit sebelum kegiatan dimulai.
- e. Peserta **wajib** mengaktifkan tampilan kamera/video selama mengikuti kegiatan pembelajaran.
- f. Selama pemaparan materi, peserta diharapkan menonaktifkan suara.
- g. Pada saat sesi materi berlangsung, ketika ingin mengajukan pertanyaan peserta dapat menggunakan fitur *raise hand* dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*) oleh moderator atau melalui kolom *chat* dengan langsung menuliskan inti pertanyaan.
- h. Peserta wajib mengenakan pakaian yang sopan (tidak diperkenankan menggunakan kaos)

2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di bagian akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan.



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Absensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.



4. Klik *TTD* di bagian kanan halaman untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.



#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradil)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradil)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

5. Tanda tangan digital pada kolom yang disediakan.



6. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



7. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



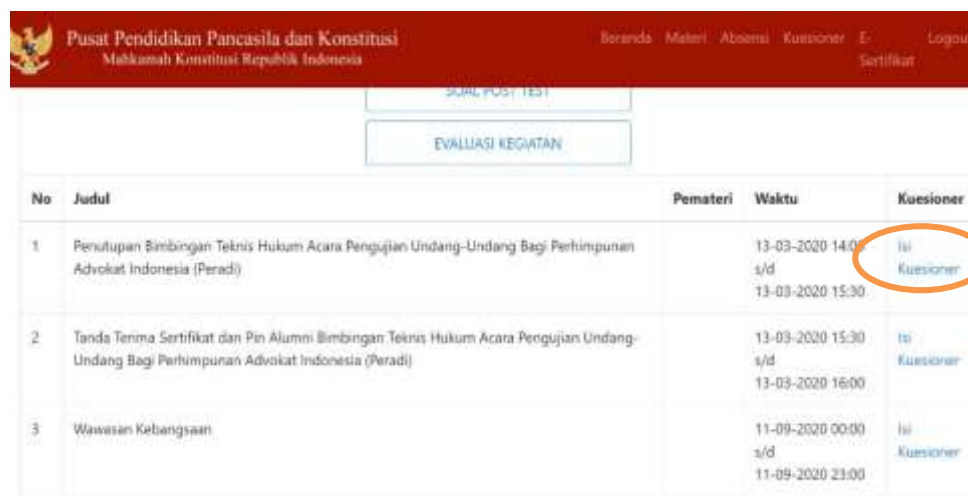
8. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



9. Mengisi evaluasi kegiatan



10. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



11. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- Media *Offline*:
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- Media *Online* (*pusdik.mkri.id*)
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan

adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1

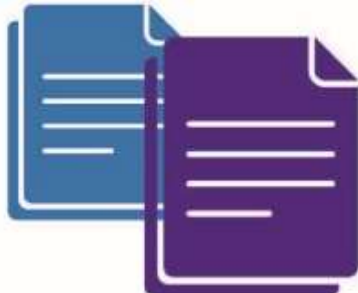
Persyaratan Pelayanan


Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;





STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
 - Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 17 (tujuh belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Imam Margono, S.E., M.M.

- Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
- Kepala Bagian Umum



Nanang Subekti, S.E., M.S.E

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara



Bergabung pada *Zoom* **30** menit sebelum acara dimulai



Username menggunakan format:
Nomor Registrasi_Nama Peserta_Asal Instansi
Contoh: **234_Lionel Messi_Mahkamah Konstitusi**



Mengisi **daftar hadir** yang disediakan



Peserta disarankan menggunakan *Laptop/PC* yang terhubung dengan **koneksi internet stabil**



Mengaktifkan kamera video *Laptop/PC* selama kegiatan berlangsung



Saat kegiatan berlangsung, peserta diharapkan berada di **lokasi yang tidak terganggu (bising)**, serta *smartphone* dalam keadaan **diam (*silent mode*)**



Selama pemaparan materi, peserta diharapkan **menonaktifkan suara**



Agar suara lebih optimal, disarankan menggunakan **headset, handsfree, earphone** atau semacamnya



Sesi tanya jawab dibuka ketika **moderator mempersilahkan**



Bagi peserta yang akan bertanya, harap memberikan tanda "**Raise Hand**"



Peserta juga dapat bertanya dengan **memanfaatkan kolom chat**



Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id



PENJELASAN TEKNIS

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI

Senin, 20 Juni 2022



PUSDIK
PANGCA
MAHA & KONSTITUSI



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id



MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tips dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tips dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner* (AC) dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer LCD dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, proyektor, LCD);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

11



12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun



**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id



UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI



Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



Kuesioner
Online



Masukan dan
Saran di Microsite

Contact Center Pusdik:

0851-5792-9660



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Muhlis Nova



Hadian Taofik Rohman



Hatika Al Shafa



Cafid Sugianto



Fazlur Rahman El
Islamy



Yahya Amrullah Taufik



Angga Putri Gardina



Edwin Rivano



Suhardi

Bahan Materi dan Sertifikat




Seluruh bahan materi dapat diunduh melalui akun peserta.



Sertifikat:

- ❖ **E-Sertifikat** hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (**kehadiran 100%**) dan yang **mengumpulkan tugas praktik** yang diberikan oleh Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kurikulum Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

1. Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
2. Konstitusi dan Konstitusionalisme
3. Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
4. Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945
5. Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
6. Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
7. Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
8. Sistem Informasi Perkara Elektronik
9. Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **25.402** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **32.978** orang



PELAKSANAAN KEGIATAN

Waktu : Senin s.d. Kamis
20 s.d. 23 Juni 2022

- Tempat : Aplikasi Zoom Meeting

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Senin, 20 Juni 2022	13.00 – 13.30 WIB	Peserta <i>Sign In</i> ke aplikasi <i>Zoom Meeting</i>
	13.30 – 14.30 WIB	Penjelasan Teknis
	14.30 – 15.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Mars Mahkamah Konstitusi4. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi5. Sambutan Ketua Umum AAKI6. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi7. Hymne Mahkamah Konstitusi8. Pembacaan Doa


JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Selasa, 21 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi I: Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Narasumber: Prof. Dr. Adji Samekto, S.H., M.Hum.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi II: Konstitusi dan Konstitusionalisme Narasumber: Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi III: Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M.
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi IV: Jaminan Hak Konstitusional Warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
	17.30 WIB	Selesai lanjut di hari berikutnya

JADWAL KEGIATAN

Hari	Waktu	Kegiatan
Rabu, 22 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi V: Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Rizki Amalia, S.H., M.H.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Panitera Pengganti MKRI
	15.00 – 17.00 WIB	<ul style="list-style-type: none">• Sesi Mandiri• Peserta Melanjutkan Penyusunan Tugas Mandiri Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Hari	Waktu	Kegiatan
Kamis, 23 Juni 2022	07.15 – 07.30 WIB	Persiapan masuk ke aplikasi zoom meeting
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi VIII: Sistem Informasi Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi MKRI
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Narasumber: Peneliti MKRI
	12.00 - 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 13.30 WIB	<i>Post test</i> & Evaluasi Kegiatan
	13.30 – 15.30 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Mars MK 3. Kesan & Pesan Peserta 4. Laporan Plt. Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 5. Sambutan dan sekaligus menutup acara oleh Wakil Ketua MK 6. Hymne MK 7. Pembacaan Doa



Peserta Kegiatan

Peserta sebanyak 400 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota AAKI

Mekanisme Penyelenggaraan

- ✓ 400 orang peserta mengikuti kegiatan secara *online* (daring)
- ✓ Seluruh narasumber akan menyampaikan materi secara *online* (daring) dari Pusdik/kediaman masing-masing narasumber

Ketentuan Umum

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang diatur oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

& KONSTITUSI

Ketentuan Khusus Peserta Daring (*Online*)

Peserta daring harus menyiapkan **kuota internet minimal 10 gb** agar tetap terhubung dalam jaringan saat pelaksanaan bimtek virtual

Masuk *platform* dilakukan 30 menit sebelum acara dimulai

Peserta mengisi presensi melalui sistem informasi peserta (**SIMULTAN**) *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**



Kamera platform aplikasi virtual harus dalam keadaan terbuka atau *on* dan mohon untuk fitur mikrofon dalam keadaan *off* pada saat sesi pemaparan narasumber

Link untuk Pre dan Post test serta kuesioner dapat diakses melalui *login* dengan *username* dan *password* masing-masing peserta pada laman **pusdik.mkri.id**

Pembiayaan

- ❖ Biaya penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan lainnya menjadi beban Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya akomodasi, konsumsi, serta transportasi peserta menjadi beban masing-masing peserta.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.
- ❖ Penggantian biaya paket kuota data internet senilai Rp. 100.000,- akan diberikan kepada peserta yang mendapatkan sertifikat, sesuai ketentuan.



Mekanisme Penggantian Biaya Kuota Internet

- ❖ Khusus kepada peserta yang mendapatkan **Sertifikat**.
- ❖ Setelah **e-sertifikat dibagikan**, Pusdik MK akan berkoordinasi dengan provider untuk mengirimkan kuota data internet senilai Rp. 100.000,- ke nomor telepon peserta yang mendapatkan sertifikat.
- ❖ Catatan Penting:
 - Kuota data internet dikirim ke **nomor telepon peserta sesuai dengan yang tercantum dalam sistem informasi peserta (SIMULTAN)**.
 - Apabila terdapat kesalahan/kekeliruan nomor telepon yang tercantum dalam sistem informasi peserta (**SIMULTAN**), sehingga kuota data internet tidak diterima, maka menjadi tanggung jawab masing-masing peserta.



Simultan (Sistem Informasi Langsung dan Transparan)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat





T
E
R
I
M
A

K
A
S
I
H



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital



E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*



Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN

← → ↻ https://pusdik.mkri.id 80% ☆

KALENDER AKADEMIK

Prev 2022 Maret Next

Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

■ Peningkatan Pemahaman HKWN ■ Bimbingan Teknis Hukum Acara MK ■ Lomba/Kompetisi
■ Seminar/Lokakarya/Halaqoh ■ Kegiatan Lain

SELENGKAPNYA

SIMULTAN

SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN

LOGIN

- Profil
- Booklet Kegiatan
- Materi Kegiatan
- Galeri Kegiatan
- Kuesioner Evaluasi
- Pre-test & Post-test

SARANA PENGADUAN

- LAPOR! LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT
- Gratifikasi
- Benturan Kepentingan
- Whistle Blowing System



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Masukan
Username
dan
Password

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

Login



Profil Peserta

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Nama Lengk	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 0 bulan 15 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Telepon/HP	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

Profil Peserta

Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



PPHKWN


SOAL PRE TEST


SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test : 0
				Nilai Post Test : 0

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

[SOAL PRE TEST](#)

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 15 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test
				Nilai Post Test

: 6
10



SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



PPHKWN

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
		Nilai Pre Test	:	6
		Nilai Post Test	:	0

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan PPHKWN

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Penjelasan Teknis Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 03:30 s/d 10-03-2020 04:30	TTD
2	Pembukaan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	10-03-2020 19:00 s/d 10-03-2020 21:00	TTD
3	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	11-03-2020 07:30 s/d 11-03-2020 09:30	TTD
4	Sistem Penyelenggaraan Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	11-03-2020 10:00 s/d 11-	TTD

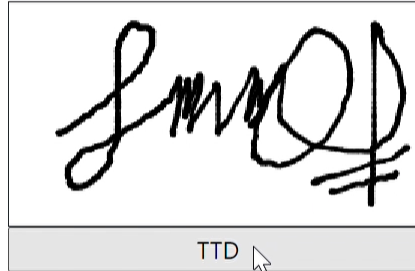
Klik Absensi dan TTD

*Untuk Absensi sebaiknya peserta membuka dashboard e-pusdik **menggunakan smartphone atau laptop dengan layar sentuh (*touchscreen*)**, karena akan membubuhkan tanda tangan di layar



Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Pancasila dan Konstitusi





Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Waktu	Absen
1	Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:00 WIB	Sudah Absen 09-11-2020 00:00 WIB s/d 09-11-2020 19:30 WIB



Bimbingan Teknis atau PPHKWN

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



8	Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
9	Persekjen 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
10	Sistem Penyelenggaraan Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945	Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H.	File
11	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
12	Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia	Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.	File
13	Pedoman Penyelenggaraan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)	Mahkamah Konstitusi	File

Pedoman penyelenggaraan (booklet) dapat diunduh dengan mengklik pada bagian tulisan File



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Guru dan Pelajaran PPKn Tingkat SMA/SMK dan MA/MAK

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



1



2



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan

1. Greetings

- a) Mengucapkan salam;
- b) Menyampaikan selamat bergabung kepada para peserta baik yang online dan offline serta memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan;
- c) Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom;
- d) Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio;
- e) Menyampaikan bahwa materi narasumber telah diupload dan dapat diunduh di epusdik melalui link pusdik.mkri.id

B. Sesi Materi

- a) Menyapa narasumber, mengucapkan selamat bergabung;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan sesi materi secara singkat (outcome yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah Total Peserta;
 - Pembagian peserta online dan offline;
 - Asal daerah peserta;

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab;

D. Tata cara peserta mengajukan pertanyaan

- a) Melalui fitur raise hand di zoom;
- b) Melalui chat zoom;

E. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan dan mengisi kuesioner evaluasi narasumber;

F. Mempersilakan narasumber untuk memulai;

G. Narasumber selesai memaparkan materi

1. Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
2. Memandu jalannya tanya jawab:
 - Memberi kesempatan kepada peserta offline terlebih dahulu (dibatasi 1 dulu);
 - Pertanyaan dari peserta online yang mengajukan langsung melalui fitur raise hand;
 - Pertanyaan dari chat zoom yang dikumpulkan oleh petugas kelas melalui WA Moderator;

H. Penutup

1. Menutup sesi materi:
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini;
 - Mempersilakan narasumber meninggalkan zoom meeting;
2. Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematerinya;
 - Mengingatkan untuk tidak mematikan zoom;
 - Mengingatkan untuk ontime dalam sesi berikutnya ;

PANDUAN PETUGAS KELAS

1. Membantu host melakukan approval kepada peserta yang masuk link zoom
2. Memantau lalu lintas pertanyaan peserta melalui fitur raise hand
3. Membantu mengumpulkan pertanyaan pada kolom chat zoom yang selanjutnya diarahkan kepada WA Moderator
4. Membantu menjawab pertanyaan peserta terkait teknis zoom dikolom chat
5. Membantu permintaan narasumber dan moderator

PANDUAN SESI MODERATOR PRAKTEK DAN PRESENTASI

1. Greetings
 - Mengucapkan salam
 - Mengucapkan selamat bergabung kepada para peserta
 - Mengingatkan kembali ketentuan/tata tertib dalam zoom
 - Menyapa beberapa peserta (random) untuk test audio
2. Membuat cek list peserta yang ada di dalam kelasnya (absen)
3. Membuka acara
 - Memperkenalkan diri
 - Menjelaskan singkat mekanisme praktek (sesuai PPT)
4. Memastikan semua peserta sudah mendownload soal dan template
5. Memperkenalkan Narasumber
 - Membaca cv singkat
6. Memberikan waktu kepada Narasumber untuk menjelaskan jalannya praktek
7. Membantu Narasumber memantau lalu lintas pertanyaan
8. Menutup sesi

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

A. SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Pengujian Undang-Undang pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Pengujian Undang-Undang sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Pengujian Undang-Undang yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*share screen*) apabila diperlukan.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
 - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
 - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun zoom: **MK_<Nama Lengkap>**
Contoh: MK_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.
- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

A. SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan reviu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama mengalami kendala teknis.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*share screen*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil reviu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.

- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator sebagai *host zoom* akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta dan menyampaikan pertanyaan dari peserta melalui kolom *chat*.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

B. Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan

- 1) Lokasi narasumber dapat berada di kantor (WFO) atau kediaman masing-masing (WFH):
 - a) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di kantor (WFO), Bapak/Ibu dihimbau untuk berada di ruangan kerja masing-masing atau mencari lokasi lain yang tenang (hening).
 - b) Jika Bapak/Ibu melaksanakan tugas di rumah (WFH), Bapak/Ibu dihimbau untuk mencari ruangan/lokasi dengan kondisi tenang (hening).
- 2) Pastikan jaringan internet Bapak/Ibu stabil.
- 3) Narasumber bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting melalui laptop/PC masing-masing.
- 4) Narasumber **bergabung (*join*) ke dalam aplikasi zoom meeting 30 (tiga puluh) menit sebelum sesi dimulai**, dengan format tampilan nama (*username*) akun *zoom*: **MK_<Nama Lengkap>**
Contoh: MK_Imam Margono
- 5) Pada saat sesi berlangsung, Bapak/Ibu dihimbau untuk menggunakan *headset/earphone/headphone* agar kualitas suara terjaga dengan baik.

- 6) Bagi narasumber yang berada di kantor (WFO), agar menggunakan masker yang nyaman untuk berbicara sehingga suara narasumber dapat terdengar dengan jelas oleh peserta.
- 7) Lalu lintas pertanyaan selama sesi berlangsung ada pada moderator.

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
20 s.d. 23 Juni 2022**

Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum. -

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	9	53	3,31	Saran : waktu pelatihan ditambah dengan mengurangi jam pelajaran dalam sehari
2	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	DECKY SUBARJA, S.Psi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
4	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah baik
5	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	53	3,31	cukup bagus dan ditingkatkan metode elearning
6	Ansorzal Kurniawan.SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Jangan terlalu cepat dalam menyampaikan materi karena daring dan tatap muka sedikit berbeda
7	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	Davip Arya Bhima, SE, MAB	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	9	56	3,50	Waktunya perlu di perpanjang
9	Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Mantep
10	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
11	Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	jika berkenan apakah boleh minta nomor hp Prof Dr Adji Samekto nggih...
12	SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	NOVIA, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	Sari Damayanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	8	55	3,44	Baik Baik
17	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	50	3,13	Sejauh ini sudah baik
19	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	60	3,75	
20	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	Baiknya bisa memberikan contoh pada setiap penjelasannya.
22	RAIS ROZALI, SH, MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	63	3,94	
23	Krisdiana Yulastuti, S.E., M.Si.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	52	3,25	Mohon lebih sering mengadakan bimtek untuk menambah wawasan Analis Kebijakan
24	Swasnita Sihotang, S.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sangat bagus dlm penyampaian materi
25	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	9	56	3,50	Usul bhn materi utk terus disosialisasikan secara intensif kpd semua kalangan
26	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	3	4	9	58	3,63	
27	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	Vice Admira Firnaherera, MPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	Reny Nirmala	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	63	3,94	- -
30	Drs. Deni Ardiana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
32	Drs. Achmad Chodiq	3	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	9	54	3,38	Untuk kepentingan saat ini Nilai nilai Pancasila lebih dibutuhkan untuk menyatukan masyarakat yang terbelah Segera merumuskan konkretisasi Nilai nilai di era kekinian, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab dan punya kewenangan? pada hal ada BPIP, lembaga yang khusus terkait masalah tersebut
33	Alfina Fedora Kotta,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	Indriyani, S.KM., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Secara keseluruhan sangat baik dan menambah ilmu pengetahuan kepada kami.
36	Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
37	Rina Christina, SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Study Kasus belum ada pada sesi pemateri maka perlu diadakan Penyelesaian masalah dari permasalahan nilai2 pancasila di masyarakat
38	Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	8	54	3,38	Bagus dan performanya terjaga selama memberikan pembelajaran
39	Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	60	3,75	
40	Tri Wahyu Wijayanti, S.M	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Secara keseluruhan sangat baik, materi yang disampaikan menambah wawasan
41	Amrih Wigiati, S.Sos.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	Perlu kegiatan seperti ini dilakukan secara periodik dengan pembahasan butir butir pancasila lebih detail, sehingga pengembangan kepentingan dapat merumuskan peraturan/ kebijakan tidak bertentangan dengan pancasila demi keadilan dan kesejahteraan rakyat.
42	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	baik
43	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
44	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	Semoga ke depan semua lini dan K/L bersama sama mengarusutamakan kembali Pancasila. Amin
45	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
46	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
47	Dra Rorie Paulina MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
48	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	Pemahaman akan lebih mendalam jika dibarengi dengan studi kasus di berbagai daerah di Indonesia, baik mulai dari wilayah barat hingga ke timur dengan isu yang sama, kelompok mayoritas terhadap minoritas baik dalam masalah agama, etnis. Malaysia dan Singapore sudah lama menonjolkan hidup bersama antar etnis baik dalam iklan, promosi, film dan disetiap event, malah dalam organisasi pemerintahan juga sudah beragam, namun di Indonesia belum atau sedikit sekali porsinya mulai dengan hal seperti ini
49	SISKA YUNI HARTANTI, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	Materi sangat bagus dan terimakasih atas ilmunya hari ini
50	Setiowiji Handoyo, SE, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	Irawati, M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	hanya satu masalah di saya sebagai peserta....internet yang tidak stabil..... perlu ada persiapan kuota buat para peserta diklat Mahkamah Konstitusi tentang nilai pedoman PANCASILA sebagai ruh dalam bernegara dan bermasyarakat
52	Tuti Kurnia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
53	Lusitawati	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
54	Siti Kholiyah, SAB, MAP.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
55	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	tidak ada tidak ada
56	Harris Taruna Nugroho, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	Drs. H. Nahrudin, M.H	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	
58	Ir. Kemala Hayati, MT.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
59	dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	60	3,75	Sudah sangat baik
60	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69	
61	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	SUDAH BAGUS
62	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus
63	Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
64	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	
65	Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	7	57	3,56	penggunaan sarana dan metode pendidikan dapat ditingkatkan penggunaan sarana dan metode pendidikan dapat ditingkatkan
66	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	Siti Maesyarah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	cukup baik, tingkatkan
68	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Tidak cukup waktu untuk diskusi karena antusias peserta yang tinggi untuk bertanya.
69	Dr. Rusdiati Rumiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus, pertahankan
70	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	60	3,75	- -
71	Puput Putri Sari, S.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
72	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	hebat memang prof Adji

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
73	Heri Kusmanta, M.P.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Narasumber dan materi sudah sangat baik. Pertahankan
74	Siti Annisa Silvia Rosa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Sudah sangat bagus Sudah sangat bagus
76	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	presentasi menggunakan infografis
77	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	Isfahriani Sari Nasoetion,SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
79	Juherman, S.Si, M.AP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	pertanyaan2 yang sudah di ajukan lewat chat mungkin bisa dijawab oleh pak prof, bisa dikirim lewat grup wa kegiatan ini
80	Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
81	Iwan Ridwan Stiaggi, M.AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	8	49	3,06	bisa memacu semangat kedepannya
82	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	9	58	3,63	Perlu dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkat pemahaman nilai -nilai untuk menjaga keutuhan NKRI penyempurnaan materi agar mudah diaplikasikan di tingkat lapangan
83	Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
84	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	
85	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mekanisme penyajian sangat filosofis Penyajian perlu diblended dengan aplikasi terapannya dilapangan yang membumi
86	Yossi Apriliana, SE, M. AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
87	Naufal Noor Rochman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
88	Djati Witjaksono Hadi	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	51	3,19	Untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila, disarankan diperbanyak contoh2 dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara.... contoh yang diberikan sepertinya pernah juga disampaikan pada penataran P4 tahun 1980an. Perlu lebih disosialisasikan bagaimana mengaktualisasikan nilai2 pancasila, dibuatkan manualnya dan tutorialnya..... tks
89	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
90	Paramita Wikansari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
91	Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok ok
92	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	Perlu adanya contoh nyata penerapan dari Nilai Nilai Pancasila kepada mqasyarakat Agar bahan tayang disempurnakan
93	Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Rekaman pengajar pada sesi materi
94	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	3	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	
95	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
96	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
97	Siti Irma Suryani	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
98	Kania Rahma Nureda, S.H.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
99	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Narasumber menyampaikan materi dengan interaktif dan berdasarkan sharing experience
100	Sulikah, S. Ag.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
101	Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Pertahankan
102	drg. Tince Arniati Jovina, MKM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
103	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
104	Ratih Purwandari Rusna,SKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
105	Sofia Yuniar Sani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
106	Ir. Nani Rohaeni, MP	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	9	57	3,56	waktu diskusi rasanya kurang...baiknya penanya dapat diambil mewakili berbagai tingkat pemerintahan.
107	Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Diluangkan waktu lebih banyak buat Prof mengajar -
108	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
109	Desi Fitriani,SKM.MSi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak ada
110	Yulius Tiranda, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
111	Dita Andriasari SH,MH	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	Jam kegiatan sama dengan jam kerja serta tidak ada penugasan dari pimpinan /surat tugas sehingga sulit mengikuti secara fokus karena mengerjakan pekerjaan utama.
112	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat menarik acaranya sangat menarik acaranya
113	MURTONO,SE.,M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
114	AMAS, S.E., M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
115	Nurul Hasani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
116	Firman, SKM., M. PH	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	62	3,88	
117	Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
118	YOGI TRACKA, SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
119	Suliyani, SKM, M.Epid	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
120	Imran Nur, S.IP, M.Si	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	Semoga kegiatan ini dapat berkelanjutan dengan materi dan narasumber yang lebih menarik, dan kegiatan dilakukan secara tatap muka Terima kasih Bapak/Ibu Narasumber, Moderator dan Panitia Pelaksana
121	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	9	54	3,38	Terima Prof sudah memberikan ilmu bagi kami.
122	Nani Mardiah, S.Farm., Apt	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	-
123	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
124	Endang Prihayuni, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
125	Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
126	Christa Gumanti Manik, MPH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
127	Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	4	3	8	52	3,25	Baik Baik
128	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
129	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
	AVERAGE	3,71	3,68	3,62	3,67	3,53	3,56	3,60	3,65	3,64	3,70	3,71	3,62	3,53	3,50	3,70	3,69			3,63	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
20 s.d. 23 Juni 2022**

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Indriyani, S.KM., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Terimakasih, sangat berguna dan bermanfaat bagi kami
2	Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	9	53	3,31	Saran : agar ditambahkan materi nilai-nilai luhur Pancasila yang tentunya bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari
3	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Penyajian cukup bagus, modulasi sudah cukup jelas
4	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	Swasnita Sihotang, S.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	SDH baik
6	Sari Damayanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
7	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	9	51	3,19	materi sgt bermanfaat ini agar dapat disosialisasikan kpd setiap kalangan
9	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	sudah baik sudah baik
10	YOGI TRACKA, SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
11	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	4	3	3	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	3	8	54	3,38	
12	Setiowiji Handoyo, SE, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	Drs. Achmad Chodiq	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	9	53	3,31	lebih baik kalau bisa tatap muka agenda tahunan akan lebih baik kalau bisa menyasar profesi jabatan yang lain
14	DECKY SUBARJA, S.Psi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	Windy kusuma ningrum, SE.MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
16	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	8	54	3,38	Lebih ditingkatkan
17	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Sudah baik
18	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah baik..lanjutan
19	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	3	3	3	2	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
20	SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	55	3,44	
21	Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	penjelasannya sudah jelas dan bisa di fahami
22	RAIS ROZALI, SH, MH	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56	
23	Vice Admira Firnaherera, MPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	SISKA YUNI HARTANTI, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	8	51	3,19	Materi dan diskusinya sangat bagus, bisa menambah ilmu dan pengetahuan kami. mohon diadakan bimtek serupa dengan tema berbeda. Terimakasih
25	Lusitawati	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
26	Ayurisyia Dominata, S.IP.,M.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	konsep desentralisasi Indonesia maju 34 propinsi
27	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	Drs. Deni Ardiana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	63	3,94	
30	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
32	Ansorzal Kurniawan.SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	4,00	Gambar materi agak sedikit buram perlu di perbaiki lagi kualitas tampilan gambar
33	Reny Nirmala	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	61	3,81	- -
34	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	Perlu diberikan contoh2 dalam penjelasannya.
35	Krisdiana Yulastuti, S.E., M.Si.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19	Mohon lebih banyak webinar tentang materi Konstitusi & konstitusionalisme

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
36	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
37	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
38	Ir. Kemala Hayati, MT.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
39	dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	58	3,63	Materi dan cara menyampaikannya cukup jelas untuk dipahami
40	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	- -
41	Djati Witjaksono Hadi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Agar ditambahkan contoh-contoh hal yang inkonstitusional dan Inkonstitusional bersyarat ? Penjelasan agar dilengkapi.
42	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
43	Dr. Rusdiati Rumiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus, pertahankan
44	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
45	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	2	3	4	8	50	3,13	eye contact, slide design utk ditingkatkan
46	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	6	45	2,81	narsum yang punya power suara dan impresif
47	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	7	53	3,31	
48	Puput Putri Sari, S.Si.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	
49	Davip Arya Bhima, SE, MAB	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Waktu perlu ditambah lagi
50	Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Paparan dapat dibuat lebih menarik dan atraktif lagi kedepannya. Terima kasih
51	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	61	3,81	Materi presentasi sangat menarik, dapat disajikan bervariasi dengan video pembelajaran yang atraktif
52	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Materi seperti ini sangat bagus, bila memungkinkan semua analisis kebijakan diberikan materi seperti ini.
53	Desi Fitriani,SKM.MSi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak ada
54	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
55	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	Siti Annisa Silvia Rosa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
57	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
58	Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
59	Siti Irma Suryani	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	Pak Fajar sangat berkompeten dan seluruh materi disampaikan dengan jelas. Saran: lebih banyak waktu yang disediakan untuk berdiskusi.
60	Harris Taruna Nugroho, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
61	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	55	3,44	
62	Amrih Wigiati, S.Sos.MM	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	8	38	2,38	
63	Siti Kholyah, SAB, MAP.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
64	Heri Kusmanta, M.P.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Narasumber dan materinya sangat bagus. Pertahankan
65	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
66	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
68	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat menarik acaranya sangat menarik acaranya
69	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	9	56	3,50	
70	Naufal Noor Rochman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
71	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
72	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
73	Ratih Purwandari Rusna,SKM	3	4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
74	Endang Prihayuni, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
75	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	8	56	3,50	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
77	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	Perlu dilanjutkan bukan saja untuk para analis tetapi kepada semua aparatur sangat perlu mengetahui untuk meningkatkan pengetahuan tentang batasan batasan yang menjadi kewenangan. Bahan paparan kiranya perlu lebih disederhanakan agah mudah dipahami dan dimengerti
78	Isfahriani Sari Nasoetion,SP	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	agar waktu interaktif sharing session dan diskusi bisa ditambah
79	MURTONO,SE.,M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
80	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Penyajian perlu dilengkapi contoh tarapan dalam pelaksanaan hasil analisis kebijakan publik Perlu evidence based dalam penjelasan materi dalam pelaksanaan di lapangan
81	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	8	54	3,38	Perlu contoh dalam pelaksanaanya Kesesuaian waktu dan materi
82	Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	3	4	8	58	3,63	sudah cukup baik
83	Yossi Apriliana, SE, M. AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
84	AMAS, S.E., M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
85	Drs. H. Nahrudin, M.H	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	62	3,88	
86	Alfina Fedora Kotta,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Dipertahankan sudah baik
88	Nurul Hasani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
89	drg. Tince Arniati Jovina, MKM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
90	Ir. Nani Rohaeni, MP	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
91	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
93	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	7	62	3,88	
94	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
95	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	Perlu contoh dalam pelaksanaanya Kesesuaian waktu dan materi
96	Dra Rorie Paulina MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
97	Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
98	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
99	Imran Nur, S.IP, M.Si	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	9	55	3,44	Semoga kegiatan ini berlanjut dengan model penyajian secara tatap muka Terima kasih utk bapak/ibu narasumber, moderator dan panitia pelaksana
100	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	3	4	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	8	56	3,50	Terima kasih pak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H. atas ilmu yang diberikan.
101	Nani Mardiah, S.Farm., Apt	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	-
102	Sofia Yuniar Sani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
103	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
104	Dita Andriasari SH,MH	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	perlu adanya surat tugas kepada peserta spy dapat mengikuti kegiatan secara penuh tidak terdistraksi tugas lainnya sehingga materi yg bagus2 ini dapat diterima dengan baik.
105	Sulikhah, S. Ag.	4	4	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
106	Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	3	8	60	3,75	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
107	Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik dan menarik materi dan penyajiannya
108	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok
109	Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
110	Tri Wahyu Wijayanti, S.M	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kemampuan Menyajikan Materi baik, menambah wawasan dan pengetahuan
111	Tuti Kurnia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
112	Christa Gumanti Manik, MPH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
113	Irawati, M.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	banyak bahasa hukum..sedangkan peserta dari berbagai institusi diluar hukum...jadi banyak yang blm mengerti istilah bahasa yang digunakan so fa so good...but need bahasa yang lebih bisa dipahami...bahasa Indonesia
114	Yulius Tiranda, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
115	Siti Maesyarah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
116	Rina Christina, SH.MH.	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	51	3,19	
117	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	0	56	3,50	
118	Paramita Wikansari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	AVERAGE	3,59	3,53	3,49	3,53	3,45	3,36	3,53	3,56	3,58	3,61	3,57	3,51	3,39	3,33	3,55	3,50			3,51	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
20 s.d. 23 Juni 2022**

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	6	53	3,31	perlu ditingkatkan
2	NOVIA, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	Siti Maesyarah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	cukup, tinggal di tingkatkan lagi
4	AMAS, S.E., M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
5	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	4	3	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
7	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	9	50	3,13	Perlu perluasan detail materi utk tindak lanjut implementasi
8	Firman, SKM., M. PH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	62	3,88	
9	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	Sudah baik
10	SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	58	3,63	
11	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	Setiowiji Handoyo, SE, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	Drs. Deni Ardiana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	mohon kalau bisa ada rekaman videonya
14	Davip Arya Bhima, SE, MAB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Perlu ditambah waktunya krn materinya cukup banyak
15	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
16	RAIS ROZALI, SH, MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
17	Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	salam takzim buat Prof Ni matulhuda
18	Drs. Achmad Chodiq	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	9	56	3,50	Sudah baik, tegas dan jelas kalau bisa mewarnai sistem penegakan hukum yang transparan dan akuntabel di NKRI akan sangat Baik menjadikan kegiatan tersebut sebagai agenda tahunan, khususnya ke anggota Dewan...biar paham
19	SISKA YUNI HARTANTI, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	8	55	3,44	Sudah bagus trimakasih 🙏
20	Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Berbagai materi pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini kiranya dapat diformulasikan kembali sebagai bahan ajar kepada khalayak yang lebih luas (pelajar, mahasiswa, ASN, TNI/Polri, eksekutif, dll) untuk semakin menegakkan Pancasila di Indonesia. Pancasila harus semakin membumi di Negara Republik Indonesia.
22	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat menarik acaranya Perlu konsisten Dan terjadwal
23	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	3	3	4	4	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
24	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	56	3,50	
25	Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	8	50	3,13	Sesi tanya jawab mohon ditambah
26	Djati Witjaksono Hadi	4	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Perlu ditambahkan contoh2 terbaik tentang terkait ketatanegaraan, seperti penunjukkan Menteri Koordinator yang berwenang mengurus semua urusan, terkesan menjadi Menteri semua urusan.... Seharusnya kewenangan Menteri Koordinasi diperjelas, sehingga tidak terkesan tumpang tindih.
27	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	4	8	52	3,25	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
28	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	51	3,19	
29	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	9	52	3,25	Materi yang disajikan dapat menjadi tambahan pengetahuan
31	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	Siti Annisa Silvia Rosa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus
36	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	Dra Rorie Paulina MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	55	3,44	Baiknya diberikan contoh2 dalam penjelasannya.
39	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tdk ada Tdk ada
40	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	- -
41	Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	
42	drg. Vивиyanti, DPH, MHealSc	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
43	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	8	60	3,75	
45	Ir. Kemala Hayati, MT.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
46	Rina Christina, SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	studi kasus dioerbanyak
47	Yulius Tiranda, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	Vice Admira Firnaherera, MPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	8	55	3,44	Sudah sangat baik Perlu kesesuaian materi dengan waktu
50	Desi Fitriani,SKM.MSi	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Tidak Ada
51	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	9	57	3,56	Tidak ada
52	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	4	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	4	9	57	3,56	Tidak ada
53	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
54	Siti Kholiyah, SAB, MAP.	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
55	Sari Damayanti, SH	4	4	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	55	3,44	
56	Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	59	3,69	semoga paparan dapat lebih menarik dan atraktif lagi serta menyajikan sumber data yang lebih ilmiah. Terima kasih
57	Amrih Wigiati, S.Sos.MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3	9	46	2,88	Ssbaiknya materi prof nimah dibahas lebih detail krn sangat ssnstif. Agar semua pihak menjadi paham dan dpt bermusyawarah unt sepakat. Perlu dilakukan FGD bekerjasama dg AAKI shg JFAK akan bertmbah kualitasnya dan dapat menelorkan rekomendasi yg berkualitas pula
58	Dr. Rusdiati Rumiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus, pertahankan
59	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	61	3,81	
60	Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih Bu Kami di daerah sudah sangat senang dengan sistem desentralisasi Bu. Palembang bisa punya LRT dan maju
61	Suliyani, SKM, M.Epid	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	
62	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	3	8	56	3,50	Terima kasih bu Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum atas ilmu yang diberikan.
63	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	
64	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	Ir. Nani Rohaeni, MP	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
66	Ansorzal Kurniawan.SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Signal sempat hilang semoga yg akan datang jaringan nya lebih baik lagi
67	Puput Putri Sari, S.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	
68	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
69	Drs. H. Nahrudin, M.H	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
70	Dita Andriasari SH,MH	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	8	57	3,56	waktu pelaksanaan yang berbarengan dengan jam kerja sehingga menyulitkan tetap fokus pada kegiatan ini karena harus mengerjakan tugas utama lainnya sehingga materi yang diterima tidak optimal
71	Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
72	Harris Taruna Nugroho, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
73	Indriyani, S.KM., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	bagus banget, sangat menambah ilmu pengetahuan bagi kami
74	Juherman, S.Si, M.AP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materinya mantap ni
75	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan dan pemaparan sangat enak didengar, terima kasih
76	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
77	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Materi bagus
78	Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik, dapat diteruskan
79	Ratih Purwandari Rusna,SKM	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
80	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	4	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	57	3,56	Baik
81	Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	banyak materi dan pengalaman yg dishare tp bahan belum dapat kita lihat atau pegang akan bagus jika ada buktinya
82	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
83	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	Narasumber memberikan wawasan yang luas terhadap isu-isu terkini Media pembelajaran dapat disampaikan dengan lebih atraktif
84	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	Perlu dilakukan lebih luas termasuk para penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah dalam penyampaian materi kiranya perlu didukung oleh bahan yang lebih simple agar mudah dipahami bagi para peserta
85	Nani Mardiah, S.Farm., Apt	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	8	58	3,63	-
86	Isfahriani Sari Nasoetion,SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat jelas paparannya tks
87	Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	3	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	56	3,50	
88	Tomy Risiqi Dinihari, SH. M.Hum	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	8	51	3,19	
89	Sofia Yuniar Sani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
90	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
91	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	8	54	3,38	
93	Yossi Apriliana, SE, M. AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
94	Reny Nirmala	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	- -
95	Imran Nur, S.IP, M.Si	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	Semoga kegiatan ini berlanjut, dan dilakukan secara tatap muka Terima kasih Bapak/Ibu Narasumber, Moderator dan Panitia Pelaksana
96	Naufal Noor Rochman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
97	dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	Materi dan penyajian cukup bagus
98	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
99	Swasni Sihatang, S.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
100	Nurul Hasani	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
101	Lusitawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
102	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	8	56	3,50		
103	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63		
104	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
105	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat memperluas wawasan kami. Terima kasih	
106	drg. Tince Arniati Jovina, MKM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
107	Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	4	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	sudah cukup baik	
108	Siti Irma Suryani	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	Prof Nimah jempol. Apresiasi terhadap PPPK MKRI atas nara sumber yang sangat berkompeten Waktu yang diberikan untuk penjelasan materi dan diskusi sudah seimbang.	
109	YOGI TRACKA, SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -	
110	Sulikh, S. Ag.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
111	Heri Kusmanta, M.P.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Narasumber dan materi sangat bagus, tegas dan lugas. Pertahankan ya Prof	
112	MURTONO,SE.,M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -	
113	Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	hebat didukung bnyak pengalaman	
114	Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
115	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok	
116	Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
117	Tuti Kurnia	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69		
118	Christa Gumanti Manik, MPH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
119	Irawati, M.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	so far so good	
120	Alfina Fedora Kotta,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
121	Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	4	3	8	52	3,25	Baik Baik	
122	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
123	Endang Prihayuni, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
124	Tri Wahyu Wijayanti, S.M	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
125	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
126	Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	3	4	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	3	3	3	8	53	3,31	baik baik	
	AVERAGE	3,71	3,60	3,60	3,60	3,51	3,45	3,65	3,71	3,64	3,67	3,69	3,60	3,44	3,44	3,66	3,70			3,60		

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
20 s.d. 23 Juni 2022**

Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Endang Prihayuni, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	AMAS, S.E., M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	Swasni Sihatang, S.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	3	3	2	3	2	3	2	2	3	3	3	3	2	3	2	3	6	42	2,63	
7	YOGI TRACKA, SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
8	DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Sudah sangat baik Sudah sangat baik
9	Siti Kholyah, SAB, MAP.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	good good
11	Rina Christina, SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Studi Kasus diperbanyak
12	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penjelasan baik dan mudah dipahami
14	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak ada Tidak ada
16	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	RAIS ROZALI, SH, MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	
18	Firman, SKM., M. PH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	Siti Annisa Silvia Rosa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	mantap, lanjutkan!
22	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	8	58	3,63	Materi sgt bermanfaat, saran utk terus disosialisasikan sec intensif
23	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi yang disajikan amat penting dan menarik, kiranya dapat diformulasikan sebagai bahan pengajaran pada khalayak yang lebih luas (pelajar, mahasiswa, ASN, TNI/Polri, parpol, ormas, dunia usaha, dll).
25	Drs. Deni Ardiana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	Ir. Kemala Hayati, MT.	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
27	SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
28	Setiowiji Handoyo, SE, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	Materi dan penyampaian cukup jelas
30	Vice Admira Firnaherera, MPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	Juherman, S.Si, M.AP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	materinya sangat bermanfaat bagi kami
32	Davip Arya Bhima, SE, MAB	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Durasi penyampaian materi kurang lama
33	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
34	Drs. Achmad Chodiq	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	8	54	3,38	penting dalam pemahaman untuk Instansi/lembaga yang diberi tanggungjawab dalam penegakan HAM agar tidak melanggar HAM itu sendiri sebagai tanggungjawab negara/pemerintah UU ITE.....perlu revitalisasi dan harmonisasi agar tidak dimanfaatkan untuk kepentingan sekelompok orang/golongan tertentu
35	Naufal Noor Rochman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
36	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	4	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
37	Dita Andriasari SH,MH	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	62	3,88	perlu adanya surat tugas kepada peserta spy dapat mengikuti kegiatan secara penuh tidak terdistraksi tugas lainnya sehingga materi yg bagus2 ini dapat diterima dengan baik.
38	Krisdiana Yulastuti, S.E., M.Si.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19	waktu penyampaian materi sangat bagus, mohon lebih sering mengadakan bimtek dengan topik yang lain
39	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
40	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	62	3,88	
41	Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lanjutkan Bagus sekali terimakasih Prof. Mohon tetap dan selalu adil.
42	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus
43	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	8	54	3,38	
44	Dra Rorie Paulina MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	Drs. H. Nahrudin, M.H	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	62	3,88	
46	Ansorzal Kurniawan.SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Cukup jelas dan tegas
47	Sulikhah, S. Ag.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	Djati Witjaksono Hadi	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	3	8	55	3,44	Permasalahan yang terkait dengan materi yang disampaikan Narasumber bagus, tetapi perlu penambahan waktu untuk membahas kasus-kasus yang terkait dengan kebijakan pemerintah, sehingga dapat menjadi masukan.
49	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	55	3,44	
50	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	4	4	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	55	3,44	
51	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	Perlunya contoh nyata terkait HAM Kesesuaian waktu dan materi
52	Reny Nirmala	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	- -
53	Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	4	9	55	3,44	Pemateri dan materi yang disampaikan sangat menarik, bila perlu sampaikan dengan gambar2 biar lebih menarik.
54	Nani Mardiah, S.Farm., Apt	4	4	3	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	8	57	3,56	-
55	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
56	Amrih Wigiati, S.Sos.MM	3	3	2	2	2	2	3	3	3	3	2	3	2	2	2	2	8	39	2,44	
57	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	Baiknya perlu ada contoh2 dalam penjelasan.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
58	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	57	3,56	
59	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
60	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
61	Ratih Purwandari Rusna, SKM	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
62	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	3	3	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
63	Heri Kusmanta, M.P.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Narasumber dan materi sudah sangat bagus.
64	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	56	3,50	
65	Ir. Nani Rohaeni, MP	4	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	9	57	3,56	
66	Sari Damayanti, SH	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
67	Dr. Irhamahayati, S. Si, Apt., MTI	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	8	53	3,31	
68	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	
70	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	4	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	9	59	3,69	perlu dilanjutkan pda sasaran yang lebih luas Bahan perlu lebih simpel dan mudah dipahami
71	Dr. Rusdiati Rumiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus, pertahankan
72	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Yth Panitia boleh minta rekamannya setelah acara selesai untuk semua materi untuk pembelajaran kami. Terimakasih sebelumnya.
73	Harris Taruna Nugroho, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
74	Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
75	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	- -
76	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
77	Siti Irma Suryani	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	
78	MURTONO,SE.,M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
79	Imran Nur, S.IP, M.Si	4	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	Materi dan narasumber yang sangat menarik, semoga kegiatan ini ada kelanjutannya Terima kasih Pak Prof selaku narasumber, Modertaor dan Panitia Penyelenggara
80	Sofia Yuniar Sani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	Sudah baik
82	Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lancar
83	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Narasumber sangat menguasai materi dengan penjelasan yang detail dan mendalam
84	Isfahri Sari Nasoetion,SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
85	Yossi Apriliana, SE, M. AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
86	Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sangat baik. Penjelasan nara sumber sangat lengkap.
87	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
88	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
89	Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	baik dan menarik
90	Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	7	57	3,56	
91	Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
92	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
93	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	3	4	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	8	57	3,56	Terima kasih pak 1945Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H. atas ilmu yang diberikan.
94	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok
95	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
96	Indriyani, S.KM., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Materi yg dibawakan sangat baik dan mudah dipahami. Terimakasih banyak. Maaf, saya kemarin lupa tidak langsung mengisi kuesioner karena sedang dalam perjalanan.
97	Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
98	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
99	Puput Putri Sari, S.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
100	SISKA YUNI HARTANTI, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih narasumber
101	SISKA YUNI HARTANTI, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih narasumber
102	SISKA YUNI HARTANTI, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Terimakasih narasumber
103	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
104	Yulius Tiranda, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
105	Tuti Kurnia	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	
106	Christa Gumanti Manik, MPH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
107	Irawati, M.A.	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	so far so good
108	Nurul Hasani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
109	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	4	3	4	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	8	58	3,63	Ditingkatkan lagi jaringan internetnya terputus2
110	Alfina Fedora Kotta,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
111	Desi Fitriani,SKM.MSi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak Ada
112	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
113	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
114	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
115	Siti Maesyaroh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
116	Tri Wahyu Wijayanti, S.M	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
117	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	3	8	54	3,38	
118	Paramita Wikansari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	AVERAGE	3,74	3,70	3,64	3,66	3,53	3,48	3,69	3,69	3,65	3,66	3,66	3,66	3,47	3,48	3,71	3,69			3,63	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
20 s.d. 23 Juni 2022**

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	8	52	3,25	Selalu ditingkatkan
3	Endang Prihayuni, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
4	Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
5	Davip Arya Bhima, SE, MAB	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Durasinya penyampaian mohon bisa diperpanjang
6	Naufal Noor Rochman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
7	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	NOVIA, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
10	Drs. Deni Ardiana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tdk ada Sdh baik
12	Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah cukup jelas dan mudah dipahami
13	Sari Damayanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	Siti Maesyaroh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	SISKA YUNI HARTANTI, SE	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	9	59	3,69	Sudah baik. Semoga sukses selalu buat bapak
18	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	Vice Admira Firnaherera, MPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	SITI KHOERIYAH, SE,M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94	
21	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	Swasnita Sihotang, S.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Saran : Kegiatan Bimtek ini sangat bagus khususnya bagi sy yg background pendidikan bukan dari Hukum. Alangkah baiknya jika kegiatan ini dapat diberikan link rekaman kegiatan ini bagi peserta yg mengikuti bimtek ini SBG bahan utk menyusun laporan serta secara langsung dpt mendengarkan kembali informasi2 yg disampaikan oleh narasumber yg Tdk terdapat di dlm bahan materi. Perbaikan : kafang2 suara narasumber terputus-putus
23	Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Mantep, nice morning session!
24	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Sudah sangat baik
25	YOGI TRACKA, SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
26	Ir. Kemala Hayati, MT.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
27	Yulius Tiranda, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
28	Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat bagus terimakasih bapak
29	Siti Annisa Silvia Rosa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
30	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	4	4	3	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	8	56	3,50	Perlu terus dilakukan sosialisasi atas semua materi MK
31	AMAS, S.E., M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
32	Setiowiji Handoyo, SE, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
33	Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19	Materi sangat bagus menambah wawasan kami tentang Mahkamah Konstitusi, mohon lebih sering mengadakan diklat peningkatan kompetensi dengan materi yang lain.
34	Reny Nirmala	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	- -
35	Lusitawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
36	Drs. Achmad Chodiq	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	4	3	8	56	3,50	Pembahasan substansi terkait isu nasional terkini menjadi agenda tahunan sekaligus ada penyamaan persepsi yang terus berkembang
37	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
38	Ansorizal Kurniawan.SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kasih kuis dong biar tidak tegang
39	Amrih Wigiati, S.Sos.MM	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
40	Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	9	55	3,44	
41	Djati Witjaksono Hadi	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	53	3,31	Agar dapat ditambahkan Contoh-contoh pengajuan-pengajuan JR yang ditolak MK. Microfone narasumber agar menggunakan yang menghasilkan kualitas audio yang baik. tks
42	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
43	Dra Rorie Paulina MM	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
44	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	- -
45	RAIS ROZALI, SH, MH	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	57	3,56	
46	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	4	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	58	3,63	Perlu dilanjutkan kepada media yang lebih luas untuk memahami fungsi, kewenangan MK baik masyarakat maupun pemerintah Kalau bisa bahan agar lebih simpel dan mudah untuk dipahami
47	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	58	3,63	Narsum keasyikan menjelaskan materi di bagian awal sehingga bagian akhir kurang dikupas secara mendalam
48	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
49	Rina Christina, SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Sebaiknya tidak terlalu naratif, perbanyak kasus dan penyelesaian dari kasus
50	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Materi sangat membantu dalam pemahaman tentang MK, terutama bagi yang bukan dibidang hukum namun sering berhadapan dengan isu isu yag bersinggungan dengan masalah hukum
52	Harris Taruna Nugroho, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
53	Puput Putri Sari, S.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
54	Nenni Naomi Br. Sitingjak, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus
56	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
57	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	59	3,69	
58	Ir. Nani Rohaeni, MP	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
59	Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
60	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat baik
61	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	61	3,81	
62	Nani Mardiah, S.Farm., Apt	4	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	2	3	3	4	8	56	3,50	Materi sangat bagus namun suara sangat kecil.
63	Dr. Irhamahayati, S. Si, Apt., MTI	4	4	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	4	8	55	3,44	
64	Sulikah, S. Ag.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	Yossi Apriliana, SE, M. AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
66	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	57	3,56	
67	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	59	3,69	
68	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	53	3,31	
69	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	9	59	3,69	Sudah bagus
70	Ratih Purwandari Rusna,SKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	Drs. H. Nahrudin, M.H	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Lebih sering Dr.Irfan diberi kesempatan sebagai narasumber acara seperti ini
72	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
73	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
74	Imran Nur, S.IP, M.Si	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	59	3,69	Semoga kegiatan lanjutannya, dilaksanakan dengan tatap muka Terima kasih Pak Dr.Irfan selaku Narasumber, Pak moderator dan Bapak/Ibu Panitia Pelaksana
75	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	diharapkan pertanyaan yang ada di kolom chat dapat dijawab dan dikirimkan jawabannya melalui WA grup atw media lainnya
76	Irawati, M.A.	4	4	3	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	8	56	3,50	so far so good ok sdh klarifikasi hehehe
77	Sofia Yuniar Sani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
78	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	9	61	3,81	Penyajian materi sangat menarik dan lugas
79	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
80	Siti Kholiyah, SAB, MAP.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
81	Dita Andriasari SH,MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	diperlukan surat tugas pelaksanaan bimtek agar bisa lebih fokus, karena dobel menjalankan tugas utama lainnya.
82	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	good diPertahankan
83	Dr. Rusdiati Rumiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus, pertahankan
84	Tuti Kurnia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
85	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	58	3,63	
86	Nurul Hasani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	4	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	59	3,69	
88	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
89	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
90	Isfahriani Sari Nasoetion,SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	good👍
91	Alfina Fedora Kotta,S.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	Heri Kusmanta, M.P.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus semuanya, baik narasumber maupun materinya
93	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
94	Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
95	Juherman, S.Si, M.AP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materinya sangat bermanfaat bagi kami yg jadi analis kebijakan
96	Indriyani, S.KM., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	cukup baik dan bisa dipahami, terimakasih
97	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
98	Desi Fitriani,SKM.MSi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak Ada
99	dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	8	59	3,69	
100	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	4	8	55	3,44	Mohon disesuaikan waktu dan materi Perlu ada contoh kasus
101	Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	4	4	8	53	3,31	
102	MURTONO,SE.,M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
103	Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	verygood
104	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok
105	Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	8	50	3,13	Baik Baik
106	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
107	Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
108	Siti Irma Suryani	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	
109	Firman, SKM., M. PH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
110	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
111	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
112	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	4	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	8	58	3,63	Terima kasih atas ilmu yang diberikan.
113	Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
114	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
115	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
116	Christa Gumanti Manik, MPH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
117	Tri Wahyu Wijayanti, S.M	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
118	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
119	Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	3	8	57	3,56	baik baik
120	Suliyani, SKM, M.Epid	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
121	Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	bagus
	AVERAGE	3,71	3,61	3,57	3,61	3,52	3,48	3,63	3,64	3,65	3,69	3,65	3,59	3,43	3,48	3,66	3,64			3,60	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
20 s.d. 23 Juni 2022**

Saiful Anwar, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Endang Prihayuni, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	4	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
4	Naufal Noor Rochman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
5	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	Christa Gumanti Manik, MPH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
7	Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	3	9	58	3,63		
8	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	Swasnita Sihotang, S.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Saran : mohon dpt diberikan link rekaman agar kami dpt mengulang kembali tehnik penyusunan permohonan pengujian undang2
10	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
11	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tdk ada Sdh baik
12	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	4	3	3	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	4	4	3	8	54	3,38	Lebih ditingkatkan lagi jaringan internetnya terputus2	
13	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
14	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
15	SITI KHOERIYAH, SE,M.Si	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38		
16	Setiowiji Handoyo, SE, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	Yossi Apriliana, SE, M. AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
18	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94		
19	YOGI TRACKA, SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -	
20	Rina Christina, SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Narsum sebaiknya saat menyajikan materi untuk lebih fokus dengan audiensi nya Adanya latihan mengenai uji konstitusi agar audiens paham mengenai tata cara uji konstitusi
21	Drs. Achmad Chodiq	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	cara penyampaian substansi agar lebih ditingkatkan lagi, karena kami bukan berlatarbelakang pendidikan hukum ditingkatkan lagi	
22	Indriyani, S.KM., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Secara keseluruhan mudah dipahami dan banyak memberikan ilmu baru kepada peserta, terimakasih.	
23	Vice Admira Firnaherera, MPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
24	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
25	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Narasumber terlihat membaca	
26	Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	seemoga bisa lebih interaktif dan komunikatif lagi pemaparannya kedepan. Terima kasih	
27	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Masih perlu ada pelatihan cara permohonan pengujian	
28	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Masih perlu ada pelatihan cara permohonan pengujian	
29	Desi Fitriani,SKM.MSi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak Ada	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
30	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah cukup jelas
32	Amrih Wigiati, S.Sos.MM	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	9	56	3,50	
33	Drs. Deni Ardiana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	Krisdiana Yulastuti, S.E., M.Si.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19	Materi sangat bagus menambah wawasan kami yang awam di bidang Hukum , mohon lebih sering diadakan Diklat semacam ini.
35	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	3	3	3	2	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	7	46	2,88	
36	NOVIA, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
38	Yulius Tiranda, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	Ansorzal Kurniawan.SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Yang akan datang kami berharap kegiatan ini bisa tatap muka langsung biar lebih jelas
40	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	7	48	3,00	
41	Djati Witjaksono Hadi	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Kualitas audio perlu diperbaiki, agar penyampaian materi dapat dengan baik diterima. tks Karena peserta tidak semua Sarjana Hukum atau yang menangani Hukum, kiranya dapat ditambah waktu pelaksanaan prakteknya. tks
42	Djati Witjaksono Hadi	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	49	3,06	Kualitas audio perlu diperbaiki, agar penyampaian materi dapat dengan baik diterima. tks Karena peserta tidak semua Sarjana Hukum atau yang menangani Hukum, kiranya dapat ditambah waktu pelaksanaan prakteknya. tks
43	AMAS, S.E., M.M.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
44	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	8	60	3,75	
45	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	3	4	4	8	56	3,50	
46	Ir. Kemala Hayati, MT.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
47	Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
48	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	9	60	3,75	Perlu dilanjutkan kepada peserta yang lebih luas Cara membiarkan penjelasan kalau bisa lebih pelan
49	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	good good
50	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	54	3,38	
51	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	- -
52	Reny Nirmala	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	- -
53	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	materinya sangat menarik, namun suara tidak terdengar jelas. intonasi suara narsum rendah ditambah dengan sinyal yang naik turun
54	Harris Taruna Nugroho, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
55	Nenni Naomi Br. Sijinjak, SE	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Waktu penyampaian materi ini butuh di perpanjang dan kasus-kasus atau prakteknya dapat lebih 2-3 soal
56	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	4	3	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	9	60	3,75	Sudah bagus

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
57	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	suara kurang terdengar dibanding moderator, mungkin dari kualitas mic atw jarak ke mic. namun secara umum sangat bagus
58	Dita Andriasari SH,MH	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	47	2,94	waktu pelaksanaan kegiatan yang sama dengan jam kerja serta tidak disertai surat tugas sehingga tidak optimal dalam mengikuti sesi materi.
59	dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	60	3,75	
60	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	bagus.. cuma sound dari narasumber agak kecil
61	Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
62	Dra Rorie Paulina MM	3	4	3	3	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	58	3,63	SUARA KURANG KERAS SEHINGGA KURANG MEMAHAMI APA YANG SUDAH DIPAPARKAN
63	SISKA YUNI HARTANTI, SE	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	47	2,94	Mohon untuk suara nya diperbaiki kr suara saat penyampaian materi sering terputus-putus sehingga tidak jelas
64	Dr. Rusdiati Rumiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus, pertahankan
65	Imran Nur, S.IP, M.Si	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	3	4	4	9	55	3,44	Semoga kegiatan ini ada kelanjutannya Terima kasih Pak Saiful selaku Narasumber, Pak Moderator dan Bapak/Ibu Panitia Pelaksana
66	MURTONO,SE.,M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
67	Drs. H. Nahrudin, M.H	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
68	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
69	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
70	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
71	Ratih Purwandari Rusna,SKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
72	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
73	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	9	61	3,81	Penjelasan Narasumber sangat mendetail, bagus karena akan menjadi modal untuk sesi praktik
74	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	Tulisan di paparan apabila ditampilkan beberapa terlalu kecil tidak dapat dibaca, mungkin juga layar untuk proporsi paparan kurang besar. Terimakasih
75	Irawati, M.A.	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	52	3,25	so far so good
76	RAIS ROZALI, SH, MH	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	52	3,25	
77	Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	4	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	58	3,63	Suara masih tersimpan krn bisa gangguan jaringan
78	Heri Kusmanta, M.P.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	Audio lebih diperhatikan.
79	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	5	51	3,19	
80	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
81	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
82	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
83	Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
84	Puput Putri Sari, S.Si.	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	60	3,75	
85	Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	7	49	3,06	Terlalu banyak noise, perlu diperhatikan agar tidak mengganggu acara
86	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
87	Siti Irma Suryani	3	3	3	4	3	3	2	3	4	4	4	3	2	2	3	4	7	50	3,13	Suara tidak stabil, sering kurang terdengar sehingga materi sulit ditangkap jelas. Perlu perbaikan dalam hal kestabilan suara.
88	Isfahriani Sari Nasoetion,SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
89	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok
90	Siti Kholiyah, SAB, MAP.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
91	Sari Damayanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
92	Tuti Kurnia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	
93	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	Agar disesuaikan materi dan waltu
94	Ayurisyia Dominata, S.IP.,M.A.	3	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	suara agak kecil oke
95	Siti Annisa Silvia Rosa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
96	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
97	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
98	Davip Arya Bhima, SE, MAB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Durasi kurang
99	Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik
100	Nurul Hasani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
101	Firman, SKM., M. PH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
102	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
103	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
104	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	4	3	4	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	8	57	3,56	Terima kasih pak Saiful Anwar, S.H., M.H. atas ilmu yang diberikan.
105	Ir. Nani Rohaeni, MP	4	3	3	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	57	3,56	
106	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
107	Sulikhah, S. Ag.	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	
108	Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
109	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
110	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
111	DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
112	Alfina Fedora Kotta,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
113	Sofia Yuniar Sani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
114	Siti Maesyaroh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
115	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
116	Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	bagus
117	Paramita Wikansari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	AVERAGE	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###	###			3,49	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
20 s.d. 23 Juni 2022**

1. Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.
2. Ery Satria Pamungkas, S.H.
3. Ria Indriyani, S.H., M.H.

4. Yunita Rhamadani, S.H., M.H.
5. Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.
6. Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	Naufal Noor Rochman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
2	Siti Maesyaroh	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
3	Christa Gumanti Manik, MPH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
4	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	3	8	55	3,44	Ditingkatkan lagi jaringan internetnya
5	Juherman, S.Si, M.AP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
6	NOVIA, ST	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
7	Irawati, M.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	8	49	3,06	so fa so good	
8	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
9	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tdk ada Tdk ada	
10	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
11	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06		
12	Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sudah jelas dan mudah di fahami	
13	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
14	Drs. Deni Ardiana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
15	YOGI TRACKA, SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	-	
16	Vice Admira Firnaherera, MPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
17	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	9	52	3,25		
18	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	4	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	8	56	3,50		
19	Yulius Tiranda, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
20	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
21	Krisdiana Yuliasstuti, S.E., M.Si.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19	Mohon waktu praktek lebih banyak dengan beragam kasus agar kami lebih paham	
22	Amrih Wigiati, S.Sos.MM	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75		
23	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
24	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
25	Rina Christina, SH.MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat memuaskan praktik pelatihannya diperbanyak soal2 pelatihan untuk pengkayaan kompetensi pemahaman dan keahlian	
26	Reny Nirmala	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	- -	
27	Harris Taruna Nugroho, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
28	SITI KHOERIYAH, SE,M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	63	3,94		
29	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	penjelasan Mb Dian Chusnul Khotimah sangat clear.. bahasanya mudah dimengerti dan interaksi antara narsum, moderator dan peserta sangat baik,..	
30	Ansorizal Kurniawan.SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Signal sering hilang	
31	Nenni Naomi Br. Sijinjak, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
32	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	59	3,69		

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
33	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	8	56	3,50	
35	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	Yossi Apriliana, SE, M. AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
37	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	waktu praktek dan pengerjaan tugas terlalu singkat
38	RAIS ROZALI, SH, MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	8	61	3,81	
39	Setiowiji Handoyo, SE, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
41	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	58	3,63	Dengan dilakukan bedah kasus dan praktek langsung membuat permohonan ini sehingga lebih memahami, terimakasih buat bapak Narasumber
42	Siti Irma Suryani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	4	9	61	3,81	
43	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	63	3,94	
44	dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
45	Ratih Purwandari Rusna,SKM	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	55	3,44	
46	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
47	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
48	Drs. Achmad Chodiq	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3	8	61	3,81	bisa dipertahankan bisa Tatap muka akan lebih baik
49	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	9	63	3,94	Narasumber menjelaskan dengan detail step by step, mudah dipahami
50	Ir. Kemala Hayati, MT.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
52	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok
53	Djati Witjaksono Hadi	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Agar diberi tambahan waktu untuk mengecek pasal2 dan norma-norma di UU yang terkait.
54	Djati Witjaksono Hadi	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	8	56	3,50	Agar diberi tambahan waktu untuk mengecek pasal2 dan norma-norma di UU yang terkait.
55	Heri Kusmanta, M.P.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Audio lebih diperhatikan. Materi dan Narasumber sudah bagus.
56	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	8	51	3,19	perlu untuk lathan2 selanjutnya
57	Dr. Rusdiati Rumiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik, pertahankan
58	Dita Andriasari SH,MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	Diperlukan surat penugasan agar bisa lebih fokus mengikuti kegiatan ini krn masih double dengan kegiatan tugas utama lainnya.
59	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah Baik Dipertahankan dan ditingkatkan
60	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	9	60	3,75	Sudah bagus
61	Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	9	56	3,50	Terima kasih atas bimbingannya
62	Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	verygood
63	Desi Fitriani,SKM.MSi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak Ada
64	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Saat menjelaskan pada saat praktek, sebaiknya semua ditanya apakah sudah jelas dan dapat lanjut pada nomor berikutnya, sehingga tidak masing-masing bertanya sehingga maju mundur menjelaskannya. Terimakasih.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
65	Siti Kholyah, SAB, MAP.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
66	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	9	53	3,31	
67	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	Cukup baik
68	Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
69	Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
70	Sari Damayanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
71	Tuti Kurnia	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	
72	Drs. H. Nahrudin, M.H	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
73	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Materi dan watu perlu disesuaikan
74	Dra Rorie Paulina MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mantap sesi ini sungguh bedah kasus yang sangat efektif dan interaktif, membuat kami peserta yang awam ilmu hukum menjadi mengerti alur dan bahasa pembahasan perkara hukum konstitusional. Terima kasih
77	SISKA YUNI HARTANTI, SE	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Suaranya sering putus-putus
78	AMAS, S.E., M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
79	Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	Baik Baik
80	Ayurisyia Dominata, S.IP.,M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat bagus ibunya pintar dan baik. terimakasih
81	Siti Annisa Silvia Rosa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
82	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	59	3,69	
83	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	9	60	3,75	Penyampaian Bagus perlu dilanjutkan Penyampaian lebih pelan-pelan
84	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
85	MURTONO,SE.,M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
86	Swasnita Sihotang, S.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	Lusitawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
88	Indriyani, S.KM., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	materi yang diberikan sangat jelas dan detil, semoga nantinya dapat kami terapkan di institusi masing-masing sebagai tuisi dari analisis kebijakan. terimakasih banyak.
89	Davip Arya Bhima, SE, MAB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	waktunya kurang panjang
90	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
91	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	- -
92	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	
93	Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
94	Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Baik. Metode dipertahankan yg rigid sdh baik
95	Nurul Hasani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
96	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
97	Firman, SKM., M. PH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
98	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
99	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	4	3	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	4	4	3	8	56	3,50	Terima kasih atas panduan dan ilmu yang diberikan.

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
100	Ir. Nani Rohaeni, MP	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	60	3,75	
101	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
102	Sulikhah, S. Ag.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
103	Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
104	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
105	Puput Putri Sari, S.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
106	Dr. Irhamahayati, S. Si, Apt., MTI	4	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	54	3,38	
107	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	sangat membantu
108	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
109	DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
110	Alfina Fedora Kotta,S.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
111	Imran Nur, S.IP, M.Si	4	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	57	3,56	Semoga ada kelanjutan diklat ini. Terima kasih bapak/ibu narasumber, moderator dan panitia pelaksana
112	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
113	Sofia Yuniar Sani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
114	Endang Prihayuni, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
115	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
116	Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	8	54	3,38	baik baik
117	Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	bagus
118	Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	62	3,88	sudah cukup baik
119	Isfahri Sari Nasoetion,SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
120	Paramita Wikansari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
	AVERAGE	3,67	3,61	3,68	3,59	3,55	3,54	3,63	3,66	3,63	3,65	3,58	3,64	3,54	3,53	3,64	3,66			3,61	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
20 s.d. 23 Juni 2022**

*Riska Aprian
Rudi Kurniawan*

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	Endang Prihayuni, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	3	4	3	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	57	3,56	
4	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	3	4	4	3	8	56	3,50	Ditingkatkan lagi jaringan internetnya terputus2
5	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	Naufal Noor Rochman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
7	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
8	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tdk ada Tdk ada
9	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
10	Swasnita Sihotang, S.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	Davip Arya Bhima, SE, MAB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	durasi kurang panjang
12	Setiowiji Handoyo, SE, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	keren moderator dan narasumbernya.. interaktif penyajiannya, tks
13	Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup jelas
14	YOGI TRACKA, SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
15	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	8	52	3,25	Masih perlu pembelajaran utk semua kalangan
17	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	8	52	3,25	Masih perlu pembelajaran utk semua kalangan
18	SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	56	3,50	
19	Rina Christina, SH.MH.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	media ajar nya divariatif agar tidak membosankan
20	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	Drs. Deni Ardiana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
22	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	3	3	2	2	3	3	3	3	3	4	3	4	4	4	3	4	7	51	3,19	ttd banyak yg diskip
23	Reny Nirmala	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	- -
24	RAIS ROZALI, SH, MH	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	2	7	50	3,13	
25	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	4	8	58	3,63	
26	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	6	46	2,88	Penggunaan bahasa kurang baik
27	SISKA YUNI HARTANTI, SE	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	Video narasumber kecil sehingga wajahnya tidak begitu jelas
28	Siti Annisa Silvia Rosa	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
29	Iswati Utamiputeri, S.Si., M.T.	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	Mantep, semoga kedepannya lebih baik lagi. aamiin
30	Drs. Achmad Chodiq	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	8	51	3,19	Layanan Informasi yang mantap, keamanan akses yang penting maintenance dengan pihak di luar MK apa tidak membahayakan terkait Rahasia negara misal
31	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	AMAS, S.E., M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	8	62	3,88	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
33	Vice Admira Firnaherera, MPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	9	51	3,19	
35	Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
36	Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19	Mohon lebih sering mengadakan webinar seperti ini untuk menambah wawasan Analis Kebijakan
37	Harris Taruna Nugroho, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	Amrih Wigiati, S.Sos.MM	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	4	9	57	3,56	Mungkin bisa kami diundang untuk diklat offline di bogor, agar lebih intent pemahamannya dan mengaplikasikan.
39	Ir. Kemala Hayati, MT.	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
40	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	2	3	3	7	46	2,88	
41	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
42	Yossi Apriliana, SE, M. AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
43	Dra Rorie Paulina MM	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
44	Tuti Kurnia	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
45	Ratih Purwandari Rusna,SKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
46	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
47	Ansorizal Kurniawan.SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Kasih kuis dong biar seru apa lagi yang bisa jawab di kasih hadiah pasti lebih seru
48	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
49	Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok ok
50	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
51	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
52	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	51	3,19	
53	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	9	63	3,94	Sistem Informasinya bagus, semoga sudah ada kontrol yang ketat untuk tidak semua orang di dunia dapat akses semua informasi, terutama yang merupakan rahasia atau kelemahan negara (bia ada). Terimakasih
54	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	4	4	3	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	9	60	3,75	Perlu dilanjutkan untuk peserta yang lebih luas Kiranya waktunya perlu diperpanjang karena sangat teknis menyulitkan bagi pesrta yang tidak berlatar belakang hukum
55	Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	9	55	3,44	
56	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
57	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
58	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
59	Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Peserta dapat segera terdaftar pada sistim ini
60	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
61	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
62	Dr. Irhamahayati, S. Si, Apt., MTI	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	51	3,19	
63	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	8	60	3,75	
64	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	good good
65	Drs. H. Nahrudin, M.H	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	8	61	3,81	
66	Ir. Nani Rohaeni, MP	4	3	3	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
67	Sofia Yuniar Sani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
68	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	7	50	3,13	Perlu diperhatikan waktu dan materi
69	Dita Andriasari SH,MH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	48	3,00	moderator terlalu banyak menyela saat narsum paparan materi perlu surat tugas saat kegiatan krn saat mengikuti acara ini tidak fokus krn sambil menjalankan tugas pokok kedinasan lainnya
70	Sulikah, S. Ag.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
71	dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	58	3,63	
72	Puput Putri Sari, S.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
73	Djati Witjaksono Hadi	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	9	52	3,25	Perlu waktu untuk mendalami dan mempelajari sistem ini dengan baik, sehingga waktu pelajaran secara mandiri agar ditambah.
74	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	Juherman, S.Si, M.AP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	Siti Maesyarah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
77	Yulius Tiranda, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	Irawati, M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	generasi milenium memang ok bingit sy suka ada gestur bodylanguange jadi tidak monoton dan gampang bosan tks mas Rudi Kurniawan...sukses selalu ya.... so far so good
79	Nurul Hasani	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
80	Indriyani, S.KM., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Seru, sangat bermanfaat dan memberikan informasi yang luas kepada peserta. Terimakasih banyak.
81	Siti Kholiyah, SAB, MAP.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
82	Heri Kusmanta, M.P.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah bagus tapi terkadang suara kurang jelas.
83	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	- -
84	Dr. Rusdiati Rumiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik, pertahankan
85	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
86	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	3	3	4	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
88	Christa Gumanti Manik, MPH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
89	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	8	53	3,31	
90	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	4	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	3	4	4	3	8	55	3,44	Terima kasih atas ilmu dan panduan yang diberikan.
91	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	7	42	2,63	
93	Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	4	3	4	4	3	3	4	3	3	4	4	3	4	3	4	3	8	56	3,50	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
94	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sudah bagus
95	Desi Fitriyaneti,SKM.MSi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak Ada
96	MURTONO,SE.,M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
97	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Penjelasan Fasilitator menambah pengetahuan dan wawasan baru dalam sistem perkara Bagus dan menarik
98	Imran Nur, S.IP, M.Si	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	Semoga berlanjut ke diklat berikutnya Terima kasih bapak/ibu narasumber, moderator dan panitia pelaksana
99	Sari Damayanti, SH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	9	53	3,31	
100	Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	4	4	4	3	3	8	59	3,69	
101	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
102	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
103	Alfina Fedora Kotta,S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
104	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok
105	Isfahri Sari Nasoetion,SP	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	9	56	3,50	
106	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
107	Siti Irma Suryani	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	8	53	3,31	Praktek materi ini sebaiknya diintegrasikan dengan tugas penyusunan permohonan judicial review, berupa pembuatan login dan pengajuan permohonan sehingga peserta dapat mempraktekkan langsung proses permohonan sejak penyusunan hingga pengajuan.
108	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
109	Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
110	Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
111	DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
112	Suliyani, SKM, M.Epid	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
113	Lusitawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
114	Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	bagus
115	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
116	Buana Fauzi Febuari, SE., SH., MM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
	AVERAGE	3,48	3,43	3,41	3,38	3,37	3,42	3,41	3,41	3,47	3,54	3,40	3,50	3,47	3,47	3,52	3,50			3,45	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
20 s.d. 23 Juni 2022**

*Abdul Ghoffar, S.H., M.H.
Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.
Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.*

*Anna Triningsih, S.H., M.Hum.
Anantha Ayu Devitasari, S.H., M.H.
Intan Permata Putri, S.H., M.H*

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	8	56	3,50	Ditingkatkan lagi jaringan internetnya terputus2
2	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
3	Siti Maesyarah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	3	3	4	4	3	3	4	3	4	3	3	4	4	3	4	4	8	56	3,50	
5	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak ada Tidak ada
6	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	49	3,06	
7	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
8	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	AMAS, S.E., M.M.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
10	Reny Nirmala	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	- -
11	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	9	61	3,81	
13	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	Dra Rorie Paulina MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
15	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	4	3	4	4	4	8	55	3,44	
16	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	Davip Arya Bhima, SE, MAB	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Durasi kurang lama
18	Endang Prihayuni, S.Sos	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	Siti Annisa Silvia Rosa	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	3	4	3	3	8	56	3,50	
21	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	tetap utk terus sosialisasikan
22	Drs. Deni Ardiana	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	Ir. Kemala Hayati, MT.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	
25	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
26	SISKA YUNI HARTANTI, SE	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	4	3	3	4	8	55	3,44	Sudah baik
27	Said Moammad Khadafi, ST MT MSc	4	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
28	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	57	3,56	Sudah baik
29	Nurul Hasani	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	50	3,13	
30	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
31	SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
32	Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	8	51	3,19	mohon lebih sering mengadakan webinar seperti ini untuk menambah pengetahuan kami yang awam tentang aturan hukum
33	Sari Damayanti, SH	4	4	4	4	3	3	4	4	4	3	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50	
34	Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	semoga kedepannya bisa interaktif lagi dan sesuai pembahasan evaluasinya dengan soal praktek, tidak membahas kemana-mana, terima kasih.
35	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
36	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	cukup baik Perlu dipertahankan

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
37	Desi Fitriani, SKM, MSi	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Tidak Ada
38	Djati Witjaksono Hadi	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Narasumber disarankan videonya on, sehingga kita mengetahui wajahnya. tks
39	Setiowiji Handoyo, SE, ME	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	Drs. Achmad Chodiq	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	8	54	3,38	dipertahankan yang sudah berjalan dengan baik ditingkatkan lagi demi pelayanan yang excellent
41	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Narasumbernya ibu Ayu nsangat jelas dalam menerangkan
42	Dr. Rusdiati Rumiah	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik, pertahankan
43	Puput Putri Sari, S.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
44	Puput Putri Sari, S.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
45	Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	3	3	4	3	3	3	4	4	3	4	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	Sesi evaluasi ini menambah wawasan, hal ini perlu dilanjutkan
46	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	9	59	3,69	Perlu dilanjutkan dengan memperluas cakupan peserta sehingga lebih banyak paham Materi yang padat kiranya waktu pelaksanaan ditambah sesuai dengan waktu wilayah Indonesia
47	RAIS ROZALI, SH, MH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	3	8	60	3,75	
48	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiaty, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	9	59	3,69	sangat menambah wawasan
49	Yossi Apriliana, SE, M. AP	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
50	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
51	Ansorzal Kurniawan, SE, MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Yang akan datang sebaiknya kegiatan ini sebaiknya tatap muka agar lebih paham
52	Ratih Purwandari Rusna, SKM	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	8	51	3,19	
53	dr. Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	4	4	4	4	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	3	4	8	57	3,56	
54	Drs. H. Nahrudin, M.H	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
55	Siti Kholiyah, SAB, MAP.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
56	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
57	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	Sesi evaluasi memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh penjelasan yang lebih komprehensif terhadap penguasaan individu Penjelasan Narasumber sangat mendetail dan menguasai materi
58	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	8	61	3,81	
59	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	8	59	3,69	
60	Rina Christina, SH, MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	hasil evaluasi (recoder) dikirim ke peserta agar peserta dapat memahami permohonan uji konstitusi terutama pada rumusan petitum
61	Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
62	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	8	52	3,25	Perlu penyesuaian materi dan waktu
63	Amrih Wigiyati, S.Sos, MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
64	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
65	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	3	3	9	60	3,75	
66	Nenni Naomi Br. Sitingjak, SE	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
67	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	4	3	8	58	3,63	Terima kasih atas ilmu yang diberikan.
68	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
69	Tuti Kurnia	3	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
70	Alfina Fedora Kotta, S.Pd	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
71	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
72	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	3	4	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	8	56	3,50	
73	Swasnita Sihotang, S.Kom	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mohon link rekaman bimtek dpt diberikan ke peserta utk menjadi bahan pembelajaran kembali sehingga bisa LBH mengerti LG. Terimakasih
74	Harris Taruna Nugroho, S.T.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
75	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
76	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
77	Heri Kusmanta, M.P.A	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
78	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	ok
79	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	9	52	3,25	
80	MURTONO,SE.,M.Si.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
81	Isfahri Sari Nasoetion,SP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
82	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
83	Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
84	Ir. Nani Rohaeni, MP	4	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	57	3,56	
85	Siti Irma Suryani	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	60	3,75	
86	Vice Admira Firnaherera, MPA	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
87	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	60	3,75	
88	Naufal Noor Rochman	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
89	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
90	Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	7	54	3,38	
91	Sulikhah, S. Ag.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
92	Sofia Yuniar Sani	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
93	Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
94	Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	3	3	9	58	3,63	
95	drg. Tince Arniati Jovina, MKM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
96	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	61	3,81	
97	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	58	3,63	- -
98	Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	3	4	3	4	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	8	55	3,44	baik baik
99	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
100	Suliyani, SKM, M.Epid	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
101	Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	4	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	baik dan sangat well educate akan sangat bagus jika dicontohkan kasus update atau kasus terbaru.
102	Ayurisyia Dominata, S.IP.,M.A.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
103	Imran Nur, S.IP, M.Si	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	4	4	9	56	3,50	Semoga berlanjut pada diklat berikutnya Terima kasih Bapak/Ibu Narasumber, Moderator dan Panitia Pelaksana
104	Indriyani, S.KM., M.Si.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	terimakasih untuk semua narasumber yang telah mengisi kegiatan yang sangat bermanfaat ini.
105	Yulius Tiranda, M.Pd	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
106	Firman, SKM., M. PH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
107	Lusitawati	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
108	Christa Gumanti Manik, MPH	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
109	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
110	YOGI TRACKA, SE.MM	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	- -
111	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	4	4	8	56	3,50	

NO.	NAMA	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
112	Juherman, S.Si, M.AP	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Mudah2an kedepan bisa dilaksanakan offline biar lebih fokus
113	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	AVERAGE	3,62	3,57	3,65	3,63	3,55	3,50	3,62	3,68	3,62	3,65	3,65	3,54	3,46	3,49	3,62	3,59			3,59	

**Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
20 s.d. 23 Juni 2022**

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
1	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	18	3	3	3	3	3	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Pak Nanang Subekti	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	85	72	3,00	
2	Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	4	4	4	4	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	3	3	4	4	4	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.		18	4	4	3	4	4	19	4	3	4	3	14	4	3	4	4	15	80	89	3,71	sudah cukup bagus, mohon bisa dipertahankan
3	Hj. Dewi Sartika. SE.MM	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	yahya amrullah taufik	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4,00	ke depannya diadakan pelatihan serupa dan jangan lupa dengan penyelenggaraan yang lebih baik bekerja sama dengan instansi saya Puslatbang KDOD di Samarinda mengadakan eVirtual Training seperti ini agar semakin banyak warga melek literasi regulasi terima kasih
4	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	18	3	3	3	3	3	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Fazlur	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3,00	Sdh baik Sdh baik Sdh baik
5	Amrih Wigati, S.Sos.MM	4	4	4	2	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	3	4	3	14		91	3,79	Agar ditingkatkan kegiatan ini Sebaiknya ada diklat offline juga agar kita lebih paham dan bisa aplikatif Kegiatan sudah ok dan bagus sangat bermanfaat
6	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	3	4	4	3	3	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judharikawan, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	93	3,88	
7	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16		96	4,00	
8	Dra Rorie Paulina MM	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	3	4	4	4	15	90	95	3,96	untuk ke Depan jk ada pelatihan untuk penugasan di berikan waktu agak panjang dengan melihat basic pendidikan dan pengalaman peserta krn kegiatan bimtek kali ini dari JFAK banyak yang tidak mempunyai basic di bidang hukum
9	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	4	4	3	3	3	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	3	4	3	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	-	18	3	4	3	4	4	18	3	4	4	3	14	3	4	3	4	14	90	85	3,54	Terima kasih atas ilmu yang diberikan. Sangat mencerahkan terkait konstitusi Semoga kegiatan sejenis dapat terlaksana untuk lapisan masyarakat lainnya.
10	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	3	4	3	3	3	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	4	3	4	3	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Bapak yang berpantun (Pak Nanda - maaf lupa nama bekakangnya)	18	3	3	3	4	3	16	3	4	3	3	13	4	3	4	3	14	95	81	3,38	Sudah diselenggarakan dengan baik. Para Narasumber sangat kompeten sekali, alhamdulillah mendapat insight yang sangat berharga krn background saya bukan hukum...meski masih harus mencerna lebih mendalam dan pelan2. Terima kasih sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan baik.
11	drg. Tince Arniati Jovina, MKM	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judharikawan, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	96	4,00	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
12	Dita Andriasari SH,MH	3	3	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.		20	4	3	3	3	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	87	3,63	diperlukan surat tugas agar pimpinan di kantor mengetahui sehingga bisa lebih fokus mengikuti kegiatan
13	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	4	3	3	3	4	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	4	3	3	4	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Fazlur	17	4	3	4	3	4	18	4	4	3	3	14	4	3	4	3	14	80	83	3,46	Jaringan internetnya terputus2
14	Firman, SKM., M. PH	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4,00	
15	Drs. Achmad Chodiq	3	4	3	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	19	2	4	4	3	3	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Mas Ami	16	3	3	3	4	4	17	4	4	3	3	14	3	3	4	4	14	89	80	3,33	layanan cukup Bagus agenda rutin tahunan sangat mencerahkan
16	Drs. Deni Ardiana	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	semuanya	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	85	72	3,00	Untuk dilanjutkan kegiatan seperti ini
17	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	4	4	4	4	4	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	-	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	0	12	4	4	4	4	16	95	91	3,79	Pelatihan agar dilakukan secara reguler
18	Harris Taruna Nugroho, S.T.	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Yahya Amarullah Taufik	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	96	4,00	
19	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Bp. Fazlur	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4,00	Waktu pelatihan pada jam kerja dibatasi 1 hari 1 sesi untuk memberikan kesempatan bagi peserta untuk menjalankan tugas di kantor dan lebih fokus mengikuti diklat MKRI
20	Indriyani, S.KM., M.Si.	3	3	3	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3,00	Secara keseluruhan, saya sangat puas dengan kegiatan yang diadakan oleh pusdik MKRI, semoga dapat kami terapkan ilmu yang telah kami terima di instansi kami masing-masing
21	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	..	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	92	96	4,00	
22	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	4	4	3	3	3	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Imam Margono	20	3	3	3	4	4	17	4	4	3	4	15	4	4	3	3	14	85	87	3,63	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
23	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	4	4	3	4	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	4	4	4	4	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.		20	4	4	3	3	3	17	3	4	3	3	13	3	4	4	4	15	90	86	3,58	
24	Ayurisy Dominata, S.I.P.,M.A.	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Suhardi	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	98	96	4,00	presensi 80% bisa dapat sertifikat, karena mustahil dalam belajar dapat nilai sempurna 100. dimana2 ada jeda toleransi. saya sudah presensi tapi tidak terekam shg merugikan jika tidak dapat sertifikat sementara saya merasa sudah absen.
25	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	3	4	3	3	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Sama rata	20	4	4	3	3	3	17	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	85	89	3,71	Mungkin bisa menggunakan bahasa yang lebih umum dan awam, karena tidak semuanya berbackground pendidikan hukum
26	Dr. Irhamahayati, S. Si, Apt.,MTI	4	4	3	3	3	3	Konstitusi dan Konstitusionalisme	20	4	4	3	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Panji	19	4	3	3	4	4	18	4	4	3	3	14	4	4	0	3	11	8	82	3,42	
27	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	4	4	3	3	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	22	4	4	4	4	4	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	-	20	4	4	4	4	3	19	3	4	3	4	14	4	4	4	4	16	90	91	3,79	perlu dilanjutkan untuk media yang lebih luas
28	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Pak Imam	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	0	12	4	4	4	4	16	99	92	3,83	
29	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	3	4	3	3	4	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	3	4	3	3	3	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.		17	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	3	3	3	3	12	91	84	3,50	
30	Ir. Anak Agung Istri Agung Widayawati	4	4	4	3	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	23	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Bapak Nanda Adytiansyah	20	3	4	3	4	4	18	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	95	92	3,83	Kegiatan ini perlu dilanjutkan dengan memperhatikan waktu pelaksanaan (jam pelajaran) setiap harinya agar jangan terlalu malam selesainya. Mengingat saya berdomisili di Prop Bali.
31	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	3	4	4	3	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	20	4	3	3	3	3	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.		16	3	3	3	3	3	15	4	3	4	3	14	3	3	3	3	12	85	77	3,21	usul untuk terus diklat utk semua KL dan masyarakat para tokoh masyarakat
32	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	4	4	3	3	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	20	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Bp. Nanda Adytiansyah	20	3	3	3	4	4	17	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	89	3,71	
33	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	4	4	4	3	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	4	3	4	4	4	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Moderator Materi: Sistem Infomasi Perkara Elektronik	19	4	4	3	4	4	19	4	4	3	3	14	4	3	4	4	15	92	90	3,75	---
34	Davip Arya Bhima, SE, MAB	3	3	3	1	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	16	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Mr/Mrs...	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	70	2,92	Durasi waktu bimtek agar di perpanjang
35	Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Nanda Adiansyah	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4,00	Baik lanjutkan Metode diklat ini sangat baik. Saya memperoleh pengetahuan yg lebih mendalam tentang hak Konstitusional Warga Negara.

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
36	Drs. H. Nahrudin, M.H	4	4	4	3	3	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22	4	3	4	4	4	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Yahya Amrullah	19	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	95	92	3,83	Tingkatkan inovasi pelayanan dan semangat pengabdian tngkatkan sosialisasikan tentang fungsi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi kepada semua kementerian/lembaga/ormas maupun warga negara Sangat bangga bila kami dapat kembali untuk mengikuti kegiatan seperti ini
37	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	3	4	3	4	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	3	3	4	3	3	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Pak Nanang	16	4	4	2	4	4	18	4	2	2	4	12	4	4	4	4	16	88	83	3,46	OBS tdk mendukung untuk visualisasi slide narasumber dg font kecil
38	AMAS, S.E., M.M.	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	pak Nando/moderator sistem perkara elektronik/maaf kalau keliru namanya	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	96	4,00	Kegiatan ini sangat bermanfaat untuk dan terutama para ASN terlebih para pimpinannya baik untuk eselon 1, 2,3 dan para pimpinan daerah diseluruh Indonesia. Yang paling utama adalah perbaiki terus menerus semua aspeknya agar kualitas layanan sebaik sempurna.
39	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	98	96	4,00	
40	Djati Witjaksono Hadi	4	4	3	3	3	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	3	4	4	3	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.		18	3	3	3	4	4	17	4	3	3	3	13	4	4	3	3	14	95	83	3,46	Untuk pelaksanaan praktek penyusunan surat permohonan peninjauan UU di MK agar ditambahkan sehingga tugas dapat disiapkan dengan baik. Waktu istirahat siang kiranya dapat ditambah, sehingga dapat digunakan untuk ibadah dan makan siang dengan cukup.
41	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Nanda Adytiansyah	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4,00	baik ditingkatkan
42	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	nanda	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	72	3,00	
43	SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	97	95	3,96	
44	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanda Adytiansyah	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4,00	
45	Puput Putri Sari, S.Si.	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Panji n Supardi	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	96	4,00	MK keren!!!	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN	
46	RAIS ROZALI, SH, MH	3	4	3	3	3	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	4	3	4	3	4	Intan Permata Putri, S.H., M.H	Nanda	18	3	3	2	3	4	15	4	4	4	4	16	0	4	4	4	4	12	70	80	3,33	
47	Desi Fitriani,SKM.MSi	3	3	3	3	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Pak.Fazrul	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	12	89	72	3,00	Belajar Hukum Itu Luar Bisa Smg Diklatnya ada setiap tahun utk Anggota AAKI jd tambah terpapar Krn saat ini dr berbagai latar belakang dan dianggap baru pengenalan. Pada hal ini suatu saat bs saja diperlukan oleh peserta baik secara individu/ kelompok. sekian Tq Bapak/ Ibu Panitia Very Goods👍👍
48	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	4	4	3	3	3	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	4	4	3	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Gardina	19	4	3	3	3	3	16	4	4	3	3	14	4	3	3	3	13	90	83	3,46	Perlu diperhatikan kesesuaian materi dengan waktu Sangat baik penyelenggaraan Diklat	
49	Tri Wahyu Wijayanti, S.M	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Hadian	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	96	4,00	Sangat baik Menarik Menambah wawasan tentang hukum	
50	Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	4	4	4	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	90	94	3,92		
51	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Hatika Al Shafa	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	98	96	4,00		
52	Siti Kholiyah, SAB, MAP.	3	3	3	3	3	3	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Edwin Rivano	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	95	72	3,00	Mohon bersabar dalam pendampingan membimbing Tugas, mohon maaf tugas saya belum benar. Bukan berarti narsum yang kurang tetapi kemampuan saya yang jalannya mulai perlahan	
53	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Gardania	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4,00	Desain layar saat presentasi agar untuk paparan mempunyai porsi yang lebih besar sehingga lebih kelihatan jelas tanpa harus membuka materi di window lain. Terimakasih	
54	Iswati Utamiputeri, S.Si., M.T.	4	4	4	3	3	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22	4	4	4	4	4	Intan Permata Putri, S.H., M.H	Pak Fajar	20	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	93	3,88	Semoga mencantumkan juga informasi nama-nama moderator selain narasumber tiap sesi. Kemudian, bisa terdapat menu edit ttd jika salah memasukkan ttd. Waktu pelatihan harian bisa selesai maksimal pukul 16.00. Lalu, perlu ada menu notes atau kuis menggunakan aplikasi penyajian data. Terima kasih	
55	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	3	3	3	3	3	3	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Intan Permata Putri, S.H., M.H	Sistem Informasi Perkara Elektronik	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	85	72	3,00	Semoga bisa dilakukan secara offline, karena bila secara online tidak terlalu fokus disambi dengan pekerjaan kantor	

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
56	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Bambang Sukmadi	20	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	98	95	3,96	Waktu pelaksanaan kegiatan mohon diperhatikan untuk peserta yang berasal dari Indonesia bagian Timur dan Tengah
57	Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	4	4	3	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	4	3	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		19	3	3	4	4	4	18	4	4	3	3	14	3	4	4	4	15	95	89	3,71	Mungkin perlu ada kegiatan lanjutan dengan offline
58	Yossi Apriliana, SE, M. AP	3	3	3	3	3	3	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	95	72	3,00	
59	Nurul Hasani	4	3	3	3	3	2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Intan Permata Putri, S.H., M.H	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	15	4	4	3	4	3	18	4	3	3	3	13	3	3	3	3	12	90	76	3,17	tampilan materi di simultan perlu diberikan kolom keterangan tambahan msalnya tanggal, krena yg skrg ga bsa bedain materi diunggah kpan trus nyampur sma yg bru dtambahkan atau dbuat folder, manajemen file aja
60	Ratih Purwandari Rusna,SKM	3	3	3	3	3	3	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Panji	15	4	4	3	4	3	18	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	86	75	3,13	
61	Setiowiji Handoyo, SE, ME	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Intan Permata Putri, S.H., M.H	Sistem informasi perkara elektronik	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	96	4,00	
62	Naufal Noor Rochman	3	3	3	3	3	3	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	72	3,00	
63	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	3	3	3	3	3	3	Sistem Informasi Perkara Elektronik	18	3	3	4	4	3	Rudi Kurniawan	Panji	17	3	3	3	3	3	15	3	4	4	3	14	3	3	3	3	12	88	76	3,17	
64	SISKA YUNI HARTANTI, SE	3	3	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22	3	4	3	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Edwin	18	4	4	4	4	4	20	4	4	3	3	14	4	3	3	3	13	90	87	3,63	Terimakasih saya ucapkan kepada panitia, narasumber, atas penyelenggaraan diklat ini, benar-benar menambah wawasan dan ilmu saya yang mempunyai basic ekonomi. dan membuat saya tertarik lebih mendalam ilmu hukum

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
65	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	moderator tanggal 22	20	4	4	4	4	4	20	3	4	4	4	15	4	4	4	4	16	99	95	3,96	Secara umum saya sangat puas dengan kegiatan ini. Hanya saja pelaksanaan post test mendadak di kelompok kami karena mendadak moderator di kelompok mengasikan untuk mengerjakan post test diluar jadwal yang sudah kami terima (seharusnya dimulai pada pukul 13.00), pelaksanaan post test yang diberikan waktu 20 menit juga menjadi terburu-buru karena dikerjakan pada saat sedang akan mendengarkan evaluasi jawaban dari penugasan. harap menjadi catatan karena secara umum hampir semua dilakukan sudah sesuai jadwal. Pelaksanaan diklat ini cukup on time dari awal hingga akhir, semua materi disampaikan oleh narasumber yang kompeten dan sangat menarik untuk disimak. hanya saja dari segi waktu, kami di Wilayah Indonesia Bagian Tengah kurang diuntungkan karena pada saat-saat tertentu penerimaan bertepatan dengan waktu ibadah sholat. Kami mengharapkan semua file record/rekaman pelaksanaan zoom meeting ini dapat kami unduh
66	Rina Christina, SH.MH.	3	3	3	3	3	3	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	4	4	4	4	4	Intan Permata Putri, S.H., M.H	yang ngasih kuis dan dapet souvenir	20	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	90	77	3,21	Recorder evaluasi dikirim ke peserta pengerjaan latihan tidak singkat waktunya perbanyak sesi latihan dan media evaluasi dibuat paparan jadi tidak hanya bicara saja
67	Siti Irma Suryani	4	4	4	4	3	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	23	4	3	4	3	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Moderator materi "Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"	18	4	4	3	4	3	18	4	4	3	3	14	4	3	4	4	15	90	88	3,67	Salah satu diklat yang paling asyik yang pernah saya ikuti. Dan juga, relevan dan bermanfaat. Ada integrasi praktek permohonan judicial review dari penyusunan permohonan hingga pengajuan permohonan menggunakan SIMPEL (versi SIMPEL-TEST) sehingga peserta mengalami keseluruhan proses secara langsung.
68	Tuti Kurnia	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	semuanya okeh	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4,00	Dapat menjangkau lebih luas masyarakat
69	Ir. Kemala Hayati, MT.	4	4	4	4	4	4	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Saiful Anwar, S.H., M.H.	Giradina	20	3	4	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	95	3,96	Pada saat sesi pelajaran teknik penyusunan permohonan pengujian UU terdapa UUD 1945 dapat diberikan contoh-contoh, sehingga pada saat mengerjakan soal latihan dapat lebih maksimal, karena tidak semua berlatar belakang hukum
70	Swasnita Sihotang, S.Kom	3	3	4	3	4	2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	4	4	4	3	3	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Yg hari terakhir	18	3	3	4	4	4	18	3	3	3	3	12	4	4	4	4	16	8	83	3,46	Mohon kebaikan hati panitia utk dpt memberikan link rekaman utk kegiatan bimtek ini. Terimakasih

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
71	Siti Annisa Silvia Rosa	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Bagus semua	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	96	4,00	
72	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	4	4	3	3	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	22	4	3	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Bapak Anang	19	3	3	4	4	4	18	4	4	3	3	14	4	3	3	3	13	90	86	3,58	
73	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	4	4	3	3	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	3	4	3	3	3	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Moderator pada materi Sistem Informasi Perkara Elektronik	16	3	4	3	3	3	16	4	4	3	3	14	4	3	3	4	14	87	80	3,33	
74	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	semua ok	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4,00	sangat bermanfaat
75	Sofia Yuniar Sani	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	pak Nanda	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4,00	tidak ada saran, karena penyelenggaraan dilakukan dengan sangat baik dari mulai di hari pertama hingga hari terakhir. Tim diklat mampu menghadirkan nara sumber yang qualified, dan mampu memberikan materi yang menurut saya berat dengan bahasa dan pembawaan materi dengan cara yang mudah diterima. Salut untuk para moderator yang bisa menjadi jembatan antara para narsum dengan peserta
76	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	4	4	4	4	4	4	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	20	4	4	4	4	4	20	4	4	3	4	15	4	4	4	4	16	97	95	3,96	
77	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	4	4	2	3	2	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	4	2	3	4	4	17	4	4	2	4	14	4	4	3	3	14		79	3,29	Alangkah lebih baiknya jika dilakukan secara luring agar Peserta lebih fokus dan pemahamannya lebih banyak yang didapat
78	Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Ananthia Ayu Devitasari, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	96	4,00	
79	Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	4	4	3	3	4	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Tantangan Dalam Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	20	3	3	4	4	4	18	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	91	3,79	Perlu tambahan waktu dan studi kasus pada Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 Ketentuan dalam mendapatkan sertifikat perlu adanya pembenahan. Karena Peserta yang mengikuti dari pagi sampai sore selama 4 hari, mengeluarkan dana berupa wifi akan merasa kurang bermanfaat jika tidak mendapatkannya

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
80	Sulikah, S. Ag.	4	4	3	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	22	4	4	3	4	4	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Nanang Subekti	19	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	97	92	3,83	Ada materi-materi (yang bagi di luar disiplin ilmu hukum) yang masih asing dan dalam penjelasannya kurang detail sehingga belum bisa dipahami, sementara tidak semua pertanyaan terjawab karena keterbatasan waktu. Mohon perhatiannya. Kegiatan ini amat sangat bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum, namun tentunya masih sangat terbatas yang bisa mendapatkannya bila dibanding dengan jumlah seluruh warga negara Indonesia. Upaya edukasi ini harus dilaksanakan secara lebih masif lagi agar merata meliputi seluruh rakyat Indonesia...mungkin salah satunya melalui kurikulum sekolah. Sekiranya ada diklat luring mohon kami diikutsertakan kembali agar lebih efektif dan efisien lagi ilmu dan penerapannya. Terima kasih yang setinggi-tingginya atas ilmu-ilmunya...barokallah.
81	NOVIA, ST	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4,00	Semoga bisa memberikan diklat lagi terkait materi-materi dasar-dasar hukum dan penegakan hukum lainnya
82	Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	88	72	3,00	
83	Reny Nirmala	4	4	4	4	4	4	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4,00	---
84	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4,00	secara keseluruhan pelaksanaan kerja sama sudah baik, namun terkadang terganggu di layar monitor tampilan tidak clear alias blur dan tayangan gerak di monitor buat kepala uyeng-uyeng.... materi inti belum mendalam dan tidak sesuai dengan judul kegiatan, yang mana tidak terdapat penjelasan hal22 apa saja yg menjadi kewenangan dari anggota dan pengurus AAKI, serta rambu-rambu etika dalam organisasi dan juga bgm menghadapi adanya gugatan dari masyarakat/LSM terkait rekomendasi yang disampaikan.
85	Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	3	4	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	19	4	3	3	3	4	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	0	17	3	3	3	3	4	16	3	4	3	3	13	3	3	4	4	14	90	79	3,29	baik baik baik

NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
86	Ansorzal Kurniawan.SE.MM	4	4	4	4	4	4	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Ery satia pamungkas	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	3	15	95	3,96	Sangat bermanfaat sekali dan menambah ilmu tetapi lebih baik tatap muka	
87	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Ananithia Ayu Devitasari, S.H., M.H.	Nanang Subekti	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	98	96	4,00	Kegiatan pelatihan PPHKWN melalui daring terlaksana dengan baik berkat arahan dari penyelenggara/panitia dengan informasi yang sangat clear Sistem informasi pendukung sangat mengakomodir kebutuhan informasi peserta yang mengikuti melalui distance learning Kegiatan pelatihan berikutnya dapat lebih efektif jika dilaksanakan melalui luring/offline
88	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	3	3	3	3	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	3	3	3	3	4	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.		16	4	3	3	3	4	17	4	4	3	3	14	4	4	3	3	14	90	81	3,38	
89	Suliyani, SKM, M.Epid	4	4	3	4	3	3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	21	4	3	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Iqbal	19	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	92	3,83	
90	Isfahriani Sari Nasoetion,SP	4	4	4	4	4	4	Konstitusi dan Konstitusionalisme	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	96	4,00		
91	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Bapak Imam Margono	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99	96	4,00	
92	Vice Admira Firnaherera, MPA	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	87	72	3,00	
93	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	4	4	4	4	4	4	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	Fazlur	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	96	4,00	
94	Juherman, S.Si, M.AP	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Moderator yg ada kuis2 nya	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	96	4,00	Mudah2an bisa diselenggarakan secara offline	
95	Sari Damayanti, SH	3	3	3	3	3	3	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	ERWIN / KELAS 5	15	3	3	3	3	3	15	3	4	3	3	13	4	4	4	4	16	90	77	3,21	KEREN,, IT MK sangat keren sekali..
96	MURTONO,SE.,M.Si.	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	98	96	4,00	---

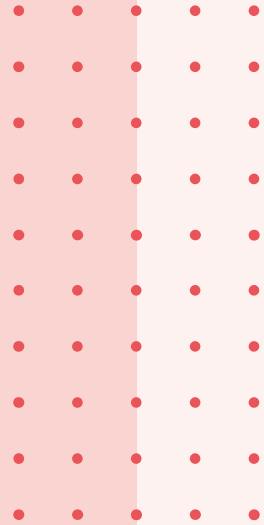
NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
97	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Hadian	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	0	12	10	92	3,83	sangat baik,, terimakasih.. mohon diagendakan kembali acara2 yang sama untuk AAKI
98	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.	bbbbbb	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	95	96	4,00	sudah bagus Baik semoga semakin bagus kedepannya
99	Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Nanang Subekti	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	0	4	12	99	92	3,83	Semoga lebih sering mengadakan diklat peningkatan kompetensi Analis Kebijakan dengan tema yang lain
100	Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.		20	4	4	4	3	4	19	4	3	3	3	13	4	4	4	4	16	80	92	3,83	
101	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	3	4	2	3	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Gardina	15	2	3	2	3	3	13	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	70	2,92	1) Kalo daring agar internet di host dan narasumber terjamin lancar dan stabil; 2) Narasumber jangan terbawa suasana peserta daring yang tidak semua konsen dan semangat, baiknya mampu membangkitkan semangat peserta; 3) Banyakin lagi narasi ujaran yang mempromosikan Perilaku Hidup Bersih dan SEHAT (PHBS), yang sudah spt. jangan lupa menggerakkan tubuh, siapkan sarapan, dll. Hindari mempromosikan merokok/udud/sudah asam rasanya (mulut), dll..... yang berpantun sudah ok namun agar pantunnya interaktif dengan peserta shg merangsang konsentrasi dan memikat lagi
102	Irawati, M.A.	4	4	4	4	4	4	Sistem Informasi Perkara Elektronik	24	4	4	4	4	4	Rudi Kurniawan	Nanda Adytiansyah	20	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	89	83	3,46	karena sinyal yang terkendala bukan pake wifi fiber..hy wifi mobile... luring atau kegiatan langsung bisa menjadi masukan agar lebih efektif, btw thanks ya.....jazakumullah khoir buat semua fasilitator yang bertugas dan yang menginisiasi. Terima Kasih..Wassalam....
103	Heri Kusmanta, M.P.A	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	98	96	4,00	
104	Siti Maesyaroh	3	3	3	3	3	3	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	moderator terakhir, lupa namanya	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	3	12	80	72	3,00	sudah cukup, tingkatkan

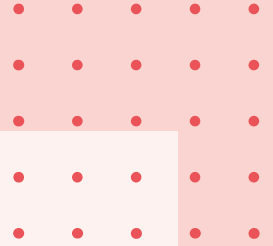
NO.	NAMA	1	2	3	4	5	6	MATERI MENARIK	SUM	7	8	9	10	11	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	SUM	12	13	14	15	16	SUM	17	18	19	20	SUM	21	22	23	24	SUM	SKOR	TOT	RATA RATA	SARAN
105	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	3	4	3	3	4	3	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	20	4	3	4	4	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum		18	4	3	3	4	3	17	4	3	3	4	14	4	3	3	4	14	90	83	3,46	
106	DECKY SUBARJA, S.Psi	4	4	4	4	4	4	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Adjie Samekto, S.H., M.Hum.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	99,9	96	4,00	Semoga pelatihan seperti ini ada berkesinambungan. Terus terang pemahaman dan pendalaman materi pancasila dan UUD 1945 jauh lebih baik di pelatihan ini dibandingkan yg saya dapatkan di bangku sekolah dan kuliah
107	YOGI TRACKA, SE.MM	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.		20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	90	96	4,00	_ _ -
108	DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	3	3	3	3	3	3	Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	18	3	3	3	3	3	Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum	Nanda Adityansyah	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	12	3	3	3	0	9	80	69	2,88	Sudah sangat bagus Sudah sangat baik Sudah sangat baik
109	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	4	4	4	4	4	4	Acara Penutupan	24	4	4	4	4	4	Rudi Kurniawan	.	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	100	96	4,00	...
110	Christa Gumanti Manik, MPH	4	4	4	4	4	4	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	24	4	4	4	4	4	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Semuanya Menarik	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	16	4	4	4	4	16	150	96	4,00	Sebaiknya kegiatan dimulai jam 9 pagi, karena jika terlalu pagi khawatir masih ada yg appel, dan rapat tim kedepan sebaiknya diadakan secara luring agar bisa roleplay kuis nya dibanyakin lagi supaya peserta byk dapet surprise hhhehehehe
AVERAGE		3,67	3,76	3,55	3,50	3,61	3,67		3,63	3,77	3,69	3,78	3,76	3,80			3,76	3,74	3,70	3,66	3,82	3,83	3,75	3,86	3,87	3,66	3,76	3,79	3,89	3,84	3,87	3,87	3,87	89,49		3,76	

TANTANGAN DALAM REAKTUALISASI IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA

ADJISAMEKTO

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Deputi Pengkajian Dan Materi BPIP 2018-2022

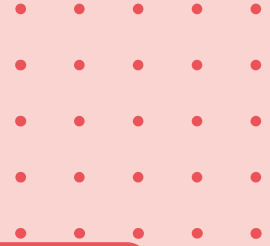




PEMAHAMAN MAKNA NILAI-NILAI PANCASILA (PERSPEKTIF FILSAFAT)



SUMBER NILAI
NILAI PANCASILA :
Pengalaman Bangsa
Indonesia



INDERAWI
Berdasar Fakta

EMPIRIS

AKAL
Berbasis Kesadaran

RASIONAL

KETUHANAN



KEMANUSIAAN



PERSATUAN



KERAKYATAN



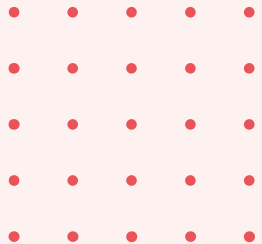
KEADILAN SOSIAL



Merupakan satu
kesatuan yang
terhubung/ tidak
terpisahkan

NO	NILAI	PEMAKNAAN / PENJABARAN	RUMUSAN
1.	Ketuhanan	Kehidupan manusia berasal dari Tuhan. Manusia dikonsepsikan dalam konteks makhluk Tuhan YME, bukan manusia dalam konteks individual.	Ketuhanan Yang Maha Esa
2.	Kemanusiaan	Manusia tidak dapat sendirian mengembangkan dunia, tetapi bersama-sama dari berbagai suku, ras dan agama.	Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
3.	Persatuan	Persatuan Indonesia adalah sikap aktif; cara merasakan, berpikir dan mempertahankan keberlanjutan hidup dalam suatu kebersamaan berdasarkan perasaan senasib dan kesamaan tempat hidup.	Persatuan Indonesia
4.	Kerakyatan	Di Indonesia, semua keputusan diambil berdasarkan kesepakatan karena ada kesadaran bahwa manusia sesungguhnya berdiri sejajar.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan
5.	Keadilan Sosial	Tujuan berkehidupan Negara Bangsa Indonesia adalah hidup bersama mewujudkan kesejahteraan umum melalui cara-cara yang mencerminkan keadilan social, dimana negara harus hadir.	Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

**KEDUDUKAN PANCASILA
DALAM KEHIDUPAN BERNEGARA -
BERBANGSA DAN BERMASYARAKAT
INDONESIA**





- Sebagai Dasar Negara
- Filosofische Grondslag

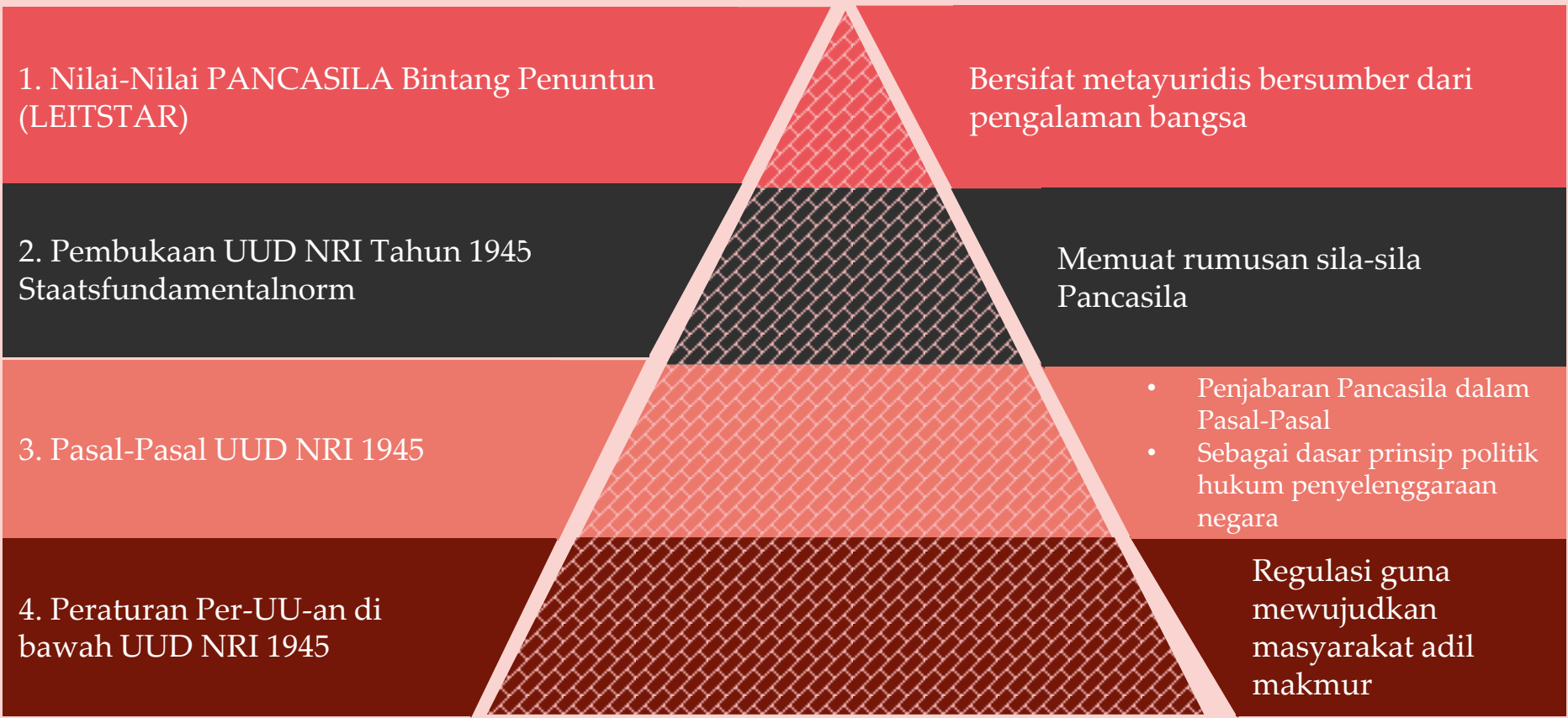
- Sebagai Weltanschauung
- Pandangan hidup
- Falsafah bangsa
- Paradigma : paying berpikir yang menuntun perspektif : ontology - epistemologi

- Sebagai Ideologi Bangsa
- Seperangkat pemikiran terpadu sebagai instrument untuk capai tujuan bersama

- Sebagai pemersatu bangsa
- Sebagai common denominator untuk tumbuhkan kebangsaan & persatuan

- Sebagai sumber segala sumber hukum negara

Kedudukan Pancasila
Dalam Bernegara, Berbangsa, Bermasyarakat
Indonesia





**PANCASILA
SEBAGAI LANDASAN MEWUJUDKAN
MASYARAKAT ADIL & MAKMUR
KONKRETISASI
NILAI-NILAI PANCASILA**



PEMBANGUNAN NASIONAL BERDASARKAN PANCASILA

Tujuan: Membangun Masyarakat Adil dan Makmur Menurut Pancasila

Unsur-unsur masyarakat adil makmur:

1. Terjaminnya sandang pangan dan papan
2. Ada jaminan kesehatan & pendidikan tiap warga Negara
3. Adanya jaminan hari tua setiap warga Negara
4. Jaminan setiap warga Negara dapat mengembangkan kehidupan kerohaniannya ;
5. Jaminan berkehidupan dalam lingkungan yang layak dan sehat;

Modal Utama Pembangunan Nasional

1. Religiusitas
2. Kepercayaan, Kemampuan, Keuletan Bangsa
3. Jiwa Gotong Royong
4. Semangat Cinta Tanah Air
5. Keunggulan SDM, Penguasaan teknologi, Kekayaan Alam

6. Posisi Geografis Sebagai Negara Kepulauan
7. BUMN, BUMD, UMKM Dan Koperasi
8. Kekuatan TNI-POLRI
9. Semangat Penyelenggara Negara
10. Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sasaran Pembangunan Nasional

1. [Bidang Mental, Agama, Rohani, Kebudayaan, Penelitian Pendidikan](#)
2. [Bidang Ekonomi Kesejahteraan, Kesehatan](#)
3. [Bidang Pertahanan & Keamanan](#)
4. [Bidang Pengelolaan SDA & Lingkungan Hidup](#)
5. [Bidang Hukum & HAM](#)
6. [Bidang Produksi & Pertanian](#)
7. [Bidang Distribusi & Perhubungan](#)
8. **Politik Luar Negeri**
9. **Bidang Komunitas, Lokalitas, dan Masyarakat Hukum Adat ;**
10. **Bidang Perhubungan ;**
11. **Bidang Maritim Dan Neg Kep**
12. **Bidang Kominfo**



**TANTANGAN
AKTUALISASI NILAI-NILAI
PANCASILA**

**Dalam kehidupan Bernegara,
Berbangsa, Bermasyarakat
di Era Kekinian**



TANTANGAN AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA

ASPEK SUBSTANTIF

1. Pancasila hanya dipahami sebagai penuntun perilaku;
2. Pancasila tidak dideskripsikan dalam penjelasan utuh;
3. Pancasila tidak dibahas dalam konteks kehidupan beragama;
4. Beraamnya historisitas Pancasila dalam ruang akademik;
5. Belum dapat ditemukan konkretisasi Pancasila

ASPEK BUDAYA

1. Dampak globalisasi & reformasi : dihilangkannya Pancasila dari ruang publik;
2. Pancasila hanya dipelajari sebagai ilmu pengetahuan, bukan sebagai ideologi;
3. Penerimaan setengah hati Pancasila oleh kalangan pendidik;
4. Ruang publik lebih didominasi diskursis keagamaan, daripada diskursus kebangsaan/persatuan;
5. Belum masifnya pembudayaan Pancasila.

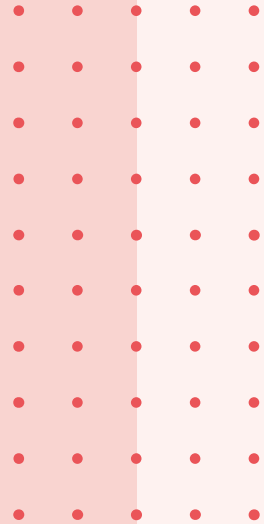
ASPEK KELEMBAGAAN

1. Pancasila belum menjadi landasan penyelenggaraan ekonomi & kesejahteraan bangsa;
2. Banyak regulasi yang masih belum sinkron dengan Pancasila dan UUD NRI 1945;
3. Praktik politik belum sepenuhnya mendasarkan pada pandangan hidup Pancasila
4. Pancasila belum utuh dikembangkan sebagai paradigma ilmu pengetahuan;
5. Birokratisasi.

TERIMA KASIH
SALAM
PANCASILA

ADJISAMEKTO

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Deputi Pengkajian Dan Materi BPIP 2018-2022



KONSTITUSI & KONSTITUSIONALISME

Dr. Fajar Laksono Suroso

KONSTITUSI

MAKNA GAGASAN:

- ▶ MASA KEKUASAAN RAJA-RAJA DAN NEGARA KOTA (POLIS) DI EROPA BARAT-ABAD 11 DAN 12
- ▶ TIDAK DAPAT DILEPASKAN DARI GAGASAN PERLINDUNGAN HAM, DEMOKRASI, NEGARA HUKUM
- ▶ SEKULARISASI KEKUASAAN DAN KONFLIK RAJA DAN PAUS (*DICTATUS PAPAE* OLEH PAUS GREGORIUS VII PADA 1075)
- ▶ DARI MANA SUMBER LEGITIMASI RAJA KALAU BUKAN DARI TUHAN? *SOCIAL CONTRACT*/PERJANJIAN MASYARAKAT/AJARAN KEDAULATAN RAKYAT (THOMAS HOBBS, JJ ROUSSEAU, JOHN LOCKE)
- ▶ DOKUMEN-DOKUMEN TERTULIS BERISI PRINSIP ORGANISASI PEMERINTAHAN DISEBUT PERJANJIAN, INSTRUMEN, KESEPAKATAN, DAN HUKUM DASAR, **BUKAN KONSTITUSI**
- ▶ BAHASA LATIN “CONSTITUTIO” (TINDAKAN PEMERINTAHAN TERTENTU), TIDAK ADA HUBUNGAN DENGAN APA YANG KITA SEBUT SEBAGAI KONSTITUSI

ISTILAH MODERN:

- ▶ ISTILAH “KONSTITUSI” DIGUNAKAN UNTUK MENYEBUT SEKUMPULAN PRINSIP FUNDAMENTAL PEMERINTAHAN, BARU DIMULAI KETIKA BANGSA AMERIKA MENDEKLARASIKAN KONSTITUSINYA PADA 1787
- ▶ KONSTITUSI: DOKUMEN TERTULIS YANG MENGGAMBARAKAN KESELURUHAN SISTEM PEMERINTAHAN, SEKUMPULAN ATURAN YANG MEMBENTUK DAN MENGATUR ATAU MEMERINTAH PEMERINTAH ITU SENDIRI (K.C. WHEARE)
- ▶ KONSTITUSI: KUMPULAN PRINSIP-PRINSIP YANG MENGATUR KEKUASAAN PEMERINTAHAN, HAK-HAK PIHAK YANG DIPERINTAH (RAKYAT), DAN HUBUNGAN DI ANTARA KEDUANYA (C.F. STRONG)
- ▶ KONSTITUSI BISA BERUPA SATU DOKUMEN ATAU KOMBINASI DARI HUKUM-HUKUM DASAR DAN KEBIASAAN

KONSTITUSIONALISME

MAKNA KONSTITUSIONALISME

- ▶ PAHAM MENGENAI PEMBATASAN KEKUASAAN DAN JAMINAN HAK-HAK RAKYAT MELALUI KONSTITUSI
- ▶ PEMBATASAN LEGAL TERHADAP PEMERINTAH SECARA SAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN WARGA NEGARA (ALAN S. ROSENBAUM)
- ▶ PEMBATASAN KEKUASAAN NEGARA *VIS A VIS* MASYARAKAT DALAM BENTUK PERLINDUNGAN HAM DAN IMPLEMENTASI PEMISAHAN KEKUASAAN NEGARA (LANE)
- ▶ HUKUM MENGATASI, MENGENDALIKAN, DAN MENGONTROL PEMERINTAHAN/POLITIK
- ▶ KEBEBASAN WARGA NEGARA DI BAWAH JAMINAN KONSTITUSI, SEKALIGUS PEMBATASAN KEKUASAAN NEGARA YANG DASAR LEGITIMASINYA BERASAL DARI KONSTITUSI
- ▶ DIEJAWANTAHKAN DALAM *RULE OF LAW*, DEMOKRASI, PERLINDUNGAN HAM, DAN LAIN-LAIN



ESENSI KONSTITUSIONALISME

- ▶ KEKUASAAN (POLITIK) TUNDUK PADA HUKUM.
- ▶ DIAKUIINYA JAMINAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK ASASI MANUSIA.
- ▶ ADANYA PERADILAN YANG BEBAS DAN MANDIRI.
- ▶ PERTANGGUNGJAWABAN PENYELENGGARA NEGARA KEPADA PUBLIK (AKUNTABILITAS PUBLIK) SEBAGAI SENDI UTAMA KEDAULATAN RAKYAT.

HUBUNGAN KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME

KONSTITUSI = WADAH
KONSTITUSIONALISME = ISI

- ▶ UNTUK MELINDUNGI HAM, KEKUASAAN PEMERINTAH HARUS DI DIBATASI DAN DIKONTROL SECARA TEGAS.
- ▶ UNTUK MERAH KONSTITUSIONALISME SEJATI, KONSTITUSI HARUS MENCAKUP ATURAN YANG **MEMUNGKINKAN DILAKUKAN KONTROL TERHADAP KEKUASAAN POLITIK** DAN **PERLINDUNGAN TERHADAP HAM**
- ▶ PEMISAHAN KEKUASAAN DAN JAMINAN HAK INDIVIDU SEBAGAI 'PERANGKAT' KELEMBAGAAN UTAMA BAGI SEBUAH KONSTITUSI

=====) **UNSUR KONSTITUSI DEMOKRATIS**

MATERI MUATAN KONSTITUSI

- KESEPAKATAN TENTANG CITA-CITA BERSAMA TERKAIT DENGAN TUJUAN BERNEGARA ATAU BERORGANISASI, DISERTAI OLEH PELBAGAI PRINSIP DASAR YANG DISEPAKATI BERSAMA,
- KESEPAKATAN TENTANG PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG MENGATUR DAN MENJAMIN HAK DAN KEWAJIBAN ASASI MANUSIA DAN WARGA NEGARA SERTA PENGATURAN TENTANG HUBUNGAN ANTARA WARGA NEGARA DENGAN INSTITUSI NEGARA DAN PEMERINTAHAN,
- PENGATURAN TENTANG BENTUK-BENTUK DAN POLA-POLA RELASI SERTA MEKANISME HUBUNGAN ANTAR FUNGSI DAN INSTITUSI NEGARA DAN PEMERINTAHAN, DAN
- PENGATURAN TENTANG PROSEDUR PEMBENTUKAN KESEPAKATAN DAN PERUBAHAN-PERUBAHAN KONSTITUSI.

MATERI MUATAN KONSTITUSI DEMOKRATIS

- ▶ PEMBATASAN KEKUASAAN NEGARA
- ▶ PERLINDUNGAN HAM
- ▶ **PROSEDUR PERUBAHAN KONSTITUSI**

PERUBAHAN KONSTITUSI

- ▶ PERUBAHAN KONSTITUSI ITU PERLU DAN HARUS DIFASILITASI
- ▶ KONSTITUSI YANG TAK BISA DIAMANDEMEN MERUPAKAN DOKUMEN PALSU DAN PENUH KEPURA-PURAAAN ATAU DOKUMEN BASA BASI.
- ▶ DALAM KONSTITUSI MODERN YANG BAIK, ATURAN UNTUK MELAKUKAN AMANDEMEN MERUPAKAN SATU BAGIAN YANG PENTING (FRIEDRICH)

- ▶ MEKANISME PERUBAHAN KONSTITUSI (**K.C. WHEARE**)
 1. PERUBAHAN RESMI (*FORMAL AMENDMENT*)
 2. KONVENSI KETATANEGARAAN (*CONSTITUTIONAL CONVENTION*)
 3. PENAFSIRAN PENGADILAN (*JUDICIAL INTERPRETATION*)

- ▶ **CARL SCHMITT** DAN **MAHFUD MD**:
FAKTOR KONFIGURASI POLITIK YANG BERKUASA PADA SUATU WAKTU.



TIGA TRADISI PERUBAHAN UUD

INSERT

- MENGUBAH MATERI UUD DENGAN LANGSUNG MEMASUKKAN (*INSERT*) MATERI PERUBAHAN KE DALAM NASKAH UUD. [PRANCIS, JERMAN, BELANDA]

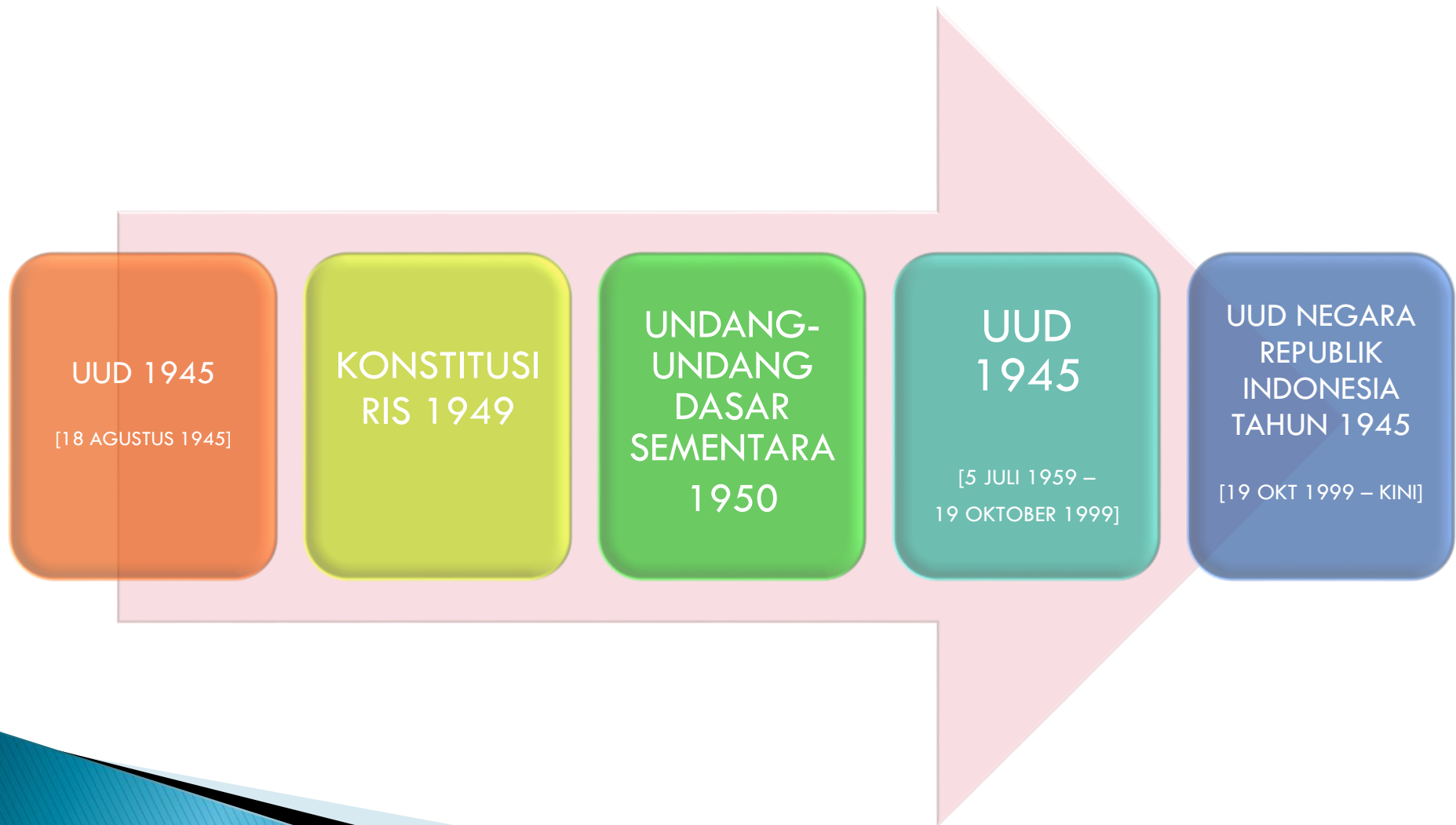
GANTI

- MENGGANTI NASKAH UUD, NASKAH KONSTITUSI SAMA SEKALI DIGANTI DENGAN NASKAH YANG BARU [PENGALAMAN INDONESIA KONSTITUSI RIS 1949 KE UUDS 1950]

ADDENDUM

- PERUBAHAN KONSTITUSI MELALUI NASKAH YANG TERPISAH DARI TEKS ASLINYA, YANG DISEBUT SEBAGAI AMANDEMEN. NASKAH ASLI UUD TETAP UTUH, PERUBAHAN DIPENUHI MELALUI NASKAH TERSENDIRI YANG DIJADIKAN *ADENDUM* TERHADAP NASKAH ASLI TERSEBUT.

PERKEMBANGAN KONSTITUSI INDONESIA



MENGAPA UUD 1945 DILAKUKAN PERUBAHAN?

- ▶ KONSTITUSI SARAT-EKSEKUTIF (*EXECUTIVE HEAVY*)
- ▶ TAK ADA MEKANISME *CHECKS AND BALANCES*
- ▶ TERLALU BANYAK PENDELEGASIAN KE UNDANG-UNDANG
- ▶ PASAL-PASAL AMBIGU/MULTITAFSIR
- ▶ TERLALU PERCAYA SERTA BERGANTUNG PADA *POLITICAL GOODWILL* DAN INTEGRITAS POLITISI

LIMA KESEPAKATAN DASAR

- ▶ MEMPERTAHANKAN PEMBUKAAN UUD 1945
- ▶ MEMPERTAHANKAN BENTUK NKRI
- ▶ MEMPERTAHANKAN SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL
- ▶ MEMASUKKAN MATERI MUATAN KONSTITUSI YANG SEMULA ADA DALAM PENJELASAN KE DALAM BATANG TUBUH UUD 1945
- ▶ MELAKUKAN AMANDEMEN UUD 1945 MELALUI BENTUK 'ADDENDUM', TANPA MENGHAPUS TEKS ASLI

PERUBAHAN UUD 1945

PASAL 37:

- 1) USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DAPAT DIAGENDAKAN DALAM SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT APABILA DIAJUKAN OLEH SEKURANG-KURANGNYA **1/3** DARI JUMLAH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.
- 2) SETIAP USUL PERUBAHAN PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DIAJUKAN SECARA **TERTULIS** DAN DITUNJUKKAN DENGAN **JELAS** BAGIAN YANG DIUSULKAN UNTUK DIUBAH BESERTA ALASANNYA.
- 3) UNTUK MENGUBAH PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR, SIDANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DIHADIRI OLEH SEKURANG-KURANGNYA **2/3** DARI JUMLAH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.
- 4) PUTUSAN UNTUK MENGUBAH PASAL-PASAL UNDANG-UNDANG DASAR DILAKUKAN DENGAN PERSETUJUAN SEKURANG-KURANGNYA **LIMA PULUH PERSEN DITAMBAH SATU** ANGGOTA DARI SELURUH ANGGOTA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT.
- 5) KHUSUS MENGENAI BENTUK **NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA** TIDAK DAPAT DILAKUKAN PERUBAHAN.



thank
you

SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD NRI TAHUN 1945

**Oleh:
Ni'matul Huda**

Disampaikan dalam acara “Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia” yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi RI, Bogor, 21 Juni 2022

CITA HUKUM (*RECHTSIDEE*) INDONESIA

- **Cita hukum bangsa Indonesia berakar dalam Pancasila, yang oleh para Bapak Pendiri Negara Republik Indonesia ditetapkan sebagai landasan kefilisafatan dalam menata kerangka dan struktur dasar organisasi negara sebagaimana yang dirumuskan dalam UUD 1945.**
- **Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengungkapkan pandangan bangsa Indonesia tentang hubungan antara manusia dan Tuhan, manusia dan sesama manusia, serta manusia dan alam semesta yang berintikan keyakinan tentang tempat manusia individual di dalam masyarakat dan alam semesta.**
- **Cita hukum Pancasila harus mencerminkan tujuan menegara dan seperangkat nilai dasar yang tercantum baik dalam Pembukaan maupun Batang Tubuh UUD 1945.**

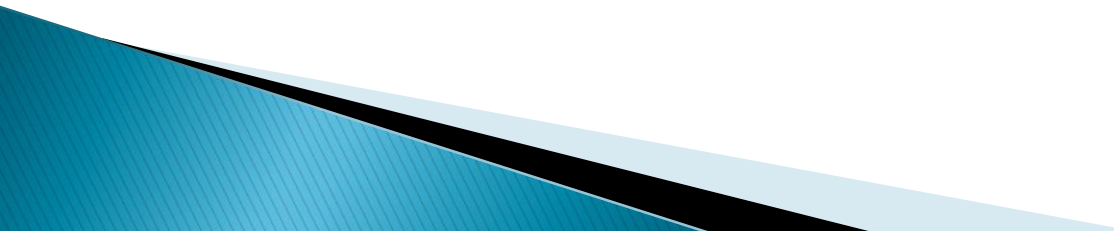
PANCASILA DAN PEMBUKAAN UUD 1945

- ▶ **Pancasila dan Pembukaan UUD 1945 dianggap sebagai norma dasar, sebagai sumber hukum positif. Rumusan hukum dasar dalam pasal-pasal yang terdapat pada badan (batang tubuh) UUD 1945 adalah pancaran dari norma yang ada dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila.**
- ▶ **Asas-asas Pancasila terkandung dalam dan merupakan bagian dari Pembukaan UUD 1945, sehingga dengan menyebut Pembukaan UUD 1945 saja, asas-asas itu akan dengan sendirinya telah tercakup.**
- ▶ **Selain disebut sebagai cita-cita hukum, bagi Pembukaan UUD 1945 ini ada istilah lain yang digunakan, yaitu *Grundnorm* dan *Staatsfundamentalnorm* atau “pokok kaidah fundamental negara” seperti digunakan oleh Notonagoro.**

HUBUNGAN PRESIDEN & PEMBANTU PRESIDEN

- ▶ Dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, penyelenggara kekuasaan eksekutif adalah presiden (*single executive*), yang dalam melaksanakan kewajiban, kewenangan, dan tugasnya dibantu oleh wakil presiden (Pasal 4 ayat (2)) dan menteri-menteri negara (Pasal 17 ayat (1)) UUD NRI Tahun 1945.
- ▶ Wakil Presiden dan Menteri adalah pembantu Presiden. Dengan kata lain, hubungan antara Presiden dengan Wakil Presiden dan Menteri tidak bersifat *collegial*.
- ▶ Salah satu konsekuensinya, dalam praktik diterima pandangan bahwa yang bertanggungjawab adalah Presiden.

REDUKSI KEKUASAAN PRESIDEN SETELAH AMANDEMEN UUD 1945

1. **Kekuasaan legislasi berkurang (Pasal 5 ayat 1)**
 2. **Pembatasan masa jabatan/periodisasi (Pasal 7)**
 3. **Dapat di *impeach* (Pasal 7A)**
 4. **Tidak dapat membekukan/membubarkan DPR (Pasal 7C)**
 5. **Hak prerogratif presiden berkurang (Pasal 13, 14, 15).**
- 

PENGUATAN KEWENANGAN DPR

1. **Memegang kekuasaan legislasi (Pasal 20)**
2. **Memiliki hak-hak interpelasi, angket dan menyatakan pendapat (Pasal 20A ayat 2)**
3. **Anggota DPR mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal 20A ayat 3)**
4. **Mengusulkan *impeachment* presiden dan/atau wakil presiden (Pasal 7A)**
5. **Memilih anggota BPK (Pasal 23F), Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3), Hakim Konstitusi (Pasal 24C ayat 3), dan KY (Pasal Pasal 24B ayat 3)**

SISTEM MULTI PARTAI & PRESIDENSIAL

- ▶ **Scott Mainwaring mengingatkan secara teoritis presidensialisme dan sistem multipartai adalah “kombinasi yang sulit” dan berpeluang terjadi *deadlock* dalam relasi eksekutif-legislatif.**
- ▶ **Sistem ini berpengaruh pada ketidakstabilan politik yang dapat berimbas pada inefisiensi kinerja pemerintahan, di antaranya adalah:**
- ▶ **1) fluktuasi kekuatan sistem presidensial tergantung dukungan koalisi partai politik; 2) sistem kepartaian multipartai tidak mendukung sistem presidensial; 3) tidak adanya koalisi permanen yang dapat mendukung pemerintahan selama masa lima tahun presiden terpilih; 4) adanya dugaan personalitas presiden terpilih yang menyebabkan lemahnya sistem presidensial; 5) adanya dugaan koalisi partai politik hanya untuk mendapatkan kekuasaan, bukan karena kesamaan visi dan misi; 6) kursi kabinet menjadi alat politik partai politik.**

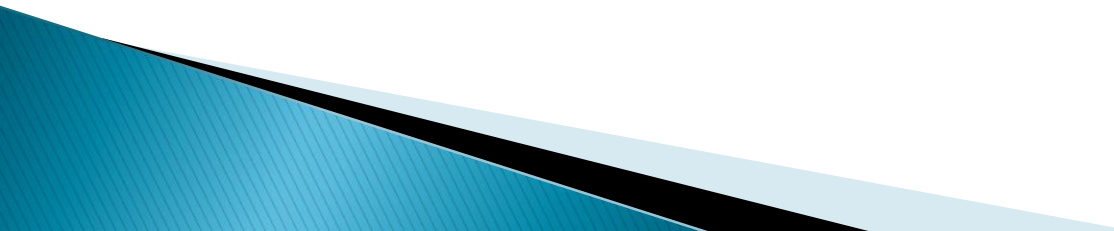
MAHKAMAH KONSTITUSI & EKSEKUTORIAL PUTUSAN

- ▶ **Di dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..”.**
- ▶ **Bagaimanakah tindak lanjut putusan MK (pengujian UU)?**
- ▶ **Bentuk hukum yang digunakan untuk menindaklanjuti putusan MK sangat beragam, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum terkait kedudukan dan tindak lanjut putusan MK. Misalnya diatur dengan PERMA, SEMA, PKPU, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Surat Edaran Menteri, Peraturan Menteri, dan lain-lain.**

Lanjutan

- ▶ **Siapakah yang akan bisa memaksa supaya Putusan Mahkamah Konstitusi ditaati dan ditindaklanjuti oleh lembaga negara lainnya? Putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya *declaratoir*, sehingga dilaksanakan atau tidak oleh Pemerintah atau DPR atau pun MA, sangat bergantung dari *political will* lembaga tersebut.**
- ▶ **Sifat yang *declaratoir* demikian tidak membutuhkan satu aparat yang melakukan pelaksanaan putusan MK. Eksekusi demikian dibutuhkan dalam jenis-jenis putusan pengadilan biasa *condemnatoir* yang menghukum salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, misalnya membayar sejumlah uang.**

GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH

- ▶ **Dalam konteks hubungan pemerintah pusat dan daerah, presiden juga dibantu oleh gubernur. Gubernur selain sebagai kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat juga sekaligus sebagai wakil pemerintah pusat.**
 - ▶ **Pengaturan terkait hal tersebut telah ditentukan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara, bahwa hubungan antara kementerian dan pemerintah daerah dilaksanakan dalam kerangka sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sesuai peraturan perundang-undangan.**
- 

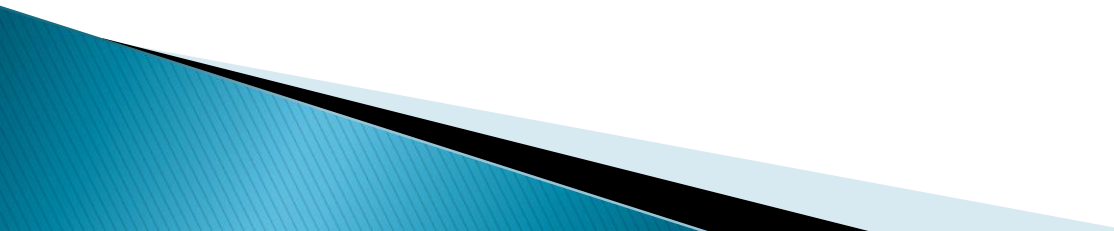
RELASI DEMOKRASI DENGAN DESENTRALISASI

- ▶ **Pandangan bahwa desentralisasi itu memiliki relasi kuat dengan demokratisasi didasarkan pada asumsi bahwa desentralisasi dapat membuka ruang yang lebih besar kepada masyarakat untuk terlibat di dalam proses pembuatan keputusan-keputusan politik di daerah. Kedekatan itu juga yang memungkinkan rakyat melakukan kontrol terhadap pemerintah daerah.**
- ▶ **Dengan demikian pemerintah daerah diharapkan memiliki akuntabilitas yang lebih besar lagi. Tanpa adanya akuntabilitas, rakyat di daerah bisa menarik mandat yang telah diberikan melalui pemilihan.**

PERDA MENGHAMBAT LAJU INVESTASI DI DAERAH?

- ▶ Terdapat 3143 Peraturan Daerah (Perda) baik perda provinsi maupun perda Kabupaten/Kota yang telah dibatalkan Presiden melalui Kementrian Dalam Negeri pada tahun 2016 silam.
- ▶ Menteri Tjahyo Kumolo menyatakan bahwa perda tersebut dibatalkan karena menghambat laju investasi di daerah.
- ▶ “Pemerintah Jokowi Batalkan 3.143 Peraturan Daerah”, diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160613184515-32-137842/pemerintah-jokowi-batalkan-3143-peraturan-daerah/> pada tanggal 25 Oktober 2017

PERDA BERMASALAH

- ▶ **Rekomendasi Menteri Keuangan kepada Menteri Dalam Negeri berkaitan dengan adanya sejumlah Perda yang dipandang bermasalah, adalah:**
 - ▶ **(1) Tumpang tindih dengan pajak pusat;**
 - ▶ **(2) Pungutan retribusi yang tidak sesuai dengan prinsip retribusi;**
 - ▶ **(3) Menimbulkan duplikasi dengan pungutan daerah;**
 - ▶ **(4) Menghambat arus lalu lintas barang;**
 - ▶ **(5) Berakibat meningkatnya beban subsidi pemerintah.**
- 

UU NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG IBUKOTA NEGARA

Pasal 1 angka 2:

- ▶ **Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.**

Pasal 1 angka 9:

- ▶ **Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.**

Pasal 1 angka 10:

- ▶ **Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.**

PASAL 5

- (1) Ibu Kota Nusantara berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat, serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional.**
- (2) Sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus, Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang ini.**
- (3) Dikecualikan dari satuan pemerintahan daerah lainnya, di Ibu Kota Nusantara hanya diselenggarakan pemilihan umum tingkat nasional.**
- (4) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara merupakan kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang berkedudukan setingkat menteri, ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden setelah berkonsultasi dengan DPR**

lanjutan

(6) Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara.

Catatan:

- ▶ **Mungkinkah ada otonomi dapat dilakukan tanpa adanya DPRD Provinsi?**
- ▶ **Peraturan Kepala Otorita setingkat apa? Apakah setingkat Perda (provinsi) atau Peraturan Menteri?**

UU NO. 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH

Pasal 187:

- ▶ **Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang disusun berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU.**

Pasal 189 ayat (1) pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;**
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;**

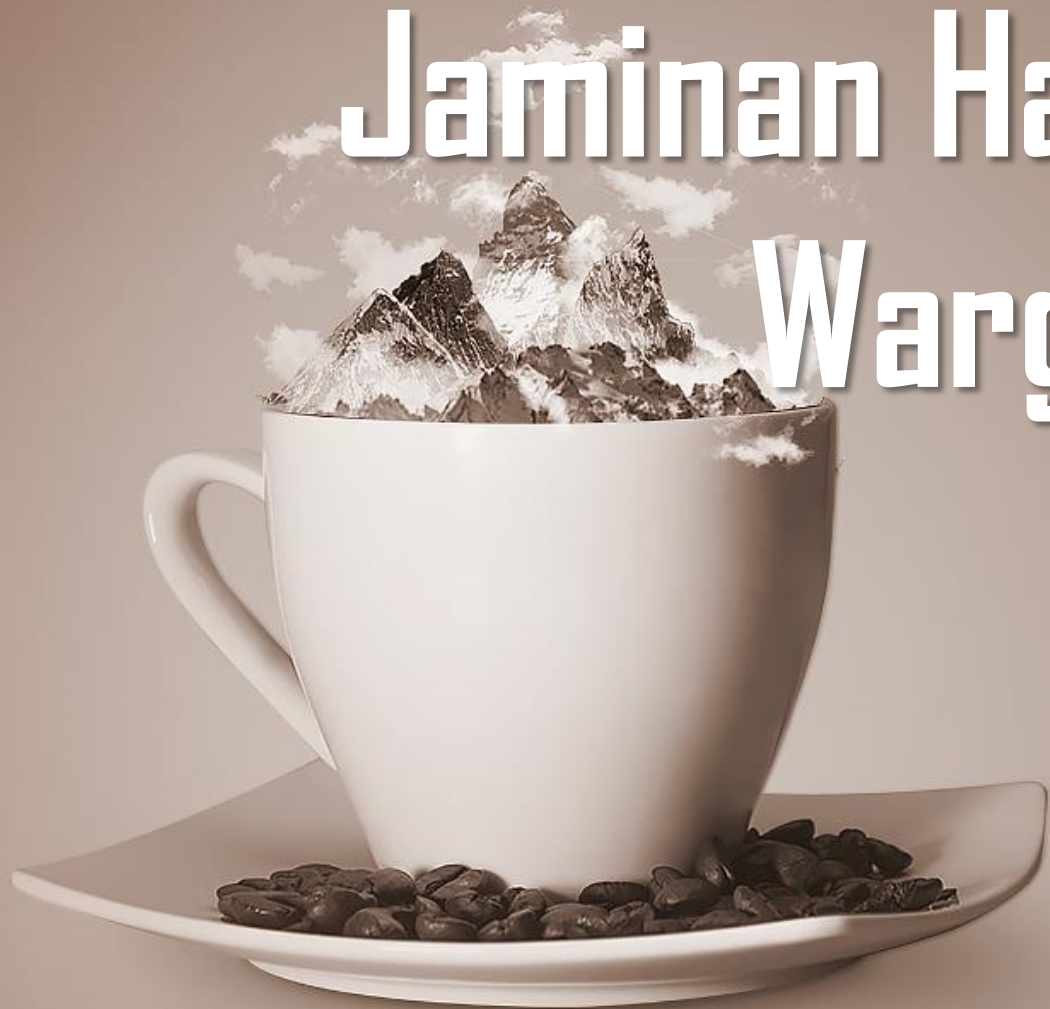
Ianjutan

- c. **Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai dengan Pasal 291, Pasal 296, Pasal 302, Pasal 324, dan Pasal 325 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan**
- d. **Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.**

lanjutan

- (2) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Pajak dan Retribusi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.**

Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara Dalam UUD NRI 1945



Judhariksawan



Hak Konstitusional

Seperangkat hak yang disepakati, diatur dan dijamin pemenuhannya dalam konstitusi (UUDNRI1945)

Constitutional Rights Dalam UUD NRI 1945



Citizen's Rights



State's Responsibility



Human Rights

State's Responsibility



Melindungi segenap bangsa,
memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa,
ikut melaksanakan ketertiban
dunia, serta mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia (Pembukaan UUD 1945,
alinea IV)

The Citizen's Rights



Pasal 26 UUD 1945

(1) Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara

(2) Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia

Hak Asasi Manusia (*Human Rights*)



*“Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk) Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang **wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang** demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”*

(UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

Universal Declaration on Human Rights



All human beings are born
free and *equal*
in dignity and rights.

Prinsip Dasar Hak Asasi Manusia



Universal



Kesetaraan



Non Diskriminasi



Inalienability



Indivisibility



Interrelated and
interdependent



State Responsibility

BAB XA UUD NRI 1945

Pasal 28A – 28J

Hak untuk hidup

Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan

Hak mengembangkan diri

Hak memperoleh keadilan

Hak atas kebebasan pribadi

Hak atas rasa aman

Hak atas kesejahteraan

Hak turut serta dalam pemerintahan

Hak wanita

Hak anak



Non Derogable Rights

Hak untuk hidup

Hak untuk tidak disiksa

Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani

Hak beragama

Hak untuk tidak diperbudak

Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum

Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

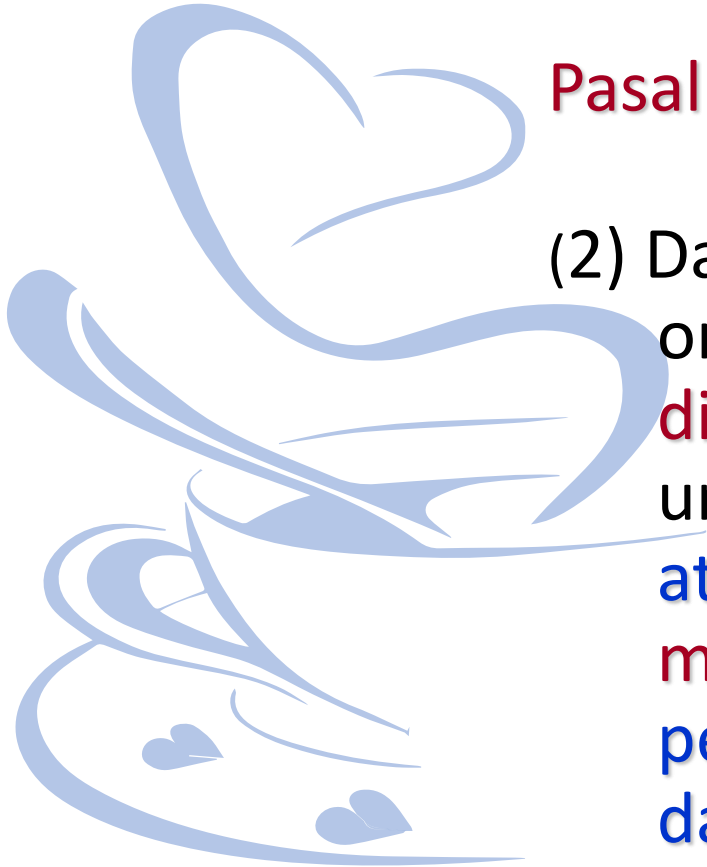
Tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun
(Pasal 28I Ayat 1 UUD NRI 1945)



Derogable Rights

Pasal 28J UUD NRI 1945:

(2) Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang **ditetapkan dengan undang-undang** semata-mata untuk **menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain** dan untuk **memenuhi tuntutan yang adil** sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu **masyarakat yang demokratis**.



Penegakan Hak Konstitusional

Mahkamah Konstitusi RI

*The Guardian of Constitution
The Sole Interpreter of Constitution*

Constitutional Review

Constitutional Complaint?



Penegakan Hak Asasi Manusia

Pasal 7 Ayat (1) UU HAM:

Setiap orang berhak untuk menggunakan semua **upaya hukum nasional dan forum internasional** atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.





Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum **mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut** hak seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU HAM

Pelanggaran HAM yang Berat

- Genosida
- Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Mekanisme Hukum Nasional



Mahkamah Konstitusi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia – UU HAM

Pengadilan HAM - UU No. 26 tahun 2000

(Pelanggaran HAM yang Berat: Genosida dan
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan)

Mekanisme Hukum Internasional

Dewan HAM PBB

Tribunal Ad Hoc – Dewan Keamanan PBB

International Criminal Court (Serious Crimes)



Thank You



E-mail: Judhariksawan@gmail.com

Professor of International Law, Human Rights and Media Law
Faculty of Law, Hasanuddin University
CEO and Founder the Riksawan Institute (www.riksawan.com)

“MAHKAMAH KONSTITUSI DAN HUKUM ACARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H.,M.H.

Peneliti Ahli Pada Hakim Konstitusi

Dewan Pakar IKA FH UNDIP 2021-2025

i.rachman@mkri.id dan Irfan_nrachman@yahoo.com

**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 2022**

Curriculum vitae



Nama : **Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.**

Jabatan : Peneliti Ahli Hakim Konstitusi, Speech Writer, Penulis Buku/Jurnal, Narasumber/Fasilitator Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi, Cisarua, Bogor

Riwayat Jabatan/Pekerjaan :

1. Asisten Ketua MK/Hakim MK 2015-Skg (Prof. Dr. Arief Hidayat)
2. Asisten Wakil Ketua MK 2013-2015 (Prof. Dr. Arief Hidayat)
3. Asisten Ketua MK 2010-2013 (Prof. Dr. Moh. Mahfud MD)
4. Panitera Pengganti Ad Hoc Pemilu Legislatif 2019
5. Panitera Pengganti Ad Hoc Pemilihan Kepala Daerah 2015
6. Panitera Pengganti Ad Hoc Pemilu Legislatif 2009
7. Peneliti di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara 2007-2010

Pendidikan:

1. Sarjana, Fakultas Hukum Unpad
2. Magister Hukum, Fakultas Hukum Univ. Indonesia
3. Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip

Pend. Non Formal:

1. Participant The 3rd Summer School of Association of Asian Constitutional Court and Equivalent Institution, Ankara, Turkey 2015
2. Judicial Recharging Programme ProCuria for Legal Officer, The Hague University, Netherlands 2018

Sistematika Materi

Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Aspek-Aspek Umum Hukum Acara MK

Hukum Acara Pengujian Undang-Undang

Bagian 1:

**KEDUDUKAN DAN
KEWENANGAN MAHKAMAH
KONSTITUSI**

Pengertian Konstitusi

Supreme Law of the Land

Konstitusi dapat dibedakan dalam arti sempit (UUD 1945) dan dalam arti luas (nilai-nilai dasar kenegaraan)

Konstitusi merupakan sumber bagi seluruh undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya di suatu negara

Dalam konteks supremasi konstitusi (*constitutional supremacy*), segala keputusan dan tindakan apa pun harus sesuai dengan konstitusi



Sejarah Judicial Review



**Mahkamah Agung
Amerika Serikat
Marbury v Madison
(1803)**



**Mahkamah
Konstitusi Austria
(1920)**



**Mahkamah
Konstitusi Republik
Indonesia
(2003)**

Model *Judicial Review*

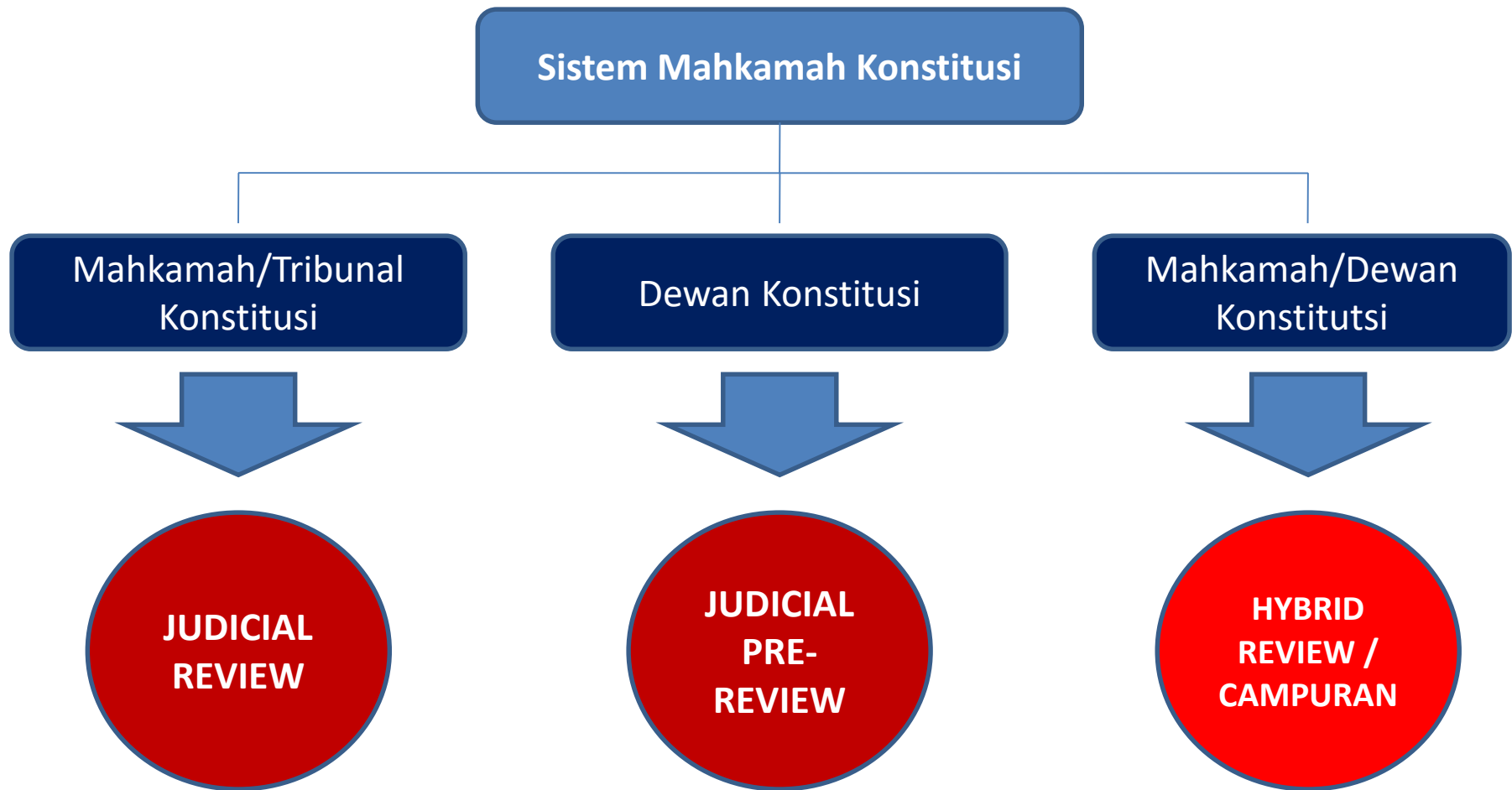
Sistem Terdesentralisasi / Sistem Amerika

- Terdesentralisasi di MA dan Pengadilan di bawahnya.
- Amerika Serikat, Canada, Australia, Filipina, India, Filipina, dsb.

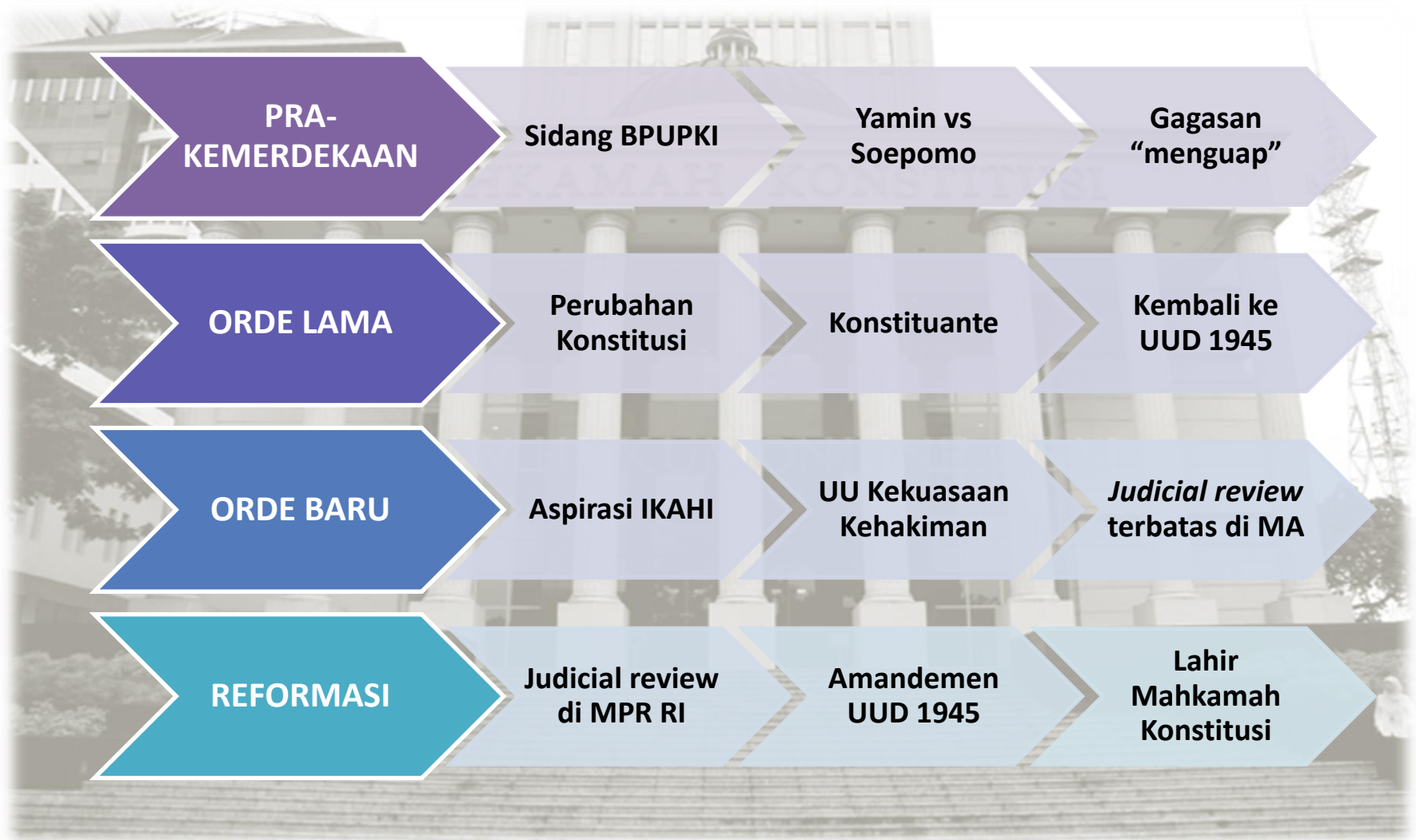
Sistem Terpusat / Sistem Eropa / Sistem Kelsenian

- Terpusat di Mahkamah Konstitusi
- Jerman, Austria, Turki, Korea Selatan, Afrika Selatan, Thailand, **INDONESIA**, dsb.

Model Mahkamah Konstitusi



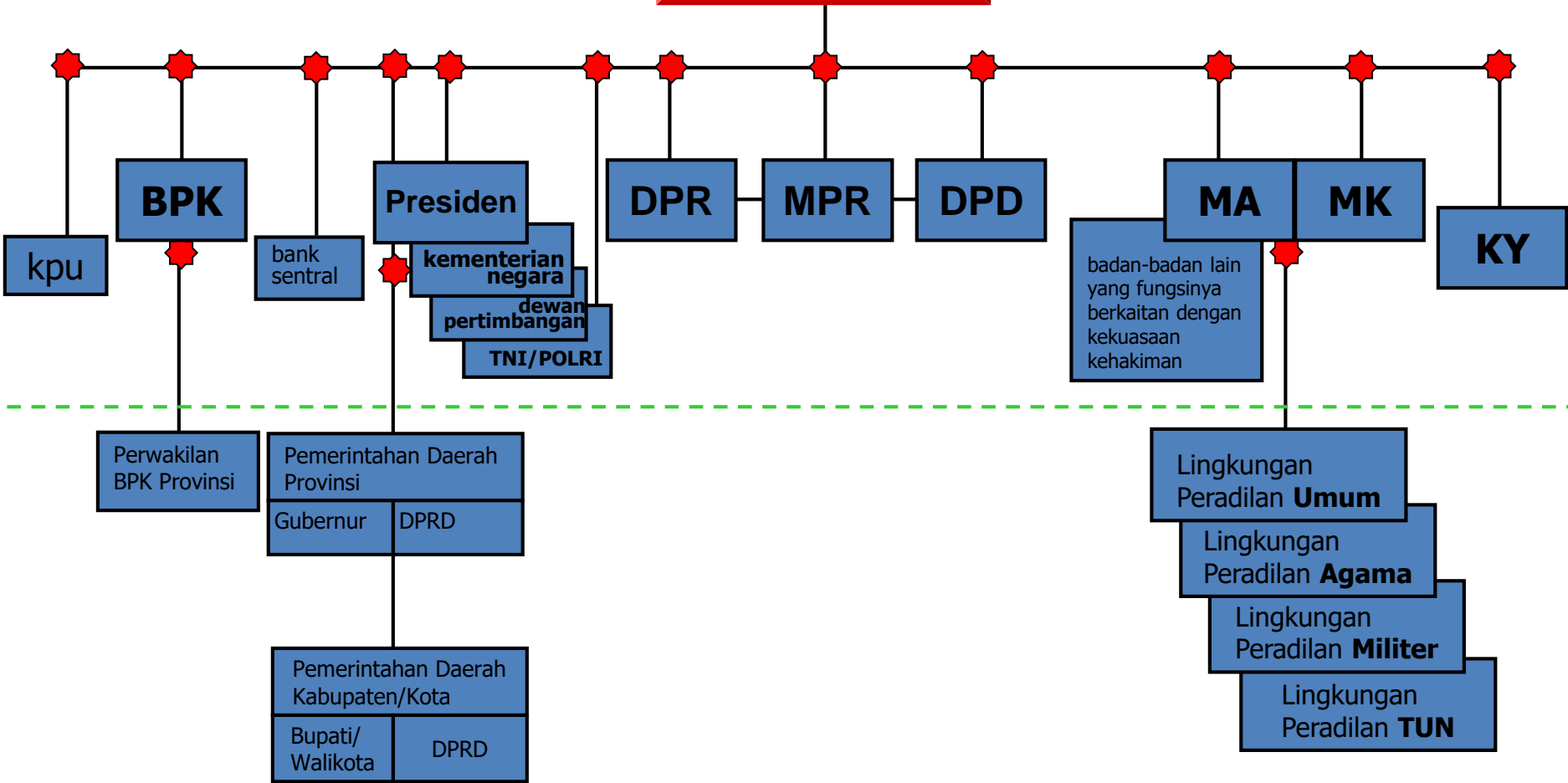
Sejarah Mahkamah Konstitusi Indonesia



Lembaga-Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUSAT

UUD 1945



DAERAH

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 
- Menguji UU terhadap UUD 1945

2

- 
- Memutus SKLN yang Kewenangannya diberikan oleh UUD 1945


3

- 
- Memutus Pembubaran Partai Politik

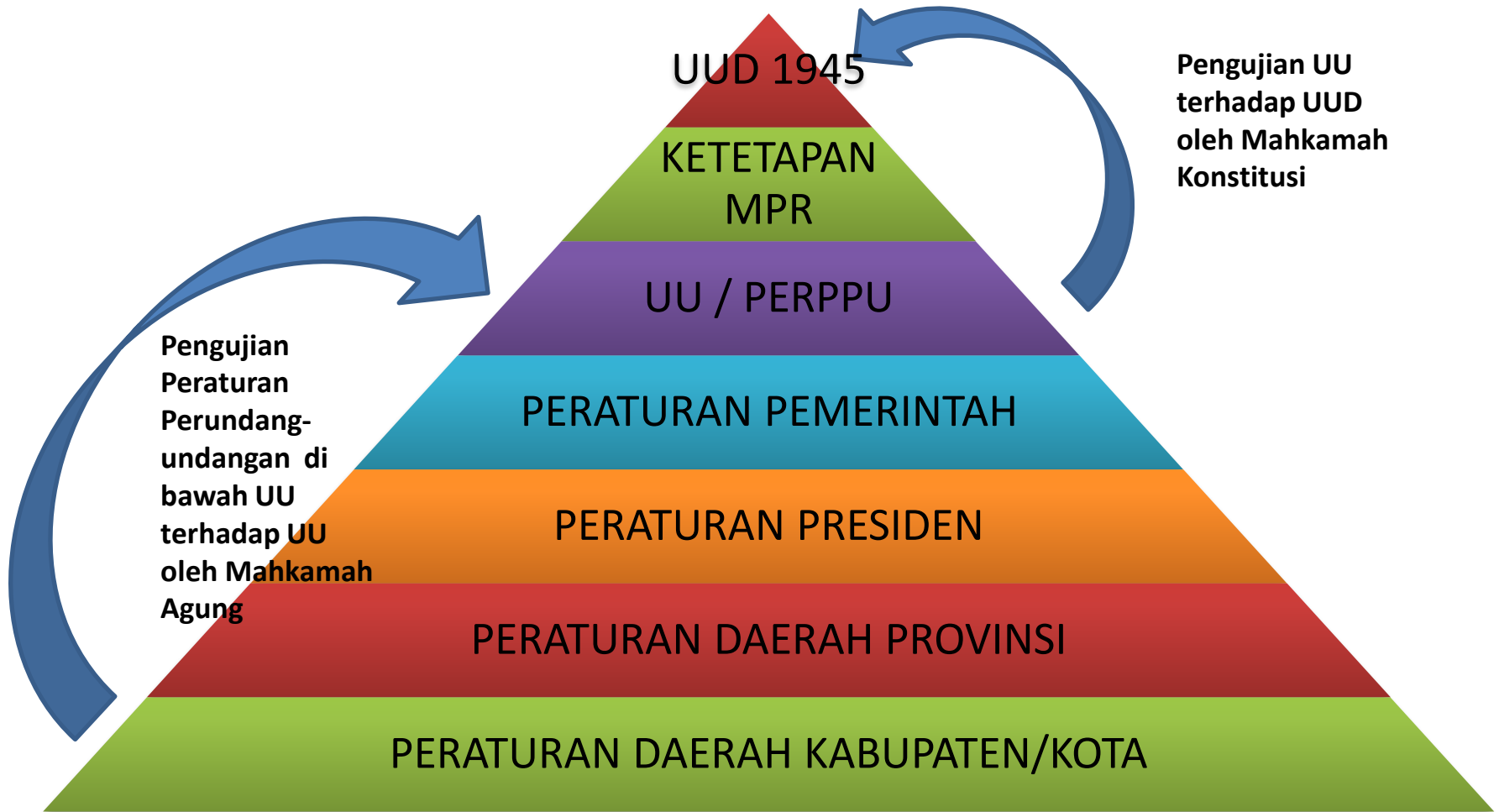
4

- 
- Memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

5

- 
- Memberikan Putusan atas Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden

Sistem Pengujian Peraturan Per-UU-an



Fungsi Mahkamah Konstitusi



The Guardian of the Constitution, Ideology, and Democracy



The Protector of Human Rights and Constitutional Citizen's Rights



The Final Interpreter of the Constitution

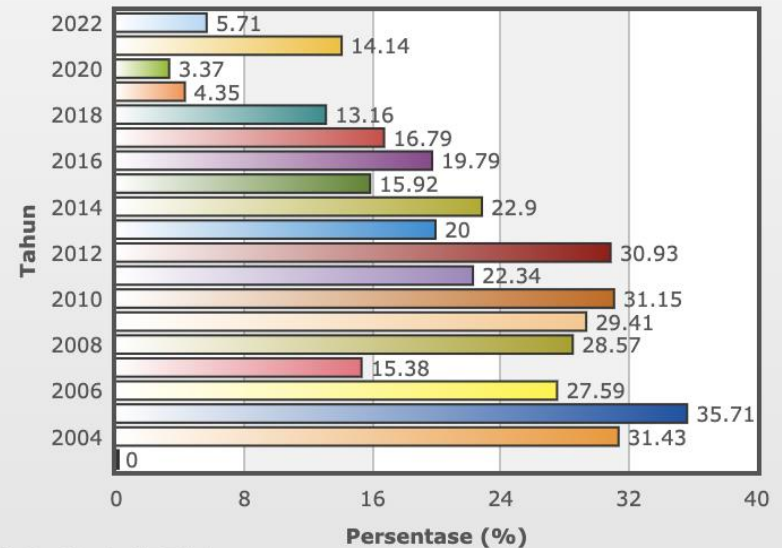
Statistik Putusan MK

(Update: 18 Mei 2022)

Rekapitulasi Putusan

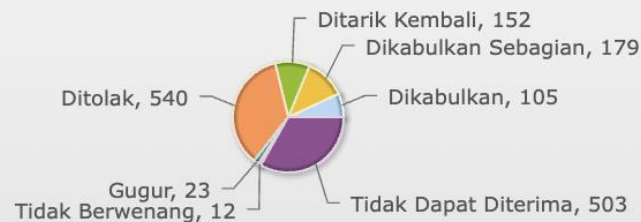
No	Perkara	Jumlah	Persentase
1	PUU	1514	45%
2	SKLN	29	1%
3	PHPU	676	20%
4	PHPKADA	1136	34%
Total		3355	100%

Grafik Putusan PUU Kabul (284) rata-rata: (18.76%)



FusionCharts XT Trial

Grafik PUU



FusionCharts XT Trial

Keterangan:

Belum ada perkara terkait dengan pembubaran partai politik dan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

10 UU Paling Banyak Diuji

No	Nama Undang-Undang	Jumlah
1	Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum	82
2	Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana	74
3	Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang	40
4	Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang	39
5	Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	38
6	Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewam Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36
7	Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	34
8	Undang-undang Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	33
9	Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat	26
10	Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	26

Bagian 2:

**ASPEK-ASPEK UMUM
HUKUM ACARA
MAHKAMAH KONSTITUSI**

ASAS-ASAS UTAMA

- *Independen and Imparsial*
- *Presumption of Constitutionality*
- *Audi et Alteram Partem*
- *Ius Curia Novit*
- *Erga Omnes*
- *Final and Binding*



PRINSIP PERSIDANGAN

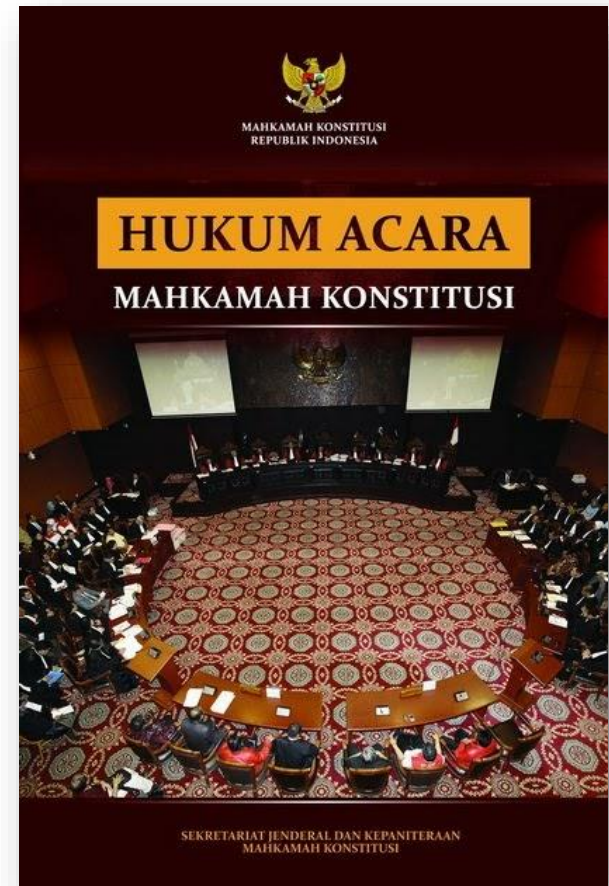
- Persidangan Terbuka untuk Umum, kecuali Rapat Permusyawaratan Hakim
- Peradilan Cepat, Sederhana, dan Tanpa Biaya
- Hakim bersifat Aktif dan Pasif
- Asas Pembuktian Bebas



HUKUM ACARA

Sumber Utama:

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang telah direvisi beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK)
4. Yurisprudensi Putusan MK
5. UU dan hukum acara umum lainnya



Bagian 3:

HUKUM ACARA

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Dasar Hukum Hukum Acara MK

1. UU 24/2003 sebagaimana telah diubah terakhir oleh UU 7/2020

[Ps.28 s.d. Ps.49] → Hukum Acara Umum

[Ps.50 s.d. Ps.60] → Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (tenggat 60 hr sejak BRPK utk Pengujian Formil sebagaimana Putusan Nomor 79/PUU-XVII/2019)

[Ps.61 s.d. Ps.67] → Hukum Acara SKLN

[Ps.68 s.d. Ps.73] → Hukum Acara Pembubaran Partai Politik (tenggat 60 hr)

[Ps.74 s.d. Ps.79] → Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan umum (tenggat 14 hr sejak BRPK utk Pilpres dan 30 hr sejak BRPK utk Pileg

[Ps.80 s.d. Ps.84] → Hukum Acara Pemakzulan Presiden.(tenggat 90 hr sejak BRPK.

[Ps.86 menyatakan MK dapat mengatur lebih lanjut bagi kelancara tugas dan wewenangnya.

2. PMK 2/2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mencabut PMK 9/2021 dan PMK 6/2005.

3. PMK-PMK Terkait Beberapa Kewenangan MK.

Jenis Pengujian

- Dapat dilakukan untuk seluruh UU, termasuk Perppu, yang terdiri dari pengujian materiil dan formil.
- Pengujian Materiil
 - Berkaitan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU atau Perppu
 - Tidak ada batas waktu mengajukan permohonan
- Pengujian Formil
 - Berkaitan dengan proses pembentukan UU atau Perppu
 - Batas waktu 45 hari
 - Yurisprudensi Putusan MK:
 - Diprioritaskan untuk diputus lebih dahulu dalam jangka waktu 60 hari
 - UU yang diuji dapat ditangguhkan oleh MK



PEMOHON

- Perorangan WNI, baik Perorangan maupun Kelompok yang mempunyai kepentingan yang sama
- Kesatuan Masyarakat Hukum Adat [Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945]
- Badan Hukum Publik atau Privat
- Lembaga Negara



FORMAT PERMOHONAN

- Identitas Pemohon atau Kuasanya terdiri dari:
 - Nama, TTL, Pekerjaan, Alamat Lengkap, dan Email
- Uraian Permohonan:
 - Kewenangan Mahkamah
 - Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)
 - Alasan permohonan (*Posita*)
 - Permohonan (*Petitum*)

Catatan: Seluruh permohonan yang sudah diregistrasi bisa diunduh melalui laman MK sebagai contoh



TAHAPAN PERSIDANGAN

- **Pemeriksaan Pendahuluan**
 - Penyampaian Pokok-Pokok Permohonan Secara Lisan.
 - Penyampaian Nasihat Oleh Hakim
 - Penyampaian Perbaikan Permohonan
- **Pemeriksaan Persidangan**
 - Pemeriksaan pokok permohonan; alat-alat bukti tertulis;
 - Mendengarkan keterangan Presiden/Pemerintah; DPR dan/atau DPD; saksi; ahli; Pihak Terkait;
 - Pemeriksaan alat-alat bukti
 - Penyampaian Kesimpulan
- **Pembacaan Putusan**



PARA PIHAK

- Pemohon
- Pihak yang didengar keterangannya:
 - DPR dan/atau DPD
 - Presiden
 - Lembaga Negara terkait;
 - Badan hukum publik/privat, organisasi kemasyarakatan, pihak lain yang diperlukan (*ad informandum judicem*)
- Pihak Terkait
 - Memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang diajukan



JENIS PUTUSAN

- **Ketentuan Umum:**

- Ditolak
- Dikabulkan
- Tidak Dapat Diterima (*NO*)

- **Perkembangan Putusan:**

- Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*)
- Tidak Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*)
- Penundaan Keberlakuan Putusan
- Pemberlakuan Putusan berlaku surut
- Perumusan Norma dalam Putusan





TERIMA KASIH



TEKNIK PENYUSUNAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG



PARA PIHAK

[Pasal 3 dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2021]

- a. Pemohon;
- b. Pemberi Keterangan; dan
- c. Pihak Terkait.

Ketiganya dapat diwakili oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa khusus dan/atau didampingi oleh pendamping berdasarkan surat keterangan

PEMOHON

**[Pasal 51 ayat (1) dan Penjelasan UU MK serta
Pasal 4 ayat (1) PMK 2/2021]**

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya undang-undang, yaitu:

- perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama)
- kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang
- badan hukum publik atau privat, atau
- lembaga negara

KERUGIAN HAK DAN/ATAU KEWENANGAN KONSTITUSIONAL

[Putusan MK No. 006/PUU-III/2005 dan No. 11/PUU-V/2007]

- *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- *adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
- *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*

PEMBERI KETERANGAN

[Pasal 54 UU MK dan Pasal 23 PMK 2/2021]

- ❑ Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada MPR, DPR, DPD, dan/atau Presiden
- ❑ Keterangan Pemberi Keterangan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon termasuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemberi Keterangan atau yang diminta oleh Mahkamah;

PIHAK TERKAIT

[Pasal 26 PMK 2/2021]

- ❑ Pihak lain selain Pemberi Keterangan diposisikan sebagai Pihak Terkait;
- ❑ Pihak Terkait adalah pihak yang berkepentingan langsung dan/atau tidak langsung dengan pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan langsung adalah pihak yang hak dan/atau kewenangannya secara langsung terpengaruh kepentingannya oleh pokok permohonan;
- ❑ Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung adalah pihak yang hak, kewenangan, dan/atau kepentingannya tidak secara langsung terpengaruh oleh pokok permohonan tetapi karena kepeduliannya terhadap permohonan dimaksud;

PERMOHONAN

(Pasal 1 UU MK, Pasal 2 PMK 2/2021)

- ❑ Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 atau pengujian Perppu terhadap UUD 1945
- ❑ Permohonan pengujian undang-undang dan Perppu meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil
- ❑ Pengujian materiil adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945
- ❑ Pengujian formil adalah pengujian yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu

PENGAJUAN PERMOHONAN

[Pasal 29, 30, 31 UU MK dan Pasal 9, 10 PMK 2/2021]

1. Permohonan dapat diajukan secara luring atau daring;
2. Berkas permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia sebanyak 1 eksemplar asli yang ditandatangani oleh Pemohon/Kuasa Hukum;
 - b. Fotokopi identitas Pemohon/kuasa hukum dan surat kuasa;
 - c. AD/ART;
3. Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Identitas Pemohon dan/atau kuasa hukum;
 - b. Kewenangan Mahkamah;
 - c. Kedudukan hukum Pemohon;
 - d. Alasan permohonan; dan
 - e. Petitum.
4. Permohonan diajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar asli disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar. Alat bukti sekurang-kurangnya memuat: 1) salinan undang-undang atau Perppu, setidaknya-tidaknya bagian atau bab yang dimohonkan pengujian termasuk halaman depan dan halaman yang memuat tanggal pengundangan dari Salinan undang-undang atau Perppu; dan 2) salinan UUD 1945.

IDENTITAS PEMOHON

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Nama Pemohon dan/atau kuasa hukum;
2. Pekerjaan;
3. Kewarganegaraan;
4. Alamat rumah/kantor;
5. Alamat surat elektronik.

Jakarta, ...

Kepada Yth.
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Hal: Permohonan Pengujian Materil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ...
terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H.
2. ..., S.H., LL.M., dan
3. ..., S.H.

Para Advokati Kuasa hukum pada kantor ..., beralamat di ..., berdasarkan surat kuasa hukum nomor ... tanggal ..., baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

2. Nama : ...
Tempat/Tanggal Lahir : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Kesemuanya selanjutnya disebut **Para Pemohon**

KEWENANGAN MAHKAMAH

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kewenangan Mahkamah
2. Objek permohonan
3. Simpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan ...
2. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan ...
3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang ... (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan ...
4. Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas Pasal ... Undang-Undang Nomor ..., yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
5. Oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

KEDUDUKAN HUKUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

1. Dasar hukum kedudukan hukum Pemohon
2. Penjelasan hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dianggap dirugikan dengan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian
3. Simpulan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK, menyatakan
2. Penjelasan 51 ayat (1) UU MK, menyatakan...
3. Mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai Pemohon, dan adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional dari Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang;
4. Kualifikasi para Pemohon dalam permohonan ini adalah sebagai ...
5. Mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang, yakni harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana diuraikan dalam Putusan Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, sebagai berikut...
6. **Pemohon I** adalah warga negara Indonesia ...
7. **Pemohon II** adalah warga negara Indonesia ...
8. Bahwa Pasal ...
9. Berdasarkan alasan-alasan di atas para Pemohon mengalami kerugian konstitusional dengan diberlakukannya pasal-pasal yang dimohonkan pengujian, sehingga dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

POSITA

[Pasal 10 PMK 2/2021]

- Penjelasan mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945; atau
- Penjelasan bahwa materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu bertentangan dengan UUD 1945.

Uraikan secara detail dalil Pemohon disertai dengan dasar hukum dan argumentasi yuridis mengenai pembentukan undang-undang atau Perppu tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 atau pertentangan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari Undang-Undang dengan UUD 1945, disertai bukti-bukti yang berkaitan dengan dalil permohonan.

PETITUM

[Pasal 10 PMK 2/2021]

Hal-hal yang diminta untuk diputus (*petitum*):

Pengujian Formil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa pembentukan undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu berdasarkan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Pengujian Materil, meliputi:

- a. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- c. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Lanjutan ...

Atau Petitem inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*)

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai ...;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

The background features a dynamic, wavy pattern of red and white. The red is a vibrant, saturated color, while the white is a clean, bright white. The waves are fluid and organic, creating a sense of movement and depth. The text is centered over this background.

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3

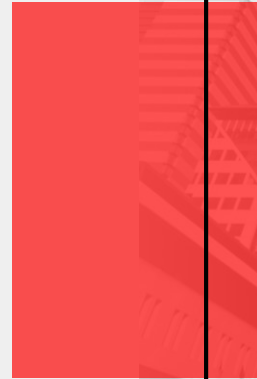
Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval

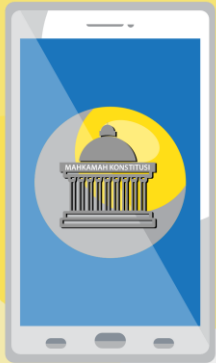
4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.

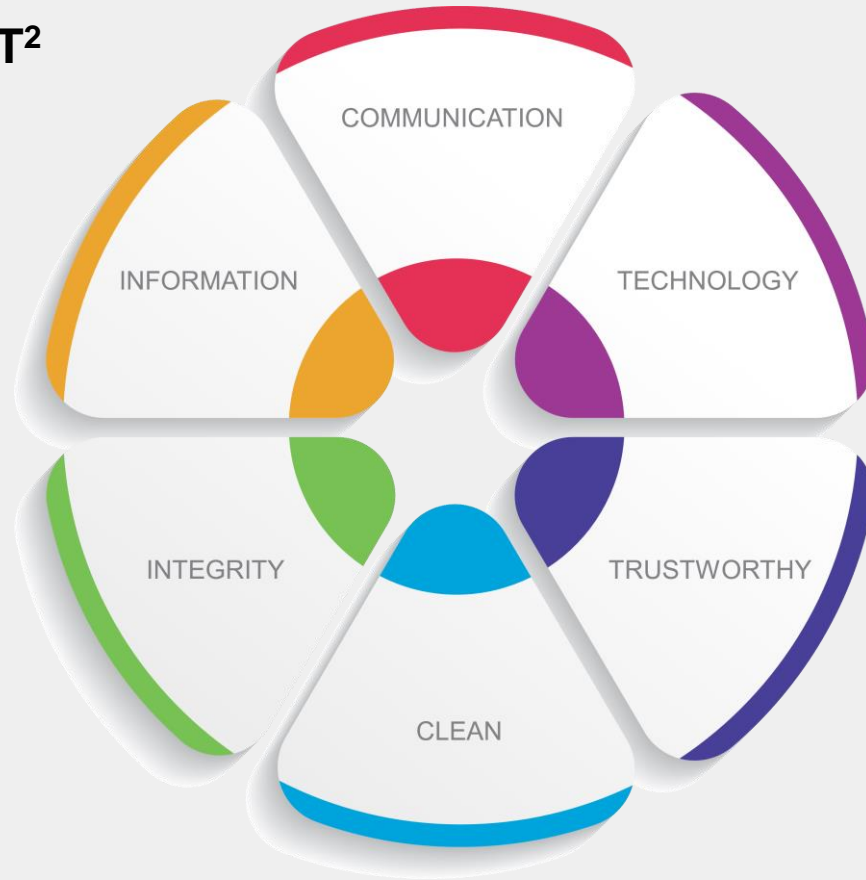




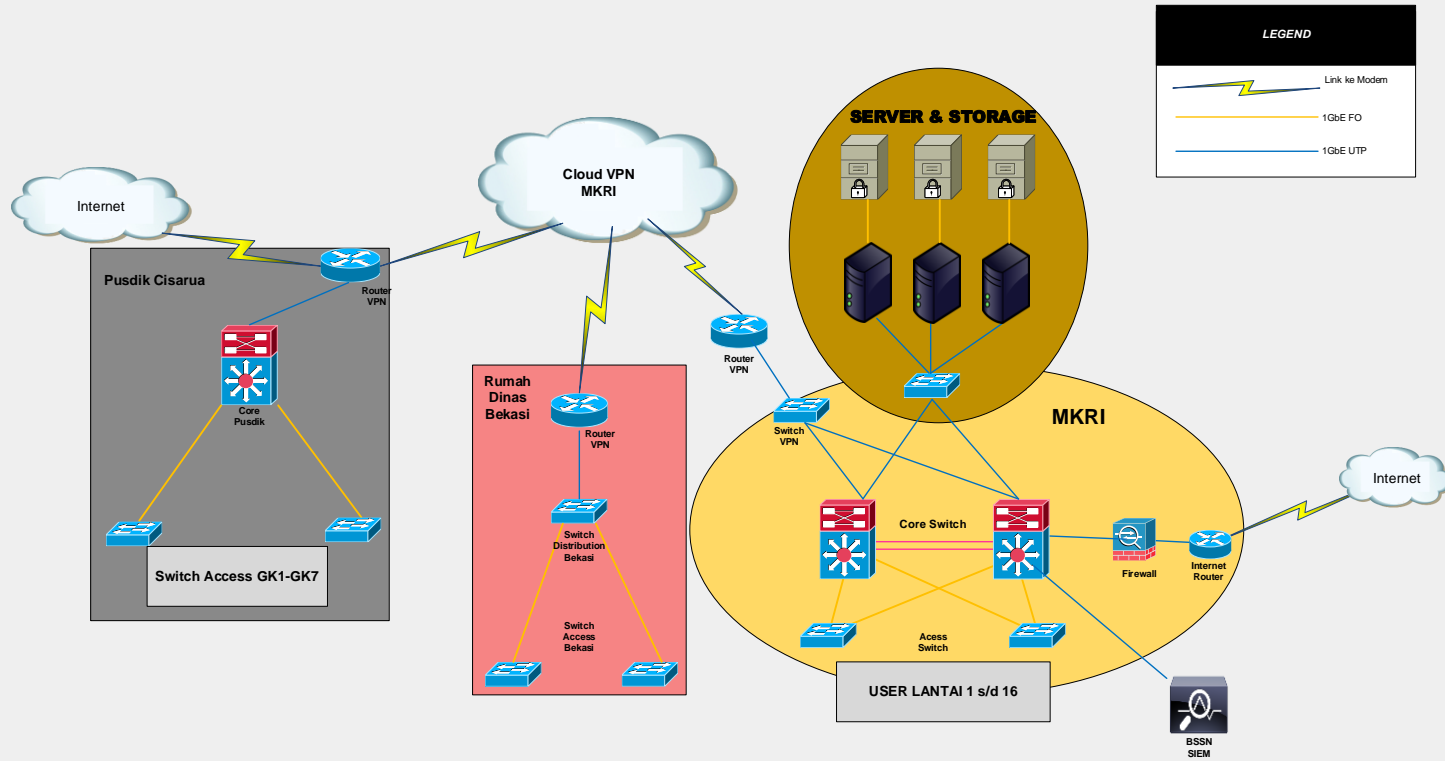
Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

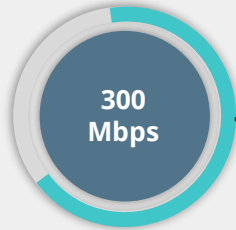
PENGERTIAN ICT²



TOPOLOGI MAHKAMAH KONSTITUSI



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



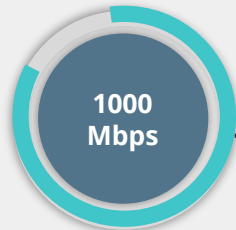
**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



**Bandwith 1000 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll

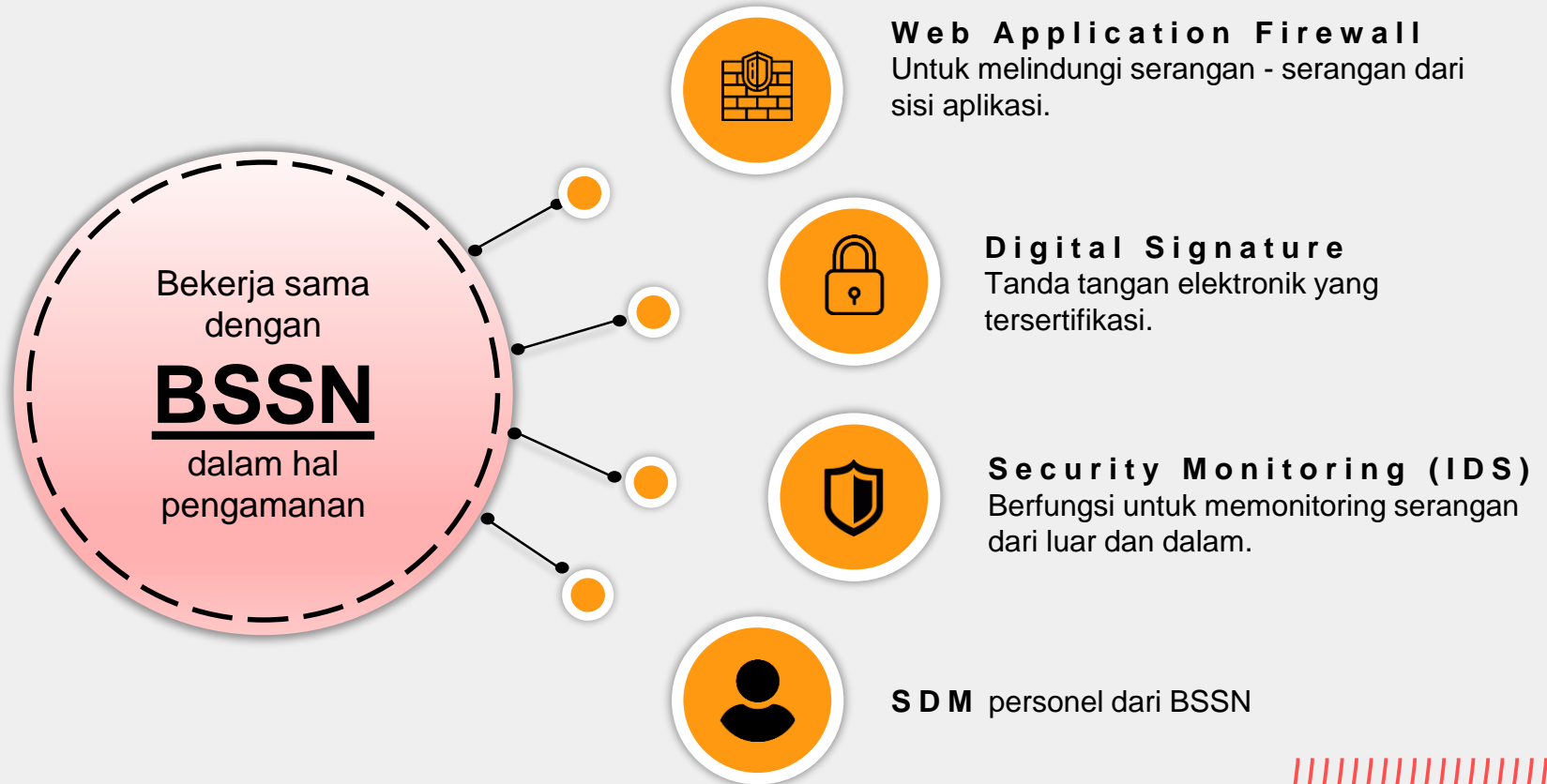


MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara luring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:

Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.



PERSIDANGAN VIRTUAL



You Tube
Diakses melalui
Youtube Mahkamah
Konstitusi



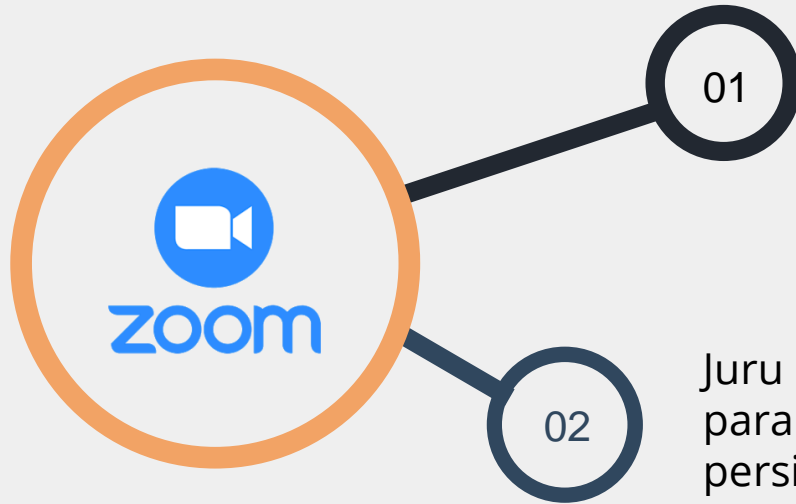
MKRI.ID
Live Streaming
Diakses melalui
Website Mahkamah
Konstitusi



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (ZOOM)



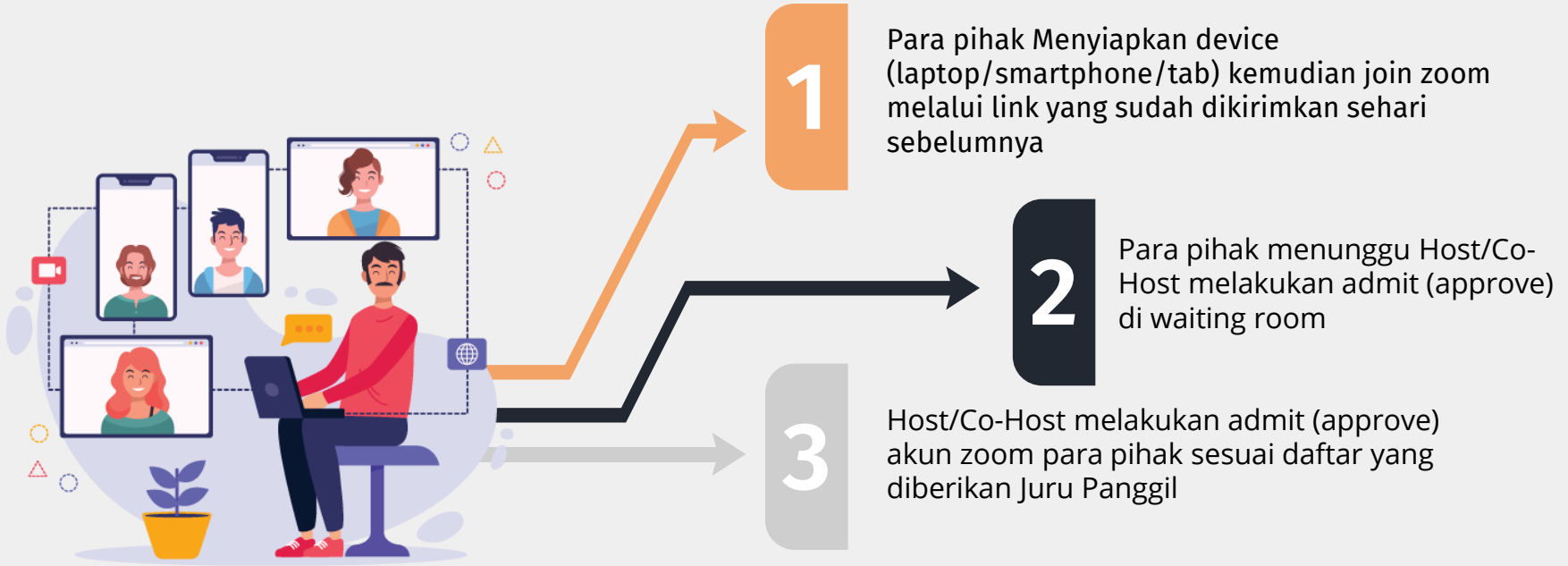
TAHAP PERSIAPAN



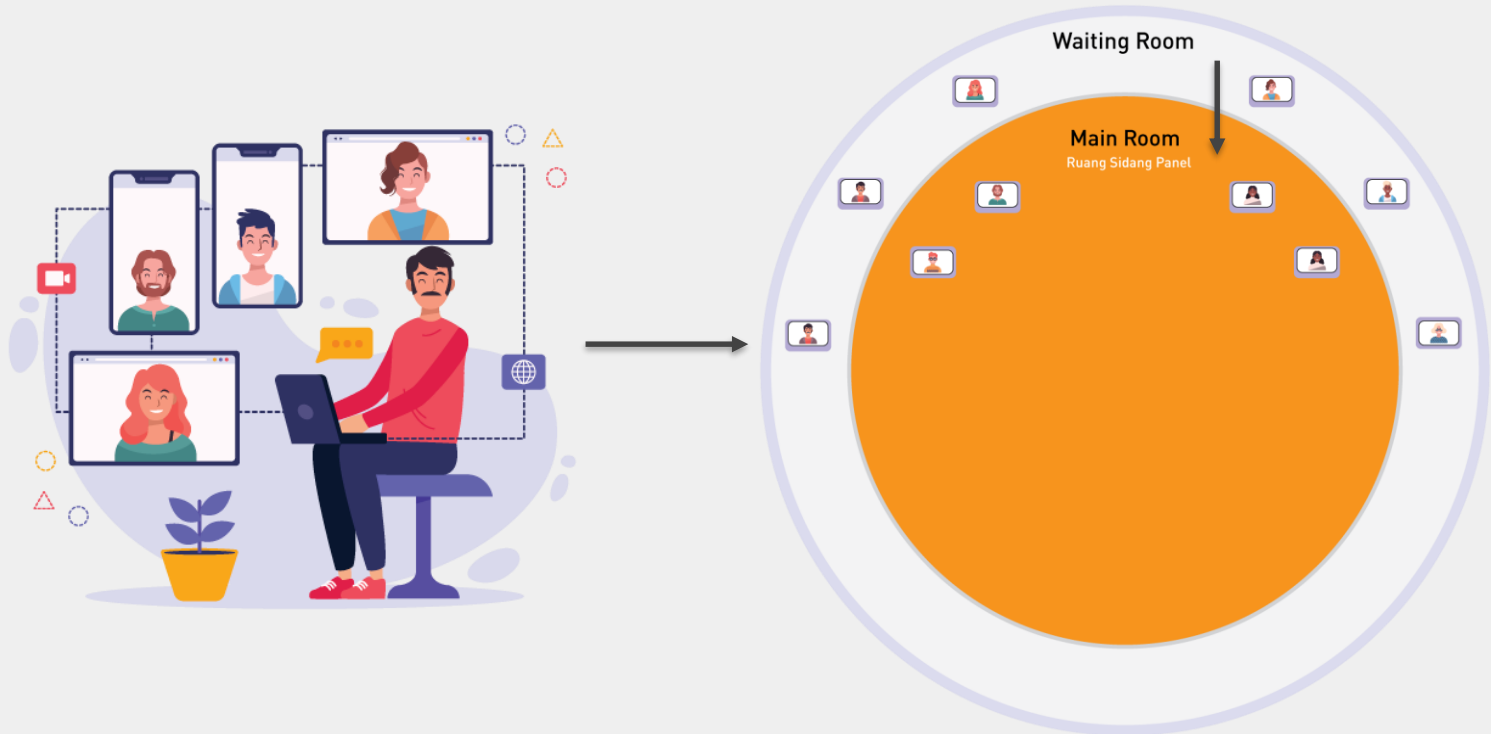
01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan

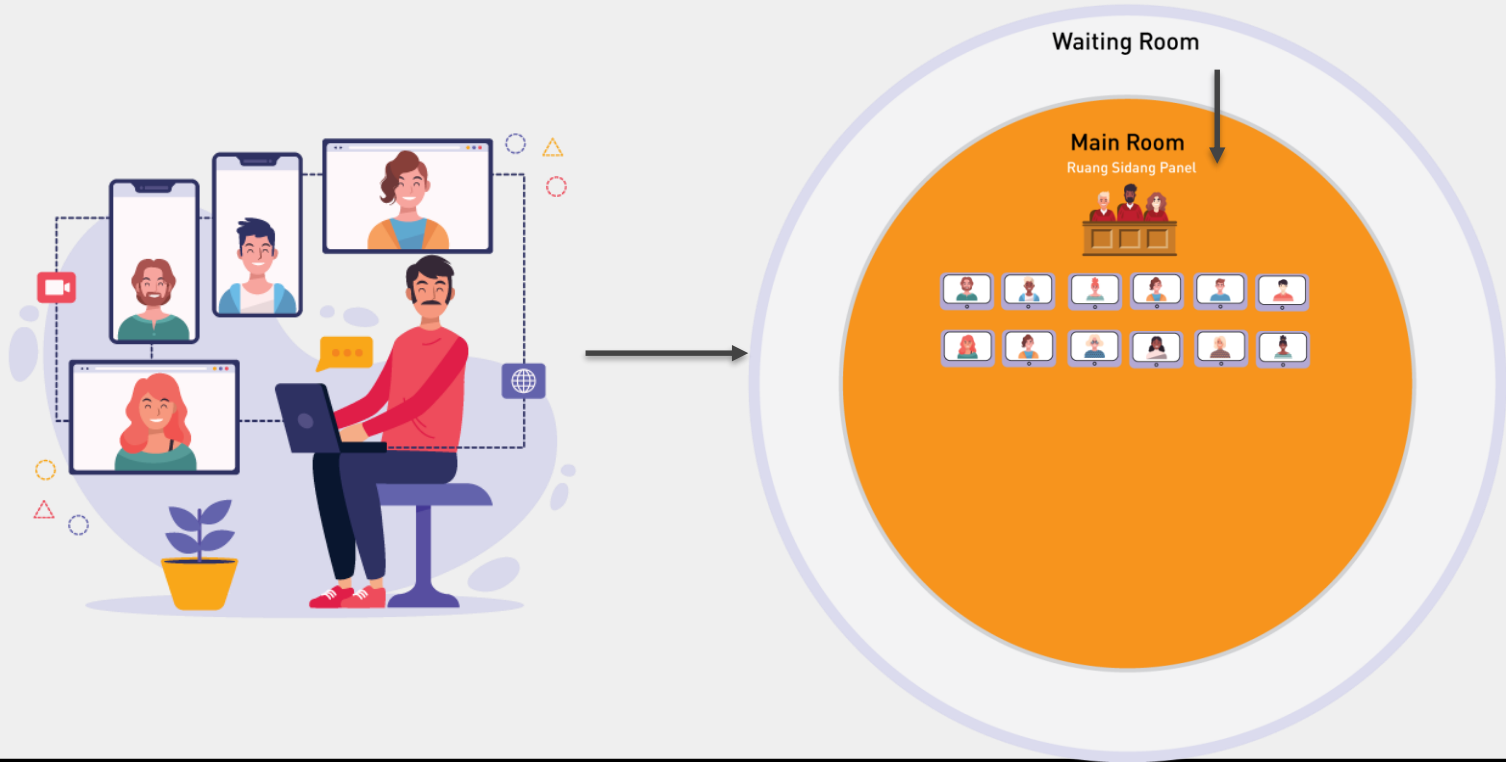
ALUR PERSIDANGAN ONLINE



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®

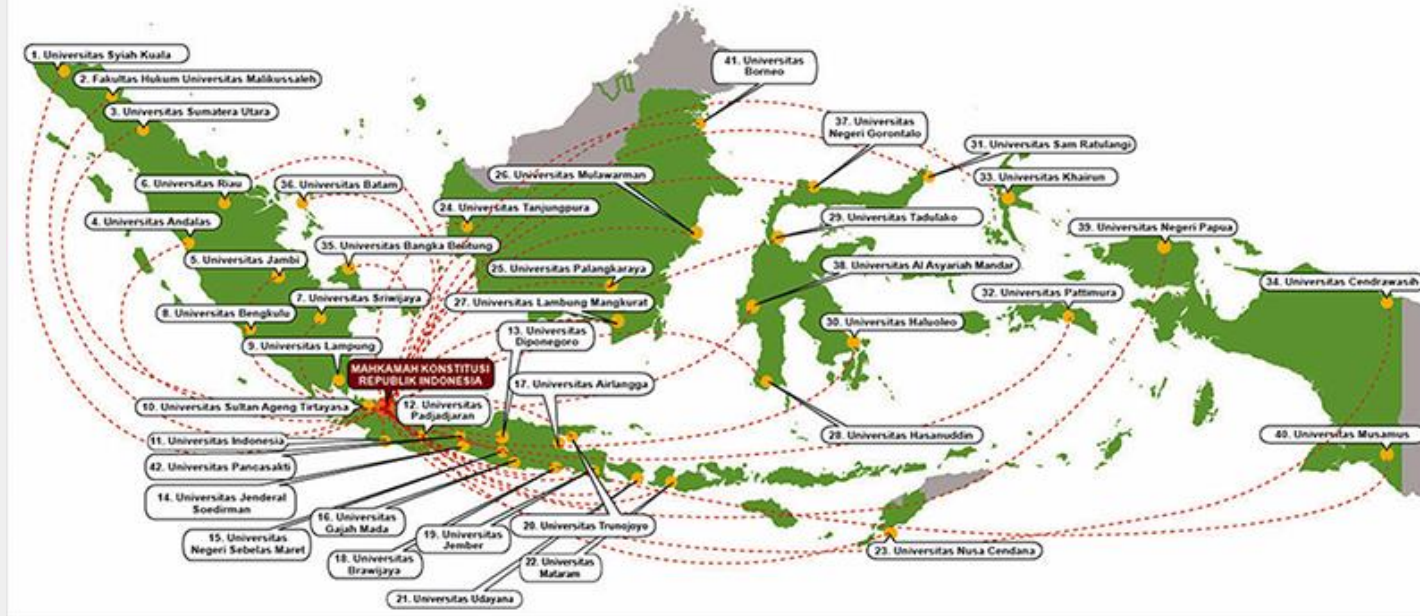


VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH (VIDEO CONFERENCE) PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara	Jalan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN JARAK JAUH MENGGUNAKAN ZOOM



Persidangan Jarak Jauh Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.5K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI

43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

1:25:45 3:08:10 14:15 19:16 19:15 1:41:05

https://studio.youtube.com/channel/UCX-BUMN871Avqkl5LFgxxw/editing/images_num : Dr. Suhartoyo., Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
"TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG"

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):

Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)

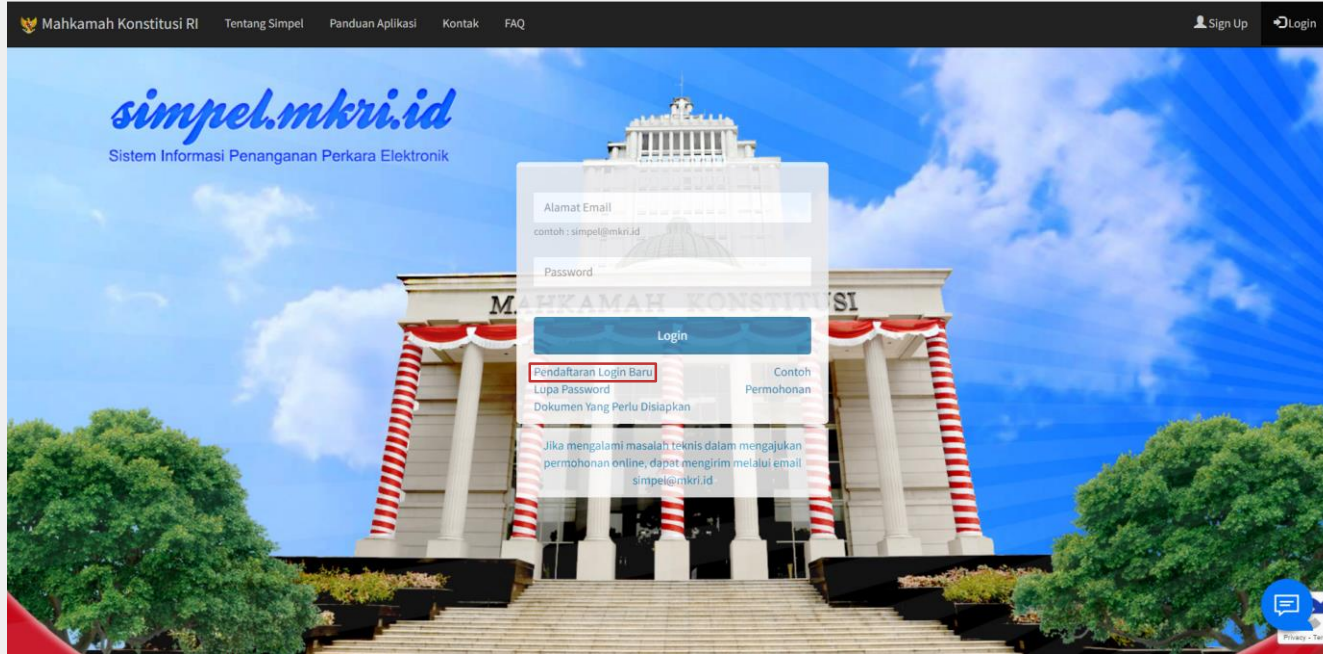
"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



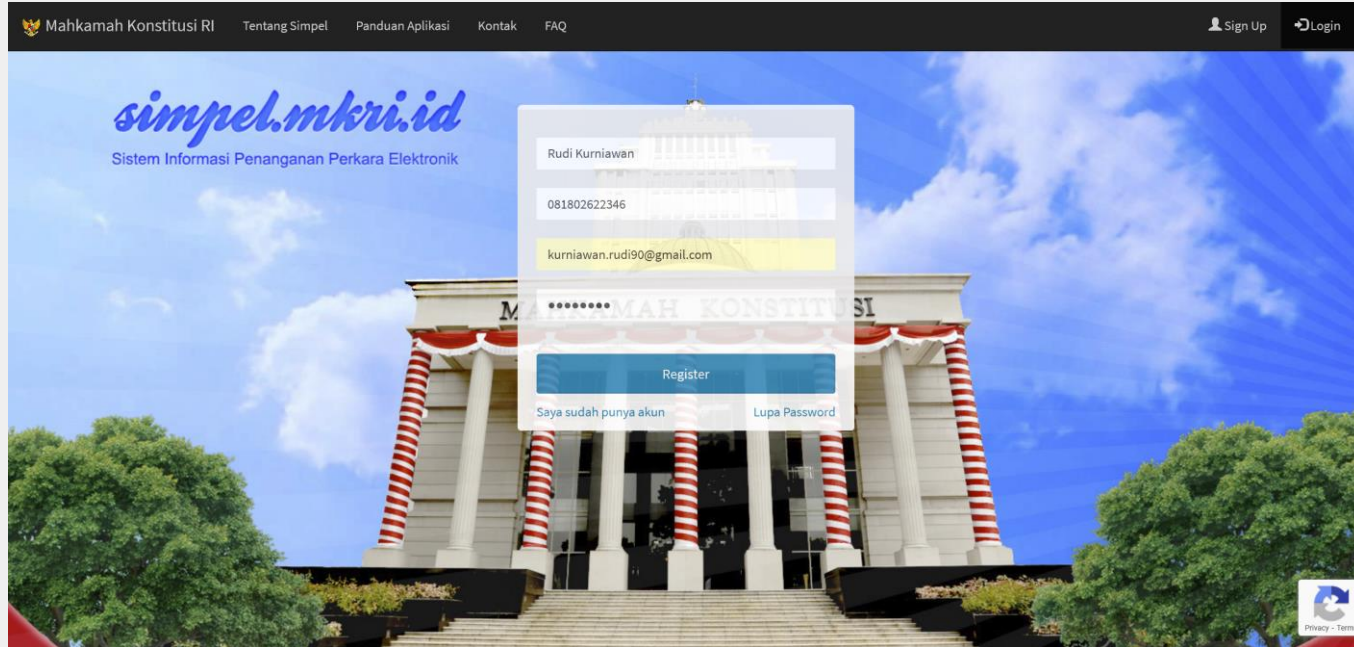
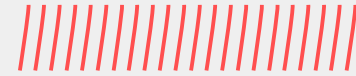
Permohonan Online (simple.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simple.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



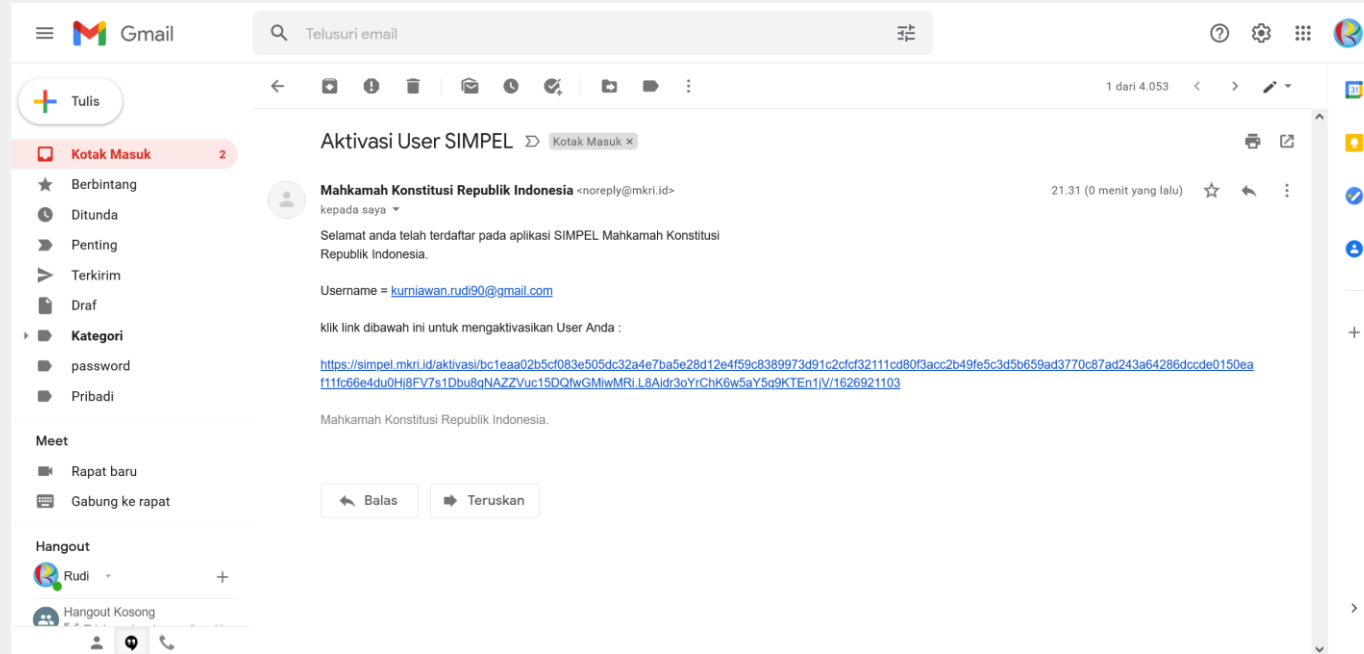
Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL user profile page. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The page displays a profile card with the user's name and a placeholder for a profile picture. Below the card is a form for updating user information, including fields for Name, Email, Nomor Telepon/HP, Nomor KTP, File KTP, and Alamat. The form is currently empty, and the user is prompted to click 'Simpan' (Save) or 'Batal' (Cancel).

Profile User

Rudi Kurniawan

Nama *
Rudi Kurniawan

Email
kurniawan.rudi90@gmail.com

Nomor Telepon/HP *
081802622346

Nomor KTP *
1234567891011121

File KTP *
Browse... ttd digital.png
File type harus .jpg, gif atau .png
Belum ada file KTP

Alamat
Despek

Simpan **Batal**

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

SIMPEL.MKRI.ID SIMPEL.MKRI.ID

Permohonan

- 1 Pengujian Undang-Undang (PUU) [Selengkapnya](#)
- 0 Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) [Selengkapnya](#)
- 0 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden [Selengkapnya](#)
- 0 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR-DPRD-DPD) [Selengkapnya](#)

Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

- 0 PHP Gubernur, Bupati, dan Walikota [Selengkapnya](#)

Kalender Sidang

2021 Juli

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
26	28	30	1	2	3	4
7	8	9	10	11		
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8

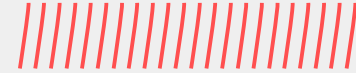
Legenda: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Libur (Red)

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Perkuliahan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online" with a sub-heading "PUU(Pengujian Undang-Undang)". The breadcrumb trail is "Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU".

The interface is divided into three main sections:

- Proses Pengisian Pokok Permohonan** (Active): This section contains a text area for the "Uraian Pokok Permohonan" (Main Description of the Request). The example text provided is: "Uraian Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)".
- Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa** (Inactive): This section is currently empty.
- Proses Upload Dokumen** (Inactive): This section is currently empty.

Below the text area, there is a list of required documents:

Dokumen yg harus disiapkan:

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTA/BAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

Keterangan:
** Jika menggunakan kuasa pemohon

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > > Permohonan PUU

SIMPEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Version 2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materilil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon + Tambah Pemohon

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa + Tambah Kuasa

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main menu on the left includes options like Dashboard, Info Permohonan, Permohonan PUU, SKLN, PHPU, PHP Kepala Daerah, Kunjungan Sidang, Bantuan, and Konsultasi. The current page is titled 'Permohonan Online' and shows a progress bar with three stages: 'Proses Pengisian Pokok Permohonan', 'Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa', and 'Proses Upload Dokumen'. The 'Berkas Permohonan' section contains a table with the following data:

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a '+ Tambah Berkas' button. Below the table, there are four action buttons: 'Kembali (Edit Permohonan)', 'Batal (Hapus Permohonan)', 'Simpan Sementara', and 'Kirim Permohonan'. The footer of the page includes the copyright information: 'Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.' and the version number 'Version 2.1'.

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020

Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materilil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDIA MEMERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETERIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
no:118768196420114103355

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SIAIP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 26 JULI 2020
SEKRETERIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh per:

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA, MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS, BERSEDA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETERIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAMZAH



Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hamzah - NIP. 19650108 199002 1 001
Digital Signature
no:118768196420114103355

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN SEBAIK-BAKNYA SESUAI DENGAN AMANAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 26 JULI 2020
SEKRETERIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HAMZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh per:

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab Ming

Pemohonan
Online
simpl.mkri.id

PIPKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG [Selengkapnya >](#)

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Tunda (Red), Libur (L)



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA

INFO PUBLIK

PUBLIKASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penyelurusan Perkara



Informasi Anggaran



AACC



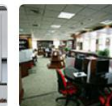
LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!



BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya ■ Tunda ⌚ Libur

 Agenda Sidang

 Siaran Pers

 Berlangganan

 ILM

 Konsultasi

 Dewan Etik

Permohonan Online
simpler.mkri.id



simpler.mkri.id


BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**

 Hakim Konstitusi

 Putusan

 Streaming dan Video Conference


 Case Tracking

 Informasi Anggaran

 AACC

 LPSE MAHKAMAH KONSTITUSI

 JDIH MAHKAMAH KONSTITUSI

 Pusdik MKRI

 Perpustakaan

 Pusat Sejarah Konstitusi

 Gedung MK

 Majalah Konstitusi

 Jurnal Konstitusi

 Jurnal Consrev

 SP4N-LAPOR!



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keduanya ■ Tunda ⌚ Libur

 Agenda Sidang

 Siaran Pers

 Berlangganan

 ILM

 Konsultasi

 Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

 Permohonan Online simpel.mkri.id

simpel.mkri.id


BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-


Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan


PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**


 Hakim Konstitusi


 Putusan


 Streaming dan Video Conference


 Case Tracking


 Informasi Anggaran


 AACC


 LPSE MKRI


 JDIH


 Pusdik MKRI


 Perpustakaan


 Pusat Sejarah Konstitusi

 Gedung MK

 Majalah Konstitusi

 Jurnal Konstitusi

 Jurnal Consrev

 SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Tunda (Red), Libur (Light Blue)

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Permohonan Online
simpler.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

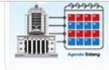
Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penyelurusan Perkara
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consrev
- SP4N-LAPOR!



LIVE STREAMING PERSIDANGAN



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendiiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



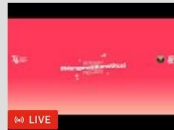
Jurnal Consrev



SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan. Sela...



Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022. Selasa...



Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022. Senin,...



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022. Senin,...



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XIX/2021. Senin,...



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekal...



2352-9000

Jl. Medan Merdeka Barat No.6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keduanya (Purple), Tunda (Red), Libur (L)

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mkri - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mkri Mahkamah Konstitusi (Mk) Menegaskan Pendiirannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 | **PENGUJIAN UNDANG - UNDANG**

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Penyelurusan Perkara
- INFORMASI ANGGARAN
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consrev
- SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



MAHKAMAH
KONSTITUSI

Q Cari

CASE TRACKING

MKRI PUU SKLN PHPU PHPKADA

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHR.GUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

Case tracking

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CASE TRACKING

Traking Perkara
Mahkamah Konstitusi RI

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Tracking Perkara
Tracking Perkara

Detail Proses dan Dokumen

STEP	TANGGAL	PROSES	FILE
1	05-01-2022	Pengajuan Permohonan disertai Penerbitan APD dan DKPP dengan Nomor 3/PUU/PAN/MKS/SP/19/2022	Permohonan APD dan DKPP
2	11-01-2022	Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan	
3	07-03-2022	Penyerahan Perbaikan Permohonan	Perbaikan Permohonan
4	26-01-2022	Permohonan sudah di Registrasi Mahkamah dengan Nomor 12/PUU-XX/2022, dan telah di terbitkan ASRK dengan Nomor 12/PUU/PAN/MKS/SP/19/2022	ARSK
5	27-01-2022	Telah diterbitkan surat penyempitan salinan permohonan dengan nomor 13.12/PUU/PAN/MKS/SP/19/2022	
6	22-02-2022 14:00 WIB	Agenda Sidang : Pendahuluan Acara Sidang - Pemeriksaan Pendahuluan (I)	Jadwal Sidang
7	07-03-2022 14:30 WIB	Agenda Sidang : Perbaikan Permohonan Acara Sidang - Perbaikan Permohonan (II)	Jadwal Sidang
8	-	Penyerahan Perbaikan Jawaban dan Keterangan	-
9	07-03-2022 09:30 WIB	Rapat Pemuryawaratan Hakim	-
10	29-03-2022 09:30 WIB	Pengucapan Putusan Acara Sidang : Pengucapan Putusan	Jadwal Sidang File Putusan
11	29-03-2022	Telah diterbitkan salinan Putusan dengan nomor 37.12/PUU/PAN/MKS/SP/19/2022	1. Penyempitan Salinan Putusan ke Pemohon 2. Penyempitan Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI 3. Penyempitan Salinan Putusan ke Presiden Republik Indonesia 4. Penyempitan Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI 5. Penyempitan Salinan Putusan ke Ketua Majelis Perwakilan Rakyat RI 6. Penyempitan Salinan Putusan ke Ketua Dewan Perwakilan Daerah RI

Detail Perkara

No. Perkara : 12/PUU-XX/2022
 Pokok Perkara : Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan
 Pemohon : dr. Ludjiono
 Kuasa Hukum : -

Riwayat Sidang

NO	TANGGAL	ACARA SIDANG	HASILKAN SIDANG	
			PDF	AUDIO
1	2022-02-09 11:13:00	Pemeriksaan Pendahuluan (I)	PDF	AUDIO
2	2022-02-22 14:00:00	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN (II)	PDF	AUDIO
3	2022-03-07 15:18:00	Perbaikan Permohonan (III)	PDF	AUDIO
4	2022-03-29 09:52:00	PENGUCAPAN PUTUSAN	PDF	AUDIO

Pengujian Undang-Undang yang sempa

NO	NO PERKARA	POKOK PERKARA	PEMOHON	TRACKING
1	4/PUU-XX/2012	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Pemohon I), Ryan Muhammad (Pemohon II), Berwika Sari (Pemohon III), Erwin Agustian (Pemohon IV), Eko Santoso (Pemohon V)	Tracking
2	66/PUU-XX/2014	Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Victor Santoso Tandasa	Tracking
3	98/PUU-XX/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Victor Santoso Tandasa; Rasminto; Dhisiky; Arief Rachman; Ryan Muhammad; Mochamad Roem Djibran; Soekhin; Rizki Apriadi; Syarif Muhammad Nur; Balan Eksakul Mahasriwa Universitas Esa Unggul (BEM UEG) dwakil Rizka Rizki, Tiwika Hendrik Satrio, Al Rahmahulbi; Baidar Eksakul Mahasriwa Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (BEM FH UEG) dwakil Muhammad Zaky Rabbani, Rizaldi Prabowo, Ryan Pratna; dan Gerakan Mahasiswa Hukum Jakarta (GMHJ) dwakil Muhammad Farhan Al, David Wilton Purba, Ciptika Salsaha, Heni Noviana; Badan Eksakul Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sahid Jakarta (BEM FH USAHE) dwakil oleh Deva Liana dan Marsha Inggita Livia Wahyu Nugroho, S.H., M.H.; Anisa Alwani Satrio; Donald Rochman Taraban; Antri Dhanes; Saad Mawardi; Saawan; Satrio Han Kawanu	Tracking

CLICK MK



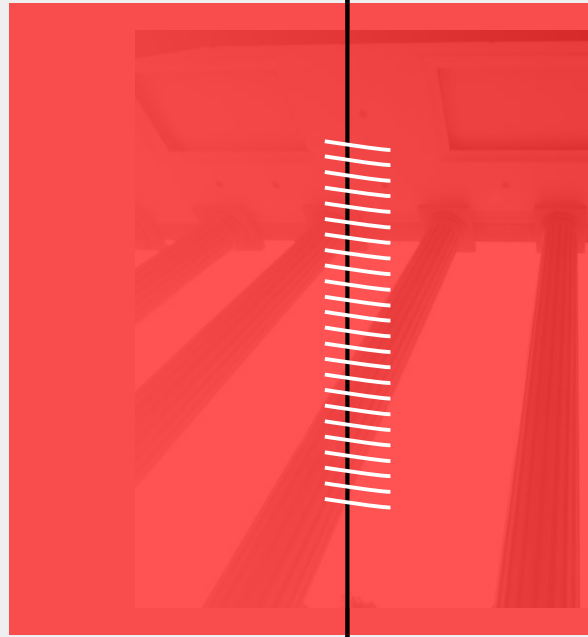
CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH



SOAL PRAKTIK PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Pak Basuki seorang warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai driver ojek online beralamat di Jalan Pandawa, Kec. Kartosuro, Kota Solo mengeluhkan tentang kejadian yang menimpa dirinya saat dia ditilang oleh polisi karena dianggap telah melanggar Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun bunyi dari pasal tersebut adalah *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”*.

Akibat pelanggaran tersebut Pak Basuki harus membayar denda sebesar Rp. 1.000.000. Namun menurut Pak Basuki denda tersebut sangat mahal dan tidak mungkin untuk dibayar oleh karena penghasilan pak Basuki tidak akan mencukupi untuk membayar denda tersebut. Menurut pak Basuki pada saat ditilang, dia sudah menyampaikan informasi kepada petugas polisi bahwa penyebab utama tidak dapat memperpanjang Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah karena belum memiliki uang untuk memperpanjang SIM tersebut sehingga apabila uang yang ada digunakan untuk memperpanjang SIM maka keluarganya tidak dapat makan.

Pak Basuki berharap ada perlakuan khusus bagi masyarakat yang memiliki penghasilan pas-pasan ataupun masyarakat dalam kategori miskin untuk dapat memperpanjang SIM dengan jeda perpanjangan SIM yakni maksimal 6 bulan sejak SIM tersebut habis masa berlakunya sehingga masyarakat yang tidak mampu diberikan waktu untuk menabung guna membayar perpanjangan SIM tersebut. Saat ini Pak Basuki sudah menjalani profesi sebagai driver ojek online selama hampir 3 tahun dan rata-rata penghasilan perbulan yang didapatkan antara Rp. 750.000 ribu hingga Rp. 1.500.000 setiap bulan.

Menurut Pak Basuki Ketentuan Pasal 281 UU LLAJ tersebut bertentangan dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang telah menetapkan bahwa *“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*. Selain itu, Pak Basuki juga meminta agar masyarakat miskin seperti dirinya

mendapatkan perlakuan khusus sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 (*“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*)

Tugas Para Peserta adalah sebagai tim kuasa hukum para Pemohon adalah menyusun Permohonan sesuai dengan template yang sudah diberikan melalui Simultan/grup telegram.

Masing-Masing Peserta harus merumuskan alasan permohonan sesuai dengan sistematika permohonan Pengujian Undang-undang.

Terima Kasih, Selamat Mengerjakan!

.....,20..

Hal : Permohonan Pengujian Materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang
... terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Kami bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. ..., S.H., M.H., LL.M
2. ..., S.H., M.H.
3. ..., S.H.

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ..., yang beralamat di Jalan ..., berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal ..., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama:

1. Nama : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon I**

2. Nama : ...
Kewarganegaraan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...

Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon II**

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai.....**para Pemohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan pengujian materiil Pasal ... Undang-Undang Nomor ... tentang ... (selanjutnya disebut UU ...) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945).

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar...”
2. Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
3. Bahwa selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”
4. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil atas ... UU... yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:
...
5. Bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang *in casu* UU ... terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan ini.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau;
 - d. lembaga negara”.

Selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan:

“Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

2. Bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah Konstitusi berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa para Pemohon merupakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf ... UU MK, yang memiliki hak konstitusional sebagaimana dijamin dalam Pasal ... UUD 1945;
4. Bahwa Pemohon I merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
5. Bahwa Pemohon II merupakan ... (uraikan kualifikasi dan kerugian hak konstitusional);
6. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal yang menentukan merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk ...
7. Bahwa menurut para Pemohon jika permohonan dikabulkan oleh Mahkamah maka ...
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

C. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok permohonan adalah ketentuan Pasal ... UU ... yang menyatakan ...
2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:
...
3. Bahwa menurut para Pemohon ketentuan Pasal *a quo* yang mengatur ... bertentangan dengan Pasal ..., Pasal ..., dan Pasal ... UUD 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
...
4. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut para Pemohon Pasal ... UU ... bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

D. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

atau

Menyatakan Pasal ... Undang-Undang Nomor ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ...;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

PEMOHON/KUASA HUKUM PEMOHON*

1. Nama (tanda tangan)
2. Nama (tanda tangan)
3. ...*dst*

*jika menggunakan kuasa hukum, Permohonan ditandatangani oleh kuasa hukum



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1618/DK.00/04/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

11 April 2022

Kepada Yth.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)

Dr. Totok Hari Wibowo

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi mengundang Bapak dan staf untuk menghadiri rapat pembahasan penjajakan kerjasama kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI**, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 12 April 2022
Waktu : 13.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi zoom Meeting*
Link Zoom :
<https://us02web.zoom.us/j/87076146362?pwd=WDJiMVJNbWJvQ3ZGQzE0YnZYSjQ1Zz09>
Atau
Meeting ID: 870 7614 6362
Passcode: 731333

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1275447983220411081215

NOTA DINAS
NOMOR 1165/2600/DK.00/04/2022

Kepada : Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Dari : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Perihal : Laporan Hasil Rakor Penjajakan Kerjasama Kegiatan dengan AAKI
Tanggal : 13 April 2022

Dengan hormat, sehubungan rencana kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota AAKI, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyelenggarakan rapat koordinasi dengan AAKI, pada hari Selasa tanggal 12 April 2022. Adapun hasil rapat koordinasi kami sampaikan sebagai berikut:

1. Hadir dalam rapat ketua umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) Bapak Totok Hari Wibowo; Bapak Marcelino (Wakil Ketua Umum), Ibu Irhamna (Sekjen AAKI);
2. Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) memiliki anggota PNS dan Non PNS yang tersebar diseluruh wilayah Indonesia;
3. Pihak Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) sangat mengapresiasi atas kebijakan MK yang telah memilih AAKI sebagai partner dalam kegiatan ini dan berkeinginan agar kegiatan dapat berlangsung dengan beberapa angkatan;
4. Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI akan dilaksanakan pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring;
5. Pembiayaan kegiatan meliputi biaya narasumber, penyelenggaraan kegiatan dan paket data menjadi beban Mahkamah Konstitusi;
6. Biaya transportasi, akomodasi, serta konsumsi menjadi beban masing-masing peserta;
7. Adapun rencana narasumber dalam kegiatan ini, kami usulkan sebagai berikut:

No.	Materi	Narasumber
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai Nilai Pancasila	1. Prof. Yudi Latif, M.A., Ph.D 2. Dr. Hayyan UI Haq, S.H., LL.M (alternatif)
2.	Konstitusi dan Konstitusionalisme	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.
3.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945	1. Prof. Dr. Nimatul Huda, S.H., M.Hum 2. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H. (alternatif)



4.	Jaminan Hak Konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945	1. Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D 2. Dr. Hesti Armiwulan S.H., M.Hum (alternatif)
5.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara PUU	1. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., M.PA 2. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum. (alternatif)
6.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Kepaniteraan
7.	Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Kepaniteraan
8.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	Pusat TIK
9.	Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	Puslit

Demikian yang dapat kami sampaikan, untuk selanjutnya kami mohon arahan dari Bapak Sekjen. Atas perhatian dan arahan Bapak Sekjen lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2381/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

09 Juni 2022

Kepada Yth.

Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)

Dr. Totok Hari Wibowo

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)** yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Juni 2022
Waktu : 15.30 –17.30 WIB
Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*
(Link akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi



Digital Signature
mk1735162820220609090700



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 737/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Rapat**

20 Juni 2022

Kepada Yth.

Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI** pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menghadiri rapat teknis persiapan kegiatan dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Juni 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)
Agenda : Rapat Persiapan Kegiatan PPHKWN bagi Pengurus dan Anggota AAKI dan Kelayakan Efisiensi Bandwidth Limiter bagi Kualitas HD pada Primary Broadcast Kegiatan Online.

Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Imam Margono

Tembusan:

Yth. Bapak Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1106185840220620081734



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2392/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Juni 2022

Kepada Yth.

Prof. Dr. Adji Samekto, S.H. M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)** pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 21 Juni 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk117749908220606104703

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/ Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	<ul style="list-style-type: none">a. Konsep, Prinsip, dan Nilai dalam Pancasila.b. Fungsi Pancasila dan Perwujudannya.c. Tantangan Implementasi Pancasila di Era Digital.d. Bentuk-Bentuk Penerapan Pancasila.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2627/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

21 Juni 2022

Kepada Yth.

Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)** pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 21 Juni 2022
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono



Digital Signature
mk1884441312220621101612

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Sistem Penyelenggaraan Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Pokok-Pokok Pikiran Pembukaan UUD NRI Tahun 1945; b. Dasar-Dasar Penyelenggaran Negara; c. Sistem Pemerintahan Indonesia; d. Lembaga-Lembaga Negara dan Hubungan antar Lembaga Negara (Prinsip <i>Check and Balances</i>); e. Prinsip Hubungan Pusat dan Daerah.	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2394/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

10 Juni 2022

Kepada Yth.

Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)** pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 21 Juni 2022
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.



Digital Signature
mk1177499008220606105041

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Materi/Mata Ajar	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dalam UUD NRI 1945	<p>a. Konsep dan Prinsip HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pengertian HAM; 2) Ruang Lingkup HAM; 3) Prinsip-prinsip dan Tujuan HAM. <p>b. Gagasan dan Perkembangan Konstitusionalisasi HAM dalam Konstitusi Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sejarah dan perdebatan HAM (Hatta vs Yamin) dalam penyusunan UUD 1945 (sebelum amandemen); 2) Pengaturan HAM dalam UUD 1945 (setelah amendemen); 3) Perkembangan HAM dalam Putusan MK; 4) Instrumen pengaturan HAM dalam peraturan perundang-undangan. <p>c. Aspek Hukum Internasional HAM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Universalitas HAM; 2) Instrumen Internasional tentang HAM; 3) Penegakan Hukum HAM Internasional. <p>d. Kewajiban dan Tanggungjawab Negara:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemajuan HAM; 	Ceramah & Diskusi	120 Menit



- 2) Perlindungan HAM;
- 3) Pemenuhan HAM;
- 4) Penegakan HAM.

e. Pelanggaran dan Penegakan HAM:

- 1) Jenis Pelanggaran HAM;
- 2) Penegakan HAM.





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2326/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

06 Juni 2022

Kepada Ykh.

Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)** pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk117749908220606105236

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2430/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

15 Juni 2022

Kepada Ykh.

Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)** pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1719615937220615111444

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar/Materi	Pokok Materi	Metode	Durasi
1.	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	a. Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi Indonesia; b. Kedudukan dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi; c. Struktur organisasi Mahkamah Konstitusi; d. Mekanisme Kerja Mahkamah Konstitusi; e. Karakteristik umum Hukum Acara Mahkamah Konstitusi; f. Hukum Acara Pengujian Undang-Undang;	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2626/DK.06.00/06/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

21 Juni 2022

Kepada Ykh.

Panitera Pengganti Tk. I

Saudara Saiful Anwar, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)** pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk1841563411220621101422

**GARIS BESAR KURIKULUM PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI**

No.	Mata Ajar	Materi	Metode	Durasi
1.	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945	<p>a. Tata Cara Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945:</p> <ul style="list-style-type: none">– Kewenangan MK;– Kedudukan hukum Pemohon;– Alasan Permohonan (formil & materiil);– Kerugian Konstitusional;– Petitum. <p>b. Format Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945.</p>	Ceramah & Diskusi	120 Menit





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2328/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

06 Juni 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Achmad Edi Subiyanto**
2. **Hani Adhani**
3. **Ery Satria Pamungkas**
4. **Ria Indriyani**
5. **Yunita Rhamadani**
6. **Dian Chusnul Chatimah**
7. **Jefri Porkonanta Tarigan**
8. **Rahadian Prima Nugraha**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)** pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 22 Juni 2022
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk117749908220606105353



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2329/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

06 Juni 2022

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Riska Aprian**
 - 2. Rudi Kurniawan**
- di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)** pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Sistem Informasi Perkara Elektronik

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Garis Besar Kurikulum Materi terlampir. Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk117749908220606105427



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 2330/DK.06.00/06/2022
Lampiran : -
Hal : **Undangan Narasumber**

06 Juni 2022

Kepada Ykh. Saudara/i:

1. **Abdul Ghoffar**
2. **Helmi Kasim**
3. **Irfan Nur Rachman**
4. **Luthfi Widagdo Eddyono**
5. **Anna Triningsih**
6. **Ananthia Ayu Novitasari**
7. **Rima Yuwana Yustikaningrum**
8. **Intan Permata Putri**

di Tempat

Dalam rangka revitalisasi, reaktualisasi, dan reinternalisasi implementasi nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus untuk meningkatkan pemahaman warga negara tentang Hukum Acara di Mahkamah Konstitusi, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI)** pada tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara daring melalui aplikasi *Zoom Meeting*.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 23 Juni 2022
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Aplikasi *Zoom Meeting* (*link* akan diberitahukan lebih lanjut)
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945

Kami telah menugaskan **Sdr. Suhardi**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Imam Margono

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk1177499008220606105504



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT KETERANGAN
NOMOR 2668/DK.06.00/06/2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Imam Margono, S.E., M.M.
NIP : 19690331 198912 1 001
Jabatan : Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
Jabatan : Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia

Adalah benar telah menjadi Narasumber Ahli pada kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia (AAKI) yang dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 21 Juni 2021
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Secara Daring melalui Aplikasi Zoom Meeting
Materi : Sistem Penyelenggaraan Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 23 Juni 2022

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono, S.E., M.M.



Digital Signature
mk-1437851393220623015733



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

SURAT TUGAS

222/2000/06/2022

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, perlu adanya narasumber dan moderator dalam kegiatan tersebut;
- b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu penetapan surat tugas penunjukkan narasumber dan moderator kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
2. Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Memberi Tugas:

- Kepada : **Nama Terlampir**
- Untuk : Melaksanakan tugas sebagai narasumber dan moderator dalam kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Pengurus dan Anggota Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia
- Hari/tanggal : Senin s.d. Kamis/ 20 s.d. 23 Juni 2022
- Waktu : **Jadwal Terlampir**
- Tempat : Melalui Aplikasi *Zoom Meeting*

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 20 Juni 2022
a.n. Ketua,
Sekretaris Jenderal,
M. Guntur Hamzah



Digital Signature
mk519290350220620094732

Lampiran Surat Tugas
Nomor : 222/2000/06/2022
Tanggal: 20 Juni 2022

Daftar Narasumber dan Moderator

No	Nama	Jabatan	Tanggal
1	Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si.,DFM.	Narasumber	20 Juni 2022
2	Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.	Narasumber	9 Juni 2022
3	Prof. Dr. Adji Samekto, S.H. M.Hum.	Narasumber	21 Juni 2022
4	Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi H, S.H., M.M.	Narasumber	21 Juni 2022
5	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.	Narasumber	21 Juni 2022
6	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	21 Juni 2022
7	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2022
8	Rizki Amalia, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2022
9	Dr. Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2022
10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2022
11	Ery Satria Pamungkas, S.H.	Narasumber	22 Juni 2022
12	Ria Indriyani, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2022
13	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2022
14	Dian Chusnul Chatimah, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2022
15	Jefri Porkonanta Tarigan, S.H., M.H.	Narasumber	22 Juni 2022
16	Riska Aprian, S.T., M.Kom.	Narasumber	23 Juni 2022
17	Rudi Kurniawan	Narasumber	23 Juni 2022
18	Dr. Abdul Ghoffar, S.H., M.H.	Narasumber	23 Juni 2022
19	Helmi Kasim, S.S., S.H., M.H.	Narasumber	23 Juni 2022
20	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.	Narasumber	23 Juni 2022
21	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	23 Juni 2022



22	Anna Triningsih, S.H., M.Hum.	Narasumber	23 Juni 2022
23	Ananthia Ayu Novitasari, S.H., M.H.	Narasumber	23 Juni 2022
24	Intan Permata Putri, S.H.	Narasumber	23 Juni 2022
25	Imam Margono	Moderator	21 Juni 2022
26	Nanang Subekti	Moderator	21 Juni 2022
27	Santhy Kustrihardiani	Moderator	21 Juni 2022
28	Melati Kusuma Wardani	Moderator	21 Juni 2022
29	Bambang Sukmadi	Moderator	22 Juni 2022
30	Suhardi	Moderator	22 Juni 2022
31	Nanda Adytiansyah	Moderator	23 Juni 2022
32	Angga Putri Gardina	Moderator	22 dan 23 Juni 2022
33	Bangkit Panji Anarogo	Moderator	22 dan 23 Juni 2022
34	Fazlur Rahman El Islamy	Moderator	22 dan 23 Juni 2022
35	Hadian Taofik Rochman	Moderator	22 dan 23 Juni 2022
36	Yahya Amarullah Taufik	Moderator	22 dan 23 Juni 2022
37	Chafid Sugianto	Moderator	22 dan 23 Juni 2022
38	Edwin Rivano	Moderator	22 dan 23 Juni 2022





KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
DENGAN ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PENGURUS DAN ANGGOTA ASOSIASI ANALIS KEBIJAKAN INDONESIA

NOMOR : 37/PK/2022
NOMOR : 004/PK/AAKI/VI/2022

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Dua** bulan **Juni**, tahun **Dua ribu dua puluh dua** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Imam Margono**, Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jl. Raya Puncak KM. 83 Cisarua, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16750, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Totok Hari Wibowo**, Ketua Umum Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, berkedudukan di Gedung STC Senayan Lt 2 Ruang 35, Jl. Asia Afrika Pintu IX Gelora Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk menyelenggarakan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI, dengan kesepakatan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan kerja sama **PARA PIHAK** dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI ini dilaksanakan dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Pasal 2

Kerja sama ini mengatur penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 20 s.d. 23 Juni 2022 secara *online* (daring).

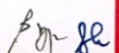
BAB III
KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI sesuai kurikulum dan silabus yang ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
 - b. Menyediakan ruangan belajar mengajar secara *online* (daring) dan narasumber.
 - c. Menerbitkan Sertifikat keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
 - a. Menetapkan, mengundang, dan menghadirkan sebanyak maksimal 400 orang pengurus dan anggota AAKI sebagai peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI.
 - b. Menjamin peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI belum pernah mengikuti kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara sebelumnya.



- c. Memberikan daftar nama peserta yang mengikuti kegiatan paling lambat tanggal **13 Juni 2022**.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 4

- (1) **PIHAK KESATU** berhak menerima daftar nama peserta kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI dari **PIHAK KEDUA** paling lambat tanggal **13 Juni 2022**.
- (2) **PARA PIHAK** berhak melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI.

BAB IV

BIAYA

Pasal 5

- (1) Biaya terkait dukungan teknis untuk kegiatan virtual (transportasi, akomodasi, dan konsumsi) menjadi tanggungan masing-masing peserta.
- (2) **PIHAK KESATU** akan mengganti biaya penggunaan internet berupa paket data/pulsa senilai Rp. 100.000,- yang akan dikirimkan kepada nomor handphone **peserta yang mendapatkan sertifikat**.
- (3) **PIHAK KESATU** tidak menanggung biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh peserta.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sampai dengan penyelenggaraan kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Pengurus dan Anggota AAKI ditutup.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah dan/atau dalam keadaan *force majeure* yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian ini tanpa harus menyelesaikan sisa waktu yang masih ada.

[Handwritten signature]

BAB VI
BEA MATERAI DAN KEWAJIBAN PAJAK
Pasal 7

- (1) Bea materai yang dipersyaratkan dalam perjanjian ini, dibebankan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Kewajiban pajak yang timbul akibat pembayaran pelaksanaan perjanjian ini akan dipungut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Pengaturan atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perubahan (*adendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah mufakat.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 9

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** pada saat perjanjian ini ditandatangani.
- (2) Perjanjian kerja sama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas.

PIHAK KESATU,
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi RI


Iman Margono
Plt. Kepala Pusat

Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

PIHAK KEDUA,
Asosiasi Analis Kebijakan Indonesia


1BF98AJX601684208

Dr. Totok Hari Wibowo
Ketua Umum

Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	20/06/2022 13:30:50 WIB
2	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	20/06/2022 13:33:09 WIB
3	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	20/06/2022 13:33:14 WIB
4	Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	20/06/2022 13:38:10 WIB
5	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	20/06/2022 13:40:12 WIB
6	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	20/06/2022 13:40:25 WIB
7	Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	20/06/2022 13:42:55 WIB
8	Yossi Apriliana, SE, M. AP	20/06/2022 13:44:47 WIB
9	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	20/06/2022 13:48:44 WIB
10	RAIS ROZALI, SH, MH	20/06/2022 13:52:36 WIB
11	Setiowiji Handoyo, SE, ME	20/06/2022 13:53:16 WIB
12	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	20/06/2022 14:03:11 WIB
13	Desy Eka Khairunnisa S.Kom, M.Si	20/06/2022 14:06:33 WIB
14	dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	20/06/2022 14:08:39 WIB

15 Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	20/06/2022 14:08:41 WIB
16 Reny Nirmala	20/06/2022 14:08:57 WIB
17 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	20/06/2022 14:14:00 WIB
18 Tri Wahyu Wijayanti, S.M	20/06/2022 14:17:07 WIB
19 Nurul Hasani	20/06/2022 14:17:43 WIB
20 Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	20/06/2022 14:19:54 WIB
21 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	20/06/2022 14:21:58 WIB
22 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	20/06/2022 14:22:34 WIB
23 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	20/06/2022 14:22:59 WIB
24 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	20/06/2022 14:23:47 WIB
25 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	20/06/2022 14:24:37 WIB
26 Amrih Wigati, S.Sos.MM	20/06/2022 14:24:40 WIB
27 Paramita Wikansari	20/06/2022 14:25:13 WIB
28 Puput Putri Sari, S.Si.	20/06/2022 14:26:21 WIB
29 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	20/06/2022 14:26:51 WIB
30 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	20/06/2022

	14:27:18 WIB
31 NOVIA, ST	20/06/2022 14:27:37 WIB
32 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	20/06/2022 14:29:17 WIB
33 Vice Admira Firnaherera, MPA	20/06/2022 14:30:10 WIB
34 Firman, SKM., M. PH	20/06/2022 14:31:31 WIB
35 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	20/06/2022 14:35:16 WIB
36 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	20/06/2022 14:35:49 WIB
37 Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	20/06/2022 14:36:57 WIB
38 Hj. Dewi Sartika. SE.MM	20/06/2022 14:37:01 WIB
39 Sari Damayanti, SH	20/06/2022 14:37:03 WIB
40 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	20/06/2022 14:37:59 WIB
41 Dra Rorie Paulina MM	20/06/2022 14:38:28 WIB
42 M. Ridha Muttaqin, S.Pd.I,MM	20/06/2022 14:38:31 WIB
43 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	20/06/2022 14:38:48 WIB
44 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	20/06/2022 14:38:50 WIB
45 NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	20/06/2022 14:38:57 WIB
46 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	

	20/06/2022 14:39:42 WIB
47 Dara Mitra Wismaningrum, SKM	20/06/2022 14:39:55 WIB
48 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	20/06/2022 14:39:56 WIB
49 Christa Gumanti Manik, MPH	20/06/2022 14:40:28 WIB
50 Harris Taruna Nugroho, S.T.	20/06/2022 14:40:56 WIB
51 Drs. H. Nahrudin, M.H	20/06/2022 14:41:05 WIB
52 Drs. Deni Ardiana	20/06/2022 14:42:41 WIB
53 Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	20/06/2022 14:43:25 WIB
54 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	20/06/2022 14:44:16 WIB
55 Dita Andriasari SH,MH	20/06/2022 14:44:26 WIB
56 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	20/06/2022 14:44:38 WIB
57 Ir. Nani Rohaeni, MP	20/06/2022 14:45:24 WIB
58 DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	20/06/2022 14:46:11 WIB
59 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	20/06/2022 14:46:12 WIB
60 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	20/06/2022 14:46:13 WIB
61 Davip Arya Bhima, SE, MAB	20/06/2022 14:46:30 WIB

62 SISKI YUNI HARTANTI, SE	20/06/2022 14:47:05 WIB
63 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	20/06/2022 14:47:08 WIB
64 Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	20/06/2022 14:47:31 WIB
65 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	20/06/2022 14:47:35 WIB
66 Sofia Yuniar Sani	20/06/2022 14:47:40 WIB
67 Made Agus Sugianto, SKM, MKes	20/06/2022 14:47:52 WIB
68 Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	20/06/2022 14:48:44 WIB
69 Siti Irma Suryani	20/06/2022 14:49:31 WIB
70 DECKY SUBARJA, S.Psi	20/06/2022 14:51:12 WIB
71 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	20/06/2022 14:51:19 WIB
72 Ratih Purwandari Rusna,SKM	20/06/2022 14:51:48 WIB
73 Sulyani, SKM, M.Epid	20/06/2022 14:51:49 WIB
74 SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	20/06/2022 14:52:00 WIB
75 Desi Fitriani,SKM.MSi	20/06/2022 14:52:03 WIB
76 Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	20/06/2022 14:52:03 WIB
77 Alfina Fedora Kotta,S.Pd	20/06/2022

	14:52:08 WIB
78 Nani Mardiah, S.Farm., Apt	20/06/2022 14:52:25 WIB
79 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	20/06/2022 14:52:32 WIB
80 MURTONO,SE.,M.Si.	20/06/2022 14:52:53 WIB
81 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	20/06/2022 14:53:00 WIB
82 Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	20/06/2022 14:53:29 WIB
83 Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	20/06/2022 14:53:31 WIB
84 Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	20/06/2022 14:56:31 WIB
85 Naufal Noor Rochman	20/06/2022 14:57:39 WIB
86 drg. Tince Arniati Jovina, MKM	20/06/2022 14:57:40 WIB
87 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	20/06/2022 14:57:58 WIB
88 RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	20/06/2022 14:58:17 WIB
89 Siti Maesyaroh	20/06/2022 14:58:18 WIB
90 Kania Rahma Nureda, S.H.	20/06/2022 14:58:32 WIB
91 Swasnita Sihotang, S.Kom	20/06/2022 14:59:09 WIB
92 Imran Nur, S.IP, M.Si	20/06/2022 14:59:12 WIB
93 Siti Annisa Silvia Rosa	

	20/06/2022 15:02:00 WIB
94 Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	20/06/2022 15:02:26 WIB
95 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	20/06/2022 15:02:35 WIB
96 Drs. Sjaeful Inwan, M.M., CRMO	20/06/2022 15:03:05 WIB
97 Ansorizal Kurniawan.SE.MM	20/06/2022 15:03:41 WIB
98 Juherman, S.Si, M.AP	20/06/2022 15:05:37 WIB
99 Rina Christina, SH.MH.	20/06/2022 15:06:23 WIB
100 Heri Kusmanta, M.P.A	20/06/2022 15:07:35 WIB
101 Djati Witjaksono Hadi	20/06/2022 15:08:22 WIB
102 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	20/06/2022 15:08:52 WIB
103 Lusitawati	20/06/2022 15:11:16 WIB
104 Dr. Rusdiati Rumiah	20/06/2022 15:12:30 WIB
105 Ali Fauzan, Lc, M. Sos	20/06/2022 15:15:49 WIB
106 Endang Prihayuni, S.Sos	20/06/2022 15:21:15 WIB
107 Isfahriani Sari Nasoetion,SP	20/06/2022 15:21:32 WIB
108 Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	20/06/2022 15:22:00 WIB

109 Irawati, M.A.	20/06/2022 15:23:33 WIB
110 Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	20/06/2022 15:24:53 WIB
111 Sulikah, S. Ag.	20/06/2022 15:25:21 WIB
112 Indriyani, S.KM., M.Si.	20/06/2022 15:26:02 WIB
113 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	20/06/2022 15:26:51 WIB
114 Yana Supriatna	20/06/2022 15:28:34 WIB
115 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	20/06/2022 15:29:07 WIB
116 Anita Febrina Zentrato, S.Pi.	20/06/2022 15:32:19 WIB
117 Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	20/06/2022 15:34:05 WIB
118 Yulius Tiranda, M.Pd	20/06/2022 15:42:23 WIB
119 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	20/06/2022 15:45:37 WIB
120 Drs. Achmad Chodiq	20/06/2022 15:59:18 WIB
121 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	20/06/2022 16:02:21 WIB
122 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	20/06/2022 16:14:00 WIB
123 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	20/06/2022 16:25:54 WIB
124 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	20/06/2022

	17:12:50 WIB
125 Ir. Kemala Hayati, MT.	20/06/2022 20:39:44 WIB
126 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	20/06/2022 20:40:02 WIB
127 AMAS, S.E., M.M.	20/06/2022 20:40:52 WIB
128 YOGI TRACKA, SE.MM	20/06/2022 21:46:01 WIB
129 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	20/06/2022 22:05:46 WIB

Acara Pembukaan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	20/06/2022 15:30:35 WIB
2	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	20/06/2022 15:30:48 WIB
3	Anita Febrina Zendrato, S.Pi.	20/06/2022 15:32:41 WIB
4	Vice Admira Firnaherera, MPA	20/06/2022 15:34:34 WIB
5	Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	20/06/2022 15:34:41 WIB
6	Harris Taruna Nugroho, S.T.	20/06/2022 15:35:14 WIB
7	Rina Christina, SH.MH.	20/06/2022 15:36:11 WIB
8	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	20/06/2022 15:37:14 WIB
9	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	

	20/06/2022
	15:37:39 WIB
10 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	
	20/06/2022
	15:37:45 WIB
11 Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	
	20/06/2022
	15:37:59 WIB
12 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	
	20/06/2022
	15:38:12 WIB
13 Alfina Fedora Kotta,S.Pd	
	20/06/2022
	15:39:14 WIB
14 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	
	20/06/2022
	15:40:24 WIB
15 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	
	20/06/2022
	15:41:13 WIB
16 M. Ridha Muttaqin, S.Pd.I,MM	
	20/06/2022
	15:41:20 WIB
17 Paramita Wikansari	
	20/06/2022
	15:41:37 WIB
18 Djati Witjaksono Hadi	
	20/06/2022
	15:42:14 WIB
19 Yulius Tiranda, M.Pd	
	20/06/2022
	15:42:34 WIB
20 Reny Nirmala	
	20/06/2022
	15:42:44 WIB
21 Setiowiji Handoyo, SE, ME	
	20/06/2022
	15:42:57 WIB
22 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	
	20/06/2022
	15:43:09 WIB
23 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	
	20/06/2022
	15:44:13 WIB
24 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	
	20/06/2022
	15:44:28 WIB

25 Ratih Purwandari Rusna,SKM	20/06/2022 15:45:29 WIB
26 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	20/06/2022 15:45:48 WIB
27 Dra Rorie Paulina MM	20/06/2022 15:46:17 WIB
28 Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	20/06/2022 15:46:35 WIB
29 Ansozizal Kurniawan.SE.MM	20/06/2022 15:47:40 WIB
30 Hj. Dewi Sartika. SE.MM	20/06/2022 15:47:45 WIB
31 Yossi Apriliana, SE, M. AP	20/06/2022 15:48:47 WIB
32 Puput Putri Sari, S.Si.	20/06/2022 15:49:04 WIB
33 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	20/06/2022 15:49:32 WIB
34 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	20/06/2022 15:49:54 WIB
35 Siti Maesyarah	20/06/2022 15:50:42 WIB
36 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	20/06/2022 15:52:07 WIB
37 Sari Damayanti, SH	20/06/2022 15:52:17 WIB
38 Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	20/06/2022 15:52:43 WIB
39 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	20/06/2022 15:53:02 WIB
40 Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	20/06/2022

	15:53:03 WIB
41 NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	20/06/2022 15:53:06 WIB
42 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	20/06/2022 15:53:51 WIB
43 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	20/06/2022 15:54:14 WIB
44 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	20/06/2022 15:54:28 WIB
45 Firman, SKM., M. PH	20/06/2022 15:56:26 WIB
46 drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	20/06/2022 15:56:27 WIB
47 RAIS ROZALI, SH, MH	20/06/2022 15:56:40 WIB
48 Drs. Achmad Chodiq	20/06/2022 15:59:37 WIB
49 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	20/06/2022 16:00:40 WIB
50 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	20/06/2022 16:02:31 WIB
51 ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	20/06/2022 16:03:57 WIB
52 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	20/06/2022 16:03:58 WIB
53 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	20/06/2022 16:04:24 WIB
54 Sofia Yuniar Sani	20/06/2022 16:06:21 WIB
55 Drs. Deni Ardiana	20/06/2022 16:06:39 WIB
56 Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	

	20/06/2022 16:06:53 WIB
57 Sulikah, S. Ag.	20/06/2022 16:11:39 WIB
58 Dara Mitra Wismaningrum, SKM	20/06/2022 16:12:40 WIB
59 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	20/06/2022 16:14:24 WIB
60 DECKY SUBARJA, S.Psi	20/06/2022 16:15:19 WIB
61 RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	20/06/2022 16:17:49 WIB
62 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	20/06/2022 16:18:36 WIB
63 Drs. H. Nahrudin, M.H	20/06/2022 16:19:42 WIB
64 Imran Nur, S.IP, M.Si	20/06/2022 16:20:53 WIB
65 Nenni Naomi Br. Sitingjak, SE	20/06/2022 16:23:37 WIB
66 Nani Mardiah, S.Farm., Apt	20/06/2022 16:24:42 WIB
67 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	20/06/2022 16:25:18 WIB
68 Davip Arya Bhima, SE, MAB	20/06/2022 16:25:22 WIB
69 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	20/06/2022 16:25:25 WIB
70 Siti Irma Suryani	20/06/2022 16:25:30 WIB
71 Naufal Noor Rochman	20/06/2022 16:25:52 WIB

72 Suliyani, SKM, M.Epid	20/06/2022 16:26:13 WIB
73 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	20/06/2022 16:26:24 WIB
74 Dita Andriasari SH,MH	20/06/2022 16:26:34 WIB
75 MURTONO,SE.,M.Si.	20/06/2022 16:26:44 WIB
76 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	20/06/2022 16:26:45 WIB
77 Heri Kusmanta, M.P.A	20/06/2022 16:27:27 WIB
78 Kania Rahma Nureda, S.H.	20/06/2022 16:27:59 WIB
79 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	20/06/2022 16:31:27 WIB
80 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	20/06/2022 16:32:56 WIB
81 Yana Supriatna	20/06/2022 16:33:12 WIB
82 Isfahriani Sari Nasoetion,SP	20/06/2022 16:33:25 WIB
83 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	20/06/2022 16:44:19 WIB
84 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	20/06/2022 16:52:43 WIB
85 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	20/06/2022 17:13:11 WIB
86 Nurul Hasani	20/06/2022 17:36:16 WIB
87 Tri Wahyu Wijayanti, S.M	20/06/2022

	17:40:38 WIB
88 Swasnita Sihotang, S.Kom	20/06/2022 18:01:16 WIB
89 SISKA YUNI HARTANTI, SE	20/06/2022 18:22:55 WIB
90 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	20/06/2022 18:33:10 WIB
91 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	20/06/2022 18:42:32 WIB
92 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	20/06/2022 18:45:41 WIB
93 Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	20/06/2022 19:56:12 WIB
94 Ir. Kemala Hayati, MT.	20/06/2022 20:40:17 WIB
95 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	20/06/2022 20:40:18 WIB
96 AMAS, S.E., M.M.	20/06/2022 20:41:07 WIB
97 Desy Eka Khairunnisa S.Kom, M.Si	20/06/2022 20:50:20 WIB
98 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	20/06/2022 20:53:27 WIB
99 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	20/06/2022 21:16:04 WIB
100 Made Agus Sugianto, SKM, MKes	20/06/2022 21:23:41 WIB
101 YOGI TRACKA, SE.MM	20/06/2022 21:46:10 WIB
102 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	20/06/2022 22:05:57 WIB

Reaktualisasi dan Implementasi Nilai-Nilai Pancasila

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	21/06/2022 07:32:02 WIB
2	Vice Admira Firnaherera, MPA	21/06/2022 07:32:36 WIB
3	Harris Taruna Nugroho, S.T.	21/06/2022 07:33:45 WIB
4	Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	21/06/2022 07:33:45 WIB
5	Drs. Achmad Chodiq	21/06/2022 07:33:54 WIB
6	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	21/06/2022 07:34:22 WIB
7	Imran Nur, S.IP, M.Si	21/06/2022 07:34:38 WIB
8	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	21/06/2022 07:35:40 WIB
9	Reny Nirmala	21/06/2022 07:36:11 WIB
10	Yossi Apriliana, SE, M. AP	21/06/2022 07:36:47 WIB
11	Siti Maesyaroh	21/06/2022 07:36:56 WIB
12	Alfina Fedora Kotta,S.Pd	21/06/2022 07:37:13 WIB
13	Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	21/06/2022 07:37:38 WIB
14	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	21/06/2022 07:38:24 WIB

15 Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	21/06/2022 07:38:49 WIB
16 Davip Arya Bhima, SE, MAB	21/06/2022 07:39:09 WIB
17 M. Ridha Muttaqin, S.Pd.I,MM	21/06/2022 07:39:23 WIB
18 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	21/06/2022 07:39:38 WIB
19 Ansozizal Kurniawan.SE.MM	21/06/2022 07:40:12 WIB
20 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	21/06/2022 07:40:21 WIB
21 Swasnita Sihotang, S.Kom	21/06/2022 07:40:36 WIB
22 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	21/06/2022 07:41:23 WIB
23 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	21/06/2022 07:42:41 WIB
24 Sofia Yuniar Sani	21/06/2022 07:42:48 WIB
25 Sulikah, S. Ag.	21/06/2022 07:43:30 WIB
26 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	21/06/2022 07:43:49 WIB
27 Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	21/06/2022 07:44:19 WIB
28 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	21/06/2022 07:44:26 WIB
29 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	21/06/2022 07:44:38 WIB
30 RAIS ROZALI, SH, MH	21/06/2022

	07:44:42 WIB
31 Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	21/06/2022
	07:44:54 WIB
32 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	21/06/2022
	07:45:07 WIB
33 drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	21/06/2022
	07:45:14 WIB
34 Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	21/06/2022
	07:45:25 WIB
35 DECKY SUBARJA, S.Psi	21/06/2022
	07:45:32 WIB
36 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	21/06/2022
	07:46:16 WIB
37 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	21/06/2022
	07:46:28 WIB
38 Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	21/06/2022
	07:46:42 WIB
39 Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	21/06/2022
	07:47:06 WIB
40 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	21/06/2022
	07:48:15 WIB
41 Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	21/06/2022
	07:48:31 WIB
42 Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	21/06/2022
	07:48:47 WIB
43 Setiowiji Handoyo, SE, ME	21/06/2022
	07:49:00 WIB
44 SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	21/06/2022
	07:49:35 WIB
45 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	21/06/2022
	07:50:16 WIB
46 Djati Witjaksono Hadi	

	21/06/2022 07:50:20 WIB
47 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	21/06/2022 07:50:25 WIB
48 Dr. Rusdiati Rumiah	21/06/2022 07:52:05 WIB
49 Puput Putri Sari, S.Si.	21/06/2022 07:52:10 WIB
50 Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	21/06/2022 07:52:41 WIB
51 Ir. Nani Rohaeni, MP	21/06/2022 07:52:46 WIB
52 Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	21/06/2022 07:53:14 WIB
53 Dra Rorie Paulina MM	21/06/2022 07:53:39 WIB
54 NOVIA, ST	21/06/2022 07:53:57 WIB
55 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	21/06/2022 07:54:44 WIB
56 Endang Prihayuni, S.Sos	21/06/2022 07:54:53 WIB
57 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	21/06/2022 07:55:22 WIB
58 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	21/06/2022 07:55:50 WIB
59 Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	21/06/2022 07:55:51 WIB
60 Isfahrini Sari Nasoetion,SP	21/06/2022 07:55:58 WIB
61 Sari Damayanti, SH	21/06/2022 07:56:23 WIB

62 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	21/06/2022 07:57:28 WIB
63 Yulius Tiranda, M.Pd	21/06/2022 07:57:46 WIB
64 Christa Gumanti Manik, MPH	21/06/2022 07:58:22 WIB
65 Drs. H. Nahrudin, M.H	21/06/2022 07:58:28 WIB
66 Kania Rahma Nureda, S.H.	21/06/2022 07:58:47 WIB
67 Ir. Kemala Hayati, MT.	21/06/2022 07:58:55 WIB
68 Ali Fauzan, Lc, M. Sos	21/06/2022 07:58:56 WIB
69 Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	21/06/2022 07:59:44 WIB
70 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	21/06/2022 07:59:53 WIB
71 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	21/06/2022 08:01:45 WIB
72 NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	21/06/2022 08:02:45 WIB
73 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	21/06/2022 08:03:20 WIB
74 Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	21/06/2022 08:03:34 WIB
75 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	21/06/2022 08:04:14 WIB
76 AMAS, S.E., M.M.	21/06/2022 08:04:39 WIB
77 Ratih Purwandari Rusna,SKM	21/06/2022

	08:05:00 WIB
78 Dara Mitra Wismaningrum, SKM	21/06/2022
	08:06:09 WIB
79 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	21/06/2022
	08:06:34 WIB
80 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	21/06/2022
	08:06:51 WIB
81 Made Agus Sugianto, SKM, MKes	21/06/2022
	08:06:56 WIB
82 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	21/06/2022
	08:10:02 WIB
83 Rina Christina, SH.MH.	21/06/2022
	08:10:32 WIB
84 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	21/06/2022
	08:10:37 WIB
85 Firman, SKM., M. PH	21/06/2022
	08:12:17 WIB
86 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	21/06/2022
	08:16:56 WIB
87 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	21/06/2022
	08:18:24 WIB
88 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	21/06/2022
	08:18:34 WIB
89 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	21/06/2022
	08:18:51 WIB
90 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	21/06/2022
	08:20:58 WIB
91 MURTONO,SE.,M.Si.	21/06/2022
	08:21:29 WIB
92 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	21/06/2022
	08:24:01 WIB
93 Juherman, S.Si, M.AP	

	21/06/2022 08:26:17 WIB
94 Tuti Kurnia	21/06/2022 08:29:02 WIB
95 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	21/06/2022 08:31:50 WIB
96 Drs. Deni Ardiana	21/06/2022 08:33:40 WIB
97 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	21/06/2022 08:35:27 WIB
98 ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	21/06/2022 08:35:48 WIB
99 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	21/06/2022 08:38:38 WIB
100 Amrih Wigati, S.Sos.MM	21/06/2022 08:38:38 WIB
101 Indriyani, S.KM., M.Si.	21/06/2022 08:41:03 WIB
102 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	21/06/2022 08:44:40 WIB
103 Lusitawati	21/06/2022 08:47:04 WIB
104 Tri Wahyu Wijayanti, S.M	21/06/2022 08:49:40 WIB
105 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	21/06/2022 08:55:31 WIB
106 Nani Mardiah, S.Farm., Apt	21/06/2022 08:57:07 WIB
107 Paramita Wikansari	21/06/2022 09:05:31 WIB
108 Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	21/06/2022 09:07:30 WIB

109 SISKA YUNI HARTANTI, SE	21/06/2022 09:12:46 WIB
110 Hj. Dewi Sartika. SE.MM	21/06/2022 09:14:36 WIB
111 Siti Annisa Silvia Rosa	21/06/2022 09:20:32 WIB
112 RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	21/06/2022 09:24:11 WIB
113 Heri Kusmanta, M.P.A	21/06/2022 09:30:42 WIB
114 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	21/06/2022 09:31:06 WIB
115 Siti Irma Suryani	21/06/2022 09:31:53 WIB
116 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	21/06/2022 09:32:10 WIB
117 Suliyani, SKM, M.Epid	21/06/2022 09:33:36 WIB
118 Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	21/06/2022 09:40:38 WIB
119 Naufal Noor Rochman	21/06/2022 09:40:55 WIB
120 drg. Tince Arniati Jovina, MKM	21/06/2022 10:00:31 WIB

Konstitusi dan Konstitusionalisme

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	drg. Tince Arniati Jovina, MKM	21/06/2022 10:00:54 WIB
2	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	21/06/2022

	10:01:18 WIB
3 Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	21/06/2022 10:01:25 WIB
4 MURTONO,SE.,M.Si.	21/06/2022 10:02:42 WIB
5 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	21/06/2022 10:03:39 WIB
6 SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	21/06/2022 10:04:09 WIB
7 Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	21/06/2022 10:04:14 WIB
8 drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	21/06/2022 10:04:20 WIB
9 Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	21/06/2022 10:04:21 WIB
10 Siti Annisa Silvia Rosa	21/06/2022 10:04:26 WIB
11 Sari Damayanti, SH	21/06/2022 10:04:53 WIB
12 Harris Taruna Nugroho, S.T.	21/06/2022 10:04:54 WIB
13 Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	21/06/2022 10:04:59 WIB
14 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	21/06/2022 10:05:12 WIB
15 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	21/06/2022 10:05:12 WIB
16 Sulikah, S. Ag.	21/06/2022 10:05:14 WIB
17 Siti Maesyarah	21/06/2022 10:05:16 WIB
18 RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	

	21/06/2022 10:05:16 WIB
19 Swasnita Sihotang, S.Kom	21/06/2022 10:05:29 WIB
20 Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	21/06/2022 10:05:34 WIB
21 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	21/06/2022 10:06:34 WIB
22 Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	21/06/2022 10:06:55 WIB
23 Alfina Fedora Kotta, S.Pd	21/06/2022 10:06:55 WIB
24 NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	21/06/2022 10:07:03 WIB
25 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	21/06/2022 10:07:10 WIB
26 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	21/06/2022 10:08:07 WIB
27 Reny Nirmala	21/06/2022 10:08:12 WIB
28 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	21/06/2022 10:08:34 WIB
29 Drs. H. Nahrudin, M.H	21/06/2022 10:09:23 WIB
30 M. Ridha Muttaqin, S.Pd.I,MM	21/06/2022 10:09:44 WIB
31 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	21/06/2022 10:09:55 WIB
32 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	21/06/2022 10:10:16 WIB
33 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	21/06/2022 10:10:20 WIB

34 Dara Mitra Wismaningrum, SKM	21/06/2022 10:11:01 WIB
35 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	21/06/2022 10:11:11 WIB
36 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	21/06/2022 10:11:39 WIB
37 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	21/06/2022 10:11:54 WIB
38 Suliyani, SKM, M.Epid	21/06/2022 10:11:54 WIB
39 Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	21/06/2022 10:11:55 WIB
40 Dita Andriasari SH,MH	21/06/2022 10:12:08 WIB
41 Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	21/06/2022 10:12:28 WIB
42 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	21/06/2022 10:12:35 WIB
43 Hj. Dewi Sartika. SE.MM	21/06/2022 10:12:37 WIB
44 Dra Rorie Paulina MM	21/06/2022 10:12:39 WIB
45 Juherman, S.Si, M.AP	21/06/2022 10:13:12 WIB
46 Firman, SKM., M. PH	21/06/2022 10:13:25 WIB
47 Puput Putri Sari, S.Si.	21/06/2022 10:13:27 WIB
48 Dr. Rusdiati Rumiah	21/06/2022 10:13:55 WIB
49 YOGI TRACKA, SE.MM	21/06/2022

	10:14:11 WIB
50 Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	21/06/2022
	10:14:32 WIB
51 Siti Irma Suryani	21/06/2022
	10:14:32 WIB
52 Ir. Nani Rohaeni, MP	21/06/2022
	10:14:36 WIB
53 Yossi Apriliana, SE, M. AP	21/06/2022
	10:14:53 WIB
54 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	21/06/2022
	10:15:53 WIB
55 Ir. Kemala Hayati, MT.	21/06/2022
	10:16:00 WIB
56 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	21/06/2022
	10:16:01 WIB
57 Kania Rahma Nureda, S.H.	21/06/2022
	10:16:18 WIB
58 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	21/06/2022
	10:16:31 WIB
59 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	21/06/2022
	10:16:51 WIB
60 Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	21/06/2022
	10:17:18 WIB
61 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	21/06/2022
	10:18:20 WIB
62 Drs. Achmad Chodiq	21/06/2022
	10:18:36 WIB
63 Lusitawati	21/06/2022
	10:18:40 WIB
64 Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	21/06/2022
	10:18:51 WIB
65 Tri Wahyu Wijayanti, S.M	

	21/06/2022
	10:19:15 WIB
66 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	
	21/06/2022
	10:19:33 WIB
67 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	
	21/06/2022
	10:19:52 WIB
68 Ansorizal Kurniawan.SE.MM	
	21/06/2022
	10:19:54 WIB
69 Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	
	21/06/2022
	10:20:19 WIB
70 Setiowiji Handoyo, SE, ME	
	21/06/2022
	10:20:29 WIB
71 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	
	21/06/2022
	10:20:39 WIB
72 Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	
	21/06/2022
	10:21:13 WIB
73 RAIS ROZALI, SH, MH	
	21/06/2022
	10:21:46 WIB
74 Davip Arya Bhima, SE, MAB	
	21/06/2022
	10:22:45 WIB
75 Windy kusuma ningrum, SE.MM	
	21/06/2022
	10:23:31 WIB
76 Tuti Kurnia	
	21/06/2022
	10:23:33 WIB
77 Isfahriani Sari Nasoetion,SP	
	21/06/2022
	10:24:11 WIB
78 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	
	21/06/2022
	10:24:51 WIB
79 DECKY SUBARJA, S.Psi	
	21/06/2022
	10:26:51 WIB
80 Rina Christina, SH.MH.	
	21/06/2022
	10:27:39 WIB

81 Indriyani, S.KM., M.Si.	21/06/2022 10:31:22 WIB
82 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	21/06/2022 10:33:41 WIB
83 Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	21/06/2022 10:38:40 WIB
84 Nenni Naomi Br. Sijinjak, SE	21/06/2022 10:38:52 WIB
85 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	21/06/2022 10:43:46 WIB
86 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	21/06/2022 10:44:51 WIB
87 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	21/06/2022 10:48:22 WIB
88 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	21/06/2022 10:48:50 WIB
89 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	21/06/2022 10:51:14 WIB
90 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	21/06/2022 10:51:22 WIB
91 Ratih Purwandari Rusna,SKM	21/06/2022 10:53:27 WIB
92 Sofia Yuniar Sani	21/06/2022 10:54:22 WIB
93 Vice Admira Firnaherera, MPA	21/06/2022 10:59:54 WIB
94 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	21/06/2022 11:00:14 WIB
95 SISKA YUNI HARTANTI, SE	21/06/2022 11:01:03 WIB
96 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	21/06/2022

	11:06:27 WIB
97 Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	21/06/2022
	11:06:46 WIB
98 Drs. Deni Ardiana	21/06/2022
	11:09:35 WIB
99 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	21/06/2022
	11:10:36 WIB
100 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	21/06/2022
	11:12:26 WIB
101 Nani Mardiah, S.Farm., Apt	21/06/2022
	11:14:12 WIB
102 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	21/06/2022
	11:17:49 WIB
103 Djati Witjaksono Hadi	21/06/2022
	11:20:06 WIB
104 Amrih Wigiyati, S.Sos.MM	21/06/2022
	11:29:32 WIB
105 AMAS, S.E., M.M.	21/06/2022
	11:31:18 WIB
106 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	21/06/2022
	11:38:07 WIB
107 Ali Fauzan, Lc, M. Sos	21/06/2022
	11:42:04 WIB
108 DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	21/06/2022
	11:43:00 WIB
109 Imran Nur, S.IP, M.Si	21/06/2022
	11:44:56 WIB
110 Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	21/06/2022
	11:49:56 WIB
111 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	21/06/2022
	11:50:40 WIB
112 Heri Kusmanta, M.P.A	

	21/06/2022 11:51:17 WIB
113 Desi Fitriani,SKM.MSi	21/06/2022 11:53:24 WIB
114 Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	21/06/2022 11:55:52 WIB
115 ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	21/06/2022 11:57:12 WIB
116 Yulius Tiranda, M.Pd	21/06/2022 11:59:26 WIB
117 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	21/06/2022 12:02:29 WIB
118 Endang Prihayuni, S.Sos	21/06/2022 12:04:19 WIB
119 Naufal Noor Rochman	21/06/2022 12:04:20 WIB
120 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	21/06/2022 12:16:17 WIB
121 Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	21/06/2022 12:22:14 WIB

Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Hj. Dewi Sartika. SE.MM	21/06/2022 13:01:29 WIB
2	Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	21/06/2022 13:02:08 WIB
3	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	21/06/2022 13:02:27 WIB
4	Davip Arya Bhima, SE, MAB	

	21/06/2022 13:02:33 WIB
5 NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	21/06/2022 13:02:56 WIB
6 Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	21/06/2022 13:04:09 WIB
7 MURTONO,SE.,M.Si.	21/06/2022 13:04:31 WIB
8 Kania Rahma Nureda, S.H.	21/06/2022 13:04:41 WIB
9 RAIS ROZALI, SH, MH	21/06/2022 13:04:44 WIB
10 Iswiate Utamiputeri, S.Si., M.T.	21/06/2022 13:04:59 WIB
11 Ansorizal Kurniawan.SE.MM	21/06/2022 13:06:10 WIB
12 Alfina Fedora Kotta,S.Pd	21/06/2022 13:06:11 WIB
13 Rina Christina, SH.MH.	21/06/2022 13:06:11 WIB
14 drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	21/06/2022 13:06:31 WIB
15 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	21/06/2022 13:06:51 WIB
16 ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	21/06/2022 13:06:51 WIB
17 Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	21/06/2022 13:06:54 WIB
18 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	21/06/2022 13:07:36 WIB
19 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	21/06/2022 13:08:11 WIB

20 Drs. H. Nahrudin, M.H	21/06/2022 13:08:32 WIB
21 Nurul Hasani	21/06/2022 13:08:50 WIB
22 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	21/06/2022 13:08:58 WIB
23 Ir. Nani Rohaeni, MP	21/06/2022 13:08:58 WIB
24 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	21/06/2022 13:09:42 WIB
25 Tri Wahyu Wijayanti, S.M	21/06/2022 13:09:52 WIB
26 Drs. Achmad Chodiq	21/06/2022 13:09:59 WIB
27 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	21/06/2022 13:10:32 WIB
28 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	21/06/2022 13:10:37 WIB
29 Christa Gumanti Manik, MPH	21/06/2022 13:10:39 WIB
30 Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	21/06/2022 13:10:43 WIB
31 Dara Mitra Wismaningrum, SKM	21/06/2022 13:10:57 WIB
32 Ir. Kemala Hayati, MT.	21/06/2022 13:11:19 WIB
33 Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	21/06/2022 13:11:37 WIB
34 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	21/06/2022 13:11:48 WIB
35 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	21/06/2022

	13:12:13 WIB
36 Siti Annisa Silvia Rosa	21/06/2022
	13:12:42 WIB
37 Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	21/06/2022
	13:13:17 WIB
38 Juherman, S.Si, M.AP	21/06/2022
	13:13:57 WIB
39 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	21/06/2022
	13:14:05 WIB
40 SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	21/06/2022
	13:14:11 WIB
41 Yossi Apriliana, SE, M. AP	21/06/2022
	13:14:49 WIB
42 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	21/06/2022
	13:14:57 WIB
43 Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	21/06/2022
	13:15:27 WIB
44 Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	21/06/2022
	13:15:36 WIB
45 Sulikah, S. Ag.	21/06/2022
	13:16:56 WIB
46 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	21/06/2022
	13:17:45 WIB
47 Isfahriani Sari Nasoetion,SP	21/06/2022
	13:17:50 WIB
48 Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	21/06/2022
	13:18:16 WIB
49 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	21/06/2022
	13:18:16 WIB
50 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	21/06/2022
	13:18:16 WIB
51 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	

	21/06/2022
	13:18:35 WIB
52 Setiowiji Handoyo, SE, ME	
	21/06/2022
	13:19:53 WIB
53 Sari Damayanti, SH	
	21/06/2022
	13:19:56 WIB
54 Siti Maesyarah	
	21/06/2022
	13:20:02 WIB
55 Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	
	21/06/2022
	13:20:08 WIB
56 Drs. Deni Ardiana	
	21/06/2022
	13:21:16 WIB
57 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	
	21/06/2022
	13:21:25 WIB
58 Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	
	21/06/2022
	13:22:02 WIB
59 Ali Fauzan, Lc, M. Sos	
	21/06/2022
	13:22:25 WIB
60 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	
	21/06/2022
	13:22:30 WIB
61 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	
	21/06/2022
	13:22:31 WIB
62 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	
	21/06/2022
	13:22:41 WIB
63 Dra Rorie Paulina MM	
	21/06/2022
	13:23:03 WIB
64 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	
	21/06/2022
	13:23:17 WIB
65 Swasnita Sihotang, S.Kom	
	21/06/2022
	13:23:18 WIB
66 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	
	21/06/2022
	13:23:39 WIB

67 DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	21/06/2022 13:23:40 WIB
68 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	21/06/2022 13:23:51 WIB
69 DECKY SUBARJA, S.Psi	21/06/2022 13:24:34 WIB
70 Dr. Rusdiati Rumiah	21/06/2022 13:24:53 WIB
71 Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	21/06/2022 13:25:20 WIB
72 Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	21/06/2022 13:25:28 WIB
73 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	21/06/2022 13:27:06 WIB
74 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	21/06/2022 13:27:13 WIB
75 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	21/06/2022 13:27:27 WIB
76 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	21/06/2022 13:28:49 WIB
77 Paramita Wikansari	21/06/2022 13:29:10 WIB
78 Dr. Halim, S.H., M.H.	21/06/2022 14:00:54 WIB
79 Djati Witjaksono Hadi	21/06/2022 14:01:27 WIB
80 YOGI TRACKA, SE.MM	21/06/2022 14:04:32 WIB
81 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	21/06/2022 14:06:45 WIB
82 Harris Taruna Nugroho, S.T.	21/06/2022

	14:06:59 WIB
83 M. Ridha Muttaqin, S.Pd.I,MM	21/06/2022 14:08:45 WIB
84 Imran Nur, S.IP, M.Si	21/06/2022 14:08:58 WIB
85 Dita Andriasari SH,MH	21/06/2022 14:09:35 WIB
86 Amrih Wigati, S.Sos.MM	21/06/2022 14:09:48 WIB
87 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	21/06/2022 14:10:01 WIB
88 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	21/06/2022 14:10:36 WIB
89 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	21/06/2022 14:11:10 WIB
90 Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	21/06/2022 14:12:48 WIB
91 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	21/06/2022 14:13:01 WIB
92 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	21/06/2022 14:13:28 WIB
93 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	21/06/2022 14:15:02 WIB
94 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	21/06/2022 14:15:12 WIB
95 AMAS, S.E., M.M.	21/06/2022 14:15:16 WIB
96 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	21/06/2022 14:15:37 WIB
97 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	21/06/2022 14:18:40 WIB
98 Windy kusuma ningrum, SE.MM	

	21/06/2022 14:21:07 WIB
99 Desi Fitriyaneti,SKM.MSi	21/06/2022 14:21:38 WIB
100 Firman, SKM., M. PH	21/06/2022 14:21:45 WIB
101 SISKI YUNI HARTANTI, SE	21/06/2022 14:22:06 WIB
102 Siti Irma Suryani	21/06/2022 14:22:38 WIB
103 Yulius Tiranda, M.Pd	21/06/2022 14:22:44 WIB
104 Suliyani, SKM, M.Epid	21/06/2022 14:23:04 WIB
105 Vice Admira Firnaherera, MPA	21/06/2022 14:23:41 WIB
106 Made Agus Sugianto, SKM, MKes	21/06/2022 14:24:06 WIB
107 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	21/06/2022 14:31:52 WIB
108 Puput Putri Sari, S.Si.	21/06/2022 14:33:22 WIB
109 drg. Tince Arniati Jovina, MKM	21/06/2022 14:38:40 WIB
110 ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	21/06/2022 14:43:41 WIB
111 Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	21/06/2022 14:45:09 WIB
112 Indriyani, S.KM., M.Si.	21/06/2022 14:50:57 WIB
113 Heri Kusmanta, M.P.A	21/06/2022 15:01:42 WIB

114 RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	21/06/2022 15:02:27 WIB
115 Nani Mardiah, S.Farm., Apt	21/06/2022 15:02:33 WIB
116 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	21/06/2022 15:02:36 WIB
117 Ratih Purwandari Rusna,SKM	21/06/2022 15:03:59 WIB
118 Tuti Kurnia	21/06/2022 15:04:19 WIB
119 Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	21/06/2022 15:07:25 WIB
120 Reny Nirmala	21/06/2022 15:12:58 WIB
121 Sofia Yuniar Sani	21/06/2022 15:13:05 WIB
122 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	21/06/2022 15:13:22 WIB
123 Naufal Noor Rochman	21/06/2022 15:22:24 WIB
124 Lusitawati	21/06/2022 15:25:46 WIB

Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Davip Arya Bhima, SE, MAB	21/06/2022 15:30:59 WIB
2	Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	21/06/2022 15:31:11 WIB

3 Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	21/06/2022 15:31:17 WIB
4 Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	21/06/2022 15:31:42 WIB
5 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	21/06/2022 15:31:53 WIB
6 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	21/06/2022 15:31:54 WIB
7 Rina Christina, SH.MH.	21/06/2022 15:32:11 WIB
8 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	21/06/2022 15:32:38 WIB
9 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	21/06/2022 15:32:47 WIB
10 Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	21/06/2022 15:33:26 WIB
11 Dra Rorie Paulina MM	21/06/2022 15:33:55 WIB
12 NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	21/06/2022 15:34:10 WIB
13 Siti Annisa Silvia Rosa	21/06/2022 15:34:18 WIB
14 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	21/06/2022 15:34:25 WIB
15 SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	21/06/2022 15:34:39 WIB
16 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	21/06/2022 15:34:45 WIB
17 Indriyani, S.KM., M.Si.	21/06/2022 15:34:48 WIB
18 Harris Taruna Nugroho, S.T.	21/06/2022

	15:34:52 WIB
19 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	21/06/2022 15:35:16 WIB
20 Siti Irma Suryani	21/06/2022 15:35:27 WIB
21 Djati Witjaksono Hadi	21/06/2022 15:35:39 WIB
22 Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	21/06/2022 15:35:42 WIB
23 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	21/06/2022 15:35:42 WIB
24 Ansorizal Kurniawan.SE.MM	21/06/2022 15:35:50 WIB
25 drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	21/06/2022 15:35:55 WIB
26 Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	21/06/2022 15:36:30 WIB
27 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	21/06/2022 15:36:52 WIB
28 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	21/06/2022 15:37:12 WIB
29 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	21/06/2022 15:39:00 WIB
30 ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	21/06/2022 15:40:08 WIB
31 Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	21/06/2022 15:41:07 WIB
32 Drs. H. Nahrudin, M.H	21/06/2022 15:42:02 WIB
33 Paramita Wikansari	21/06/2022 15:42:07 WIB
34 Alfina Fedora Kotta,S.Pd	

	21/06/2022 15:42:12 WIB
35 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	21/06/2022 15:42:13 WIB
36 Windy kusuma ningrum, SE.MM	21/06/2022 15:42:16 WIB
37 Juherman, S.Si, M.AP	21/06/2022 15:43:40 WIB
38 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	21/06/2022 15:43:41 WIB
39 ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	21/06/2022 15:43:53 WIB
40 Swasnita Sihotang, S.Kom	21/06/2022 15:43:57 WIB
41 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	21/06/2022 15:44:12 WIB
42 Ali Fauzan, Lc, M. Sos	21/06/2022 15:44:13 WIB
43 Nurul Hasani	21/06/2022 15:44:14 WIB
44 Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	21/06/2022 15:44:28 WIB
45 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	21/06/2022 15:44:36 WIB
46 Ir. Nani Rohaeni, MP	21/06/2022 15:45:03 WIB
47 Isfahrini Sari Nasoetion,SP	21/06/2022 15:46:51 WIB
48 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	21/06/2022 15:46:54 WIB
49 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	21/06/2022 15:47:15 WIB

50 RAIS ROZALI, SH, MH	21/06/2022 15:47:46 WIB
51 Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	21/06/2022 15:47:48 WIB
52 Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	21/06/2022 15:47:54 WIB
53 Siti Maesyarah	21/06/2022 15:48:08 WIB
54 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	21/06/2022 15:48:25 WIB
55 Drs. Achmad Chodiq	21/06/2022 15:48:33 WIB
56 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	21/06/2022 15:48:55 WIB
57 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	21/06/2022 15:49:26 WIB
58 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	21/06/2022 15:49:29 WIB
59 Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	21/06/2022 15:49:36 WIB
60 Firman, SKM., M. PH	21/06/2022 15:49:45 WIB
61 Kania Rahma Nureda, S.H.	21/06/2022 15:50:16 WIB
62 Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	21/06/2022 15:50:29 WIB
63 DECKY SUBARJA, S.Psi	21/06/2022 15:50:39 WIB
64 Sulikah, S. Ag.	21/06/2022 15:51:16 WIB
65 Yossi Apriliana, SE, M. AP	21/06/2022

	15:51:25 WIB
66 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	21/06/2022 15:51:47 WIB
67 Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	21/06/2022 15:51:48 WIB
68 Reny Nirmala	21/06/2022 15:51:49 WIB
69 Dita Andriasari SH,MH	21/06/2022 15:53:32 WIB
70 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	21/06/2022 15:54:44 WIB
71 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	21/06/2022 15:56:17 WIB
72 Ir. Kemala Hayati, MT.	21/06/2022 15:57:24 WIB
73 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	21/06/2022 16:00:00 WIB
74 Drs. Deni Ardiana	21/06/2022 16:00:54 WIB
75 Amrih Wigati, S.Sos.MM	21/06/2022 16:01:57 WIB
76 NOVIA, ST	21/06/2022 16:02:11 WIB
77 Setiowiji Handoyo, SE, ME	21/06/2022 16:02:35 WIB
78 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	21/06/2022 16:03:34 WIB
79 AMAS, S.E., M.M.	21/06/2022 16:04:28 WIB
80 Christa Gumanti Manik, MPH	21/06/2022 16:07:36 WIB
81 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	

	21/06/2022 16:07:50 WIB
82 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	21/06/2022 16:09:23 WIB
83 Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	21/06/2022 16:09:33 WIB
84 Dr. Rusdiati Rumiah	21/06/2022 16:10:15 WIB
85 Puput Putri Sari, S.Si.	21/06/2022 16:11:46 WIB
86 RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	21/06/2022 16:11:51 WIB
87 Vice Admira Firnaherera, MPA	21/06/2022 16:11:54 WIB
88 DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	21/06/2022 16:11:59 WIB
89 Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	21/06/2022 16:12:02 WIB
90 Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	21/06/2022 16:14:25 WIB
91 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	21/06/2022 16:15:02 WIB
92 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	21/06/2022 16:15:05 WIB
93 Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	21/06/2022 16:15:23 WIB
94 Ratih Purwandari Rusna,SKM	21/06/2022 16:16:24 WIB
95 Endang Prihayuni, S.Sos	21/06/2022 16:18:30 WIB
96 Nani Mardiah, S.Farm., Apt	21/06/2022 16:18:34 WIB

97 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	21/06/2022 16:19:15 WIB
98 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	21/06/2022 16:19:25 WIB
99 Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	21/06/2022 16:21:05 WIB
100 Naufal Noor Rochman	21/06/2022 16:23:02 WIB
101 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	21/06/2022 16:24:44 WIB
102 Desi Fitriani,SKM.MSi	21/06/2022 16:28:39 WIB
103 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	21/06/2022 16:29:56 WIB
104 Dara Mitra Wismaningrum, SKM	21/06/2022 16:31:51 WIB
105 Made Agus Sugianto, SKM, MKes	21/06/2022 16:32:19 WIB
106 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	21/06/2022 16:33:36 WIB
107 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	21/06/2022 16:34:45 WIB
108 M. Ridha Muttaqin, S.Pd.I,MM	21/06/2022 16:35:21 WIB
109 YOGI TRACKA, SE.MM	21/06/2022 16:42:29 WIB
110 Imran Nur, S.IP, M.Si	21/06/2022 16:42:38 WIB
111 Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	21/06/2022 16:45:45 WIB
112 SISKA YUNI HARTANTI, SE	21/06/2022

		17:00:25 WIB
113 Tuti Kurnia		21/06/2022
		17:01:37 WIB
114 Heri Kusmanta, M.P.A		21/06/2022
		17:06:10 WIB
115 Hj. Dewi Sartika. SE.MM		21/06/2022
		17:09:25 WIB
116 Sari Damayanti, SH		21/06/2022
		17:14:35 WIB
117 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI		21/06/2022
		17:16:26 WIB
118 Yana Supriatna		21/06/2022
		17:17:17 WIB
119 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP		21/06/2022
		17:20:09 WIB
120 MURTONO,SE.,M.Si.		21/06/2022
		17:21:42 WIB
121 Suliyani, SKM, M.Epid		21/06/2022
		17:29:43 WIB
122 Sofia Yuniar Sani		21/06/2022
		17:30:24 WIB
123 Muhammad Daud Yoppirizalady, S.T.		21/06/2022
		17:30:54 WIB
124 Tri Wahyu Wijayanti, S.M		21/06/2022
		17:32:07 WIB

Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	22/06/2022

	07:30:10 WIB
2 RAIS ROZALI, SH, MH	22/06/2022
	07:30:50 WIB
3 Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	22/06/2022
	07:31:50 WIB
4 Davip Arya Bhima, SE, MAB	22/06/2022
	07:32:30 WIB
5 NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	22/06/2022
	07:32:38 WIB
6 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	22/06/2022
	07:33:23 WIB
7 Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	22/06/2022
	07:33:39 WIB
8 MURTONO,SE.,M.Si.	22/06/2022
	07:34:47 WIB
9 Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	22/06/2022
	07:35:49 WIB
10 Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	22/06/2022
	07:36:29 WIB
11 drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	22/06/2022
	07:36:51 WIB
12 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	22/06/2022
	07:36:58 WIB
13 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	22/06/2022
	07:37:30 WIB
14 Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	22/06/2022
	07:37:33 WIB
15 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	22/06/2022
	07:38:03 WIB
16 SITI KHOERIYAH, SE,M.Si	22/06/2022
	07:38:16 WIB
17 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	

	22/06/2022
	07:38:16 WIB
18 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	
	22/06/2022
	07:38:34 WIB
19 Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	
	22/06/2022
	07:38:36 WIB
20 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	
	22/06/2022
	07:38:40 WIB
21 Heri Kusmanta, M.P.A	
	22/06/2022
	07:38:40 WIB
22 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	
	22/06/2022
	07:38:58 WIB
23 Rina Christina, SH.MH.	
	22/06/2022
	07:39:23 WIB
24 Setiowiji Handoyo, SE, ME	
	22/06/2022
	07:39:29 WIB
25 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	
	22/06/2022
	07:39:36 WIB
26 Harris Taruna Nugroho, S.T.	
	22/06/2022
	07:39:46 WIB
27 Dr. Rusdiati Rumiah	
	22/06/2022
	07:40:00 WIB
28 Puput Putri Sari, S.Si.	
	22/06/2022
	07:40:05 WIB
29 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	
	22/06/2022
	07:40:20 WIB
30 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	
	22/06/2022
	07:40:34 WIB
31 Ansorizal Kurniawan.SE.MM	
	22/06/2022
	07:40:37 WIB
32 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	
	22/06/2022
	07:41:04 WIB

33 Djati Witjaksono Hadi	22/06/2022 07:41:14 WIB
34 Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	22/06/2022 07:41:30 WIB
35 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	22/06/2022 07:41:41 WIB
36 Ir. Nani Rohaeni, MP	22/06/2022 07:41:53 WIB
37 Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	22/06/2022 07:42:24 WIB
38 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	22/06/2022 07:42:29 WIB
39 Naufal Noor Rochman	22/06/2022 07:43:04 WIB
40 ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	22/06/2022 07:43:47 WIB
41 Sofia Yuniar Sani	22/06/2022 07:44:05 WIB
42 Hj. Dewi Sartika. SE.MM	22/06/2022 07:44:08 WIB
43 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	22/06/2022 07:44:08 WIB
44 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	22/06/2022 07:45:13 WIB
45 Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	22/06/2022 07:46:05 WIB
46 Reny Nirmala	22/06/2022 07:47:01 WIB
47 DECKY SUBARJA, S.Psi	22/06/2022 07:49:15 WIB
48 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	22/06/2022

	07:50:02 WIB
49 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	22/06/2022
	07:50:03 WIB
50 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	22/06/2022
	07:50:28 WIB
51 Yossi Apriliana, SE, M. AP	22/06/2022
	07:50:47 WIB
52 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	22/06/2022
	07:50:49 WIB
53 NOVIA, ST	22/06/2022
	07:51:17 WIB
54 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	22/06/2022
	07:51:29 WIB
55 Made Agus Sugianto, SKM, MKes	22/06/2022
	07:51:39 WIB
56 Windy kusuma ningrum, SE.MM	22/06/2022
	07:51:46 WIB
57 Drs. Deni Ardiana	22/06/2022
	07:52:19 WIB
58 DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	22/06/2022
	07:52:24 WIB
59 Christa Gumanti Manik, MPH	22/06/2022
	07:53:10 WIB
60 Sari Damayanti, SH	22/06/2022
	07:53:57 WIB
61 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	22/06/2022
	07:54:05 WIB
62 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	22/06/2022
	07:54:31 WIB
63 Imran Nur, S.IP, M.Si	22/06/2022
	07:55:11 WIB
64 Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	

	22/06/2022 07:55:36 WIB
65 Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	22/06/2022 07:55:40 WIB
66 Yulius Tiranda, M.Pd	22/06/2022 07:55:54 WIB
67 Sulikah, S. Ag.	22/06/2022 07:56:31 WIB
68 Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	22/06/2022 07:56:53 WIB
69 ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	22/06/2022 07:56:54 WIB
70 Dra Rorie Paulina MM	22/06/2022 07:59:44 WIB
71 Endang Prihayuni, S.Sos	22/06/2022 08:01:26 WIB
72 Dita Andriasari SH,MH	22/06/2022 08:01:28 WIB
73 Alfina Fedora Kotta,S.Pd	22/06/2022 08:02:59 WIB
74 Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	22/06/2022 08:03:07 WIB
75 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	22/06/2022 08:03:07 WIB
76 Siti Maesyaroh	22/06/2022 08:03:23 WIB
77 Drs. H. Nahrudin, M.H	22/06/2022 08:03:25 WIB
78 SISKI YUNI HARTANTI, SE	22/06/2022 08:03:59 WIB
79 Nurul Hasani	22/06/2022 08:05:05 WIB

80 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	22/06/2022 08:06:25 WIB
81 Siti Irma Suryani	22/06/2022 08:06:36 WIB
82 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	22/06/2022 08:07:02 WIB
83 Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	22/06/2022 08:07:55 WIB
84 Dara Mitra Wismaningrum, SKM	22/06/2022 08:08:21 WIB
85 Swasnita Sihotang, S.Kom	22/06/2022 08:09:09 WIB
86 Juherman, S.Si, M.AP	22/06/2022 08:09:50 WIB
87 Vice Admira Firnaherera, MPA	22/06/2022 08:10:44 WIB
88 Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	22/06/2022 08:10:52 WIB
89 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	22/06/2022 08:12:19 WIB
90 Tri Wahyu Wijayanti, S.M	22/06/2022 08:15:29 WIB
91 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	22/06/2022 08:16:27 WIB
92 Ir. Kemala Hayati, MT.	22/06/2022 08:18:41 WIB
93 drg. Tince Arniati Jovina, MKM	22/06/2022 08:20:23 WIB
94 Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	22/06/2022 08:21:17 WIB
95 Paramita Wikansari	22/06/2022

	08:22:26 WIB
96 Drs. Achmad Chodiq	22/06/2022
	08:22:44 WIB
97 Tuti Kurnia	22/06/2022
	08:22:53 WIB
98 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	22/06/2022
	08:23:00 WIB
99 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	22/06/2022
	08:27:23 WIB
100 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	22/06/2022
	08:28:31 WIB
101 YOGI TRACKA, SE.MM	22/06/2022
	08:29:52 WIB
102 Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	22/06/2022
	08:30:08 WIB
103 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	22/06/2022
	08:32:34 WIB
104 Ratih Purwandari Rusna,SKM	22/06/2022
	08:35:46 WIB
105 Suliyani, SKM, M.Epid	22/06/2022
	08:37:00 WIB
106 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	22/06/2022
	08:37:40 WIB
107 Siti Annisa Silvia Rosa	22/06/2022
	08:38:07 WIB
108 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	22/06/2022
	08:38:20 WIB
109 Lusitawati	22/06/2022
	08:39:38 WIB
110 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	22/06/2022
	08:40:00 WIB
111 AMAS, S.E., M.M.	

	22/06/2022
	08:44:07 WIB
112 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	
	22/06/2022
	08:49:42 WIB
113 Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	
	22/06/2022
	08:50:20 WIB
114 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	
	22/06/2022
	08:54:42 WIB
115 Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	
	22/06/2022
	08:55:24 WIB
116 Kania Rahma Nureda, S.H.	
	22/06/2022
	08:55:52 WIB
117 Isfahriani Sari Nasoetion,SP	
	22/06/2022
	09:01:23 WIB
118 Ali Fauzan, Lc, M. Sos	
	22/06/2022
	09:03:49 WIB
119 RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	
	22/06/2022
	09:04:12 WIB
120 Irawati, M.A.	
	22/06/2022
	09:14:37 WIB
121 Firman, SKM., M. PH	
	22/06/2022
	09:29:01 WIB
122 Nani Mardiah, S.Farm., Apt	
	22/06/2022
	09:30:17 WIB
123 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	
	22/06/2022
	09:41:38 WIB
124 Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	
	22/06/2022
	09:50:57 WIB
125 M. Ridha Muttaqin, S.Pd.I,MM	
	22/06/2022
	09:56:32 WIB

Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	22/06/2022 10:01:02 WIB
2	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	22/06/2022 10:01:05 WIB
3	Reny Nirmala	22/06/2022 10:01:33 WIB
4	Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	22/06/2022 10:01:48 WIB
5	Yossi Apriliana, SE, M. AP	22/06/2022 10:01:55 WIB
6	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	22/06/2022 10:01:57 WIB
7	Siti Annisa Silvia Rosa	22/06/2022 10:02:09 WIB
8	Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	22/06/2022 10:02:49 WIB
9	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	22/06/2022 10:03:19 WIB
10	Sari Damayanti, SH	22/06/2022 10:04:14 WIB
11	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	22/06/2022 10:04:18 WIB
12	Drs. Sjaeful Inwan, M.M., CRMO	22/06/2022 10:04:35 WIB
13	Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	22/06/2022 10:04:38 WIB
14	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	

	22/06/2022 10:04:47 WIB
15 Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	22/06/2022 10:04:47 WIB
16 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	22/06/2022 10:04:49 WIB
17 SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	22/06/2022 10:04:57 WIB
18 Nenni Naomi Br. Sijinjak, SE	22/06/2022 10:04:58 WIB
19 Tuti Kurnia	22/06/2022 10:04:59 WIB
20 Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	22/06/2022 10:05:02 WIB
21 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	22/06/2022 10:05:05 WIB
22 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	22/06/2022 10:05:11 WIB
23 Sofia Yuniar Sani	22/06/2022 10:05:29 WIB
24 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	22/06/2022 10:05:33 WIB
25 Ir. Nani Rohaeni, MP	22/06/2022 10:05:35 WIB
26 Lusitawati	22/06/2022 10:05:49 WIB
27 Swasnita Sihotang, S.Kom	22/06/2022 10:06:01 WIB
28 Sulikah, S. Ag.	22/06/2022 10:06:02 WIB
29 Djati Witjaksono Hadi	22/06/2022 10:06:32 WIB

30 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	22/06/2022 10:06:54 WIB
31 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	22/06/2022 10:06:57 WIB
32 Drs. H. Nahrudin, M.H	22/06/2022 10:07:16 WIB
33 Heri Kusmanta, M.P.A	22/06/2022 10:07:16 WIB
34 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	22/06/2022 10:07:33 WIB
35 Drs. Achmad Chodiq	22/06/2022 10:07:33 WIB
36 Nurul Hasani	22/06/2022 10:07:48 WIB
37 Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	22/06/2022 10:08:11 WIB
38 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	22/06/2022 10:08:36 WIB
39 Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	22/06/2022 10:09:03 WIB
40 Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	22/06/2022 10:09:14 WIB
41 Puput Putri Sari, S.Si.	22/06/2022 10:09:31 WIB
42 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	22/06/2022 10:09:46 WIB
43 Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	22/06/2022 10:10:10 WIB
44 Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	22/06/2022 10:10:14 WIB
45 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	22/06/2022

	10:10:19 WIB
46 Ansorizal Kurniawan.SE.MM	22/06/2022
	10:10:29 WIB
47 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	22/06/2022
	10:10:31 WIB
48 Ratih Purwandari Rusna,SKM	22/06/2022
	10:11:02 WIB
49 Rina Christina, SH.MH.	22/06/2022
	10:11:11 WIB
50 SISKA YUNI HARTANTI, SE	22/06/2022
	10:12:06 WIB
51 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	22/06/2022
	10:12:27 WIB
52 Amrih Wigiati, S.Sos.MM	22/06/2022
	10:13:10 WIB
53 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	22/06/2022
	10:14:29 WIB
54 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	22/06/2022
	10:14:39 WIB
55 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	22/06/2022
	10:14:50 WIB
56 AMAS, S.E., M.M.	22/06/2022
	10:15:01 WIB
57 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	22/06/2022
	10:15:06 WIB
58 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	22/06/2022
	10:15:20 WIB
59 Isfahri Sari Nasoetion,SP	22/06/2022
	10:16:13 WIB
60 Dra Rorie Paulina MM	22/06/2022
	10:16:39 WIB
61 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	

	22/06/2022
	10:18:55 WIB
62 Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	
	22/06/2022
	10:18:59 WIB
63 Alfina Fedora Kotta,S.Pd	
	22/06/2022
	10:19:05 WIB
64 Kania Rahma Nureda, S.H.	
	22/06/2022
	10:19:30 WIB
65 RAIS ROZALI, SH, MH	
	22/06/2022
	10:19:38 WIB
66 Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	
	22/06/2022
	10:19:40 WIB
67 Ir. Kemala Hayati, MT.	
	22/06/2022
	10:19:41 WIB
68 Davip Arya Bhima, SE, MAB	
	22/06/2022
	10:19:56 WIB
69 Dita Andriasari SH,MH	
	22/06/2022
	10:20:12 WIB
70 Yulius Tiranda, M.Pd	
	22/06/2022
	10:20:13 WIB
71 Dr. Rusdiati Rumiah	
	22/06/2022
	10:20:39 WIB
72 Setiowiji Handoyo, SE, ME	
	22/06/2022
	10:20:50 WIB
73 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	
	22/06/2022
	10:20:52 WIB
74 Windy kusuma ningrum, SE.MM	
	22/06/2022
	10:21:24 WIB
75 Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	
	22/06/2022
	10:21:52 WIB
76 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	
	22/06/2022
	10:22:08 WIB

77 Paramita Wikansari	22/06/2022 10:22:18 WIB
78 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	22/06/2022 10:22:23 WIB
79 Siti Maesyarah	22/06/2022 10:22:56 WIB
80 Nani Mardiah, S.Farm., Apt	22/06/2022 10:23:08 WIB
81 Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	22/06/2022 10:23:11 WIB
82 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	22/06/2022 10:24:12 WIB
83 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	22/06/2022 10:25:21 WIB
84 RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	22/06/2022 10:25:56 WIB
85 YOGI TRACKA, SE.MM	22/06/2022 10:27:59 WIB
86 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	22/06/2022 10:29:38 WIB
87 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	22/06/2022 10:32:14 WIB
88 Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	22/06/2022 10:32:24 WIB
89 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	22/06/2022 10:32:51 WIB
90 NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	22/06/2022 10:34:24 WIB
91 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	22/06/2022 10:36:57 WIB
92 Harris Taruna Nugroho, S.T.	22/06/2022

	10:37:06 WIB
93 Juherman, S.Si, M.AP	22/06/2022
	10:37:08 WIB
94 Hj. Dewi Sartika. SE.MM	22/06/2022
	10:38:41 WIB
95 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	22/06/2022
	10:38:53 WIB
96 Vice Admira Firnaherera, MPA	22/06/2022
	10:42:16 WIB
97 Tri Wahyu Wijayanti, S.M	22/06/2022
	10:42:22 WIB
98 Indriyani, S.KM., M.Si.	22/06/2022
	10:43:14 WIB
99 Imran Nur, S.IP, M.Si	22/06/2022
	10:44:15 WIB
100 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	22/06/2022
	10:44:50 WIB
101 ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	22/06/2022
	10:45:15 WIB
102 DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	22/06/2022
	10:49:27 WIB
103 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	22/06/2022
	10:50:37 WIB
104 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	22/06/2022
	10:52:13 WIB
105 Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	22/06/2022
	10:53:36 WIB
106 Desi Fitriani,SKM.MSi	22/06/2022
	10:54:17 WIB
107 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	22/06/2022
	10:55:38 WIB
108 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	

		22/06/2022
		10:59:19 WIB
109 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si		
		22/06/2022
		10:59:34 WIB
110 Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes		
		22/06/2022
		11:01:22 WIB
111 Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.		
		22/06/2022
		11:01:52 WIB
112 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.		
		22/06/2022
		11:02:35 WIB
113 Drs. Deni Ardiana		
		22/06/2022
		11:09:18 WIB
114 Made Agus Sugianto, SKM, MKes		
		22/06/2022
		11:09:54 WIB
115 NOVIA, ST		
		22/06/2022
		11:14:28 WIB
116 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A		
		22/06/2022
		11:31:43 WIB
117 Firman, SKM., M. PH		
		22/06/2022
		11:46:38 WIB
118 M. Ridha Muttaqin, S.Pd.I,MM		
		22/06/2022
		11:50:04 WIB
119 Suliyani, SKM, M.Epid		
		22/06/2022
		11:52:52 WIB
120 MURTONO,SE.,M.Si.		
		22/06/2022
		11:54:05 WIB

Praktik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
----	------	-----

1 NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	22/06/2022 13:00:52 WIB
2 Reny Nirmala	22/06/2022 13:01:07 WIB
3 DECKY SUBARJA, S.Psi	22/06/2022 13:01:42 WIB
4 Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	22/06/2022 13:01:55 WIB
5 Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	22/06/2022 13:02:09 WIB
6 ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	22/06/2022 13:02:40 WIB
7 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	22/06/2022 13:04:09 WIB
8 Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	22/06/2022 13:04:28 WIB
9 Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	22/06/2022 13:04:35 WIB
10 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	22/06/2022 13:04:48 WIB
11 Sari Damayanti, SH	22/06/2022 13:04:49 WIB
12 Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	22/06/2022 13:05:13 WIB
13 Dra Rorie Paulina MM	22/06/2022 13:05:25 WIB
14 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	22/06/2022 13:05:42 WIB
15 RAIS ROZALI, SH, MH	22/06/2022 13:06:11 WIB
16 Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	22/06/2022

	13:06:17 WIB
17 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	22/06/2022 13:06:30 WIB
18 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	22/06/2022 13:06:32 WIB
19 SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	22/06/2022 13:06:35 WIB
20 Swasnita Sihotang, S.Kom	22/06/2022 13:06:36 WIB
21 Dita Andriasari SH,MH	22/06/2022 13:07:03 WIB
22 Christa Gumanti Manik, MPH	22/06/2022 13:07:05 WIB
23 Nurul Hasani	22/06/2022 13:07:08 WIB
24 drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	22/06/2022 13:07:15 WIB
25 Alfina Fedora Kotta,S.Pd	22/06/2022 13:07:17 WIB
26 Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	22/06/2022 13:07:22 WIB
27 Siti Irma Suryani	22/06/2022 13:07:22 WIB
28 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	22/06/2022 13:07:48 WIB
29 Ansorizal Kurniawan.SE.MM	22/06/2022 13:07:53 WIB
30 AMAS, S.E., M.M.	22/06/2022 13:08:07 WIB
31 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	22/06/2022 13:08:26 WIB
32 Harris Taruna Nugroho, S.T.	

	22/06/2022
	13:08:38 WIB
33 Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	
	22/06/2022
	13:08:51 WIB
34 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	
	22/06/2022
	13:09:52 WIB
35 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	
	22/06/2022
	13:09:55 WIB
36 Endang Prihayuni, S.Sos	
	22/06/2022
	13:10:21 WIB
37 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	
	22/06/2022
	13:10:45 WIB
38 Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	
	22/06/2022
	13:11:45 WIB
39 Indriyani, S.KM., M.Si.	
	22/06/2022
	13:11:47 WIB
40 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	
	22/06/2022
	13:12:57 WIB
41 Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	
	22/06/2022
	13:14:34 WIB
42 Drs. H. Nahrudin, M.H	
	22/06/2022
	13:14:44 WIB
43 Kania Rahma Nureda, S.H.	
	22/06/2022
	13:14:45 WIB
44 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	
	22/06/2022
	13:14:50 WIB
45 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	
	22/06/2022
	13:15:36 WIB
46 Tri Wahyu Wijayanti, S.M	
	22/06/2022
	13:15:40 WIB
47 Dr. Rusdiati Rumiah	
	22/06/2022
	13:15:40 WIB

48 Lusitawati	22/06/2022 13:15:42 WIB
49 Ali Fauzan, Lc, M. Sos	22/06/2022 13:16:09 WIB
50 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	22/06/2022 13:17:22 WIB
51 Davip Arya Bhima, SE, MAB	22/06/2022 13:17:30 WIB
52 Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	22/06/2022 13:17:32 WIB
53 Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	22/06/2022 13:18:25 WIB
54 Sulikah, S. Ag.	22/06/2022 13:18:57 WIB
55 Windy kusuma ningrum, SE.MM	22/06/2022 13:19:33 WIB
56 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	22/06/2022 13:20:34 WIB
57 Ratih Purwandari Rusna,SKM	22/06/2022 13:21:31 WIB
58 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	22/06/2022 13:22:07 WIB
59 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	22/06/2022 13:22:17 WIB
60 Drs. Achmad Chodiq	22/06/2022 13:22:56 WIB
61 Drs. Sjaeful Inwan, M.M., CRMO	22/06/2022 13:23:15 WIB
62 Vice Admira Firnaherera, MPA	22/06/2022 13:23:43 WIB
63 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	22/06/2022

	13:25:20 WIB
64 Drs. Deni Ardiana	22/06/2022 13:25:34 WIB
65 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	22/06/2022 13:28:07 WIB
66 Yossi Apriliana, SE, M. AP	22/06/2022 13:29:10 WIB
67 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	22/06/2022 13:30:29 WIB
68 Yulius Tiranda, M.Pd	22/06/2022 13:31:15 WIB
69 Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	22/06/2022 13:31:55 WIB
70 Puput Putri Sari, S.Si.	22/06/2022 13:32:14 WIB
71 Setiowiji Handoyo, SE, ME	22/06/2022 13:34:42 WIB
72 Juherman, S.Si, M.AP	22/06/2022 13:36:14 WIB
73 YOGI TRACKA, SE.MM	22/06/2022 13:37:13 WIB
74 Hj. Dewi Sartika. SE.MM	22/06/2022 13:37:28 WIB
75 SISKI YUNI HARTANTI, SE	22/06/2022 13:37:29 WIB
76 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	22/06/2022 13:37:29 WIB
77 Ir. Nani Rohaeni, MP	22/06/2022 13:39:37 WIB
78 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	22/06/2022 13:42:07 WIB
79 Amrih Wigiyati, S.Sos.MM	

	22/06/2022
	13:45:26 WIB
80 Djati Witjaksono Hadi	
	22/06/2022
	13:49:37 WIB
81 Paramita Wikansari	
	22/06/2022
	13:50:35 WIB
82 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	
	22/06/2022
	13:51:41 WIB
83 Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	
	22/06/2022
	13:56:08 WIB
84 Naufal Noor Rochman	
	22/06/2022
	14:06:26 WIB
85 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	
	22/06/2022
	14:06:45 WIB
86 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	
	22/06/2022
	14:06:54 WIB
87 Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	
	22/06/2022
	14:09:08 WIB
88 Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	
	22/06/2022
	14:09:14 WIB
89 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	
	22/06/2022
	14:11:35 WIB
90 Yana Supriatna	
	22/06/2022
	14:15:46 WIB
91 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	
	22/06/2022
	14:17:18 WIB
92 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	
	22/06/2022
	14:21:19 WIB
93 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	
	22/06/2022
	14:25:26 WIB
94 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	
	22/06/2022
	14:38:21 WIB

95 Rina Christina, SH.MH.	22/06/2022 14:49:18 WIB
96 ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	22/06/2022 14:52:07 WIB
97 Sofia Yuniar Sani	22/06/2022 14:52:10 WIB
98 Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	22/06/2022 14:57:44 WIB
99 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	22/06/2022 15:03:40 WIB
100 DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	22/06/2022 15:03:47 WIB
101 Dara Mitra Wismaningrum, SKM	22/06/2022 15:03:56 WIB
102 Tuti Kurnia	22/06/2022 15:04:04 WIB
103 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	22/06/2022 15:06:49 WIB
104 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	22/06/2022 15:07:58 WIB
105 RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	22/06/2022 15:08:36 WIB
106 Isfahriani Sari Nasoetion,SP	22/06/2022 15:17:02 WIB
107 Ir. Kemala Hayati, MT.	22/06/2022 15:17:41 WIB
108 MURTONO,SE.,M.Si.	22/06/2022 15:18:38 WIB
109 Heri Kusmanta, M.P.A	22/06/2022 15:18:50 WIB
110 Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	22/06/2022

	15:19:39 WIB
111 Made Agus Sugianto, SKM, MKes	22/06/2022
	15:20:51 WIB
112 Desi Fitriani,SKM.MSi	22/06/2022
	15:20:54 WIB
113 Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	22/06/2022
	15:21:05 WIB
114 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	22/06/2022
	15:21:37 WIB
115 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	22/06/2022
	15:23:27 WIB
116 M. Ridha Muttaqin, S.Pd.I,MM	22/06/2022
	15:25:50 WIB
117 Siti Maesyarah	22/06/2022
	15:30:20 WIB
118 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	22/06/2022
	15:43:45 WIB
119 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	22/06/2022
	15:47:00 WIB
120 NOVIA, ST	22/06/2022
	15:57:59 WIB
121 Siti Annisa Silvia Rosa	22/06/2022
	16:11:12 WIB
122 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	22/06/2022
	16:29:12 WIB
123 drg. Tince Arniati Jovina, MKM	22/06/2022
	16:50:48 WIB
124 Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	22/06/2022
	16:55:43 WIB
125 Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	22/06/2022
	16:56:17 WIB

Sistem Informasi Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	23/06/2022 07:30:33 WIB
2	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	23/06/2022 07:31:21 WIB
3	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	23/06/2022 07:31:27 WIB
4	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	23/06/2022 07:31:38 WIB
5	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	23/06/2022 07:31:43 WIB
6	SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	23/06/2022 07:32:43 WIB
7	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	23/06/2022 07:33:20 WIB
8	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	23/06/2022 07:33:45 WIB
9	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	23/06/2022 07:33:48 WIB
10	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	23/06/2022 07:33:59 WIB
11	Harris Taruna Nugroho, S.T.	23/06/2022 07:35:42 WIB
12	Sulikah, S. Ag.	23/06/2022 07:36:03 WIB
13	Paramita Wikansari	23/06/2022 07:37:06 WIB
14	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	23/06/2022 07:39:39 WIB

15 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	23/06/2022 07:40:11 WIB
16 Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	23/06/2022 07:40:22 WIB
17 Hj. Dewi Sartika. SE.MM	23/06/2022 07:40:28 WIB
18 Juherman, S.Si, M.AP	23/06/2022 07:40:52 WIB
19 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	23/06/2022 07:40:55 WIB
20 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	23/06/2022 07:41:12 WIB
21 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	23/06/2022 07:41:36 WIB
22 Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	23/06/2022 07:41:40 WIB
23 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	23/06/2022 07:41:53 WIB
24 Amrih Wigiyati, S.Sos.MM	23/06/2022 07:41:59 WIB
25 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	23/06/2022 07:42:04 WIB
26 Windy kusuma ningrum, SE.MM	23/06/2022 07:42:05 WIB
27 Drs. Achmad Chodiq	23/06/2022 07:42:08 WIB
28 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	23/06/2022 07:42:23 WIB
29 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	23/06/2022 07:42:28 WIB
30 Heri Kusmanta, M.P.A	23/06/2022

	07:42:45 WIB
31 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	23/06/2022 07:43:01 WIB
32 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	23/06/2022 07:43:27 WIB
33 Imran Nur, S.IP, M.Si	23/06/2022 07:44:39 WIB
34 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	23/06/2022 07:44:39 WIB
35 RAIS ROZALI, SH, MH	23/06/2022 07:44:39 WIB
36 Firman, SKM., M. PH	23/06/2022 07:44:58 WIB
37 Naufal Noor Rochman	23/06/2022 07:45:08 WIB
38 Swasnita Sihotang, S.Kom	23/06/2022 07:45:16 WIB
39 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	23/06/2022 07:45:28 WIB
40 Ansorizal Kurniawan.SE.MM	23/06/2022 07:45:42 WIB
41 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	23/06/2022 07:45:53 WIB
42 Davip Arya Bhima, SE, MAB	23/06/2022 07:46:14 WIB
43 Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	23/06/2022 07:46:16 WIB
44 DECKY SUBARJA, S.Psi	23/06/2022 07:46:18 WIB
45 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	23/06/2022 07:46:40 WIB
46 Ir. Nani Rohaeni, MP	

	23/06/2022 07:46:46 WIB
47 Dr. Rusdiati Rumiah	23/06/2022 07:47:54 WIB
48 Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	23/06/2022 07:48:00 WIB
49 Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	23/06/2022 07:48:38 WIB
50 Siti Maesyarah	23/06/2022 07:48:49 WIB
51 Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	23/06/2022 07:49:34 WIB
52 Nurul Hasani	23/06/2022 07:50:06 WIB
53 Djati Witjaksono Hadi	23/06/2022 07:50:10 WIB
54 Rina Christina, SH.MH.	23/06/2022 07:50:23 WIB
55 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	23/06/2022 07:50:24 WIB
56 Ir. Kemala Hayati, MT.	23/06/2022 07:50:49 WIB
57 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	23/06/2022 07:51:00 WIB
58 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	23/06/2022 07:51:01 WIB
59 Drs. H. Nahrudin, M.H	23/06/2022 07:51:34 WIB
60 Setiowiji Handoyo, SE, ME	23/06/2022 07:52:14 WIB
61 Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	23/06/2022 07:52:58 WIB

62 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	23/06/2022 07:53:06 WIB
63 Sari Damayanti, SH	23/06/2022 07:53:17 WIB
64 Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	23/06/2022 07:53:33 WIB
65 Reny Nirmala	23/06/2022 07:53:35 WIB
66 Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	23/06/2022 07:53:35 WIB
67 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	23/06/2022 07:53:53 WIB
68 Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	23/06/2022 07:53:55 WIB
69 Dra Rorie Paulina MM	23/06/2022 07:53:57 WIB
70 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	23/06/2022 07:55:00 WIB
71 Desi Fitriani,SKM.MSi	23/06/2022 07:55:32 WIB
72 Endang Prihayuni, S.Sos	23/06/2022 07:55:50 WIB
73 Puput Putri Sari, S.Si.	23/06/2022 07:56:47 WIB
74 Isfahriani Sari Nasoetion,SP	23/06/2022 07:57:06 WIB
75 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	23/06/2022 07:57:14 WIB
76 Tri Wahyu Wijayanti, S.M	23/06/2022 07:57:48 WIB
77 Siska Yuni Hartanti, SE	23/06/2022

	07:57:50 WIB
78 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	23/06/2022 07:57:58 WIB
79 Made Agus Sugianto, SKM, MKes	23/06/2022 07:58:17 WIB
80 Sofia Yuniar Sani	23/06/2022 07:58:21 WIB
81 Dita Andriasari SH,MH	23/06/2022 07:58:50 WIB
82 Tuti Kurnia	23/06/2022 07:59:16 WIB
83 YOGI TRACKA, SE.MM	23/06/2022 07:59:38 WIB
84 Yossi Apriliana, SE, M. AP	23/06/2022 07:59:59 WIB
85 Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	23/06/2022 08:00:31 WIB
86 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	23/06/2022 08:00:33 WIB
87 DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	23/06/2022 08:01:10 WIB
88 Christa Gumanti Manik, MPH	23/06/2022 08:02:19 WIB
89 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	23/06/2022 08:03:58 WIB
90 Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	23/06/2022 08:04:37 WIB
91 Dara Mitra Wismaningrum, SKM	23/06/2022 08:05:21 WIB
92 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	23/06/2022 08:06:59 WIB
93 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	

	23/06/2022
	08:08:25 WIB
94 Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	
	23/06/2022
	08:09:43 WIB
95 Drs. Deni Ardiana	
	23/06/2022
	08:10:10 WIB
96 RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	
	23/06/2022
	08:12:41 WIB
97 Alfina Fedora Kotta,S.Pd	
	23/06/2022
	08:13:27 WIB
98 Ali Fauzan, Lc, M. Sos	
	23/06/2022
	08:14:00 WIB
99 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	
	23/06/2022
	08:15:44 WIB
100 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	
	23/06/2022
	08:16:22 WIB
101 Siti Irma Suryani	
	23/06/2022
	08:16:24 WIB
102 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	
	23/06/2022
	08:16:46 WIB
103 Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	
	23/06/2022
	08:17:58 WIB
104 Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	
	23/06/2022
	08:18:29 WIB
105 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	
	23/06/2022
	08:18:35 WIB
106 Yulius Tiranda, M.Pd	
	23/06/2022
	08:23:41 WIB
107 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	
	23/06/2022
	08:24:03 WIB
108 Siti Annisa Silvia Rosa	
	23/06/2022
	08:24:27 WIB

109 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	23/06/2022 08:26:21 WIB
110 AMAS, S.E., M.M.	23/06/2022 08:26:31 WIB
111 Kania Rahma Nureda, S.H.	23/06/2022 08:29:40 WIB
112 MURTONO,SE.,M.Si.	23/06/2022 08:29:55 WIB
113 Vice Admira Firnaherera, MPA	23/06/2022 08:35:37 WIB
114 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	23/06/2022 08:37:00 WIB
115 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	23/06/2022 08:40:15 WIB
116 Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	23/06/2022 08:43:16 WIB
117 Indriyani, S.KM., M.Si.	23/06/2022 08:45:14 WIB
118 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	23/06/2022 08:47:48 WIB
119 NOVIA, ST	23/06/2022 08:48:57 WIB
120 Sulyani, SKM, M.Epid	23/06/2022 08:54:03 WIB
121 Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	23/06/2022 08:54:59 WIB
122 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	23/06/2022 09:03:15 WIB
123 Ratih Purwandari Rusna,SKM	23/06/2022 09:14:55 WIB
124 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	23/06/2022

	09:16:32 WIB
125 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	23/06/2022
	09:49:56 WIB
126 ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	23/06/2022
	10:01:15 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	23/06/2022 10:00:16 WIB
2	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	23/06/2022 10:00:51 WIB
3	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	23/06/2022 10:00:52 WIB
4	Sulikah, S. Ag.	23/06/2022 10:01:02 WIB
5	Siti Annisa Silvia Rosa	23/06/2022 10:01:03 WIB
6	Dr. Rusdiati Rumiah	23/06/2022 10:01:07 WIB
7	Siti Irma Suryani	23/06/2022 10:01:13 WIB
8	Hj. Dewi Sartika. SE.MM	23/06/2022 10:01:26 WIB
9	Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	23/06/2022 10:01:31 WIB
10	Djati Witjaksono Hadi	23/06/2022 10:01:32 WIB
11	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	

	23/06/2022
	10:01:38 WIB
12 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	
	23/06/2022
	10:01:42 WIB
13 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	
	23/06/2022
	10:01:49 WIB
14 Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	
	23/06/2022
	10:02:11 WIB
15 Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	
	23/06/2022
	10:02:36 WIB
16 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	
	23/06/2022
	10:02:45 WIB
17 Isfahriani Sari Nasoetion,SP	
	23/06/2022
	10:02:52 WIB
18 Dra Rorie Paulina MM	
	23/06/2022
	10:02:52 WIB
19 Davip Arya Bhima, SE, MAB	
	23/06/2022
	10:02:56 WIB
20 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	
	23/06/2022
	10:03:21 WIB
21 Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	
	23/06/2022
	10:03:36 WIB
22 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	
	23/06/2022
	10:03:45 WIB
23 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	
	23/06/2022
	10:03:45 WIB
24 Dara Mitra Wismaningrum, SKM	
	23/06/2022
	10:03:46 WIB
25 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	
	23/06/2022
	10:03:52 WIB
26 ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	
	23/06/2022
	10:03:55 WIB

27 Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	23/06/2022 10:04:16 WIB
28 Christa Gumanti Manik, MPH	23/06/2022 10:04:16 WIB
29 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	23/06/2022 10:04:47 WIB
30 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	23/06/2022 10:05:05 WIB
31 Ir. Nani Rohaeni, MP	23/06/2022 10:05:15 WIB
32 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	23/06/2022 10:05:35 WIB
33 Ir. Kemala Hayati, MT.	23/06/2022 10:05:42 WIB
34 Ansorizal Kurniawan.SE.MM	23/06/2022 10:05:43 WIB
35 Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	23/06/2022 10:06:13 WIB
36 Paramita Wikansari	23/06/2022 10:06:19 WIB
37 Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	23/06/2022 10:06:57 WIB
38 Setiowiji Handoyo, SE, ME	23/06/2022 10:07:06 WIB
39 Iswiati Utamiputeri, S.Si., M.T.	23/06/2022 10:07:15 WIB
40 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	23/06/2022 10:07:30 WIB
41 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	23/06/2022 10:08:11 WIB
42 Reny Nirmala	23/06/2022

	10:08:52 WIB
43 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	23/06/2022
	10:09:03 WIB
44 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	23/06/2022
	10:09:04 WIB
45 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	23/06/2022
	10:09:07 WIB
46 Yossi Apriliana, SE, M. AP	23/06/2022
	10:10:30 WIB
47 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	23/06/2022
	10:11:12 WIB
48 Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	23/06/2022
	10:11:27 WIB
49 Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	23/06/2022
	10:13:15 WIB
50 Puput Putri Sari, S.Si.	23/06/2022
	10:14:35 WIB
51 drg. Tince Arniati Jovina, MKM	23/06/2022
	10:15:10 WIB
52 Tri Wahyu Wijayanti, S.M	23/06/2022
	10:17:22 WIB
53 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	23/06/2022
	10:17:23 WIB
54 Ali Fauzan, Lc, M. Sos	23/06/2022
	10:17:38 WIB
55 Made Agus Sugianto, SKM, MKes	23/06/2022
	10:17:57 WIB
56 Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	23/06/2022
	10:18:08 WIB
57 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	23/06/2022
	10:18:16 WIB
58 Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	

	23/06/2022 10:18:29 WIB
59 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	23/06/2022 10:18:30 WIB
60 Firman, SKM., M. PH	23/06/2022 10:19:57 WIB
61 Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	23/06/2022 10:23:06 WIB
62 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	23/06/2022 10:24:29 WIB
63 Lusitawati	23/06/2022 10:25:08 WIB
64 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	23/06/2022 10:25:41 WIB
65 DECKY SUBARJA, S.Psi	23/06/2022 10:25:44 WIB
66 Harris Taruna Nugroho, S.T.	23/06/2022 10:25:45 WIB
67 Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	23/06/2022 10:25:51 WIB
68 Suliyani, SKM, M.Epid	23/06/2022 10:26:21 WIB
69 Desi Fitriani,SKM.MSi	23/06/2022 10:26:43 WIB
70 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	23/06/2022 10:27:06 WIB
71 Alfina Fedora Kotta,S.Pd	23/06/2022 10:27:07 WIB
72 AMAS, S.E., M.M.	23/06/2022 10:29:31 WIB
73 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	23/06/2022 10:29:56 WIB

74 Drs. Deni Ardiana	23/06/2022 10:36:00 WIB
75 Heri Kusmanta, M.P.A	23/06/2022 10:37:45 WIB
76 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	23/06/2022 10:38:20 WIB
77 SISKA YUNI HARTANTI, SE	23/06/2022 10:39:14 WIB
78 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	23/06/2022 10:42:11 WIB
79 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	23/06/2022 10:43:42 WIB
80 Nurul Hasani	23/06/2022 10:45:52 WIB
81 MURTONO,SE.,M.Si.	23/06/2022 10:49:19 WIB
82 Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	23/06/2022 10:49:20 WIB
83 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	23/06/2022 10:50:40 WIB
84 SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	23/06/2022 10:53:42 WIB
85 Imran Nur, S.IP, M.Si	23/06/2022 10:57:26 WIB
86 Drs. Achmad Chodiq	23/06/2022 11:00:41 WIB
87 Irawati, M.A.	23/06/2022 11:03:13 WIB
88 Naufal Noor Rochman	23/06/2022 11:03:13 WIB
89 Yulius Tiranda, M.Pd	23/06/2022

	11:03:53 WIB
90 Sari Damayanti, SH	23/06/2022 11:04:03 WIB
91 Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	23/06/2022 11:05:56 WIB
92 RAIS ROZALI, SH, MH	23/06/2022 11:06:30 WIB
93 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	23/06/2022 11:06:30 WIB
94 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	23/06/2022 11:10:13 WIB
95 Juherman, S.Si, M.AP	23/06/2022 11:11:08 WIB
96 Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	23/06/2022 11:13:11 WIB
97 NOVIA, ST	23/06/2022 11:15:59 WIB
98 Endang Prihayuni, S.Sos	23/06/2022 11:24:57 WIB
99 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	23/06/2022 11:26:10 WIB
100 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	23/06/2022 11:28:34 WIB
101 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	23/06/2022 11:30:12 WIB
102 Ratih Purwandari Rusna,SKM	23/06/2022 11:31:30 WIB
103 Siti Kholiyah, SAB, MAP.	23/06/2022 11:33:10 WIB
104 Drs. H. Nahrudin, M.H	23/06/2022 11:34:52 WIB
105 Dita Andriasari SH,MH	

	23/06/2022
	11:36:43 WIB
106 Rina Christina, SH.MH.	
	23/06/2022
	11:37:54 WIB
107 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	
	23/06/2022
	11:44:28 WIB
108 Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	
	23/06/2022
	11:51:25 WIB
109 Swasnita Sihotang, S.Kom	
	23/06/2022
	11:52:23 WIB
110 Amrih Wigiati, S.Sos.MM	
	23/06/2022
	11:53:28 WIB
111 Kania Rahma Nureda, S.H.	
	23/06/2022
	11:53:42 WIB
112 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	
	23/06/2022
	11:54:37 WIB
113 Indriyani, S.KM., M.Si.	
	23/06/2022
	11:58:53 WIB
114 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	
	23/06/2022
	12:03:00 WIB
115 Siti Maesyaroh	
	23/06/2022
	12:04:08 WIB
116 Vice Admira Firnaherera, MPA	
	23/06/2022
	12:04:31 WIB
117 Sofia Yuniar Sani	
	23/06/2022
	12:13:32 WIB
118 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	
	23/06/2022
	12:24:42 WIB

Acara Penutupan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
----	------	-----

1 Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	23/06/2022 13:30:39 WIB
2 Dra Rorie Paulina MM	23/06/2022 13:30:39 WIB
3 ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	23/06/2022 13:30:40 WIB
4 Harris Taruna Nugroho, S.T.	23/06/2022 13:30:45 WIB
5 NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,MM.	23/06/2022 13:30:51 WIB
6 Reny Nirmala	23/06/2022 13:30:52 WIB
7 Firman, SKM., M. PH	23/06/2022 13:30:55 WIB
8 Davip Arya Bhima, SE, MAB	23/06/2022 13:31:01 WIB
9 Gunawan Setyo Nugroho, S.Pd., MM.	23/06/2022 13:31:03 WIB
10 Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	23/06/2022 13:31:05 WIB
11 Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	23/06/2022 13:31:19 WIB
12 Ansozizal Kurniawan.SE.MM	23/06/2022 13:31:24 WIB
13 Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	23/06/2022 13:31:45 WIB
14 Rina Christina, SH.MH.	23/06/2022 13:32:15 WIB
15 Nenni Naomi Br. Sitinjak, SE	23/06/2022 13:32:16 WIB
16 Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	23/06/2022

	13:32:18 WIB
17 SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	23/06/2022 13:32:28 WIB
18 Hj. Dewi Sartika. SE.MM	23/06/2022 13:32:36 WIB
19 Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	23/06/2022 13:32:46 WIB
20 Drs. H. Nahrudin, M.H	23/06/2022 13:32:49 WIB
21 Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	23/06/2022 13:32:55 WIB
22 Yossi Apriliana, SE, M. AP	23/06/2022 13:32:59 WIB
23 Krisdiana Yuliasuti, S.E., M.Si.	23/06/2022 13:34:11 WIB
24 Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	23/06/2022 13:34:26 WIB
25 Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	23/06/2022 13:35:10 WIB
26 Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	23/06/2022 13:35:10 WIB
27 Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	23/06/2022 13:35:34 WIB
28 Iswati Utamiputeri, S.Si., M.T.	23/06/2022 13:35:52 WIB
29 NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	23/06/2022 13:36:34 WIB
30 dr.Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	23/06/2022 13:37:10 WIB
31 Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	23/06/2022 13:37:12 WIB
32 Imran Nur, S.IP, M.Si	

	23/06/2022 13:37:24 WIB
33 Setiowiji Handoyo, SE, ME	23/06/2022 13:37:25 WIB
34 Naufal Noor Rochman	23/06/2022 13:37:27 WIB
35 Dr. Rusdiati Rumiah	23/06/2022 13:39:26 WIB
36 Drs. Deni Ardiana	23/06/2022 13:39:41 WIB
37 Said Moammad Khadafi, ST MT MSc	23/06/2022 13:39:46 WIB
38 Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	23/06/2022 13:40:49 WIB
39 Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	23/06/2022 13:41:55 WIB
40 Dedi Armansyah, S. T., M. T.	23/06/2022 13:42:21 WIB
41 Djati Witjaksono Hadi	23/06/2022 13:42:36 WIB
42 Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	23/06/2022 13:42:46 WIB
43 Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	23/06/2022 13:42:55 WIB
44 Kania Rahma Nureda, S.H.	23/06/2022 13:43:21 WIB
45 Indriyani, S.KM., M.Si.	23/06/2022 13:43:32 WIB
46 Ir. Kemala Hayati, MT.	23/06/2022 13:44:15 WIB
47 Swasnita Sihotang, S.Kom	23/06/2022 13:44:51 WIB

48 YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	23/06/2022 13:44:53 WIB
49 Puput Putri Sari, S.Si.	23/06/2022 13:45:45 WIB
50 Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	23/06/2022 13:45:51 WIB
51 Tuti Kurnia	23/06/2022 13:45:56 WIB
52 Ir. Richard Butar Butar, M.E.	23/06/2022 13:46:03 WIB
53 Dr. Edy Wijayanti,AMK,SE,M.H.kes	23/06/2022 13:46:32 WIB
54 Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	23/06/2022 13:46:51 WIB
55 Dr. Irhamahayati, S. SI, Apt., MTI	23/06/2022 13:46:53 WIB
56 Endang Prihayuni, S.Sos	23/06/2022 13:47:08 WIB
57 Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	23/06/2022 13:47:58 WIB
58 Yulius Tiranda, M.Pd	23/06/2022 13:48:53 WIB
59 Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	23/06/2022 13:49:58 WIB
60 Vice Admira Firnaherera, MPA	23/06/2022 13:50:25 WIB
61 Sari Damayanti, SH	23/06/2022 13:50:39 WIB
62 Sulikah, S. Ag.	23/06/2022 13:51:08 WIB
63 Lusitawati	23/06/2022

	13:51:29 WIB
64 Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	23/06/2022
	13:51:30 WIB
65 Nurul Hasani	23/06/2022
	13:52:38 WIB
66 Amrih Wigiati, S.Sos.MM	23/06/2022
	13:53:18 WIB
67 Muhammad Andi Nasrullah S.IP	23/06/2022
	13:53:27 WIB
68 Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	23/06/2022
	13:53:38 WIB
69 Alfina Fedora Kotta,S.Pd	23/06/2022
	13:54:58 WIB
70 Paramita Wikansari	23/06/2022
	13:55:14 WIB
71 Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	23/06/2022
	13:56:36 WIB
72 Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	23/06/2022
	13:56:42 WIB
73 MURTONO,SE.,M.Si.	23/06/2022
	13:57:14 WIB
74 Christa Gumanti Manik, MPH	23/06/2022
	13:57:48 WIB
75 Siti Maesyaroh	23/06/2022
	13:58:37 WIB
76 drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	23/06/2022
	13:58:46 WIB
77 Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	23/06/2022
	13:58:46 WIB
78 RAIS ROZALI, SH, MH	23/06/2022
	13:59:18 WIB
79 YOGI TRACKA, SE.MM	

	23/06/2022 13:59:27 WIB
80 Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	23/06/2022 14:00:18 WIB
81 Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	23/06/2022 14:01:22 WIB
82 Drs. Achmad Chodiq	23/06/2022 14:01:25 WIB
83 Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	23/06/2022 14:03:54 WIB
84 Sofia Yuniar Sani	23/06/2022 14:04:16 WIB
85 Ir. Nani Rohaeni, MP	23/06/2022 14:04:28 WIB
86 Ali Fauzan, Lc, M. Sos	23/06/2022 14:04:40 WIB
87 DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	23/06/2022 14:05:18 WIB
88 Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	23/06/2022 14:06:25 WIB
89 Desi Fitriani,SKM.MSi	23/06/2022 14:06:38 WIB
90 Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	23/06/2022 14:07:42 WIB
91 I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	23/06/2022 14:07:57 WIB
92 Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	23/06/2022 14:08:21 WIB
93 Ratih Purwandari Rusna,SKM	23/06/2022 14:08:27 WIB
94 Siti Annisa Silvia Rosa	23/06/2022 14:08:31 WIB

95 Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	23/06/2022 14:08:47 WIB
96 Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	23/06/2022 14:09:27 WIB
97 Siti Irma Suryani	23/06/2022 14:15:29 WIB
98 Isfahrini Sari Nasoetion,SP	23/06/2022 14:15:57 WIB
99 Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	23/06/2022 14:17:07 WIB
100 Made Agus Sugianto, SKM, MKes	23/06/2022 14:18:40 WIB
101 Irawati, M.A.	23/06/2022 14:23:28 WIB
102 Heri Kusmanta, M.P.A	23/06/2022 14:26:39 WIB
103 I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	23/06/2022 14:26:44 WIB
104 DECKY SUBARJA, S.Psi	23/06/2022 14:28:27 WIB
105 Juherman, S.Si, M.AP	23/06/2022 14:29:09 WIB
106 Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	23/06/2022 14:32:01 WIB
107 Monalisa Herawati Rumayar,S,Pt,M,Si	23/06/2022 14:32:05 WIB
108 Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	23/06/2022 14:32:59 WIB
109 Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	23/06/2022 14:33:35 WIB
110 DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	23/06/2022

14:50:59 WIB

111 Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si

23/06/2022

14:53:04 WIB

112 Dara Mitra Wismaningrum, SKM

23/06/2022

14:59:58 WIB

113 ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si

23/06/2022

15:39:04 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-
UNDANG DAPAT DIUNDUH MELALUI
AKUN SIMULTAN PESERTA DENGAN
LOGIN TERLEBIH DULU DI LAMAN:

pusdik.mkri.id

BISA DIUNDUH
JUGA MELALUI
GRUP TELEGRAM

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek pada Zoom Meeting 13.00 – 15.00 WIB
- Sesi Praktek Mandiri 15.00 – 17.00 WIB
- Peserta Menyusun Permohonan Pengujian Undang-Undang berdasarkan Soal yang Ditentukan
- Tugas Individu
- Mengunduh Template Permohonan PUU dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut

Tugas Praktek dikirim ke *e-mail*:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Instansi>

Contoh: 234_Lionel Messi_Mahkamah Konstitusi

Nama File Ms. Word:

<No. Registrasi> _ <Nama Peserta> _ <Asal Instansi >

Contoh: 234_Lionel Messi_Mahkamah Konstitusi

KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00 WIB
Hari Rabu,
22 Juni 2022**

***Apabila melewati batas waktu, kami anggap peserta tidak mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
(Dibuat asli oleh Masing-
Masing Peserta)**



**Nilai Tugas Praktik Minimal
adalah 60, Nilai di Bawah 60
Tidak Mendapatkan Sertifikat**

***Peserta yg Tugas Praktiknya
sama (*Copy Paste*), Baik yg
Mencontek maupun yg
Dicontek, Otomatis Nilainya di
Bawah 60**

***Template Tugas Praktik harus
diisi secara lengkap, dari
Identitas Pemohon sampai ke
Petitum**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & *Typo* (20%)



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

KELAS 1

Narasumber

: Anna Triningsih

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	1	DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc.	Kemenko Perekonomian	85	80	80	81
2	2	A.M. Suhriawan S, S.STP, MM	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan				0
3	3	Agus Supriyadi, S.Kep.,Ns	Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang	85	80	85	82
4	4	Akhmat Munawar, M.Si.	Kemenko Perekonomian				0
5	5	Alfina Fedora Kotta,S.Pd	LAN	85	80	85	82
6	6	Ali Fauzan, Lc, M. Sos	Kementerian Agama	85	80	85	82
7	7	Almi Yunita Dewi, SE.,MSi.,Ak	Pemerintah Kota Depok	85	80	85	82
8	8	AMAS, S.E., M.M.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	80	80	80	80
9	9	Amni Zarkasyi Rahman, S.A.P., M.Si	Universitas Diponegoro	85	80	80	81
10	10	Amrih Wigati, S.Sos.MM	Kementerian Koperasi dan UKM	80	75	80	77
11	11	Andhi Kurniawan, S.Hut, M.Si.	Lembaga Administrasi Negara RI	85	80	85	82
12	12	Andi Miftahul Farid, ST, M.Ec.Dev	Pemerintah Kabupaten Natuna	85	80	85	82
13	13	Muhammad Andi Nasrullah S.IP	Setjen DPD	85	80	85	82
14	14	Anindita Kusumawardani, S.STP, M.Si	Sekretariat Daerah Provinsi Riau	85	80	85	82
15	15	Anita Febrina Zendrato, S.Pi.	Kementerian Kelautan dan Perikanan				0
16	16	Ansorzal Kurniawan.SE.MM	Selda Kota Metro	80	80	85	81
17	17	ARIFINA DHAMESWARI, S.E., Akt., M.Ak.	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	80	80	80	80
18	18	ASNI ASTUTI, S.STP, M.Si	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	80	80	80	80
19	19	Ayurisya Dominata, S.IP.,M.A.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	80	80	80	80
20	20	Atifah Hanum Adhawiyarti, SSTP	Pemerintah Kota Bontang				0
21	21	Buana Fauzi Februari, SE., SH., MM	Pemerintah Kota Tanjungpinang	75	70	75	72
22	22	Christa Gumanti Manik, MPH	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kemakes	85	85	85	85
23	23	Dara Mitra Wismaningrum, SKM	Kementerian Kesehatan	85	85	85	85
24	24	Davip Arya Bhima, SE, MAB	KemenPPPA	85	85	85	85
25	25	Deasywaty, S.Si., M.Si	Badan Pengawas Obat dan Makanan				0
26	26	DECKY SUBARJA, S.Psi	Kementerian Perhubungan	80	80	80	80
27	27	Dedi Armansyah, S. T., M. T.	Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi	85	80	80	81

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek1@gmail.com ; Password e-mail: **pusdikmk**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

KELAS 2

Narasumber

: TITIS ANINDYAJATI

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL INSTANSI	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	28	Desi Fitriani, SKM, MSI	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI	80	68	72	71.2
2	29	Desy Eka Khairunnisa S.Kom, M.Si	Badan Riset dan Inovasi Nasional				
3	30	DIAN JUNI EKASARI, SST, SKM, M.KEB	RSUD RAJA AHMAD TABIB	80	66	74	70.4
4	31	DIKY PRANATA KUSUMA, S.H., M.H.	KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI				
5	32	Dita Andriasari SH, MH	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	80	81	80	80.6
6	33	dr. Anna Maria Nurhaji Widjaja	RSUD Kab. Bekasi				
7	34	Dr. Edy Wijayanti, AMK, SE, M.H. kes	Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta	80	68	76	72
8	35	Dr. Frendy Ahmad Afandi, STP, M.Si	Kemendagri Bidang Perekonomian	80	69	80	73.4
9	36	Dr. H. Abdul Ghofar, M.Pd	Kementerian Komunikasi dan Informatika	80	68	71	71
10	37	Dr. Halim, S.H., M.H.	Lembaga Administrasi Negara RI				
11	38	Dr. Hariyanto, S.Kom., M.T.I.	BRIN - Badan Riset dan Inovasi Nasional	80	68	72	71.2
12	39	Dr. Ir. Erma Suryani, M.Si.	Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian Pertanian	80	70	72	72.4
13	40	Dr. Ir. Erry Ricardo Nurzal, MT., MPA	BRIN	80	75	77	76.4
14	41	Dr. Ir. Sylvana Ratina, M.Si	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80	75	77	76.4
15	42	Dr. Irhamahayati, S. Si, Apt., MTI	Badan Pengawas Obat dan Makanan	85	75	80	78
16	43	Dr. Moch. Ali Mashuri, S.Sos, M.Si	Pemerintah Kota Mojokerto	80	68	76	72
17	44	Dr. Mukti Eka Rahadian, MARS, MPH	Pusat Kebijakan Upaya Kesehatan	80	70	77	73.4
18	45	Dr. Rusdiati Rumiah	Badan Riset dan Inovasi Nasional	80	70	72	72.4
19	46	dr. Silvia Indri Sari Sihombing M.Si	RSUD Kabupaten Bekasi	80	68	74	71.6
20	47	Dra Rorie Paulina MM	Pemerintah Kabupaten Malang	80	66	72	70
21	48	Dra. Arifah, MTI, IPM	Kementerian Komunikasi dan Informatika				
22	49	Dra. SANDRA IMELDA HANAFIAH, M.Si	Pemerintah Kota Padang				
23	50	drg Siti Riswani Aisyah	Kemendes RI				
24	51	drg. Tince Arniati Jovina, MKM	BKPK Kemendes RI	80	68	73	71.4
25	52	drg. Viviyanti, DPH, MHealSc	Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Kabupaten Riau	80	69	72	71.8
26	53	Drs. Achmad Chodiq	BRIN RI	80	71	73	73.2
27	54	Drs. Deni Ardiana	Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor	80	80	78	79.6

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek2@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

KELAS 3

Narasumber :

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	55	Drs. H. Nahrudin, M.H	Kemenag				0
2	56	Drs. Sjaeful Irwan, M.M., CRMO	Kemendikbudristek	85	85	85	85
3	57	Elina, SE., M.Ec.Dev., Ak	BPK RI	85	83	85	83.8
4	58	Endang Prihayuni, S.Sos	Kementerian Kesehatan	85	85	85	85
5	59	Eni Dwiniarsih, S.T., M. M	Pemerintah Kota Jogjakarta				0
6	60	Erwin Reynold Silalahi, ST, MT	Kementerian Perindustrian				0
7	61	Etik Suandari S.E., M.Acc., Ak	Badan Pemeriksa KeuanganRI				0
8	62	Eva Wany Ellyza S.E.,M.E.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	85	83	85	83.8
9	63	Farida Ishak Indrawan, SE	Kementerian Koordinator Bidang Litbang dan Diklat				0
10	64	Ferdiansyah, S.Kom., M.T.	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI	85	83	85	83.8
11	65	Fertiana Santy, MPPM, Ph.D	Kementerian Agama				0
12	66	Firman, SKM., M. PH	UAD	85	83	85	83.8
13	67	Frans Riady JS, ST	Kemenko Kematitan dan Investasi				0
14	68	Gokma P. Simamora, S.Pt., M.M.	Kementerian Desa, PDT Dan Transmigrasi				0
15	69	Gunawan Setyo Nugroho	Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Administrasi Jakarta Barat, Pemerintah	85	86	85	85.6
16	70	Harris Taruna Nugroho, S.T.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	85	85	85	85
17	71	Heldha Oktavia Mega Puspita, S.A.P., M. PA	Badan riset dan inovasi nasional	85	83	85	83.8
18	72	Heri Kusmanta, M.P.A	Badan Riset dan Inovasi Nasional	85	85	85	85
19	73	Hj. Dewi Sartika. SE.MM	Puslatbang KDOD LANRI				0
20	74	Hj. Hasmiah., S. Pt., M. AP	Pemerintah Kabupaten Nunukan	85	85	85	85
21	75	Hj. Ns. Ening Setianingsih, S. Kep	RSUD Kab Bekasi	84	83	85	83.6
22	76	I Gusti Ayu Ngurah Lita Rumiati, SE	Balitbang Kab. Badung	85	85	85	85
23	77	I Made Bram Sarjana, S.IP.,M.Par,M.Sc	Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung	85	85	85	85
24	78	Imran Nur, S.IP, M.Si	Biro Organisasi Setda Provinsi Sulawesi Selatan	85	83	85	83.8
25	79	Indra Prasetya Adi Nugroho, S. IP, MA	Kemenko PMK	87	90	87	88.8
26	80	Indriyani, S.KM., M.Si.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	85	85	85	85
27	81	Inti Priswari, S.IP	Sekretariat Jenderal Bawaslu				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek3@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

KELAS 4

Narasumber

:

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	82	Ir. Anak Agung Istri Agung Widyawati	Balitbang Kabupaten Badung	78	78	78	78
2	83	Ir. Djati Witjaksono Hadi, M.Si., IPU.	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80	80	80	80
3	84	Ir. I Wayan Sukarsa, M.M.A	Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Badung	78	78	78	78
4	85	Ir. Kemala Hayati, MT.	Badan Perencanaan dan Pengembangan Kota Denpasar	73	73	73	73
5	86	Ir. Maria Nunik Sumartini, MP	Kementan	80	80	80	80
6	87	Ir. Nani Rohaeni, MP	Pemerintah Kabupaten Garut	78	78	78	78
7	88	Ir. Richard Butar Butar, M.E.	Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi				0
8	89	Irawati, M.A.		78	78	78	78
9	90	Isfahri Sari Nasoetion, SP	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	80	80	80	80
10	91	Iswiati Utamiputeri	Kemenko Marves	73	73	73	73
11	92	Iwan Ridwan Stiaji, M.AP	BRIN	70	70	70	70
12	93	Juherman, S.Si, M.AP	Kemenkop UKM	78	78	78	78
13	94	Kania Rahma Nureda, S.H.	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	80	80	80	80
14	95	KRISDIANA YULIASTUTI, SE, MS.i	Dinas Perencanaan, Inovasi dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja Kota	80	80	80	80
15	96	Dr. Lia Fitrianingrum, MH.	PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT	78	78	78	78
16	97	Lisa Ambarsari, S.T., M.S.E.	DEN	80	80	80	80
17	98	Lusitawati	Kementrian kesehatan	80	80	80	80
18	99	Irmawati, S.KM., M.EPID.	Badan Riset dan Inovasi Nasional				0
19	100	M. Ridha Muttaqin, S.Pd.I,MM	Pemerintah Kabupaten Balangan				0
20	101	Made Agus Sugianto, SKM, MKes	Badan Perencanaan dan Pengembangan Kabupaten Badung	78	78	78	78
21	102	Mahardhika Berliandaldo, SE.,MM.	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	80	80	80	80
22	103	Monalisa Herawati Rumayar, S.Pt.M, Si	Kemenko PMK	80	80	80	80
23	104	Muhammad Daud Yoppirizaldy, S.T.	Kementerian ESDM				0
24	105	MURTONO, SE., M.Si.	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL PROV. JABAR	80	80	80	80
25	106	Nagiot Cansalony Tambunan, SKM, ME	Kementerian Kesehatan	83	83	83	83
26	107	NANANG HARTONO DWI SAPUTRA, S.Kom.,M	Sekretariat Daerah Kota Probolinggo Prov. Jawa Timur	78	78	78	78
27	108	Nani Mardiah, S.Farm., Apt	Badan Pengawas Obat dan Makanan				0

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek4@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

KELAS 5

Narasumber : intan permata putri

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	109	Naufal Noor Rochman, S.T.	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	80	85	88	84.6
2	110	Nenni Naomi Br. Sitingjak, SE	Kementerian Koperasi dan UKM	85	85	85	85
3	111	Ni Luh Putu Suardiyanti, S.Pd.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	80	80	80	80
4	112	Noel Sita Rukmi, SKM,MKM	KemenPPPA	83	85	88	85.2
5	113	NOVIA, ST	Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kepulauan Riau	80	85	88	84.6
6	114	Nurmala Eka Putri, S.Sos., M.Si	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	80	85	88	84.6
7	115	NURMIRHAM, S.IP.,M.P.A.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT	88	90	90	89.6
8	116	Nurul Hasani, S.T., M.Si.	Badan Siber dan Sandi Negara	85	86	88	86.2
9	117	Paramita Wikansari, S.E., M.E.	Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	80	85	88	84.6
10	118	Puput Putri Sari, S.Si.	Bawaslu Provinsi Lampung	88	88	88	88
11	119	Putra Budi Darmawan, S.Pd.I., M.H.	Lembaga Administrasi Negara	80	85	88	84.6
12	120	RAIS ROZALI, SH, MH	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	85	85	88	85.6
13	121	Ratih Purwandari Rusna,SKM	RSUD Kabupaten Bekasi	85	86	88	86.2
14	122	Reny Nirmala, S.E., M.P.A.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	85	85	88	85.6
15	123	Riko Noviantoro, S.ST, M.AP	Lembaga kajian IDP-LP	80	85	80	83
16	124	Rina Christina, SH.MH.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	80	80	80	80
17	125	RUSDI TAHIR,ST.M.S.Ey	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	80	75	75	76
18	126	Said Moammar Khadafi, ST MT MSc	Kementerian Perhubungan	88	89	90	89
19	127	Sari Damayanti, SH	Kementerian Agama	80	85	88	84.6
20	128	Setiowiji Handoyo, SE, ME	BRIN	85	85	88	85.6
21	129	SISKA YUNI HARTANTI, SE	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA MACELANG	85	85	85	85
22	130	Siti Annisa Silvia Rosa	Badan Riset dan Inovasi Nasional	85	86	88	86.2
23	131	Siti Irma Suryani	Pemkot Tangerang Selatan	80	80	80	80
24	132	SITI KHOERiyAH, SE,M.Si	KEMENTERIAN DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN	80	85	88	84.6
25	133	Siti Kholyah, SAB, MAP.	BRIN	85	88	88	87.4
26	134	Siti Maesyarah, S.Kom., M.M.	Kementerian Koperasi dan UKM	80	80	80	80

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek5@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

KELAS 6

Narasumber :

NO.	NO REG.	NAMA	ASAL DAERAH	PENILAIAN			TOTAL
				SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
1	135	Sofia Yuniar Sani, S.Sos.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	80	75	80	77
2	136	Sri Wahyuni, S.Si., M.Si	Sekretariat DPRD Provinsi Kepulauan Riau	80	75	80	77
3	137	SRI YANTI M, S.Kom	Pemerintah provinsi kepulauan riau				0
4	138	Subur Widodo, S.KM., M.A.	Kementerian Kesehatan				0
5	139	Suci Ingrid Daniati, M.Si.	Kementerian Perdagangan				0
6	140	Sukantoro, S.KM., M.Kes.	Pemerintah Kota Yogyakarta				0
7	141	Sukmawati Amir, S.Pd., M.Si	Kemendesa, PDT dan Transmigrasi	80	80	80	80
8	142	Sulikhah, S. Ag.	Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	80	78	80	78.8
9	143	Sulyani, SKM, M.Epid	Kementerian Kesehatan				0
10	144	Supriati, S.H., M.H.	Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan				0
11	145	Suripto, S.Si., M.T.	Badan Riset dan Inovasi Nasional				0
12	146	Swasni Sihotang, S.Kom	Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi	80	75	80	77
13	147	Syarifuddin, S.Sos., M.Si.	Pusat Pembinaan Pelatihan dan Sertifikasi Mandiri				0
14	148	Tomy Risqi Dinihari, SH. M.Hum	Kementerian Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	80	75	80	77
15	149	Tri Wahyu Wijayanti, S.M	Pemkab Lamongan	80	74	80	76.4
16	150	Tuti Kurnia, S.P., M.M.	Pemerintah Kota Padang	80	75	80	77
17	151	Vice Admira Firnaherera, MPA	Kementerian Dalam Negeri	80	80	80	80
18	152	Vivi Elvina Panjaitan, S.I.P., M.K.P.	BRIN				0
19	153	Windy kusuma ningrum, SE.MM	Pemerintah Kota Metro				0
20	154	Yana Supriatna, S.P.	Pemerintah Kota Bandung				0
21	155	YOGI TRACKA, SE.MM	PEMERINTAH KOTA METRO				0
22	156	Yossi Apriliana, SE, M. AP	Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	80	80	80	80
23	157	YULIARDI AGUNG PRADANA, S.A.P., M.Si.	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	80	75	80	77
24	158	Yulius Tiranda, M.Pd	Setda Kabupaten Bangka Barat	80	75	80	77
25	159	Yustina Nita Sulistami, S.Kom., M.TIM.	Badan Riset dan Inovasi Nasional	80	74	80	76.4
26	160	Yusuf Hasanudin, S. Hut., MT	Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat	80	80	80	80

Catatan:

Range Nilai: 60 s.d. 90

Email Pengumpulan Tugas: tugasbimtek6@gmail.com ; Password e-mail: **mahkamah**

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

NAMA NARASUMBER : ANNA TRININGSIH

KELAS : I

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Kegiatan Bimtek peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pengurus dan anggota AAKI untuk sesi evaluasi penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 berjalan lancar</p> <p>Peserta yang terdaftar dalam kegiatan Bimtek untuk sesi evaluasi penyusunan permohonan terdiri dari 27 peserta</p> <p>Dari jumlah peserta tersebut, yang mengumpulkan tugas sebanyak 22 peserta dan yang tidak mengumpulkan tugas sebanyak 5 peserta.</p>
2	<p>Semua tugas yang dikirimkan oleh peserta ke email panitia sesuai dengan soal kasus yang diberikan.</p> <p>Tugas penyusunan permohonan yang telah dikumpulkan juga sudah sesuai dengan sistematika penyusunan permohonan sehingga dapat disimpulkan bahwa Peserta memahami materi serta dapat mengaplikasikan materi yang didapat ke dalam praktik penyusunan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.</p> <p>Dalam tugas yang dikumpulkan oleh peserta melalui email panitia, dapat disimpulkan bahwa peserta sudah menggunakan template yang diberikan panitia dalam menyusun permohonan hanya saja peserta kurang mengelaborasi kerugian hak konstitusional pemohon dalam permohonannya serta kurang mengelaborasi pokok-pokok permohonannya.</p>
3	<p>Selama sesi evaluasi BIMTEK ini terdapat 2 peserta yang melakukan presentasi antara lain peserta atas nama (22) Christa Gumanti Manik, MPH (10) Amrih Wigiati, S.Sos.MM</p> <p>Dalam sesi tanya jawab sebanyak 4 peserta yang bertanya antara lain peserta atas nama (01) DR. Ing. Totok Hari Wibowo, MSc; (13) Muhammad Andi Nasrullah S.IP; (10) Amrih Wigiati, S.Sos.MM dan (16) Ansorizal Kurniawan.SE.MM</p>

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

NAMA NARASUMBER : TITIS ANINDYAJATI

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Perlu adanya pemahaman lebih dalam mengenai permohonan baik konstitusional maupun inkonstitusional bersyarat karena masih banyak ditemukan adanya petitum bersyarat yang tidak sesuai dengan pokok permohonannya.
	Dalam suatu permohonan yang baik perlu adanya kesesuaian antara pokok permohonan dengan petitum yang diajukan untuk menunjukkan adanya koherensi dan kejelasan maksud Pemohon terhadap perkara yang diajukan.
2	Beberapa peserta sudah ada yang memahami adanya konsep penulisan petitum yang bersyarat namun perlu adanya penjelasan misalnya dalam kasus pengujian ini mengapa mereka harus dikategorikan miskin dan mengapa orang miskin perlu diperlakukan berbeda dalam perkara tersebut. Untuk itu perlu diberi penekanan untuk mempertentangkan adanya hak konstitusional dalam konstitusi dengan hak yang dilanggar dalam kasus tertentu misalnya kasus konkrit. Perlu adanya benang merah untuk menghubungkan kedua hal tersebut.
3	Terdapat peserta yang ternyata belum dapat memahami konsep pokok permohonan dan posita permohonan. Selain itu perlu kah dijelaskan lagi bagaimana konsep Ketika ada satu pasal yang diujikan dan berkait dengan pasal lainnya seperti ketentuan Pasal 281 UU Lantas yang berkait dengan ketentuan Pasal 77 UU Lantas. Bagaimana uraian pokok permohonan dan petitumnya apakah sama dengan permohonan pasal yang tidak berkait dengan pasal lainnya atau UU lainnya.

4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

11	
12	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA PA AAKI

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	<p>Peserta sangat antusias mengikuti kegiatan. Pertanyaan banyak dan beragam tidak hanya terkait materi tetapi juga terkait dengan perkembangan terbaru hukum tata Negara dan putusan MK. Perlu pengayaan dengan membuat program bagi alumni Pusdik untuk mengikuti seminar-seminar singkat yang bersifat umum.</p>
2	
3	
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

NAMA NARASUMBER : Abdul Ghoffar

KELAS : 4

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1.	Peserta yang mengumpulkan tugas hanya sekitara 30 persen. Dengan demikian, terlihat bahwa peserta kurang serius dalam mengikuti kegiatan ini.
2.	Dari sekitar 30 persen yang mengumpulkan tugasnya tersebut, terdapat beberapa peserta yang masih banyak tidak diisi semuanya. Misalnya, pada bagian posita dana petitum, terdapat beberapa peserta yang masih dibiarkan "titik-titik" yang patut diduga itu hanya copy paste dari template yang dibagikan panitia dan belum diisi secara lengkap oleh peserta. Bahkan terdapat peserta yang hanya mengumpulkan permohonan yang masih terdapat berbagai tanda merah dan coretan hampir di setiap halaman.
3.	Selain itu, terdapat peserta yang pada bagian perihal tidak mencantumkan batu ujinya. Peserta tersebut menuliskan sebagai berikut: <i>"Perihal: Pasal 281 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Adapun bunyi dari pasala tersebut adalah "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)."</i>
4.	Dari yang sudah melengkapi "isian" template permohonan tersebut, secara umum peserta sudah memahami konsep dasar cara membuat permohonan pengujian materiil UU terhadap UUD 1945. Meski demikian, masih banyak hal yang perlu diperdalam kembali, sebagai berikut.
5.	Pertama, dari segi sistematika permohonan, secara umum sudah sangat baik. Hal demikian bisa dilihat bahwa, pada semua permohonan yang disampaikan oleh peserta sudah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 PMK No. 2 tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian UU, yang mana disebutkan urutan dan hal-hal yang perlu ada dalam permohonan Pemohon, yaitu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, Alasan Permohonan, dan Petitum. Bisa jadi bagusnya sistematika ini karena peserta telah

	berpegangan pada template permohonan yang telah dibagikan oleh panitia.
6.	Kedua, dari segi penguraian kewenangan Mahkamah, secara umum juga sudah baik. Para peserta sudah menguraikan secara apik kewenangan MK yang termuat di UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, maupun UU MK.
7.	Ketiga, dari segi Kedudukan Hukum atau legal standing. Para peserta juga sudah menguraikan persoalan legal standing-nya. Namun, terkait hal tersebut, secara umum para peserta masih sangat “datar” dan kurang dalam. Para peserta kurang menguraikan Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 mencantumkan lima syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon. Para peserta seharusnya mampu menyampaikan argumentasi yang lebih meyakinkan bahwa pasal <i>a quo</i> telah merugikan mereka secara aktual atauseandainya potensial.
8.	Keempat, Terkait dengan Posita atau Alasan Permohonan, secara umum para peserta masih sangat “datar” menyampaikan argumentasi hukumnya. Para peserta kurang mengeksplor mengapa pasal tersebut perlu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum. Selain itu, peserta juga perlu menyampaikan berbagai kasus yang terjadi di masyarakat yang mengalami kerugian atas pasal tersebut. Selanjutnya peserta juga harusnya menyampaikan berbagai data yang dikeluarkan oleh lembaga yang terpercaya terkait akibat berlakunya pasal tersebut. Data tersebut akan menguatkan pendapatnya bahwa yang mengalami bukan hanya klien para peserta, tetapi semua atau mayoritas para ojek online (Ojol) yang sekategori dengan kilen para peserta yang dirugikan atas berlakunya Pasal 281 UU LLAJ tersebut.
9.	Kelima, para peserta sebagai kuasa hukum Pemohon juga penting untuk menyampaikan terkait dengan <i>original intent</i> pada saat Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dibahas pada tahun 1999-2002. <i>Original Intent</i> tersebut tentunya bisa didapatkan dari Risalah-Risalah Perubahan UUD 1945 yang dikeluarkan oleh MPR. Selain itu, para peserta juga harus menyampaikan perbandingan hukum dengan negara lain terkait dengan pengaturan keharusan adanya SIM bagi para pengendara sepeda motor. Perbandingan ini penting dilakukan sebagai pengayaan terhadap permohonan Pemohon yang dibuat oleh para peserta agar semakin menguatkan dalilnya.
10.	Keenam, para peserta juga perlu menyampaikan pendapat para ahli yang sependapat dengan permohonan peserta. Pendapat para ahli tersebut bisa

	ditemukan di dalam Jurnal atau buku-buku yang telah mereka terbitkan.
11.	Ketujuh, terkait Petitum, secara umum sudah cukup baik. Meski ada peserta masih banyak yang belum menuliskannya secara komplit. Masih terdapat peserta yang membiarkan petitumnya sebagian masih berupa titik-titik saja. Selain itu, terdapat beberapa peserta yang masih kurang jelas dalam menuliskan petitumnya.

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

NAMA NARASUMBER : INTAN PERMATA PUTRI

KELAS : 5

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Terdapat 26 peserta yang berada didalam kelas 5, dan semuanya telah mengirimkan tugas kepada panitia, dan ditelah dinilai. Peserta mengerjakan soal untuk membuat permohonan pengujian UU LLAJ terkait denda SIM mati. Sesi evaluasi menghadirkan peserta untuk mempresentasikan tugas yang disusun.
2	Peserta yang mempresentasikan tugasnya telah dievaluasi dan telah memahami tehnik penyusunan permohonan secara baik. Diskusi yang berjalan pada sesi tanya jawab berjalan dengan aktif.
3	Terdapat lebih dari 5 orang peserta yang merespon presentasi, mengajukan pertanyaan terkait tugas, maupun merespon materi yang disampaikan narasumber terkait pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar 1945.
4	Peserta berasal dari kalangan hukum dan non-hukum, dan telah memahami proses penyusunan permohonan dengan baik.
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

NAMA NARASUMBER : Ananthia Ayu Devitasari

KELAS : 6

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Dari 25 Peserta yang telah mengirimkan tugas sebanyak 14 orang.
	Secara garis besar, Peserta memahami sistematika permohonan.
	Peserta tidak banyak typo dalam menulis permohonan.
	Peserta telah baik mempresentasikan permohonan dan aktif dalam berdiskusi.
2	Bagian Kewenangan Mahkamah.
	Peserta telah sistematis dalam menjabarkan kewenangan permohonan.
	Peserta telah menguraikan seluruh dasar hukum dalam bagian Kewenangan Mahkamah.
3	Bagian Kedudukan Hukum
	Peserta telah dapat menyusun bagian kedudukan secara sistematis dan logis namun perlu penjabaran lebih detail lagi.
	Peserta hanya menuliskan lima syarat terkait kedudukan hukum tapi tidak mengkaitkan dan mengelaborasi lebih lanjut penjelasan masing-masing syarat kedudukan tersebut.
	Peserta belum dapat membedakan kerugian materiil dengan kerugian konstitusionil
4	Alasan Permohonan
	Peserta kadang masih membahas terkait kerugian konstitusional yang seharusnya masuk ke dalam bagian kedudukan hukum.
	Peserta belum mampu membedakan isu terkait implementasi norma dan konstitusionalitas norma.
	Peserta perlu menyusun pokok permohonan yang lebih menekankan pada aspek pertentangan antara pasal yang dimohonkan dengan landasan pengujian pasal-pasal dalam UUD 1945

5	Pokok permohonan lebih fokus pada aspek penentuan konstitusionalitas norma apakah norma yang diajukan bertentangan dengan konstitusi atau tidak.
	Pada bagian Pokok Permohonan, apabila peserta hendak mencantumkan permintaan putusan bersyarat pada petitum, maka pada bagian posita (pokok permohonan) perlu ada penjabaran yang komprehensif mengapa MK harus memberikan putusan bersyarat. Hal demikian penting agar konsisten antara posita dan petitum
6	Petitum
	Peserta dapat menyusun Petitum dengan baik, namun perlu lebih cermat berkaitan dengan model putusan bersyarat
	Varian petitum banyak yang hanya menuliskan petitum dengan tipe konstitusionalitas norma.
	Petitum umumnya hanya meminta membatalkan Pasal/Ayat/Penjelasan, namun jika akan menggunakan petitum dengan putusan bersyarat/pemaknaan, maka harus disebutkan harus dimaknai seperti apa Pasal/ayat tersebut.
7	
8	
9	
10	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI
PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

Sesi I	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila
Narasumber	Prof. Dr. Adji Samekto, S.H. M.Hum.
Moderator	Imam Margono

No.	Pertanyaan Peserta
1.	126_Said M Khadafi_Kementerian Perhubungan Apakah memang betul-betul kurang adanya aktualisasi pada berbagai bidang di masyarakat adil dan makmur?
2.	92_I. Ridwan Stiaji_BRIN Apa hal yang bisa lakukan untuk kembali mengangkat nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari, terlebih dalam dunia globalisasi saat ini?
3.	35_Dr. Frendy Ahmad_ Pancasila tidak bisa dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan. Bagaimana agar nilai-nilai Pancasila dan berkembang sesuai perkembangan zaman?
4.	From 110_Nenni Naomi Br Sitinjak_Kemenkop dan UKM to Everyone 08:19 AM Ijin bertanya apakah dengan Pancasila tidak dibahas dlm konteks kehidupan beragam yang menyebabkan begitu gampangnya timbul masalah sarah lalu apa tindakan yang akan dilakukan oleh kelembagaan ini. Makasih
5.	From 92_I.Ridwan Stiaji-BRIN to Everyone 08:19 AM ijin bertanya saat ini nilai atau pengamalan Pancasila di masyarakat kita dirasakan mulai tergerus dengan budaya atau kebiasaan luar, mhn dapat diberikan upaya yg kira2 tepat dalam menanggulangnya. terima kasih...
6.	From 86_Maria Nunik Sumartini_Kementan to Everyone 08:20 AM Mohon izin bertanya Prof. Saat ini dirasakan memang kurang massif dalam edukasi dan sosialisasi tentang pengamalan Pancasila di ASN. Apakah tidak dapat diupayakan ada program-program edukasi seperti pada tahun 90 an ? terimakasih, Salam hormat
7.	From 53_drs Achmad Chodiq_BRIN to Everyone 08:21 AM Istilah Konkretisasi Nilai kenapa tidak memakai kata Kristalisasi Nilai Apa yang menjadi dasar dan alasannya?
8.	From 86_Maria Nunik Sumartini_Kementan to Everyone 08:24 AM Mohon Izin tanya kembali Prof. Terkait dokumen yang disusun para pendahulu yang masih relevan yang dimaksud Prof tadi apa nama dokumennya dan dapat diperoleh untuk kami kah? Terimakasih
9.	From 108_Gunawan Setyo Nugroho_Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta to Everyone 08:25 AM

	Dalam aktualisasi Nilai Pancasila, saat ini publik sedang menunggu manfaat dari hasil kebijakan PPDB Pemerintah Pusat yg implemtasinya masih berbeda di setiap daerah. apakah Pemerintah Pusat sudah melakukan evaluasi dan memperbaiki regulasinya supaya jalur akadmis dan prestasi dapat dterima lebih baik.
10.	From 28_Desi Fitriani _ kemkes BKPK _ Pusjak UK to Everyone 08:28 AM No.28_desifn_Pujak UK kemkes RI Ijin Bertanya Prof.Adi sbb: 1. Jika Pancasila menyatukan keragaman knp saat ini byk dlm implementasinya perilaku (individu, klp dan Masy) TDK sesuai Nilai2 2. Upaya apa yg bs dilakukan Untuk kiat2 mengkongkritkan Nilai2 yg mulai tergerus tsb.
11.	From 10_Amrih Wigiati _KemenkopUKM to Everyone 08:36 AM 10-Amrih Wigiati_KemenkopUKM,. Pagi prof Aji. izin bertanya: langkah-langkah apa dilakukan oleh pemerintah dalam menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan rakyat Indonesia, sehingga rakyat bener-bener menjiwai dan bangga memiliki ideologi Pancasila yang sudah mencerminkan keterikatan dan saling mendukung dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan landasan Utama bahwa manusia sebagai mahluk Tuhan YME yang hidup Bersama-sama dengan mahluk Tuhan lainnya.
12	From 106_NagiotCansalonyTambunan_KEMENKES to Everyone 08:36 AM Salam. Saya berbagi fenomena: dalam perancangan dokumen2 strategis pembangunan (baik perencanaan, pelaksanaan dan penilaian), sering terlupakan membahas filosofi atau nilai yang mendasari (ideologi, ideal berupa Pancasila, UUD 1945 dkk) perancangan/pencapaian target. Sering muncul narasi/komentar "untuk bagian filosofi atau nilai sudah tentulah ya.....tidak usah dibahas lagi"..... padahal dalam perjalanan pembahasan perancangan, yang muncul malah sering terjadi marginalisasi nilai2 Pancasila (Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial), misalnya tidak harmonis dengan peraturan perundang-undangan yg sudah ada. Ini jadi preseden dan pembuka jalan untuk kader2 muda yang ikut dalam perancangan menjadi tidak memahami nilai2 tsb, dan bagaimana mengaktualisasikan mulai di kehidupan bernegara, berbangsa dan sehari2.... Apakah sebegitu tidak pentingnya muata filosofi/nilai dalam suatu perancangan untuk pembangunan? Mohon komentar Prof.....semoga BPIP juga dapat ikut menuntaskan ini. TK
13	From 79_Indra Prasetya Adi Nugroho_Kemenko PMK to Everyone 08:38 AM 79_Indra Prasetya_Kemenko PMK: Mohon tanggapan Prof terhadap reaktualisasi nilai Pancasila dalam kasus kasus penganut kepercayaan/keyakinan/agama yang dicerderai haknya karena mereka minoritas, misal jamaah ahmadiyah, pendirian rumah ibadah, dlsb. Sebagaimana tadi Prof sampaikan, Pancasila adalah pemersatu bangsa, sumber dari segala sumber hukum negara, bukankah sudah seyogyanya kasus kehidupan beragama dan ruang privat ini dapat diselesaikan dengan lebih Pancasilais?
14	From 41_Sylvana Ratina-KLHK to Everyone 08:45 AM prof, apakah sdh ada system dan mekansime yg sdh dibangun dlm mensosilisasikan program aktualisasi nilai2 Pancasila pd semua kalangan? sejauh mana system dan mekanisme tsb sdh berjalan selama ini? saat ini sgt terasa, nilai2 Pancasila tsb belum optimal atau malah tidak menjadi dasar acuan di kalangan masyarakat dlm bernegara berbangsa dan bermasyarakat

15	<p>From 88_Richard Butar Butar_BBPMGB to Everyone 08:47 AM</p> <p>Selamat siang Bapak, mohon izin bertanya dan penjelasan, dalam rangka penerapan nilai nilai Pancasila yang dirasakan masyarakat umum, salah satunya perlu adanya sosialisasi nilai nilai Pancasila untuk setiap Ormas, yaitu dengan membuat program/kegiatan dengan dasar nilai Pancasila, atau dibuatkan format nilai Pancasila dengan kegiatannya atau dicontohkan, sehingga masyarakat merasakan nilai nilai Pancasila tersebut, atau bagaimana Program Pemerintah untuk penerapan nilai nilai Pancasila di masyarakat umum. Terima kasih</p>
16	<p>83_Djati Witjaksono_Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p> <p>Mohon penjelasan terkait:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait sasaran pembangunan nasional berdasarkan Pancasila. Bagaimana menurut bapak? 2. Terkait tantangan dan aktualisasi Pancasila, mengapa belum ditemukan konkretisasi nilai-nilai Pancasila?
17	<p>41_Sylvana Ratina_KLHK</p> <p>Apakah selama ini sudah ada sistem/mechanisme pelaksanaan untuk menangani tantangan pudarnya konkretisasi nilai-nilai Pancasila saat ini?</p>
18	<p>From 131_SI Suryani_Bappeda to Everyone 08:52 AM</p> <p>Prof Adji, Prof beberapa kali menyebut "Barat" berideologi liberal, padahal tak semua negara "Barat" liberal dan menjadi ancaman, bahkan patut dijadikan model oleh kita. Misalnya negara-negara Skandinavia yang menganut welfare state yang sangat kental substansi sila kelima. Tidakkah kita seakan menjadi takut terhadap hal-hal yang asing padahal tak selalu buruk, bahkan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila? Terima kasih, Prof.</p>
19	<p>From 77_Bram Sarjana_Balitbang Badung to Everyone 08:54 AM</p> <p>Ijin mohon sharing-nya Prof. Saya mencermati pada Perpres Nomor 78 tahun 2021 tentang BRIN dalam pasal 6 disebutkan..."perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan bunyi pasal tersebut, mengingat saat ini juga nampaknya kami di daerah juga tengah dipersiapkan pendirian BRIDA dengan berpedoman pada Perpres 78 tahun 2021. Apakah BRIDA nantinya harus menghasilkan riset yang berdasarkan nilai Pancasila? Seperti apa itu riset dan inovasi yang berbasis Pancasila? Terima kasih Prof.</p>
20	<p>From 3_Agus Supriyadi_Dinkes Kab. Kepahiang to Everyone 09:07 AM</p> <p>Melihat kondisi saat ini, banyaknya kasus intoleransi di tengah masyarakat. 1. Apakah perlu ada kebaruan pemahaman soal pemaknaan pancasila di tengah masyarakat?...2. Apa saja hal yang mempengaruhi merosotnya nilai-nilai pancasila di tengah masyarakat, serta upaya yg bias dilakukan?</p>
21	<p>From 53_drs Achmad Chodiq_BRIN to Everyone 09:15 AM</p> <p>Kalau memang memakai terminology Konkretisasi Nilai, siapa atau Lembaga yang bertanggungjawab dan punya kewenangan untuk merumuskan nilai nilai di era kekinian? karena di grassroot sudah terbelah dan cenderung ada keberpihakan dalam menangani masalah tersebut.</p>
22	<p>1_Totok Hari Wibowo</p>

	<p>Terdapat issue bahwa kita akan membangun nuklir. Apakah iya bisa membangun nuklir di tengah-tengah masyarakat yang vektornya tidak sejalan. Hal ini membuat kita berpikir untuk lebih baik tidak melakukan itu. Bagaimana menurut bapak?</p>
23	<p>From 39_Erma Suryani_Kementan to Everyone 09:19 AM</p> <p>Izin bertanya Prof, bagaimana strategi memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda agar para generasi milenial ini dapat memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari</p>

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

Sesi II	Konstitusi dan Konstitusionalisme
Narasumber	Dr. Fajar Laksono
Moderator	Melati Kusuma Wardani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 19_Ayurisyta Dominata_BRIN to Everyone 10:39 AM ijin pak artinya kalo daerah lain juga punya karakteristik demokrasi mereka sendiri dan menginginkan itu boleh...karena demokrasi itu keinginan rakyat Indonesia terdiri dari 34 Propinsi dan mereka semua istimewa
2.	From 126_Said M Khadafi_Kemhub to Everyone 10:40 AM ijin bertanya Pak, Apakah dimungkinkan kita merubah konstitusi yang telah ada? merumuskan kembali konstitusi yg baru?
3.	From 113_NOVIA_Bappeda Kepri to Everyone 10:45 AM Aslkm, izin pak terkait UU Otonom tahun 2014 terkait Otonomi Daerah, saat ini sudah tidak dirasakan daerah karena banyak kebijakan yang kembali beralih ke pemerintah pusat...apakah hak-hak daerah dapat dikembalikan sepenuhnya ke daerah, mengingat rakyat atau masyarakat bertempat tinggal disuatu daerah?
4.	From 160_YusufHasanudin_BiroPerekonomianJabar to Everyone 10:49 AM persepsi bisa berbeda apabila menyebutkan "rakyat" karena bisa berarti rakyat yang mana atau rakyat siapa? MPR sebagai lembaga tertinggi negara seharusnya merupakan pemegang kontrol terhadap berjalannya konstitusi
5.	From 19_Ayurisyta Dominata_BRIN to Everyone 10:52 AM menurut saya Indonesia tidak rugi jika seluruh anak bangsa dari 34 propinsi berpendidikan tinggi, dan mereka jadi pemimpin di daerahnya sendiri.....Indonesia juga tidak rugi jika 34 propinsi bisa mengakses sumber daya secara adil dan pembangunan merata tiap daerah..
6.	From 86_Maria Nunik Sumartini_Kementan to Everyone 11:27 AM Mohon pendapat Bapak. Apakah pada saat proses addendum UUD 45 masih ada hal-hal yang diusulkan tapi belum disepakati, artinya masih ada potensi terjadi amandemen dengan kondisi saat ini. atau menurut Bapak sudah ideal untuk saat ini. Terimakasih
7.	From 110_Nenni Naomi Br Sijinjak_Kemkop dan UKM to Everyone 11:27 AM Ijin bertanya pak, Bapak katakana tadi byk multitafsir pada UUD 45, apakah dengan adanya amandeman yang telah dilakukan beberapa kali apakah sudah menyatakan atau menunjukkan sudah tidak ada lagi multitafsir
8.	From 131_SI Suryani_Bappeda to Everyone 11:30 AM Pak Fajar, bagaimana pendapat Bapak tentang keistimewaan dalam penerapan hukum jinayah di Aceh dalam hubungannya dengan konstitusi? Terima kasih, Pak.

9.	<p>From 142_Sulikhah_Pemprov Kepri to Everyone 11:32 AM</p> <p>Izin bertanya, maaf dalam hal penggunaan Bahasa dalam produk hukum terkadang menggunakan kata "Rakyat", "Masyarakat" dan "Warga Negara". Apakah masing-masing kata ada esensinya masing-masing? Mohon penjelasan</p>
10.	<p>35_Dr. Frendy Ahmad Afandi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akhir-akhir ini sempat ada issue untuk memunculkan kembali GBHN/PPHN. Mengapa GBHN/PPHN harus dimunculkan kembali? 2. Konstitusi tidak mudah berubah namun tidak mustahil untuk diubah. Bagaimana jika perubahan konstitusi itu tidak mendapat persetujuan rakyat?
11.	<p>From 83_Djati Witjaksono H._KLHK to Everyone 11:39 AM</p> <p>Pak Dr Fajar, izin bertanya terkait Putusan MK ttg UUCK. Dalam amar putusan, MK menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat dan memberikan tenggat waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Mahkamah juga memutuskan agar ada penangguhan pelaksanaan UUCK yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas. Baagaimana implikasi sampai dengan saat ini, sementara Presiden menyatakan UU CK tetap berlaku ? mohon pencerahan</p>
12.	<p>From 83_Djati Witjaksono H._KLHK to Everyone 11:44 AM</p> <p>Putusan MK tersebut "hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas" seperti apa ? apakah ini juga multi tafsir ? tks</p>
13.	<p>From 88_Richard Butar Butar_BBPMGB to Everyone 11:45 AM</p> <p>Selamat siang Bapak Fajar, mohon penjelasan kenapa yang dibawah UU tidak bisa dijadikan objek gugatan di MK. Tks</p>

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

Sesi III	Sistem Penyelenggaraan Negara berdasarkan UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Prof. Dr. Ni'matul Huda, S.H., M.Hum.
Moderator	Nanang Subekti

No.	Pertanyaan Peserta
1.	<p>From 83_Djati Witjaksono H._KLHK to Everyone 01:26 PM</p> <p>Izin tanya Prof Ni'matul, pada saat ini UUD 1945 telah dilakukan Amandemen sebanyak empat kali, dan sepertinya akan ada Amandemen2 lagi sesuai dengan keinginan partai yang berkuasa. Dengan banyaknya amandemen2 tersebut apakah penggunaan UUD 1945 masih benar ? Beberapa pakar menyampaikan karena sudah banyak perubahan pasal2 yang ada, maka apakah masih pas menyebut UUD 1945. terima kasih</p>
2.	<p>From 83_Djati Witjaksono H._KLHK to Everyone 01:32 PM</p> <p>Prof Ni'matul, izin bertanya terkait Putusan MK ttg UUCK. Dalam amar putusan, MK menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat dan memberikan tenggat waktu 2 tahun bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan. Mahkamah juga memutuskan agar ada penangguhan pelaksanaan UUCK yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas. Bagaimana implikasi sampai dengan saat ini, sementara Presiden menyatakan UU CK tetap berlaku ? Putusan penangguhan pelaksanaan UUCK yang berkaitan hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak luas multi tafsir. Bahkan RI 1 menyampaikan bahwa UUCK masih tetap berlaku. mohon pencerahan Prof.</p>
3.	<p>From 106_NagiotCansalonyTambunan_KEMENKES to Everyone 01:33 PM</p> <p>tanya Prof: sepertinya Pembantu Presiden itu selain Wapres, Menteri dan Gubernur (Wakil Pemerintah Pusat di Daerah), juga ada yg disebut Kepala Lembaga Non Kementريان (Badan-badan dan Otorita IKN), begitukah? Lalu tanya ke 2, posisi Panglima TNI dan KAPOLRI dalam sistem NRI sebagai bukan Pembantu Presiden kah?</p>
4.	<p>From 106_NagiotCansalonyTambunan_KEMENKES to Everyone 01:41 PM</p> <p>lagi Prof: semakin menarik materi Pancasila dan Konstitusi ini. TK MK dan AAKI. Di sesi sebelumnya, tadi ada bentuk nyata "adil dan makmur berdasarkan Pancasila" yg diejawantahkan dalam kalimat yg mengandung esensi "JAMINAN/Terjaminnya". Di sesi ini, ada prinsip "Pancasila subur hukum tertinggi". Saya jadi teringat pernyataan Presiden dan jajaran saat pandemi COVID-19 sedang tinggi-tingginya.... hukum tertinggi/terutama (maaf seingat saya) adalah Keselamatan dan Kesehatan Masyarakat sehingga semua upaya saat itu dipayungi "hukum tertinggi/terutama" tsb. Itu bisa kah dinilai sebagai bentuk riil implementasi nilai2 Pancasila dalam Sistem NRI untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam masa pandemi COVID-19 ?</p>

5.	<p>From 131_SI Suryani_Bappeda to Everyone 01:48 PM</p> <p>Prof Ni'mah, bagaimana pendapat Prof Ni'mah tentang keistimewaan dalam penerapan hukum jinayah di Aceh dalam sistem penyelenggaraan negara kita? Apakah memang tidak ada masalah konstitusional dalam penerapan hal tersebut atau merupakan perkecualian yang "halal" sebagai bentuk kompromi yang dilakukan secara sadar? Terima kasih, Prof.</p>
6.	<p>From 88_Richard Butar Butar_BBPMGB to Everyone 01:57 PM</p> <p>Selamat Siang Prof. Mohon penjelasan tentang pemindahan Ibu kota Negara, bukan yang mudah, banyak juga yang gagal setelah pindah IKN, apakah pemindahan IKN untuk pemerintah saja atau juga pusat bisnis, apakah UU IKN menjadi hal yang mendesak apalagi dimulai tahun 2024 yang merupakan juga tahun demokrasi. Tks</p>
7.	<p>From 19_Ayurisya Dominata_BRIN to Everyone 01:58 PM</p> <p>maaf bu ada perbedaan peran dan alasan mengapa dibedakan Menteri sebagai pejabat politik dan kepala Lembaga yang jabatan karir PNS...saat ini seperti ada pencampuradukan...bagaimana menurut ibu</p> <p>setahu saya dalam kondisi darurat panglima TNI bisa ambil alih pemerintahan.....mohon penjelasan lebih lanjut...apakah terkait peran dan fungsi TNI yang berbeda dengan Menteri</p>
8.	<p>92_Ridwan Stiaji</p> <p>Bagaimana menurut Ibu terkait fenomena saat ini dimana kepala daerah akan ditunjuk secara langsung oleh Presiden hingga nanti dilaksanakan pemilu pada tahun 2024?</p>
9.	<p>From 10_Amrih Wigati_KemenkopUKM to Everyone 02:06 PM</p> <p>multipartai ada plus minusnya, tetapi kalau lebih banyak minusnya krn isi kepala orang beda-beda, kenapa persyaratan mendirikan partai sepertinya sangat mudah? bukannya juga menambah beban negara? mohon pencerahannya ibu prof Ni'matul. tks</p>
10.	<p>From 3_Agus Supriyadi_Dinkes Kab. Kepahiang to Everyone 02:15 PM</p> <p>Meski Konstitusi hasil amandemen menyatakan bahwa bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah "harga mati", secara de facto, urat nadi Negara Kesatuan sudah "robek" dengan menyisakan retakan-retakan dalam konektivitas antara pemerintahan pusat dan daerah, bahkan antar daerah tingkat II dalam satu propinsi. Bagaimana Prof Ni'mah menyikapi hal tersebut?...tks</p>
11.	<p>11_Andhi Kurniawan_LAN</p> <p>Bagaimana menurut prof tentang kita menganut pemerintahan presidensil namun multi partai?</p>
12.	<p>From 110_Nenni Naomi Br Sitinjak_Kemenkop dan UKM to Everyone 02:25 PM</p> <p>Atas dasar apa ya bu suatu daerah itu memiliki khususnya diperlakukan khusus. Bukankah ini dapat menimbulkan keirian daerah lain. Mohon bantuannya bu</p>
13.	<p>From 94_Kania Rahma Nureda_Komnas HAM to Everyone 02:25 PM</p> <p>Prof ijin bertanya jika msh ada kesempatan. Diawal 2022 Menpan RB menyatakan ada puluhan lembaga negara yg tidak ikut pindah ke IKN. Contohnya Komnas HAM. Padahal UU 39/1999 dinyatakan Komnas HAM berkedudukan di Ibukota Negara. Menurut Prof, bagaimana fenomena ini? Apakah aturan setingkat UU ini berpotensi akan di revisi? Atau kah tetap memungkinkan di pindah ke IKN mengingat untuk mengubah UU butuh waktu yg tidak singkat? Terima kasih</p>

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

Sesi IV	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Prof. Dr. Judhariksawan, S.H., M.H.
Moderator	Bangkit Panji Anarogo

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 3_Agus Supriyadi_Dinkes Kab. Kepahiang to Everyone 04:06 PM Izin Prof Judha....bgaimana pendapat Prof dengan banyaknya kasus yang berkaitan dengan Hak konstitusional setiap warga negara, tetapi malah sellu dikaitkan dengan pelanggaran thdap UU ITE?...kondisi ini tentunya bertentangan dengan konsep Human Right yg sllu digaung2kan. tks
2.	From 19_Ayurisyia Dominata_BRIN to Everyone 04:10 PM Prof mohon penjelasannya tentang: 1. kesamaan hak anak bangsa Indonesia menjadi Presiden di NKRI 2. hak mengembangkan diri Prof.
3.	From 131_SI Suryani_Bappeda to Everyone 04:15 PM Prof Judha, berkaitan dengan salah dua non-derogable rights yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa, apakah pemberlakuan hukuman mati dan corporal punishment seperti hukum cambuk dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak-hak tersebut?
4.	From 160_YusufHasanudin_BiroPerekonomianJabar to Everyone 04:15 PM bagaimana dengan pemiskinan bagi para koruptor ditinjau dari HAM, karena terdapat keluarga yang akan terdampak, mohon tanggapannya prof
5.	From 134_Siti Maesyarah_KemenkopUKM to Everyone 04:21 PM prof.. bagaimana seorang analis kebijakan dlm menyikapi HAM yg berbenturan dgn norma agama atau adat setempat contohnya dalam menyikapi hak LGBT
6.	From 83_Djati Witjaksono H._KLHK to Everyone 04:21 PM Izin bertanya Prof Judha, Bagaimana dengan perlakuan yang tidak adil dari penegak hukum yang menangani perkara hukum, misalnya penistaan agama ? disatu sisi pihak yang tidak sepihak dengan pemerintah proses sangat kilat , sedangkan bagi yang memihak/ menjilat tidak diproses2 oleh penegak hukum
7.	From 87_Nani Rohaeni_Pemkab Garut to Everyone 04:24 PM Izin Prof.., Banyak tindak kekerasan pada anak yang dilakukan oleh orang dewasa dan merenggut atau menghancurkan masa depan mereka yang menyisakan trauma atau dapat merubah perilaku mereka. Bagaimana pendapat Prof. bila pelaku dituntut hukuman mati dan berkaitan dengan Hak untuk Hidup?
8.	From 77_Bram Sarjana_Balitbang Kab Badung to Everyone 04:27 PM

	<p>Mohon diskusinya Prof, bagaimana aparat TNI/Polri dapat menghadapi gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh KKB terhadap masyarakat dan aparat negara, yang seringkali juga melanggar prinsip-prinsip dasar HAM. Bertindak tegas nanti dituduh melanggar HAM, namun bila tidak bertindak tegas, kelompok separatis semakin menjadi-jadi. Bagaimana menegakkan NKRI dengan pendekatan HAM agar tidak merongrong kedaulatan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945?</p>
9.	<p>From 124_Rina Christina_BRIN to Everyone 04:30 PM Tanya Prof, salah satu yang dijamin secara tegas oleh konstitusi adalah terkait kebebasan dari penyiksaan atau perbuatan yang merendahkan derajat martabat manusia yaitu yang terdapat dalam Pasal 28G ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Bagaimana kebijakan dari MK ketika Kekerasan seksual terjadi dalam rumah tangga sedangkan kekerasan tsb merupakan perbuatan yang merendahkan derajat martabat seseorang.</p>
10.	<p>From 83_Djati Witjaksono H._KLHK to Everyone 04:36 PM Bagaimana dengan perkara Kasus KM 50, dimana patugas Kepolisian yang dinyatakan oleh Komnas HAM ada pelanggaran HAM, tetapi di vonis bebas yang telah menyebabkan meninggalkan orang lain.?</p>
11.	<p>From 19_Ayurisyia Dominata_BRIN to Everyone 04:37 PM prof setuju ga bahwa melakukan analisis kebijakan juga adalah hak Prof...hehhee hak dilindungi UU menjalankan profesi benar ga Prof..</p>
12.	<p>From 142_Sulikhah_Pemprov Kepri to Everyone 04:41 PM Izin Prof, Bagaimana upaya-upaya yang dilakukan stake holder terkait penyelarasan antara HAM dan UUD yang dalam praktek kehidupan sehari-hari sering bertolak belakang?</p>
13.	<p>From 28_Desiriani_Fitriani_kemkes BKPK _ Pusjak UK to Everyone 04:47 PM ijin bertanya Prof . Indonesia negara hukum, jika genosida adalah pelanggaran HAM terberat, bgmn dgn kasus Bupati Langkat beserta Aparat Hukum yg terlibat Apakah lupa HAM / atau sebaliknya mhn pencerahannya Prof.tq</p>
14.	<p>From 10_amrihwigati_KemenkopUKM to Everyone 04:49 PM suatu kejahatan HAM di suatu negara dapat dilaporkan ke ICC, namun apakah hukum di negara tersebut akan kalah dengan hukum internasional? bagaimana pembuktiannya agar diantara hukum tersebut kedudukannya sama dalam memandang permasalahan kejahatan HAM dan penanganannya, mohon pencerahan prof Judha. tks</p>
15.	<p>1_Totok Hari Wibowo Banyak pihak yang bermain tentang adanya gap dalam peraturan yang tidak berdimensi HAM. Bagaimana menurut bapak?</p>
16.	<p>From 110_Nenni Naomi Br Sitingak_Kemenkop dan UKM to Everyone 04:51 PM Dari sisi mana dapat dikatakan Hukum mati itu merupakan pelanggaran HAM kah prof.</p>
17.	<p>From 150_Tuti Kurnia_PemkoPadang to Everyone 04:57 PM Prof, 1) adakah panduan pembatasan (norma, nilai) yang diterapkan dari hak2 konstitusi warga. 2)apakah norma, nilai2 memang sebaiknya selalu disebutkan sebagai bagian dari substansi sebuah peraturan? 3) apakah kepemilikan aset2 ekonomi dapat dibatasi dan jenis peraturan apa saja yang dapat mengaturnya? Misalnya pembatasan</p>

	kepemilikan lahan demi kesejahteraan umum dan atau kooptasi lahan untuk kepentingan negara?
18.	94_Kania Rahma Nureda_Komnas HAM <ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana seharusnya negara untuk menangani perda diskriminatif dan cara mengantisipasi timbulnya perda diskriminatif tersebut?2. Bagaimana pendapat Prof tentang banyaknya masyarakat yang bias tentang mengatikan ham itu sendiri?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

Sesi IV	Mahkamah Konstitusi dan Hukum Acara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Dr. Irfan Nur Rachman, S.H., M.H.
Moderator	Suhardi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 160_YusufHasanudin_BiroPerekonomianJabar to Everyone 08:21 AM jadi siapa yang dapat memohon pembubaran parpol?
2.	From 39_Erma Suryani_Kementan to Everyone 08:29 AM Mengacu pada kelemahan terkait kewenangan Mahkamah Agung dan MK, bgm solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul ?
3.	From 19_Ayurisyia Dominata_BRIN to Everyone 08:31 AM pak bisnis ekonomi digital ada yg merugikan masy dan melanggar HAM (contoh pinjol), bagaimana menurut Bapak....masy ga bisa melindungi dirinya...dan terjajah secara ekonomi via digital dinegaranya sendiri....
4.	From 135-Sofia Yuniar Sani-BRIN to Everyone 08:39 AM Terimakasih untuk paparan materi pagi ini, sangat menarik dan membuat saya bertambah knowledge tentang tuisi MK yang lebih mendetail. izin bertanya, seperti yang bapak jelaskan dalam paparan, bahwa sudah menjadi tuisi MK untuk mengawal satu undang undang yang berdasar kepada Pancasila, bagaimana opini Bapak terkait UU Cipta kerja yang hingga kini implementasinya masih rawan konflik di masyarakat? karena menurut saya jika suatu peraturan di buat dengan mempertimbangkan esensi Pancasila, pastinya kan gesekan di masyarakat akan minimal. sementara yg terjadi hingga sekarang, masih banyak elemen masyarakat yang masih menyatakan ketidakpuasan terhadap UU Cipta kerja ini... Terimakasih banyak Bapak.. semoga berkenan untuk sharing ilmunya....
5.	From 126_Said M Khadafi_Kemenuh to Everyone 08:43 AM ijin bertanya Pak, kira2 ada tidak pak modus-modus sisipan pasal-pasal pesanan selama ini? karena jika UU tidak sejalan dengan UUD 1945 ada potensi malah yg di amandemen UUD 1945 nya
6.	From 3_Agus Supriyadi_Dinkes Kab. Kepahiang to Everyone 08:47 AM ass. izin pk. menurut penjelasan bpk, bahwa UU yg paling banyak ditangani oleh MK adalah UU yg terkait dengan politik....kenapa demikian?....apakah yudisial review jga kental dengan kepentingan individu/golongan?....apakh UU di luar politik sudah ideal, sehingga jarang untuk "DILIRIK"...?
7.	From 39_Erma Suryani_Kementan to Everyone 08:49 AM

	Pak Irfan, mengapa asas-asas Utama MK menggunakan istilah asing yang tidak familiar bagi masyarakat awam, apakah tidak sebaiknya menggunakan Bahasa Indonesia supaya masyarakat awam lebih paham
8.	From 52_Viviyanti_BPP Pekanbaru to Everyone 08:52 AM Pak Irfan, jika ada hal yang tidak diatur di Indonesia, apakah masih mengacu pada UU Belanda . Sementara di Belanda peraturan nya sudah berevolusi jauh. Apakah kita masih mengacu pada aturan nya yang lama?
9.	From 89_Irawati_Institut STIAMI to Everyone 08:52 AM kenapa ada yudicial review yang semu?
10.	From 110_Nenni Naomi Br Sitinjak_Kementerian Koperasi dan UKM to Everyone 08:55 AM Apa parameter yang digunakan oleh MK dalam menguji UU
11.	From 10_Amrih Wigati_KemenkopUKM to Everyone 08:55 AM Ass. Pak Irfan, apa karena undang-undang NRI warisan belanda, dan banyak akademisi lulusan luar maka bahasanya masih ada memakai Bahasa asing atau apabila memakai Bahasa Indonesia maknanya jadi beda atau kurang tepat? mohon penjelasannya. tks
12.	From 127_Sari Damayanti_Kemenag to Everyone 08:59 AM Terimakasih pak Dr.Irfan atas materinya, pertanyaan saya mengapa yang dilakukan judisial review itu hanya UU yang berkaitan dengan politik yah seperti UU Pemilu, sedangkan banyak UU lainnya yang non politik kurang terlirok oleh pemohon? terimakasih
13.	From 150_Tuti Kurnia_PemkoPadang to Everyone 09:03 AM Bagaimana perumusan norma dan nilai dalam putusan dilakukan
14.	120_Rais Rozali <ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana menurut bapak tentang adanya perbedaan pendapat para hakim dalam perkara yang masuk ke MK? 2. Mengapa MK tidak memberikan pendapat apapun terkait hal yang mempunyai potensi akan menimbulkan masalah? 3. Bagaimana implikasi putusan MK tentang UU cipta kerja terhadap UU cipta kerja yang ada?
15.	39_Erma Suryani_Kemenpan <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelemahan dalam kewenangan MK dan MA. Bagaimana jika muncul permasalahan jika hal tersebut bukan menjadi kewenangan MK maupun MA? 2. Masyarakat harusnya memahami tentang hukum namun banyak sekali istilah-istilah hukum yang sulit dipahami. Bagaimana menurut bapak?
16.	From 86_Maria Nunik Sumartini_Kementan to Everyone 09:04 AM Terimakasih Pak Dr Irfan. Mohon tanya apakah MK dapat melakukan reuiu yudicial tanpa ada pemohon, inisiatif dari MK ?
17.	From 146 Swaznita Sihotang_Kemendesa to Everyone 09:09 AM Bagaimana hak2 konstitusi bagi masyarakat adat yg selalu mengalami intimidasi khususnya wilayah tanah adat mereka yg Tdk memberikan kontribusi utk masyarakat adat. mohon penjelasannya. terimakasih
18.	From 87-Nani-Pemkab Garut to Everyone 09:09 AM

	Terima kasih Pak Irfan, saya jadi sedikit melek tentang MK. UU terkait politik memang menarik dan menggelitik, karena didalamnya banyak intrik-intrik. Apakah pernah terjadi suatu putusan terkait UU politik yang kemudian digugat kembali?
19.	From 79_Indra Prasetya Adi Nugroho_Kemenko PMK to Everyone 09:09 AM Mohon penjelasan Pak, Sejauhmana Judicial Interpretation bisa digunakan oleh MK RI?
20.	From 19_Ayurisya Dominata_BRIN to Everyone 09:10 AM pejabat negara yg tidak punya background hukum sering sengaja atau tidak sengaja melanggar hukum.....atau melanggar konstitusi.....bagaimana komentar bapak akan ini....
21.	From 88_Richard Butar Butar_KESDM to Everyone 09:11 AM Selamat pagi Bapak Irfan, mohon penjelasannya apakah SOP dapat dijadikan dasar hukum suatu pelanggaran. Terima kasih
22.	From 87-Nani-Pemkab Garut to Everyone 09:23 AM Maaf saya bukan orang hukum, barusan dicontohkan ada UU yang dibatalkan, padahal UU tersebut telah dibuat PP nya. Apakah dengan demikian artinya PP tersebut pun harus dicabut atau tidak berlaku lagi?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA

PENINGKATAN PEMAHAMAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA BAGI PENGURUS DAN ANGGOTA AAKI

Sesi IV	Teknik Penyusunan Permohonan Pengujian Undang- Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945
Narasumber	Saiful Anwar, S.H., M.H.
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	From 74_Hj.Hasmiah.,S.Pt.M.AP_Bappeda Litbang Kab. Nunukan to Everyone 10:28 AM ijin bertanya pak, pemohon 1 diisi identitas kuasa hukum atau yang didampingi.
2.	From 110_Nenni Naomi Br Sitinjak_Kemenkop dan UKM to Everyone 10:35 AM Ijin bertanya pak, jika menggunakan Lembaga advokasi, identitas yang dimasukkan apakah ketua Lembaga advokasi atau petugas yang ditugaskan oleh Lembaga advokasi tersebut untuk mendampingi.
3.	From 160_YusufHasanudin_BiroPerekonomianJabar to Everyone 11:21 AM apabila terdapat banyak pasal yang akan diujikan, apakah pada poin A (4), B (6) dan poin C dicantumkan secara keseluruhan secara spesifik atau cukup penjelasannya pada poin C saja?
4.	From 88_Richard Butar Butar_KESDM to Everyone 11:33 AM Mohon penjelasan perbedaan pada C. Pokok permohonan untuk angka 2 dan 3. Terima kasih
5.	From 39_Erma Suryani_Kementan to Everyone 11:44 AM Mohon izin bertanya, pengajuan surat pengujian UU umumnya direspon pihak MK berapa lama sejak surat permohonan diterima MK ?

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS *ONLINE* PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1



Peserta mendapatkan Surat Tugas dari panitia organisasi pihak ke-3

2



Organisasi pihak ke-3 memberikan daftar nama dan no handphone peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

3



Pusdik mengirimkan link daftar ulang melalui SMS blast/WA blast kepada calon peserta

4



Peserta melakukan daftar ulang dengan mengisi **nama lengkap dan gelar, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan terakhir, instansi, jabatan, alamat, nomor handphone, alamat email, dan upload foto KTP dan foto terbaru**

5



Pusdik mendaftarkan peserta di laman e-pusdik

6



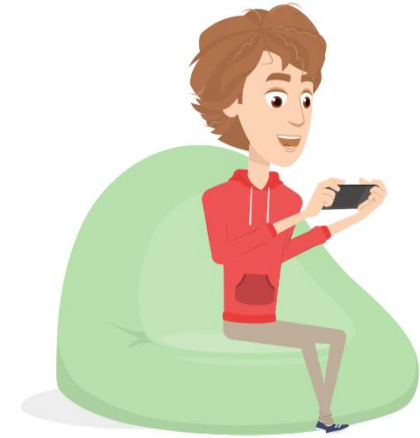
Pusdik mengirimkan username dan password akun peserta di laman pusdik.mkri.id melalui sms blast/WA blast sebagai tanda registrasi peserta selesai diverifikasi

7



Pusdik mengirim link zoom meeting melalui sms blast/WA blast pada hari H kegiatan

8



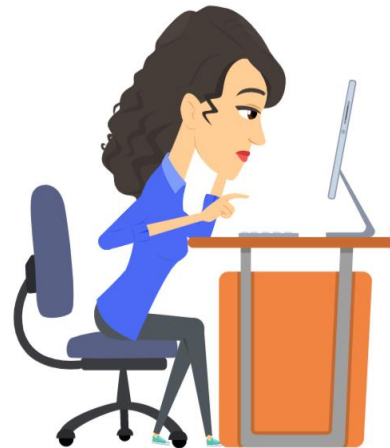
Peserta login ke zoom meeting dengan menggunakan nama yang sama pada saat registrasi

9



Peserta mengisi soal pre test di akun masing-masing

10

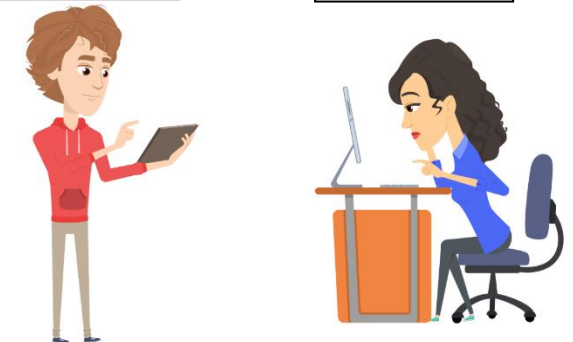


Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan, kegiatan pembelajaran, hingga penutupan) dan wajib menyalakan kamera

11

Kelompok A

Kelompok B



Sesi materi praktek mandiri, peserta akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan dibimbing oleh narasumber melalui aplikasi Zoom kelompok

12



Narasumber memaparkan materi didampingi oleh moderator

13



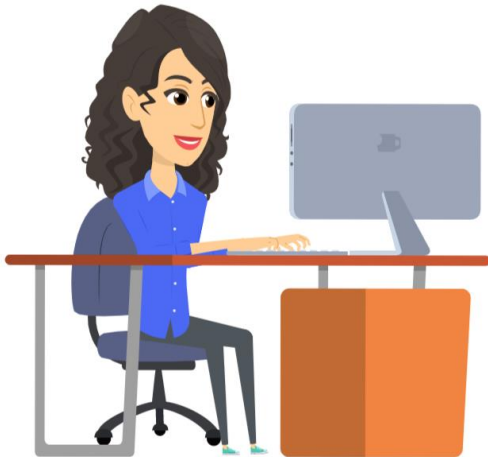
Peserta menggunakan fitur *raisehand* jika ingin bertanya dan akan diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung (*live*)

14



Moderator mengatur jalannya diskusi

15



Peserta mengisi daftar hadir di akun **SIMULTAN** masing-masing peserta

16



Narasumber selesai memberikan materi

17



Peserta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktek via email

18



Narasumber mereview hasil tugas praktek peserta

19



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal post test

20



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat